



REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
2015-2019**

**Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong**

**Buku III
Agenda Pembangunan Wilayah**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
2015-2019**

**Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong**

**Buku III
Agenda Pembangunan Wilayah**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

2015



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL 2015 - 2019

1.1.	Kerangka Pengembangan Wilayah	1-1
1.2.	Tema Pengembangan Wilayah	1-9
1.3.	Tujuan dan Sasaran Pokok Pengembangan Wilayah.....	1-11
1.4.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah.....	1-17
1.4.1.	Pengembangan Kawasan Strategis.....	1-17
1.4.2.	Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.....	1-23
1.4.3.	Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan.....	1-29
1.4.4.	Penanggulangan Bencana.....	1-32
1.4.5.	Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nasional	1-34
1.4.6.	Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah	1-38
1.5.	Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah....	1-44
1.5.1.	Sinergi Pusat-Daerah dan Kerjasama Antar Daerah.....	1-44
1.5.2.	Kerangka Pendanaan.....	1-45
1.5.3.	Kerangka Regulasi.....	1-47
1.5.4.	Kerangka Kelembagaan.....	1-47

BAB II ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA

2.1.	Capaian Kinerja Saat Ini.....	2-1
2.2.	Potensi dan Keunggulan Wilayah	2-2
2.3.	Tema Pengembangan Wilayah Papua.....	2-4
2.4.	Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Papua	2-5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.5.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Papua	2-8
2.5.1.	Pengembangan Kawasan Strategis.....	2-8
2.5.2.	Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.....	2-19
2.5.3.	Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan.....	2-28
2.5.4.	Penanggulangan Bencana.....	2-46
2.5.5.	Penataan Ruang Wilayah Papua	2-51
2.5.6.	Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah	2-56
2.6.	Kaidah Pelaksana Pengembangan Wilayah Papua	2-57
2.6.1.	Prioritas Program Pembangunan	2-57
2.6.2.	Kerangka Regulasi.....	2-64
2.6.3.	Kerangka Kelembagaan.....	2-65

BAB III ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU

3.1.	Capaian Kinerja Saat Ini.....	3-1
3.2.	Potensi dan Keunggulan Wilayah	3-2
3.3.	Tema Pengembangan Wilayah Maluku.....	3-3
3.4.	Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku	3-3
3.5.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Maluku	3-6
3.5.1.	Pengembangan Kawasan Strategis.....	3-6
3.5.2.	Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.....	3-10
3.5.3.	Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan	3-20
3.5.4.	Penanggulangan Bencana.....	3-35
3.5.5.	Penataan Ruang Wilayah Maluku	3-40
3.5.6.	Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah	3-45
3.6.	Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Maluku	3-45
3.6.1.	Prioritas Program Pembangunan	3-45
3.6.2.	Kerangka Regulasi.....	3-52
3.6.3.	Kerangka Kelembagaan.....	3-53



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA

4.1.	Capaian Kinerja Saat Ini.....	4-1
4.2.	Potensi dan Keunggulan Wilayah.....	4-2
4.3.	Tema Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara .	4-4
4.4.	Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara.....	4-4
4.5.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara.....	4-7
4.5.1.	Pengembangan Kawasan Strategis.....	4-7
4.5.2.	Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.....	4-10
4.5.3.	Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan	4-22
4.5.4.	Penanggulangan Bencana.....	4-37
4.5.5.	Penataan Ruang Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara	4-42
4.5.6.	Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah	4-46
4.6.	Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	4-46
4.6.1.	Prioritas Program Pembangunan	4-46
4.6.2.	Kerangka Regulasi.....	4-53
4.6.3.	Kerangka Kelembagaan.....	4-53

BAB V ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SULAWESI

5.1.	Capaian Kinerja Saat Ini.....	5-1
5.2.	Potensi dan Keunggulan Wilayah.....	5-2
5.3.	Tema Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi .	5-4
5.4.	Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi	5-5
5.5.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi	5-8
5.5.1.	Pengembangan Kawasan Strategis.....	5-8
5.5.2.	Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.....	5-13
5.5.3.	Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan	5-26



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5.5.4.	Penanggulangan Bencana.....	5-40
5.5.5.	Penataan Ruang Wilayah Sulawesi	5-47
5.5.6.	Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah	5-53
5.6.	Kaidah Pelaksana Pengembangan Wilayah Sulawesi	5-54
5.6.1.	Prioritas Program Pembangunan	5-54
5.6.2.	Kerangka Regulasi.....	5-68
5.6.3.	Kerangka Kelembagaan.....	5-69

BAB VI ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN

6.1.	Capaian Kinerja Saat Ini.....	6-1
6.2.	Potensi dan Keunggulan Wilayah.....	6-2
6.3.	Tema Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan	6-4
6.4.	Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan	6-4
6.5.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan	6-8
6.5.1.	Pengembangan Kawasan Strategis.....	6-8
6.5.2.	Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.....	6-12
6.5.3.	Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan.....	6-24
6.5.4.	Penanggulangan Bencana.....	6-43
6.5.5.	Penataan Ruang Wilayah Pulau Kalimantan.....	6-49
6.5.6.	Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah	6-55
6.6.	Kaidah Pelaksana Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan	6-56
6.6.1.	Prioritas Program Pembangunan	6-56
6.6.2.	Kerangka Regulasi.....	6-67
6.6.3.	Kerangka Kelembagaan.....	6-67

BAB VII ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU JAWA -BALI

7.1.	Capaian Kinerja Saat Ini.....	7-1
7.2.	Potensi dan Keunggulan Wilayah	7-2
7.3.	Tema Pengembangan Wilayah Pulau	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

	Jawa-Bali	7-4
7.4.	Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-Bali	7-5
7.5.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-Bali	7-8
	7.5.1. Pengembangan Kawasan Strategis.....	7-8
	7.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.....	7-11
	7.5.3. Pengembangan Daerah Tertinggal	7-23
	7.5.4. Penanggulangan Bencana.....	7-29
	7.5.5. Penataan Ruang Wilayah Pulau Jawa-Bali	7-36
	7.5.6. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah	7-42
7.6.	Kaidah Pelaksana Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-Bali	7-43
	7.6.1. Prioritas Program Pembangunan	7-43
	7.6.2. Kerangka Regulasi.....	7-59
	7.6.3. Kerangka Kelembagaan.....	7-60

BAB VIII ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SUMATERA

8.1.	Capaian Kinerja Saat Ini.....	8-1
8.2.	Potensi dan Keunggulan Wilayah.....	8-2
8.3.	Tema Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera	8-3
8.4.	Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera.....	8-4
8.5.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera	8-8
	8.5.1. Pengembangan Kawasan Strategis.....	8-8
	8.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.....	8-11
	8.5.3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan.....	8-25
	8.5.4. Penanggulangan Bencana.....	8-40
	8.5.5. Penataan Ruang Wilayah Pulau Sumatera.....	8-47
	8.5.6. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah	8-55



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8.6.	Kaidah Pelaksana Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera	8-55
8.6.1.	Prioritas Program Pembangunan	8-55
8.6.2.	Kerangka Regulasi.....	8-80
8.6.3.	Kerangka Kelembagaan.....	8-82



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah	1-14
Tabel 1.2.	Sasaran Peran PDRB Per Wilayah Tahun 2015-2019	1-15
Tabel 1.3.	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Per Wilayah Tahun 2015-2019.....	1-16
Tabel 1.4.	Sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah Tahun 2015-2019.....	1-16
Tabel 1.5.	Sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah Tahun 2015-2019.....	1-16
Tabel 2.1.	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pulau Papua Per Provinsi Tahun 2015-2019.....	2-7
Tabel 2.2.	Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Pulau Papua Per Provinsi Tahun 2015-2019	2-8
Tabel 2.3.	Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Pulau Papua Per Provinsi Tahun 2015-2019.....	2-8
Tabel 2.4.	Lokasi Prioritas Kota Sedang yang Berfokus pada Upaya Pemerataan Wilayah di Papua	2-26
Tabel 2.5.	Lokasi Prioritas Pembangunan Kota Baru Publik yang Mandiri dan terpadu di Wilayah Papua	2-26
Tabel 2.6.	Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan desa-Kota untuk Memperkuat Pusat Pertumbuhan di Papua ...	2-28
Tabel 2.7.	Profil Daerah Tertinggal Wilayah Pulau Papua.....	2-38
Tabel 2.8.	Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Pulau Papua	2-44
Tabel 2.9.	Profil Kerawanan dan Risiko Bencana pada Pusat Pertumbuhan di Wilayah Pulau Papua	2-48
Tabel 2.10.	Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Pulau Papua 2015 – 2019	2-53
Tabel 2.11.	Strategi Pengembangan KSN di Pulau Papua	2-56
Tabel 2.12.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Provinsi Papua	2-57
Tabel 2.13.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Provinsi Papua Barat	2-61
Tabel 3.1.	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kepulauan Maluku Per Provinsi Tahun 2015-2019.....	3-5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 3.2.	Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Kepulauan Maluku Per Provinsi Tahun 2015-2019	3-5
Tabel 3.3.	Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Kepulauan Maluku Per Provinsi Tahun 2015-2019	3-5
Tabel 3.4.	Lokasi Prioritas Kota Sedang yang Berfokus pada Upaya Pemerataan Wilayah Kepulauan Maluku	3-17
Tabel 3.5.	Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota untuk Memperkuat Pusat Pertumbuhan di Maluku.....	3-17
Tabel 3.6.	Profil Daerah Tertinggal Wilayah Kepulauan Maluku	3-27
Tabel 3.7.	Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Kepulauan Maluku	3-35
Tabel 3.8.	Profil Kerawanan dan Risiko PKN, PKW dan PKSN di Wilayah Kepulauan Maluku	3-37
Tabel 3.9.	Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Kepulauan Maluku 2015-2019	3-42
Tabel 3.10.	Strategi Pengembangan Kawasan Strategi Nasional di Kepulauan Maluku	3-44
Tabel 3.11.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Maluku	3-45
Tabel 3.12.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Maluku Utara	3-49
Tabel 4.1.	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2015-2019.....	4-6
Tabel 4.2.	Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2015-2019	4-6
Tabel 4.3.	Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2015-2019	4-6
Tabel 4.4.	Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara	4-18
Tabel 4.5.	Lokasi Prioritas Kota Sedang yang Berfokus pada Upaya Pemerataan Wilayah di Wilayah Nusa Tenggara.....	4-19
Tabel 4.6.	Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota Untuk Memperkuat Pusat Pertumbuhan Di Wilayah Nusa Tenggara	4-19
Tabel 4.7.	Profil Daerah Tertinggal Wilayah Nusa Tenggara	4-29
Tabel 4.8.	Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Nusa Tenggara	4-35



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 4.9.	Profil Kerawanan Risiko Bencana pada Pusat Pertumbuhan di Wilayah Nusa Tenggara	4-39
Tabel 4.10.	Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Nusa Tenggara Periode 2015-2019	4-43
Tabel 4.11.	Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Di Nusa Tenggara.....	4-45
Tabel 4.12.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat	4-46
Tabel 4.13.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur	4-49
Tabel 5.1.	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pulau Sulawesi Per Provinsi Tahun 2015-2019	5-7
Tabel 5.2.	Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Pulau Sulawesi Per Provinsi Tahun 2015-2019	5-7
Tabel 5.3.	Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Pulau Sulawesi Per Provinsi Tahun 2015-2019	5-8
Tabel 5.4.	Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah di Sulawesi.....	5-21
Tabel 5.5.	Lokasi Prioritas Kota Sedang Yang Berfokus Pada Upaya Pemerataan Wilayah Di Sulawesi	5-21
Tabel 5.6.	Lokasi Pembangunan Kota Baru Publik Yang Mandiri Dan Terpadu Di Wilayah Sulawesi	5-22
Tabel 5.7.	Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota Untuk Memperkuat Pusat Pertumbuhan Di Sulawesi	5-23
Tabel 5.8.	Profil Daerah Tertinggal Wilayah Sulawesi.....	5-32
Tabel 5.9.	Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Sulawesi	5-38
Tabel 5.10.	Profil Kerawanan dan Risiko PKN, PKW dan PKSN di Wilayah Sulawesi.....	5-42
Tabel 5.11.	Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Sulawesi Periode 2015-2019.....	5-50
Tabel 5.12	Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Di Sulawesi	5-52
Tabel 5.13	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sulawesi Utara	5-54
Tabel 5.14	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Gorontalo	5-56



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 5.15. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sulawesi Barat	5-58
Tabel 5.16. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah	5-60
Tabel 5.17. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan	5-63
Tabel 5.18. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara	5-66
Tabel 6.1. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2015-2019	6-7
Tabel 6.2. Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2015-2019	6-7
Tabel 6.3. Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2015-2019	6-8
Tabel 6.4. Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kalimantan	6-19
Tabel 6.5. Lokasi Prioritas Kota Sedang yang Berfokus pada Upaya Pemerataan Wilayah di Kalimantan	6-20
Tabel 6.6. Lokasi Pembangunan Kota Baru Publik yang Mandiri Dan Terpadu di Wilayah Kalimantan	6-20
Tabel 6.7. Lokasi Prioritaas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota untuk Memperkuat Pusat Pertumbuhan Kalimantan	6-21
Tabel 6.8. Profil Daerah Tertinggal Wilayah Kalimantan	6-31
Tabel 6.9. Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Kalimantan	6-37
Tabel 6.10. Profil Kerawanan dan Risiko PKN, PKW dan PKS Di Wilayah Kalimantan	6-41
Tabel 6.11. Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Kalimantan Periode 2015 - 2019	6-47
Tabel 6.12. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Kalimantan	6-50
Tabel 6.13. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Barat	6-52
Tabel 6.14. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah.....	6-54
Tabel 6.15. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan.....	6-56



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 6.16.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Timur	6-58
Tabel 6.17.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Utara	6-60
Tabel 7.1.	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2015-2019	7-7
Tabel 7.2.	Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2015-2019	7-7
Tabel 7.3.	Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2015-2019	7-8
Tabel 7.4.	Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah di Jawa-Bali	7-19
Tabel 7.5.	Lokasi Pembangunan Kota Baru di Jawa-Bali	7-20
Tabel 7.6.	Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota untuk Memperkuat Pusat Pertumbuhan di Jawa-Bali	7-20
Tabel 7.7.	Profil Daerah di Wilayah Jawa-Bali	7-28
Tabel 7.8.	Profil Kerawanan dan Risiko PKN, PKW, dan PKSN di Wilayah Jawa-Bali	7-31
Tabel 7.9.	Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Pulau Jawa-Bali Periode 2015 - 2019	7-38
Tabel 7.10.	Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali	7-41
Tabel 7.11.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi DKI Jakarta	7-43
Tabel 7.12.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Jawa Barat	7-45
Tabel 7.13.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Jawa Tengah	7-49
Tabel 7.14.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi D.I. Yogyakarta	7-53
Tabel 7.15.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Jawa Timur	7-54
Tabel 7.16.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Banten	7-56
Tabel 7.17.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Bali	7-59
Tabel 8.1.	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2015-2019	8-6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 8.2.	Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2015-2019.....	8-7
Tabel 8.3.	Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2015-2019.....	8-7
Tabel 8.4.	Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah di Wilayah Sumatera	8-20
Tabel 8.5.	Lokasi Prioritas Kota Sedang yang Berfokus pada Upaya Pemerataan Wilayah di Wilayah Sumatera	8-20
Tabel 8.6.	Lokasi Prioritas Pembangunan Kota Baru Publik Yang Mandiri Dan Terpadu Di Wilayah Sumatera	8-21
Tabel 8.7.	Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota Untuk Memperkuat Pusat Pertumbuhan di Sumatera	8-22
Tabel 8.8.	Profil Daerah Tertinggal Wilayah Sumatera.....	8-32
Tabel 8.9.	Daftar Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Sumatera	8-38
Tabel 8.10.	Profil Kerawanan dan Risiko pada PKN, PKW, dan PKS di Wilayah Sumatera.....	8-42
Tabel 8.11.	Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Periode 2015-2019	8-48
Tabel 8.12.	Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Sumatera	8-53
Tabel 8.13.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Aceh.....	8-55
Tabel 8.14.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sumatera Utara	8-58
Tabel 8.15.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sumatera Barat	8-62
Tabel 8.16.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kepulauan Riau	8-64
Tabel 8.17.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Riau	8-66
Tabel 8.18.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sumatera Selatan	8-71
Tabel 8.19.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Jambi.....	8-74
Tabel 8.20.	Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Bengkulu	8-76



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 8.21. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Lampung	8-77
Tabel 8.22. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional di Provinsi Bangka Belitung	8-79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional 1983-2013 (persen).....	1-2
Gambar 1.2.	Konsep Gerbang Pelabuhan dan Bandar Udara Internasional di Masa Depan	1-4
Gambar 1.3.	Kerangka Pengembangan Wilayah	1-7
Gambar 1.4.	Sketsa Hirarki Pusat – Pusat Pertumbuhan dan Hiterland	1-8
Gambar 1.5	Percepatan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Melalui Industrialisasi/Hilirisasi...	1-18
Gambar 1.6	Sebaran KEK yang Telah Ditetapkan	1-19
Gambar 1.7	Sebaran Lokasi KEK 2009-2014 dan Indikasi Lokasi KEK 2014-2019	1-20
Gambar 1.8	Sebaran 13 Kawasan Industri Prioritas Wilayah Luar Jawa 2015-2019	1-21
Gambar 1.9	Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	1-44
Gambar 2.1.	Peta Lokasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pulau Papua RPJMN 2015-2019.....	2-18
Gambar 2.2.	Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di Wilayah Pulau Papua	2-27
Gambar 2.3.	Peta Sebaran Daerah Tertinggal Wilayah Pulau Papua 2015-2019.....	2-37
Gambar 2.4.	Peta Sebaran Prioritas (lokpri) Kawasan Perbatasan Wilayah Pulau Papua 2015-2019.....	2-45
Gambar 2.5.	Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Pulau Papua 2015-2019.....	2-50
Gambar 3.1.	Peta Lokasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Kepulauan Maluku RPJMN 2015-2019.....	3-9
Gambar 3.2.	Peta Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Kepulauan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

	Maluku	3-19
Gambar 3.3.	Peta Sebaran Daerah Tertinggal Wilayah Kepulauan Maluku RPJMN 2015-2019.....	3-26
Gambar 3.4.	Peta Sebaran Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Wilayah Kepulauan Maluku RPJMN 2015-2019	3-34
Gambar 3.5.	Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Kepulauan Maluku	3-39
Gambar 4.1.	Peta Lokasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Nusa Tenggara RPJMN 2015-2019	4-9
Gambar 4.2.	Peta Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Nusa Tenggara.....	4-21
Gambar 4.3.	Peta Sebaran Daerah Tertinggal Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara 2015-2019.....	4-28
Gambar 4.4.	Peta Sebaran Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara 2015-2019.....	4-36
Gambar 4.5.	Peta Indeks Risiko Bendana Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara.....	4-41
Gambar 5.1.	Peta Lokasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pulau Sulawesi RPJMN 2015-2019	5-12
Gambar 5.2.	Peta Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Sulawesi.....	5-25
Gambar 5.3.	Peta Sebaran Daerah Tertinggal Wilayah Sulawesi 2015-2019	5-31
Gambar 5.4.	Peta Sebaran Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Wilayah Sulawesi 2015-2019.....	5-39
Gambar 5.5.	Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Sulawesi	5-46
Gambar 6.1.	Peta Lokasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Kalimantan RPJMN 2015-2019.....	6-11
Gambar 6.2.	Peta Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Kalimantan.....	6-23
Gambar 6.3.	Peta Sebaran Daerah Tertinggal Wilayah Kalimantan 2015-2019.....	6-34
Gambar 6.4.	Peta Sebaran Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Wilayah Kalimantan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

	2015-2019.....	6-42
Gambar 6.5.	Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Pulau Kalimantan	6-48
Gambar 7.1.	Peta Lokasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali RPJMN 2015-2019.....	7-10
Gambar 7.2.	Peta Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Jawa-Bali.....	7-22
Gambar 7.3.	Peta Sebaran Daerah Tertinggal Wilayah Jawa - Bali 2015-2019	7-27
Gambar 7.4.	Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Jawa - Bali 2015-2019	7-35
Gambar 8.1.	Peta Lokasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pulau Sumatera RPJMN 2015-2019.....	8-11
Gambar 8.2.	Peta Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Sumatera	8-24
Gambar 8.3.	Peta Sebaran Daerah Tertinggal Wilayah Sumatera 2015-2019	8-31
Gambar 8.4.	Peta Sebaran Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Wilayah Sumatera 2015-2019.....	8-39
Gambar 8.5.	Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Sumatera 2015-2019.....	8-46

BAB 1

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL 2015 – 2019

1.1. Kerangka Pengembangan Wilayah

Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing menjadi kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian bangsa; serta memperkuat daya saing antarbangsa khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah menjadi sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan dan budaya bangsa, dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Semangat dan tekad kuat membangun daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan memperkuat daya saing menjadi bagian dari visi dan misi Presiden RI 2014-2019 khususnya misi keempat: Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; misi kelima: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan misi keenam: Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Selain itu, komitmen untuk mengembangkan wilayah dan memajukan daerah dipertegas dalam agenda prioritas (NAWACITA) kedua, yaitu: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; prioritas ketiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; prioritas kelima: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; prioritas keenam: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; prioritas ketujuh: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; serta prioritas kesembilan: Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Misi dan agenda prioritas tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah yang menjadi bagian integral dari agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Tekad dan semangat mengurangi kesenjangan antardaerah dan memajukan daerah menjadi sendi utama dalam merumuskan tujuan, arah kebijakan dan strategi, serta prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah di setiap wilayah. Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu:

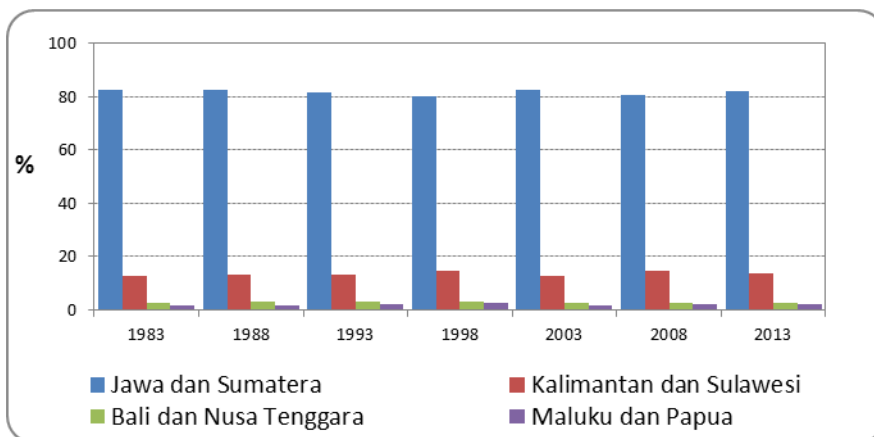


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali dan Wilayah Sumatera, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang andal; serta meperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu indikator kesenjangan adalah kontribusi PDRB KBI selama 30 tahun (1983-2013) sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB (lihat Gambar 1.1).

GAMBAR 1.1.
PERAN WILAYAH/PULAU DALAM
PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1983-2013 (PERSEN)



Sumber : BPS 1983-2013

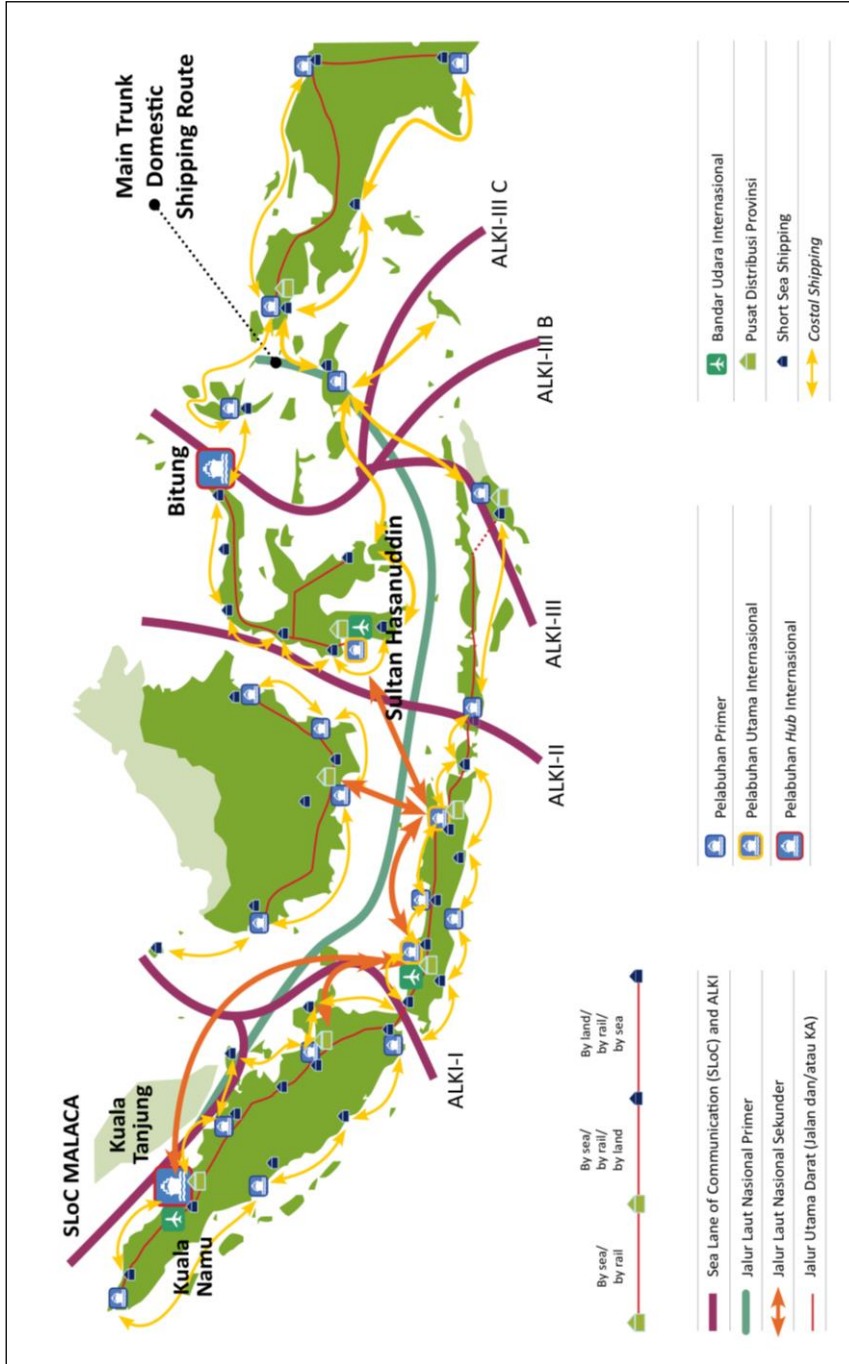
Dalam lima tahun mendatang (2015-2019), arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata dengan memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan *Sea Lane of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) (lihat Gambar 1.2); penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kerangka pengembangan wilayah nasional untuk mempercepat dan memperluas pembangunan wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*), di masing-masing pulau, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah, terutama untuk pengembangan pangan, energi, maritim, pariwisata dan industri. Industrialisasi perlu didorong untuk mengolah bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru.
2. Kedepan, dilakukan percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan.
3. Dikarenakan adanya keterbatasan dana pemerintah, maka tidak semua wilayah dapat dikembangkan pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, perlu dipilih pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai komoditas prospektif (nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja tinggi), terutama yang berada di masing-masing koridor ekonomi. Selain itu, prioritas juga akan diberikan pada pengembangan kawasan pesisir yang mempunyai sumber daya kelautan dan jasa maritim.
4. Investasi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta perlu dioptimalkan pada klaster-klaster industri untuk memicu dampak penggandanya (*multiplier effect*) pada daerah sekitarnya, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal. Memberikan *captive budget* APBN belanja modal untuk Kawasan Timur Indonesia. Belanja modal ini diharapkan akan menyuntikkan pembangunan infrastruktur di kawasan ini sehingga dapat mendorong investasi investasi lebih cepat. Jika investasi dapat digeser ke kawasan timur, maka pemerataan pembangunan antarwilayah lebih mudah dicapai.

**GAMBAR 1.2.
KONSEP GERBANG PELABUHAN DAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI MASA DEPAN**



Sumber : Menko Perekonomian, 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. Upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusat pertumbuhan tersebut, harus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan keserasian ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan pertumbuhan yang inklusif yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan di masa depan.
6. Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan informasi dan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas nasional, baik secara domestik maupun secara internasional (*locally integrated, internationally connected*). Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut sebagai pengembangan poros maritim.
7. Untuk memperlancar distribusi logistik barang, jasa, dan informasi, maka pemerintah pusat dan daerah, maupun melalui kerja sama dengan dunia usaha, termasuk BUMN, berupaya untuk (a) menurunkan biaya transaksi logistik (*transaction cost*); (b) mengurangi ekonomi biaya tinggi; (c) menurunkan rata-rata *dwelling time* (waktu tunggu kapal di pelabuhan); (d) mengembangkan sistem logistik dan distribusi secara elektronik, terutama untuk proses *pre-clearance* sampai dengan *post clearance*; dan (e) optimalisasi perijinan ekspor-impor secara terintegrasi dan elektronik antar sektor.
8. Selain itu, perlu dilakukan pula peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan kluster-kluster industri. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (*skilled labor*) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap kluster industri.
9. Dari sisi regulasi, Pemerintah secara berkelanjutan terus berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. Pemerintah perlu melakukan deregulasi (*debottlenecking*) terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi secara bertahap akan terus diberikan oleh Pemerintah melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal.
10. Pemerintah secara berkelanjutan perlu berupaya untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar

Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/ Lembaga dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi dan meningkatkan kualitas belanjanya sehingga menjadi stimulus bagi berkembangnya usaha dan investasi di daerah.

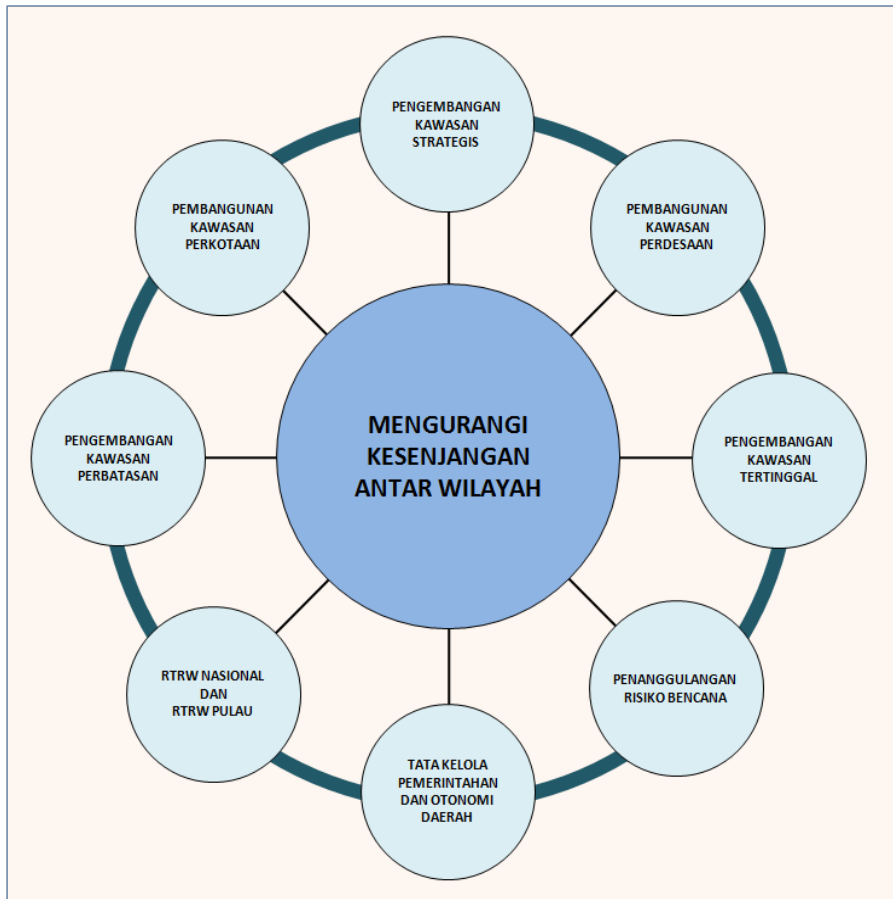
11. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor, perlu dilakukan peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah termasuk kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, dan keuangan pemerintah daerah.
12. Untuk menghindari timbulnya kesenjangan baru antara wilayah koridor ekonomi dengan wilayah sekitarnya di setiap pulau, maka pembangunan daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal, perlu ditingkatkan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar.
13. Pada saat yang bersamaan diperlukan percepatan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahanan iklim dan bencana; cerdas; dan mempunyai daya saing kota. Disamping itu, diperlukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa.
14. Selain daripada itu, akan dilakukan pula penanganan kawasan perbatasan yang ditujukan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (*security approach*) dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*).
15. Hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap bencana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kemampuan mitigasi dan penanganan daerah bencana, terutama daerah dengan risiko kebencanaan tinggi untuk meningkatkan kewaspadaan bencana dan mencegah risiko bencana.

Dengan kerangka pembangunan wilayah tersebut diharapkan kesenjangan antarwilayah antara KBI dan KTI dapat berkurang. Kerangka pengembangan wilayah dan sketsa hirarki pusat-pusat pertumbuhan dan hinterland dapat dilihat pada Gambar 1.3 dan Gambar 1.4.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 1.3.
KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

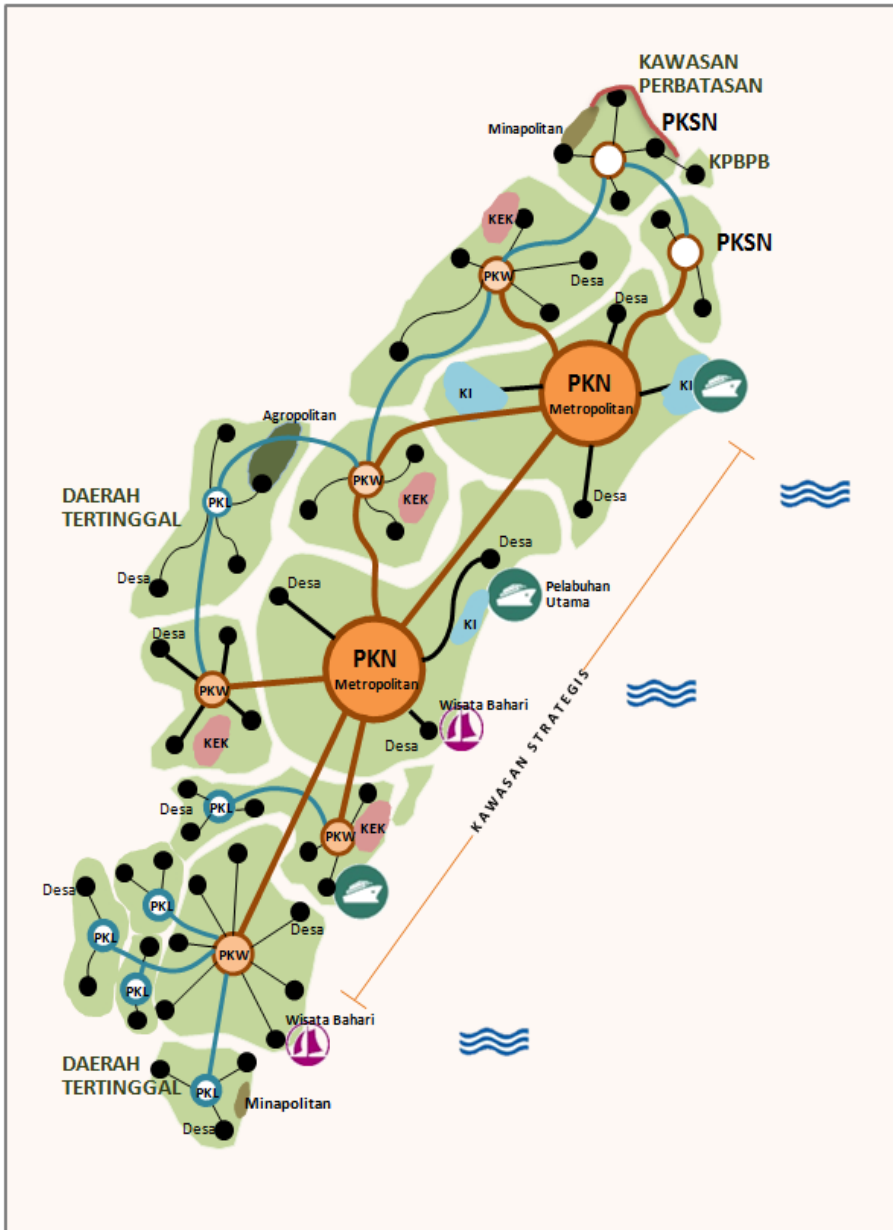


Sumber : Bappenas, 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 1.4.
SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND



Sumber : Bappenas, 2014

1.2. Tema Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu: Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali dan Wilayah Sumatera. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau menjadi acuan utama dalam mengendalikan tata ruang, serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah didasarkan pada potensi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah, serta posisi geografis strategis di masing-masing pulau. Adapun tema pengembangan wilayah di setiap pulau adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Wilayah Pulau Papua sebagai:

- Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
- Percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari;
- Percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati;
- Percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi dan tembaga;
- Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon; serta
- Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat;
- Pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Papua yang mandiri, produktif dan berkepribadian.

2. Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku sebagai:

- Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional
- Percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan;
- Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga;
- Pariwisata bahari.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara sebagai:

- Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition* (MICE);
- Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut;
- Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung;
- Pengembangan industri mangan, dan tembaga.

4. Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi sebagai:

- Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia;
- Pengembangan industri berbasis logistik;
- Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung;
- Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi;
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

5. Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan sebagai:

- Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem bencana alam banjir dan kebakaran hutan;
- Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
- Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa;
- Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

6. Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali sebagai:

- Lumbung pangan nasional;
- Pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja;
- Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif;
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.

7. Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera sebagai:

- Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional;
- Lumbung energi nasional, termasuk pengembangan energi terbarukan biomassa;
- Pengembangan hilirisasi komoditas batubara;
- Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin;
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

1.3. Tujuan dan Sasaran Pokok Pengembangan Wilayah

Dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Visi-Misi Presiden serta Agenda Prioritas Pembangunan (NAWA CITA), maka tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Sasaran pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut (lihat Tabel 1.1):

1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah antara lain mengembangkan 8 KEK yang sudah ditetapkan, termasuk KEK Tanjung Lesung dan terbangunnya 7 KEK baru di luar Jawa; 14 KI; 4 KPBPB, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah pinggiran.



2. Meningkatnya produksi perikanan; berkembangnya energi dan mineral kelautan; berkembangnya kawasan wisata bahari; dan berkembangnya industri maritim dan perkapalan, dengan sasaran (a) meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 48 juta ton pada tahun 2019 (termasuk rumput laut); (b) meningkatnya jumlah kapal perintis 75 unit untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil dan 100 lintas subsidi perintis; (c) bertambahnya luasan kawasan koservasi laut dari 15,7 juta ha (tahun 2013) menjadi 20 juta ha (tahun 2019); (d) berkembangnya energi dan mineral kelautan, serta kawasan wisata bahari; (e) meningkatnya cakupan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan menjadi 53,4 persen terhadap wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
3. Berkurangnya kesenjangan antarwilayah di masing-masing pulau yang ditandai dengan berkembangnya daerah tertinggal sebanyak 80 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,24 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14,0 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 69,59.
4. Pembangunan 5 Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa.
5. Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 7 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.
6. Pengembangan sedikitnya 20 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percotohan (*best practices*) perwujudan kota berkelanjutan;
7. Pembangunan 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8. Untuk pembangunan desa dan kawasan perdesaan, sasarannya adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
9. Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, sasarannya adalah dengan memperkuat sedikitnya 39 pusat-pusat pertumbuhan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
10. Pengembangan kawasan perbatasan difokuskan pada 10 PKSN dan pengembangan 16 PKSN lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya, terutama 187 lokasi prioritas (lokpri) perbatasan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman;
11. Untuk meminimalkan atau mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang, makasasaran penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKW, PKSN, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri maupun pusat-pusat pertumbuhan lainnya.
12. Menguatnya tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan sasaran: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya opini audit BPK di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; (4) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 60 persen dan S2-S3 sebesar 8 persen; (5) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah; (6) Terlaksananya evaluasi otsus dan pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus; (7) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah; (8) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (9) Terlaksananya pengaturan kewenangan secara bertahap di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (10) Meningkatnya persentase jumlah PTSP di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (11) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP; (12) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran; (13) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (14) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (14) Terlaksananya penguatan kelembagaan Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua dan Papua Barat.

13. Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dengan sasaran: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

TABEL 1.1.
SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah			
1	Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional		
a.	Sumatera	23,8 *)	24,6
b.	Jawa	58,0 *)	55,1
c.	Bali – Nusa Tenggara	2,5 *)	2,6
d.	Kalimantan	8,7 *)	9,6
e.	Sulawesi	4,8 *)	5,2
f.	Maluku - Papua	2,2 *)	2,9
*) Tahun 2013			
2	Pembangunan Perdesaan		
a.	Penurunan desa tertinggal		sampai dengan 5,000 desa tertinggal
b.	Peningkatan desa mandiri		paling sedikit 2,000 desa mandiri
3	Pengembangan Kawasan Perbatasan		
a.	Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)	3 (111 lokasi prioritas)	10 (187 lokasi prioritas)**
b.	Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	92 pulau kecil terluar/terdepan
**) 16 PKSN lainnya tahap persiapan			
4	Pembangunan Daerah Tertinggal		
a.	Jumlah Daerah Tertinggal	122 (termasuk 9 DOB)	42
b.	Kabupaten terentaskan	70	80
c.	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	7,1% ***	7,24%
d.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	16,64%	14,0%
e.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	68,46	69,59
***) rata-rata 2010-2014			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah			
5	Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa		
a.	Kawasan Ekonomi Khusus di Luar Jawa	7	14
b.	Kawasan Industri	n.a.	14
c.	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBBP)	4	4
6.	Pembangunan Kawasan Perkotaan		
a.	Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	2	2+ 5(usulan baru)
b.	Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa	43 kota belum optimal perannya	20 dioptimalkan perannya
c.	Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	--	39 pusat pertumbuhan yang diperkuat
d.	Pembangunan 10 Kota Baru Publik	--	10 Kota Baru

Sumber : Bappenas, 2014

Dengan memperhatikan sasaran tersebut, pada akhir tahun 2019 kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI diharapkan akan semakin berkurang yang ditandai oleh meningkatnya kontribusi PDRB KTI terhadap PDB Nasional dari sekitar 20 persen (2014) menjadi 22-25 persen; dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di KTI yang diukur dari berkurangnya angka kemiskinan dan angka pengangguran. Target pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 secara rinci adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2.
SASARAN PERAN PDRB PER WILAYAH TAHUN 2015-2019

Wilayah	Peran PDRB Wilayah (persen) Tahun 2013	Peran PDRB Wilayah (persen) Tahun 2019
Sumatera	23,8	24,6
Jawa	58,0	55,1
Kalimantan	8,7	9,6
Sulawesi	4,8	5,2
Bali - Nusa Tenggara	2,5	2,6
Maluku Papua	2,2	2,9
Nasional	100,0	100,0

Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 1.3.
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER WILAYAH TAHUN 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sumatera	5.7	6.2	6.5	7.0	7.6
Jawa-Bali	5.7	6.5	7.1	7.4	7.8
Nusa Tenggara	4.6	7.3	7.6	8.2	9.2
Kalimantan	5.0	5.9	6.1	6.9	7.6
Sulawesi	7.4	7.6	8.2	8.9	9.1
Maluku	6.5	6.9	7.8	8.0	8.2
Papua	11.7	13.2	16.0	17.2	17.3

Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 1.4.
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN PER WILAYAH TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sumatera	10.2	9.6	8.8	8.0	7.3
Jawa-Bali	9.9	9.3	8.6	7.9	7.1
Nusa Tenggara	17.7	16.4	15.1	13.8	12.5
Kalimantan	6.3	5.9	5.4	4.9	4.4
Sulawesi	10.7	9.9	9.1	8.3	7.6
Maluku	13.9	13.1	12.0	11.0	9.9
Papua	29.8	27.4	25.1	22.8	20.6

Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 1.5.
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN PER WILAYAH TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sumatera	5.4	5.2	5.0	4.7	4.6
Jawa-Bali	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5
Nusa Tenggara	3.8	3.6	3.4	3.3	3.1
Kalimantan	4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
Sulawesi	4.9	4.7	4.5	4.3	4.0
Maluku	5.9	5.7	5.4	5.2	4.9
Papua	3.7	3.5	3.4	3.2	3.0

Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014

1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

1.4.1. Pengembangan Kawasan Strategis¹

Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah yang selaras serta peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah akan mengembangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata serta sektor mikro lainnya. Strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan kawasan strategis tersebut adalah (lihat Gambar 1.5):

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah

Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, baik yang telah ada maupun yang baru di luar Pulau Jawa. Pada pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan dikembangkan 8 KEK yang sudah ditetapkan, termasuk KEK Tanjung Lesung (lihat Gambar 1.6) dan terbangunnya 7 KEK baru diluar Jawa (lihat Gambar 1.7). Selain itu, akan dikembangkan 14 Kawasan Industri baru (lihat Gambar 1.8) terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan banyak kesempatan kerja. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut diantaranya untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) di kawasan pesisir dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan.

2. Percepatan Pembangunan Konektivitas

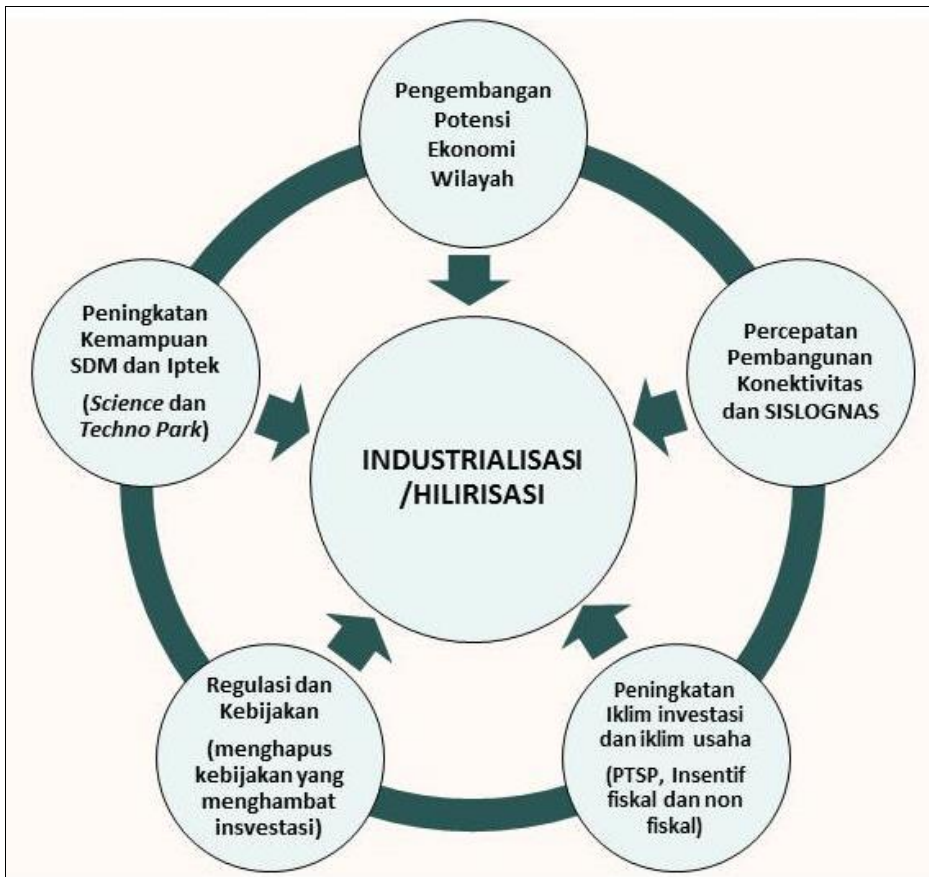
Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antarwilayah pertumbuhan serta antarwilayah pulau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, informasi, telekomunikasi, serta pasokan energi. Tujuan penguatan konektivitas adalah untuk (a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan

¹Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai “penggerak utama pengembangan wilayah.” Pusat-Pusat pertumbuhan tersebut dapat berupa KEK, KI, KPBPB dsb.



pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui *inter-modal supply chained system*; (b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (*hinterland*); serta (c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan. Upaya pembangunan konektivitas tersebut antara lain akan membangun 2.000 kilometer jalan, 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang yang lama, 10 bandara baru dan merenovasi yang yang lama, membangun Bank Pembangunan dan Infrastruktur, serta mendorong BUMN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

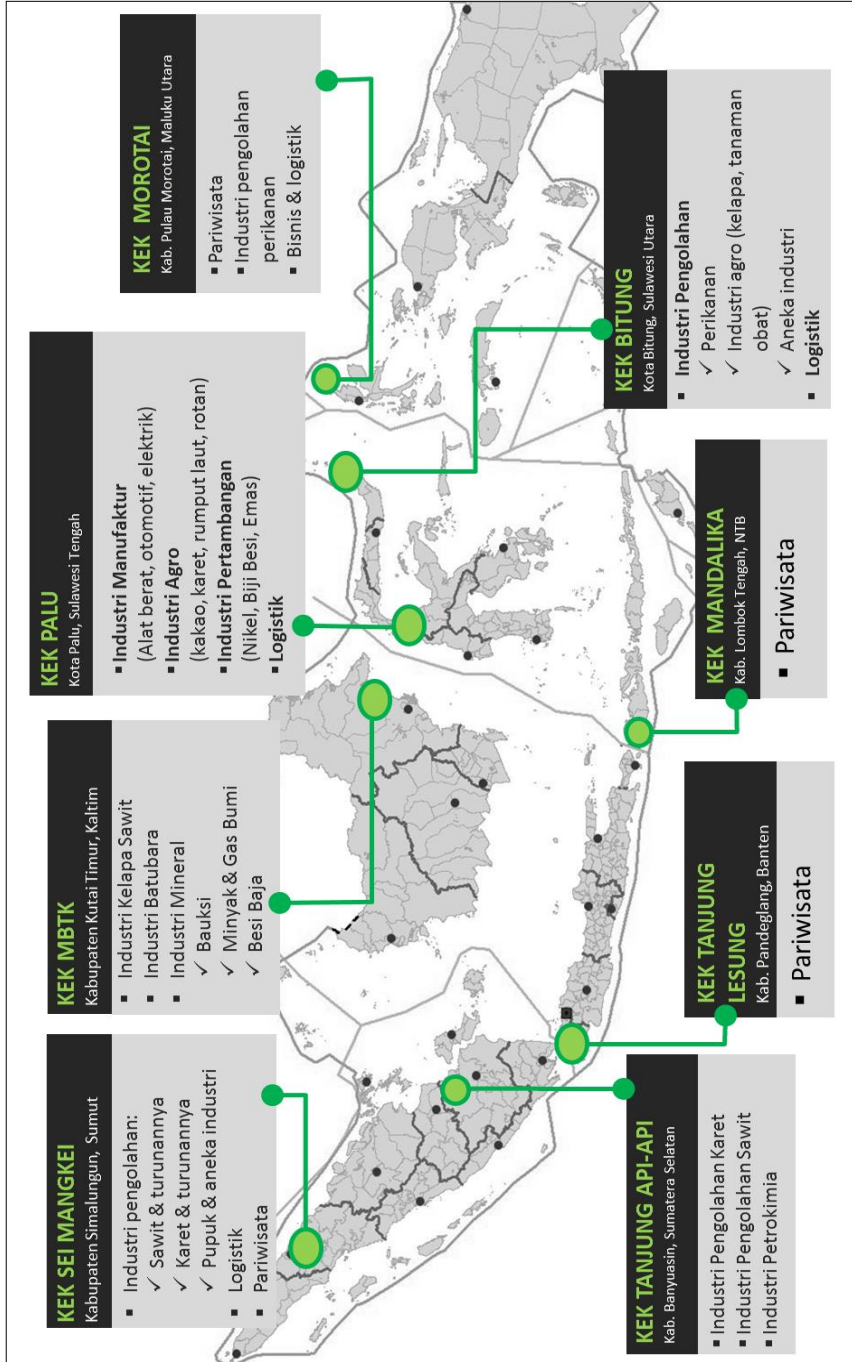
GAMBAR 1.5.
PERCEPATAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN MELALUI INDUSTRIALISASI/HILIRISASI



Sumber : Bappenas, 2014



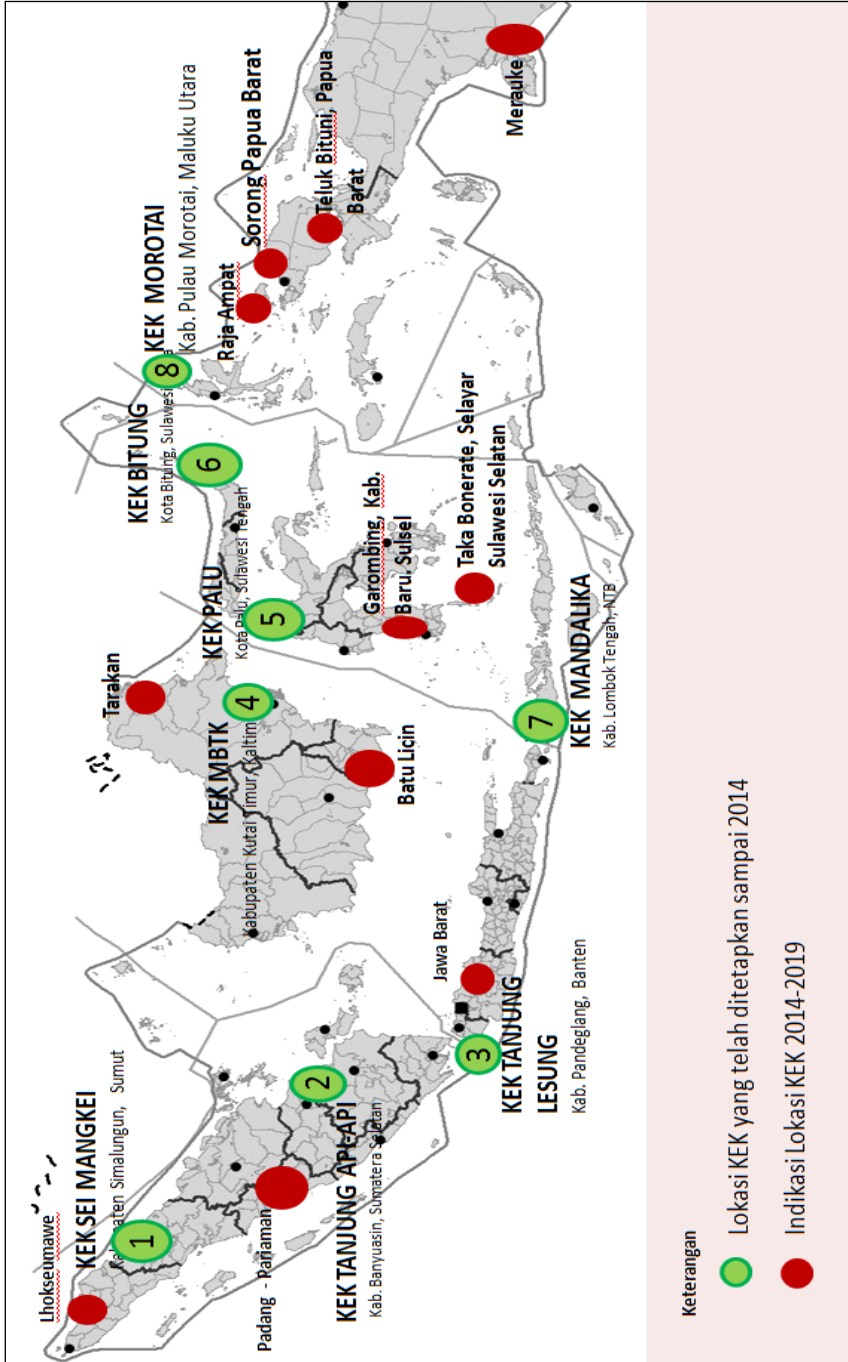
GAMBAR 1.6.
SEBARAN KEK YANG TELAH DITETAPKAN



Sumber : Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, 2014



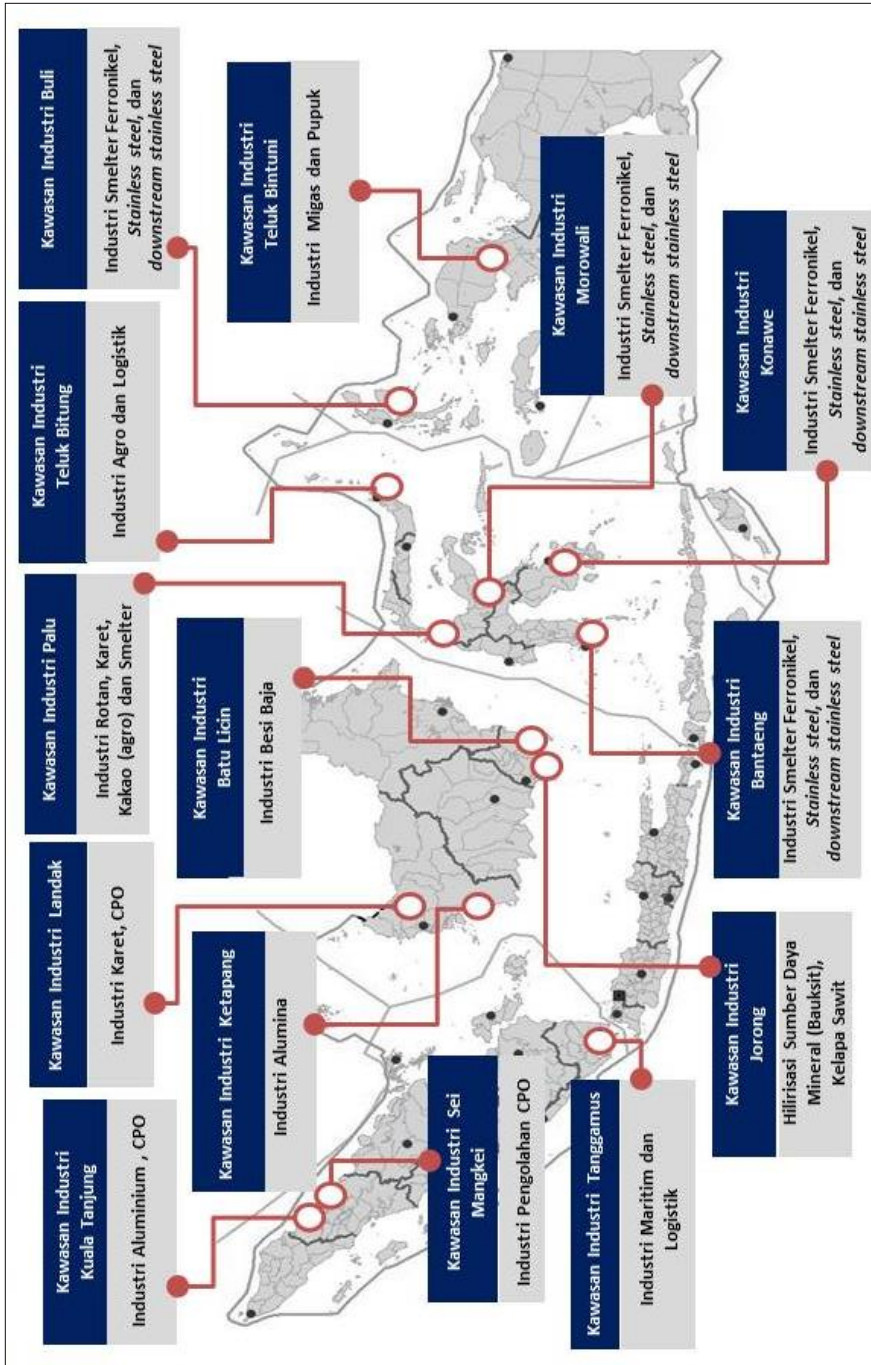
GAMBAR 1.7.
SEBARAN LOKASI KEK 2009 - 2014 DAN INDIKASI LOKASI KEK 2014 - 2019



Sumber : Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, 2014



GAMBAR 1.8.
SEBARAN 14 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS WILAYAH LUAR JAWA 2015 – 2019



Sumber : Kementerian Perindustrian dan Bappenas, 2014



3. **Peningkatan Kemampuan SDM dan IPTEK**

Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK dilakukan melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri di masing-masing pusat-pusat pertumbuhan dan kemampuan pengelolaan kawasan di wilayah belakangnya (*hinterland*). Membangun SMK-SMK dan politeknik dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini sesuai dengan potensidan kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, akan dilakukan pembangunan *Science and Techno Park* dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing, serta mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, serta dunia usaha. Untuk itu, akan ditingkatkan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi.

4. **Regulasi dan Kebijakan**

Dalam rangka mempermudah proses pembangunan, Pemerintah akan melakukan deregulasi (*debottlenecking*) peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, melalui: (i) mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan investasi, (ii) menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga, (iii) merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis, dan (iv) menyusun peraturan untuk memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

5. **Peningkatan Iklim Investasi dan iklim usaha**

Dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses kemudahan berusaha dan berinvestasi, perlu dilakukan: (i) penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha di kawasan strategis, (ii) peningkatan efisiensi logistik di dalam kawasan strategis dan antar wilayah, (iii) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kawasan Strategis dengan mempercepat pelimpahan kewenangan perijinan dari Kepala Daerah kepada Kepala PTSP (iv) meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPS terutama dalam rangka penyediaan infrastruktur dan energi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis, (v) meningkatkan dan menggali potensi investasi kawasan strategis (vi) membatalkan perda bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha di kawasan strategis,

(vii) menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik minat investor ke kawasan strategis; dan (viii) memberikan insentif fiskal dan non fiskal khusus untuk kawasan strategis yang dapat mendorong investasi sektor pengolahan yang memproduksi bahan baku untuk industri domestik dan sektor industri yang mengolah sumber daya alam.

1.4.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

1.4.2.1. Pembangunan Perkotaan

Arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal. Untuk itu, strategi pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 adalah :

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

- a) Mendorong kawasan perkotaan metropolitan baru sebagai sentra produksi pengolahan barang dan jasa untuk melayani KTI serta memantapkan peran dan fungsi kawasan metropolitan yang sudah ada untuk menjadi pusat berskala global;
- b) Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan antar pulau di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota otonom prioritas diluar Pulau Jawa – Bali yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi dan mengoptimalkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan jalur tol laut.

2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni

- a) Menyediakan sarana dan prasarana dasar perkotaan sesuai dengan tipologi, fungsi dan peran kotanya;
- b) Menyediakan dan meningkatkan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar rakyat, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
- c) Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya;
- d) Menyediakan sarana permukiman beserta sarana parasananya yang layak dan terjangkau;
- e) Mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan multimoda sesuai dengan tipologi kota dan kondisi geografisnya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f) Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- 3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana**
- a) Menata, mengelola, dan memanfaatkan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan;
 - b) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (*urban resilience*);
 - c) Menyediakan sarana prasarana yang berorientasi pada konsep hijau dan berketahanan, antara lain: *green openspace* (ruang terbuka hijau), *greenwaste* (pengelolaan sampah dan limbah), *green water* (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan), *green transportation* (transportasi ramah lingkungan), *green energy* (pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan), serta *green economy* (pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan)
- 4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal**
- a) Mengembangkan perekonomian dengan membangun pencitraan kota (*city branding*) yang mendukung pencitraan bangsa (*nation branding*);
 - b) Menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).;
 - c) Membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif.
- 5. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan**
- a) Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi pemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat;
 - b) Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan inovatif serta aparat pemerintah dalam mengelola dan mewujudkan Kota Berkelanjutan;
 - c) Menyederhanakan proses perijinan dan pelayanan publik bagi masyarakat dan para pelaku usaha;
 - d) Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota dan antara kota-kabupaten, baik dalam negeri dan luar negeri (*sister city*);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e) Membentuk dan Menguatkan status Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan termasuk Jabodetabek;
- f) Mengembangkan dan menyediakan basis data informasi dan peta perkotaan berskala besar yang terpadu dan mudah diakses; serta
- g) Meningkatkan peran aktif swasta, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan asosiasi profesi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pembangunan Kota Berkelanjutan

1.4.2.2. Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, pengembangan desa dan kawasan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar tahun 2015-2019 dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi, sesuai dengan kondisi geografisnya**
 - a) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman;
 - b) Meningkatkan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan;
 - c) Meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan;
 - d) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan
 - e) Meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.
- 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi**
 - a) Fasilitasi pengelolaan BUMDesa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
 - b) Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c) Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.
- 3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi**
- a) Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
 - b) Mendorong peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;
 - c) Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat;
 - d) Mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan;
 - e) Memperkuat partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa;
 - f) Memperkuat kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan;
 - g) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;
 - h) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; dan
 - i) Meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.
- 4. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi:**
- a) Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;
 - b) Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa;
 - c) Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
 - d) Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.



- 5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan**
 - a) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa; (iii) penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital;
 - b) Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan;
 - c) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
 - d) Mengembangkan kerjasama antar desa;
 - e) Melaksanakan penataan desa; dan
 - f) Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat.

- 6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi**
 - a) Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
 - b) Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
 - c) Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
 - d) Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
 - e) Menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang *shareholding* antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam;
 - f) Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola *shareholding* melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
 - g) Merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota

- a) Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
- b) Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
- c) Mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali; dan
- d) Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
- e) Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
- f) Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

1.4.2.3. Peningkatan Keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan

Peningkatan keterkaitan desa-kota bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui penguatan sedikitnya 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi 27 pusat pertumbuhan di KTI dan 12 pusat pertumbuhan di KBI. Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau.

- a) Mempercepat pembangunan sistem, sarana dan prasarana di bidang transportasi, dan komunikasi untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal.
- b) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah.
- c) Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi.

- a) Meningkatkan hasil pertanian dan perikanan, serta mengembangkan industri pengolahannya yang berbasis koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- b) Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan agribisnis di sektor pertanian dan perikanan/kelautan serta pengembangan kawasan pariwisata.
- c) Mengembangkan lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha khususnya di sektor pertanian dan perikanan/kelautan serta sektor lain yang mendukung.
- d) Menerapkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa.

3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan Masyarakat dalam Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa

- a) Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien;
- b) Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah;
- c) Mengembangkan kerjasama antar daerah khususnya di luar Jawa-Bali dan kerjasama pemerintah-swasta;
- d) Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama;
- e) Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal.

1.4.3. Pengembangan Daerah Tertinggal² dan Kawasan Perbatasan³

1.4.3.1. Pengembangan Daerah Tertinggal

Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada:

²Daerah Tertinggal adalah meliputi kabupaten yang masih dalam kategori tertinggal berdasarkan kriteria ekonomi; SDM; infrastruktur; kapasitas keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah.

³Kawasan Perbatasan Negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a) Upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik;
- b) Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis.

Strategi pengembangan daerah tertinggal sebagai berikut:

- a) Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, pemasaran dan perlu didukung oleh pemetaan masalah berbasis bioregion serta pengembangan produk unggulan daerah;
- b) Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, yaitu: peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, penerbangan, pelayaran dan penyediaan moda transportasi perintis;
- c) Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah;
- d) Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, serta mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: sandang, pangan, dan perumahan;
- e) Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, penyuluh pertanian-kehutanan, pendamping desa di daerah tertinggal;
- f) Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal, salah satunya melalui harmonisasi peraturan perizinan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
- g) Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM;

- h) Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan, disamping perlu dukungan semua sektor terkait;
- i) Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada (i) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (ii) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir, (iii) pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian, (iv) pemihakan terhadap Orang Asli Papua, (v) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui pemantapan sistem tata kelola yang baik, (vi) pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan, (vii) pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir, (viii) penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

1.4.3.2. Pengembangan Kawasan Perbatasan

Pengembangan kawasan perbatasan 2015-2019 difokuskan pada 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional⁴ (PKSN) Kawasan Perbatasan dan 187 lokasi prioritas (lokpri) perbatasan. Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan adalah mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (*security approach*), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*).

Sehubungan dengan hal tersebut, strategi pengembangan kawasan perbatasan diperlukan melalui:

- a. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi;
- b. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam

⁴Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

- memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing;
- c. Pembangunan konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya), Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten), Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi). Untuk kawasan perbatasan laut, pelayanan transportasi laut perlu peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan. Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk menghubungkan dengan negara tetangga. Membuka akses transportasi darat, sungai, laut, dan udara di dalam Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan;
 - d. Transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu *Costum, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu;
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara;
 - f. Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui *Pra-investigation, refixation, maintenance* (IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat; dan
 - g. Peningkatan kerjasama perdagangan (*Border Trade Agreement*) dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga.

1.4.4. Penanggulangan Bencana

Untuk mengantisipasi risiko bencana yang sudah ada dan yang berpotensi dimasa yang akan datang bila tidak dikelola/ diminimalisasi akan dapat mengakibatkan terjadinya kemunduran dari pembangunan yang sudah dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan didalam penanggulangan bencana adalah (1) mengurangi risiko bencana; dan (2) meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana.

Strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah sebagai berikut.

- 1) Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, melalui:



- a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
 - b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 untuk kota sasaran.
 - c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota.
 - d. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/ Kota.
 - e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah;
 - f. Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota sasaran sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
- 2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:
- a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.
 - b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat.
 - d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - e. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam.
 - f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.
- 3) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, melalui:
- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah.
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
 - c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- e. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
- f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana.
- g. Membangun dan memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana.
- h. Melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dan ekonomi lokal melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat.
- i. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau yang dapat menjangkau wilayah yang terkena bencana dengan cepat.
- j. Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana di daerah.

1.4.5. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nasional

Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan wilayah, diperlukan landasan utama pembangunan, yaitu: penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang ditujukan untuk perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Acuan untuk pengembangan tata ruang wilayah nasional mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Adapun arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan terkait pengembangan struktur tata ruang:

- peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
- peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

b) Kebijakan terkait pengembangan pola ruang:

- pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
- pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
- pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional;
- pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional;
- pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.
- Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.

Strategi yang diuraikan di bawah hanya mencakup strategi untuk pengembangan struktur ruang khususnya terkait dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana; dan strategi untuk pengembangan pola ruang khususnya pengembangan kawasan lindung, dan strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan strategi untuk pengembangan kebijakan lainnya dipertimbangkan dalam perumusan pengembangan strategi-strategi pengembangan kawasan strategis, daerah tertinggal, daerah perbatasan, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional tersebut, maka strategi pengembangan tata ruang wilayah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Jaringan Prasarana, meliputi:

- a) meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;



- b) mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
- c) meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- d) meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- e) meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional yang optimal.

2. Pemeliharaan dan Perwujudan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, meliputi:

- a) menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- b) mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30 persen dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- c) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- d) Implementasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan dan pemulihan kesehatan DAS kritis.

3. Pencegahan Dampak Negatif Kegiatan Manusia Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup, meliputi:

- a) menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- b) melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c) melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- d) mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;



- e) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f) mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- g) mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

4. Pengendalian Perkembangan Kegiatan Budi Daya Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, meliputi:

- a) membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- b) mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
- c) mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- d) membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

5. Pelestarian dan Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, meliputi:

- a) menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung;
- b) mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- c) membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- d) membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
- e) mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona



- penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
- f) merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional.

1.4.6. Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Tata kelola pemerintahan dan otonomi daerah memiliki arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

- a) Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Arah kebijakannya adalah restrukturisasi OPD yang efektif dan efisien dalam menjalankan pelayanan publik di daerah. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Penguatan regulasi dan kebijakan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah; dan (b) Peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah.
- b) Penataan kewenangan
Arah kebijakan penataan kewenangan adalah meningkatkan kualitas dan sinkronisasi penataan kewenangan antar level pemerintahan. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan; dan (b) Penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- c) Penataan Daerah
Arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas penataan DOB serta “penundaan” pemekaran DOB. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Penguatan regulasi dan kebijakan penataan daerah; (b) Pengembangan pedoman daerah persiapan, penggabungan serta penghapusan daerah; (c) Peningkatan kapasitas DOB; (d) Penyelesaian masalah segmentasi batas daerah; dan (e) Peningkatan pelaksanaan evaluasi perkembangan DOB.
- d) Kerjasama Daerah
Arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas kerjasama daerah di seluruh wilayah. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Pengembangan model, struktur kelembagaan dan tata cara kerjasama daerah yang lebih



luas dan implementatif; (b) Peningkatan fasilitasi untuk Pemerintah Provinsi dalam kordinasi, pembinaan dan pengawasan serta resolusi konflik penyelenggaraan kerjasama daerah; dan(c) Pemetaan potensi-potensi kerjasama daerah serta memfasilitasi terbentuknya kerjasama daerah.

e) Harmonisasi peraturan perundangan

Arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas harmonisasi peraturan perundangan sektoral dan investasi dengan peraturan perundangan daerah. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Evaluasi dan/atau konsultasi rancangan Perda; (b) Pembatalan Perda dan Perkada yang bermasalah; (c) Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah; dan (d) Pelaksanaan harmonisasi peraturan perizinan antara pusat dan daerah.

f) Sinergi perencanaan dan penganggaran

Arah kebijakannya adalah meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran untuk efektifitas dan efesiensi serta pemerataan pelaksanaan pembangunan di daerah. Strategi yang dilakukan adalah (a) Perbaikan mekanisme perencanaan, khususnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan; (b) Penguatan lembaga perencana serta hubungan perencanaan pusat dan daerah dalam sinergi perencanaan dan penganggaran; (c) Pembangunan media/sarana bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah; dan (d) Penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah sesuai peraturan, serta (e) penyesuaian pembangunan nasional dan daerah melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang, perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.

g) Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan

Arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah. Strategi yang dilakukan adalah peningkatan kinerja akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah.



h) Peningkatan Pelayanan Publik

Arah kebijakan peningkatan pelayanan publik yaitu perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin merata agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Strategi terkait inovasi dan pelayanan publik meliputi: (a) Penyusunan revisi panduan dan regulasi terkait SPM (Standar Pelayanan Minimal), PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan Inovasi Daerah untuk percepatan implementasi di daerah; (b) Peningkatan jumlah daerah yang mengimplementasikan SPM, PTSP, dan Inovasi Daerah dengan baik; (c) Penyusunan dan sosialisasi instruksi presiden mengenai penerapan sikap-sikap pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan; (d) Penerapan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN); dan (e) Penyusunan kebijakan terkait peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing perekonomian daerah.

i) Otonomi Khusus

Arah kebijakannya adalah penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus bagi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah: (a) Evaluasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus; (b) penyusunan regulasi mengenai otsus/istimewa; (c) Penerbitan regulasi daerah dalam rangka pemantapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik; (d) Penyusunan NSPK dalam rangka penguatan kelembagaan badan percepatan pembangunan kawasan Papua dan Papua Barat; dan (e) Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah otsus/ daerah istimewa.

j) Penguatan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD

Arah kebijakannya adalah peningkatan kualitas kepala daerah dan DPRD dalam melaksanakan pembangunan daerah. Strategi pembangunan yang ditempuh adalah (a) pelaksanaan pemilihan kepala daerah sesuai regulasi pilkada; (b) pelaksanaan fasilitasi kepala daerah dalam pembangunan daerah; (c) penguatan kompetensi pimpinan dan anggota DPRD; dan (d) peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD.



2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Arah kebijakan terkait isu penguatan aparatur pemerintah daerah yaitu peningkatan kualitas ASN dalam rangka menjamin tersedianya aparatur pemerintah daerah yang profesional, memiliki integritas, dan terdistribusikan secara merata di berbagai daerah sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah. Strategi turunan arah kebijakan tersebut yaitu (a) Perbaikan mutu pendidikan PNS di Daerah, (b) Penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah; serta (c) Pelaksanaan standarisasi, sertifikasi, dan Kerjasama Diklat Pemerintahan Dalam Negeri

3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

a) Kemampuan Fiskal Daerah, arah kebijakannya adalah:

- a. Meningkatkan *local taxing power*. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Pelaksanaan sosialisasi dan bantuan teknis untuk peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah, terutama pasca implementasi UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (ii) Pengembangan dan pembentukan sistem pemungutan Pajak Daerah yang efektif dan efisien tanpa menciptakan *high cost economy*; (iii) Penguatan kerjasama administrasi pajak daerah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota; (d) Peningkatan kapasitas terkait dengan sistem pengelolaan data dan administrasi pajak daerah; dan (e) Pengembangan dan penataan retribusi daerah.
- b. Meningkatkan potensi penerimaan daerah lainnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Evaluasi dan penataan pengelolaan BUMD pemerintah daerah; (ii) Pengembangan penyediaan layanan publik melalui BUMD yang bersifat mandiri; (iii) Pengembangan investasi daerah; dan (iv) Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.



b) Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah, arah kebijakannya adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penganggaran, salah satunya melalui penciptaan informasi anggaran pemerintah daerah melalui *e-government*; (ii) Pembuatan kebijakan/regulasi/pedoman bidang anggaran daerah; dan (iii) Meningkatkan profesionalisme dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah
- b. Meningkatkan jumlah daerah yang menetapkan Perda APBD tepat waktu. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Pembuatan kebijakan/regulasi/pedoman untuk mendorong penetapan APBD tepat waktu; dan (ii) Pemberian reward and punishment sebagai bentuk insentif dan disinsentif sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis akrual. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Pelaksanaan sosialisasi dan bantuan teknis untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual; dan (ii) Penyiapan sistem perencanaan dan penganggaran akuntansi berbasis akrual yang mudah dan aplikatif.
- d. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Penyusunan kebijakan/regulasi/pedoman untuk mendukung pertanggungjawaban APBD tepat waktu; dan (ii) Penerapan reward and punishment untuk mendorong Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

c) Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, arah kebijakannya adalah:

- a. Meningkatkan Belanja Pembangunan untuk menjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Peningkatan proporsi belanja modal; (ii) Pengurangan rasio belanja pegawai terhadap total belanja; (iii) Pengembangan variasi pendanaan untuk belanja infrastruktur di daerah, antara lain melalui skema



hibah, pinjaman, dan skema obligasi; dan (iv) Meningkatkan persentase belanja modal terhadap total belanja daerah.

- b. Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan *e-budgeting*. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Tersedianya dokumen panduan penerapan *e-budgeting*, (ii) Tersedianya sistem aplikasi *e-budgeting* bagi pemerintah daerah; dan (iii) Meningkatkan persentase jumlah daerah yang menerapkan *e-budgeting*.

4. Pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa

Adapun arah kebijakannya adalah penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus bagi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah: (a) Evaluasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus; (b) penyusunan regulasi mengenai otsus/daerah istimewa; (c) Penerbitan regulasi daerah dalam rangka pemantapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik; (d) Penyusunan NSPK dalam rangka penguatan kelembagaan badan percepatan pembangunan kawasan Papua dan Papua Barat; dan (e) Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah otsus/daerah istimewa.

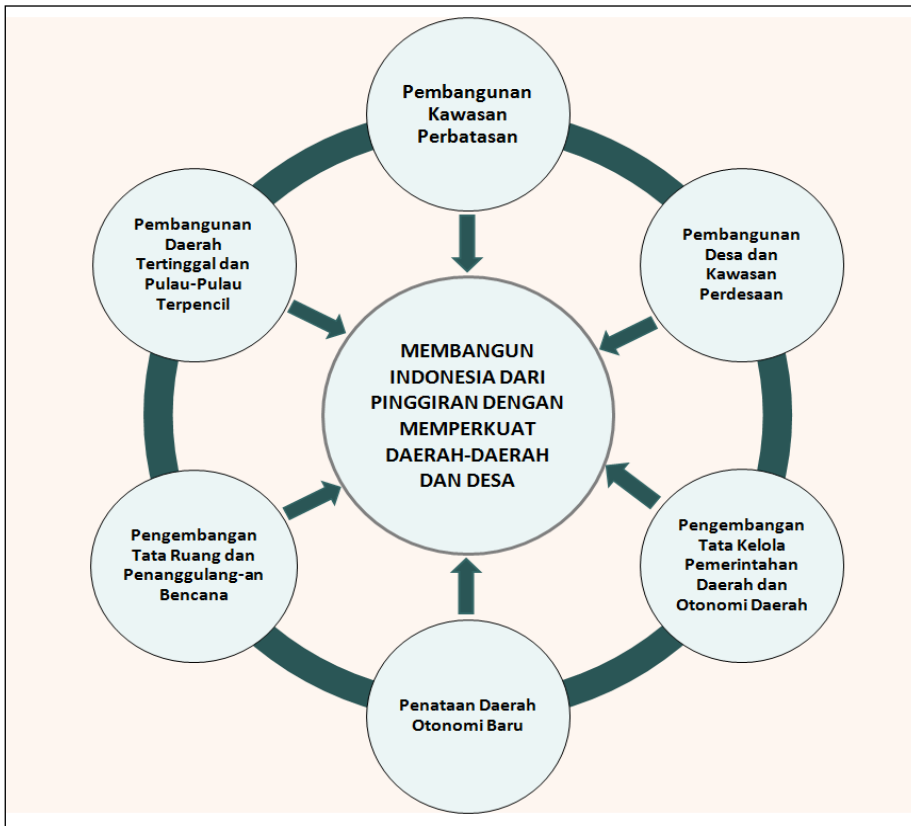
Secara ringkas, Pembangunan Indonesia diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perdesaan/perbatasan/daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil). Atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional).

Sehubungan dengan hal tersebut pembangunan perlu dimulai dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama (a) kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa tertinggal; (d) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik, seperti yang telah diuraikan di atas. Secara konseptual,



pembangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.9.

GAMBAR 1.9.
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA
DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



Sumber : Agenda Prioritas III (NAWA CITA), 2014

1.5. Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah

1.5.1. Sinergi Pusat-Daerah dan Kerjasama Antardaerah

Salah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat dan daerah adalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dirumuskan perlu memperhatikan dan menampung aspirasi daerah, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata di daerah. Selain itu, sinergi kebijakan juga dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu memahami



dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan efisien dan efektif; serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berbagai sumber daya yang tersedia.

Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dan antardaerah diperlukan untuk: (1) memperkuat koordinasi antarpelaku pembangunan di pusat dan daerah; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, baik di Pusat maupun di Daerah; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; serta (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan antara lain: (1) sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD); (2) sinergi dalam penetapan target pembangunan; (3) standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; (4) pengembangan database dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat; (5) sinergi dalam kebijakan perijinan investasi di daerah; dan (6) sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi.

Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipasi semua pelaku pembangunan dan berkembangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

1.5.2. Kerangka Pendanaan

Sinergi Pusat-Daerah dilaksanakan selaras dengan upaya penataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu kebijakan RPJMN 2015-2019 adalah restrukturisasi dan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah termasuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yang secara keseluruhan disebut dana perimbangan (DP); serta dana otonomi khusus (Dana Otsus) untuk menjaga harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.



Dalam lima tahun mendatang pengelolaan dana perimbangan dan dana otonomi khusus diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah; (2) menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) meningkatkan daya saing daerah; (5) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (6) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan (8) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAU langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain adalah untuk: (1) mewujudkan seutuhnya fungsi DAU sebagai *block grant* belanja publik pemda menurut kewenangan; (2) menyusun formulasi DAU secara komprehensif yang mampu menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang keutuhan nasional, serta memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah dengan beban nasional seperti pusat prasarana vital dan strategis, pusat investasi, kawasan hutan lindung dan wilayah perbatasan yang belum diakomodasi dalam aspek legal.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK, langkah yang akan ditempuh Pusat-Daerah antara lain adalah: (1) sinergi perencanaan DAK antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah agar pengelolaan dan pemanfaatan DAK benar-benar mendorong peningkatan pelayanan publik di daerah dan mendukung pencapaian prioritas nasional; (2) memberi kewenangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan DAK sehingga masuk dalam APBD, serta menjamin efektivitas program dan kelancaran pelaporan; dan (3) sinkronisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan kementerian/lembaga agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan DBH dan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemda, langkah yang akan ditempuh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dalam lima tahun mendatang adalah: (1) menjamin keterbukaan informasi dan data dari pusat kepada daerah; dan (2) mempercepat penyaluran DBH sumber daya alam.

Dalam rangka menjamin efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk mencapai prioritas pembangunan nasional, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan meningkatkan



penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka langkah yang akan ditempuh dalam lima tahun mendatang adalah (1) mempertegas kerangka organisasi dan personil pelaksana pemanfaatan dana dekonsentrasi; (2) sinkronisasi perencanaan program antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah; dan (3) penentuan sasaran fungsional program secara bersama.

Selain itu, dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pendanaan pembangunan daerah, maka dapat dilakukan dengan peningkatan Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS), penerbitan obligasi daerah, dan peningkatan kinerja BUMD.

1.5.3. Kerangka Regulasi

Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di daerah baik Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri.

Sinergi pusat dan daerah antara lain dilakukan dengan: (1) konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan peraturan perundangan; (2) pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudah ada; dan (3) fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang bermasalah.

1.5.4. Kerangka Kelembagaan

Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan akan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, upaya yang akan dilakukan dalam lima tahun mendatang diarahkan mempercepat reformasi organisasi perangkat daerah agar mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan mutu dan jangkauan publik pelayanan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, melaksakan kaidah penyelenggaraan pemerintahan



yang baik; serta meningkatkan daya saing daerah. Sementara, upaya peningkatan kapasitas aparatur daerah diarahkan untuk menjadi aparatur yang lebih handal, kompeten dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sinergi Pemerintah Pusat-Daerah yang akan dilakukan dalam lima tahun mendatang adalah: (1) menata dan menyempurnakan pengaturan kewenangan antartingkat pemerintahan sebagai dasar penetapan kinerja dan alokasi anggaran dengan penerapan anggaran berbasis secara bertanggung jawab; (2) mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan daerah otonom dengan tetap mengutamakan harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dan rentang kendali manajemen yang ideal; serta (3) meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah serta kerjasama antardaerah.

Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di daerah baik Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Sinergi pusat dan daerah antara lain dilakukan dengan: (1) konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan peraturan perundangan; (2) pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudah ada; dan (3) fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang bermasalah.



BAB 2

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA

2.1. Capaian Kinerja Saat Ini

- Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Papua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan migas Wilayah Papua selama kurun waktu 2009 – 2013 sebesar 9,6 persen (dengan migas) atau diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Namun demikian, peranan Wilayah Papua dalam pembentukan PDB nasional mengalami penurunan dari 2,0 persen (2009) menjadi 1,6 persen (Triwulan II 2014).
- Pemerintah Provinsi di Wilayah Papua telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret), namun persentase penduduk miskin di Provinsi Papua (30,05 persen) dan Provinsi Papua Barat (27,13 persen) masih berada jauh di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 11,25 persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT), Pemerintah Provinsi di Wilayah Papua juga telah berhasil menurunkan TPT menjadi 3,48 persen (Provinsi Papua) dan 3,70 persen (Provinsi Papua Barat) dan sudah berada di bawah TPT nasional sebesar 5,70 persen (Feb, 2014).
- Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka di Wilayah Papua ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini diindikasikan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua (66,25) dan Provinsi Papua Barat (70,62) masih berada di bawah rata-rata IPM nasional sebesar 73,81 (2013). Namun demikian, dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi telah mengalami peningkatan nilai IPM.
- Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, dari tahun ke tahun di Wilayah Papua mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan (Rasio Gini) menjadi 0,442 (Provinsi Papua) dan 0,431 (Provinsi Papua Barat) dan masih berada di atas rata-rata rasio gini nasional 0,413 (2013). Ke depan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.



2.2. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Wilayah Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan potensi sumber daya alam sangat besar di sektor pertambangan, migas dan pertanian.

- Komoditas sektor pertambangan dan penggalan yang paling dominan adalah minyak, gas, emas, perak, nikel dan tembaga. Pada tahun 2013, sektor pertambangan dan penggalan sudah berkontribusi sebesar 33,56 persen untuk seluruh Wilayah Papua. Kontribusi sektor tersebut di Wilayah Papua terpusat di Provinsi Papua yang menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi sektor pertambangan nasional. Dengan bertumpunya perekonomian Wilayah Papua pada sektor pertambangan dan penggalan menyebabkan fluktuasi pada sektor ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- Wilayah Papua memiliki potensi gas bumi sebesar 23,91 TSCF (*Trillion Square Cubic Feet*) atau sebesar 23,45 persen dari potensi cadangan gas bumi nasional. Sementara itu, cadangan minyak bumi di Wilayah Papua mencapai sekitar 66,73 MMSTB atau sebesar 0,91 persen dari cadangan minyak bumi nasional yang mencapai 7.039,57 MMSTB (*Million Stock Tank Barrels/Cadangan Minyak Bumi*). Cadangan gas bumi terdapat di sekitar Teluk Bintuni. Sementara itu, cadangan migas terbesar terdapat di sekitar Sorong, Blok Pantai Barat Sarmi, dan Semai.
- Emas, perak, dan tembaga merupakan hasil tambang yang sangat potensial untuk dikembangkan di Wilayah Papua karena memiliki lebih dari 45 persen cadangan tembaga nasional yang sebagian eksplorasi dan pengolahannya terpusat di Timika (Kabupaten Mimika). Cadangan bijih tembaga di Wilayah Papua diperkirakan sekitar 2,6 miliar ton. Sementara itu, cadangan logam tembaga hanya sekitar 25 juta ton. Bahan tambang dan galian yang menjanjikan potensi lainnya adalah bijih nikel, pasir besi, dan emas. Bijih nikel terdapat di daerah Tanah Merah, Jayapura. Sebagian besar dari sumber daya tersebut masih dalam indikasi dan belum dieksploitasi. Penambangan pasir besi, bijih tembaga, dan emas berlokasi di tempat yang sama dengan penambangan biji tembaga di Timika.
- Pengembangan MIFEE (*Merauke Integrated Food & Energy Estate*) dialokasikan seluas 1,2 juta Ha yang terdiri dari 10 Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP). Empat Klaster Sentra Produksi Pertanian yang dikembangkan yaitu: Greater Merauke, Kali



Kumb, Yeinan, dan Bian di Kabupaten Merauke. Untuk jangka menengah (kurun waktu 2015 – 2019) diarahkan pada terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, serta perikanan darat di Klaster Okaba, Ilwayab, Tubang, dan Tabonji. Sedangkan untuk jangka panjang (kurun waktu 2020 – 2030) diarahkan pada terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.

- Potensi unggulan pertanian tanaman pangan di wilayah Papua meliputi komoditi padi, palawija dan hortikultura. Tanaman palawija terdiri dari komoditi jagung, ubi kayu, ubi jalar, buah merah kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Sedangkan hortikultura terdiri dari komoditi sayur-sayuran serta buah-buahan. Berdasarkan data BPS tahun 2013, produksi tanaman pangan di Wilayah Papua terdiri dari produksi jagung sebesar 9.107 ton dari luas panen 4.255 ha, produksi padi mencapai 199.362 ton dari luas panen 58.634 ha, produksi kedelai mencapai 5.219 ton dari luas panen sebesar 4.367 ha, produksi kacang tanah mencapai 2.693 ton dari luas panen sebesar 2.551 ha, produksi sagu sebesar 7.319 ton dari luas panen 7.608 ha, dan produksi ubi jalar mencapai 455.742 ton dari luas panen sebesar 34.100 ha (2012), serta ubi kayu yang memiliki produksi mencapai 51.120 ton dari luas panen 4.253 ha.
- Tanaman perkebunan di wilayah Pulau Papua dengan produksi dan luas areal terbesar adalah kelapa sawit, kelapa, coklat, dan kopi. Penyebaran untuk produksi kelapa sawit, kelapa dan kopi terbesar terdapat di Provinsi Papua. Perkembangan perkebunan kelapa sawit cukup tinggi karena ekspansi perkebunan sawit banyak dikembangkan di wilayah Papua. Selain kelapa sawit, produksi perkebunan karet di Wilayah Papua secara keseluruhan cukup besar. Produksi karet di Wilayah Papua mengalami peningkatan selama periode 2009-2013. Pada tahun 2013, produksi karet di Wilayah Papua mencapai 2.308 ton dengan dominasi produksi dari Provinsi Papua sebesar 2.281 ton. Wilayah Papua juga sangat berpotensi untuk menjadi penghasil tebu yang besar karena memiliki lahan untuk produksi tebu terluas di luar Jawa yaitu sebesar 500.000 Ha atau 47 persen dari total lahan tebu di luar Pulau Jawa.
- Sedangkan untuk peternakan besar di Wilayah Papua, jumlah populasi terbesar adalah babi, sapi potong, dan kambing. Sebaran populasi ternak babi terbesar di Provinsi Papua sebesar 577.407



ekor di tahun 2012. Secara umum, jumlah populasi untuk ternak, sebagian besar terdapat di Provinsi Papua dibandingkan di Provinsi Papua Barat.

- Potensi perikanan dan kelautan di Wilayah Pulau Papua sangat melimpah. Wilayah Papua memiliki territorial perairan yang luas sekaligus memiliki potensi berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Papua sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu sektor ini mempunyai peluang yang sangat luas untuk terus dipacu perkembangannya. Sebagian besar produksi perikanan terdiri dari perikanan tangkap laut yang berada di Provinsi Papua. Selain itu terdapat juga potensi perikanan budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung dan sawah (mina padi). Sementara itu, perikanan budidaya laut terbesar terdapat di Provinsi Papua Barat, sedangkan untuk perikanan budidaya kolam terbesar berada di Provinsi Papua.
- Selain pengembangan sektor primer, Wilayah Papua juga memiliki beberapa potensi untuk pengembangan sektor sekunder dan tersier. Di sektor sekunder, untuk meningkatkan nilai tambah sektor unggulan, wilayah Papua memiliki potensi untuk didirikan industri pengolahan sektor unggulan (industri hilir) terutama industri buah merah, kakao dan kelapa, industri pengolahan turunan hasil pertanian dan perikanan serta industri pertambangan, minyak dan gas. Sementara di sektor tersier, dapat dikembangkan sektor pariwisata terutama wisata alam, bahari dan budaya yang merupakan tujuan wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang salah satunya terdapat di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

2.3. Tema Pengembangan Wilayah Papua

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Papua, maka tema besar pembangunan Wilayah Papua sebagai:

- Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
- Percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan parawisata bahari;
- Percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati;



- Percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi, emas, perak, dan tembaga;
- Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon; serta
- Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat;
- Pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Papua yang mandiri, produktif dan berkepribadian.

2.4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Papua

Tujuan pengembangan Wilayah Papua tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Papua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Papua dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah yang berbasis kesatuan adat melalui: (a) pemenuhan kebutuhan dasar dan ketahanan hidup yang berkelanjutan, serta pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat yang terjangkau, berkualitas, dan layak, (b) pengembangan kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis wilayah adat khususnya di Provinsi Papua melalui pengembangan industri kecil dan menengah dibidang pertanian berbasis komoditas lokal, yaitu kakao, kopi, buah merah, karet, sagu, kelapa dalam, kacang tanah, ubi, sayur dan buah-buahan, serta komoditas non lokal yaitu padi, jagung, kedelai, dan tebu; pengembangan perkebunan dan pertanian tanaman non-pangan seperti tebu, karet, dan kelapa sawit; pengembangan peternakan yaitu sapi dan babi, Pengembangan kemaritiman yaitu industri perikanan dan pariwisata bahari; pengembangan potensi budaya dan lingkungan hidup, yaitu pariwisata budaya, cagar alam dan taman nasional; dan pengembangan hilirisasi komoditas minyak, gas bumi dan tembaga. (c) penyediaan infrastruktur yang berorientasi pelayanan dasar masyarakat maupun peningkatan infrastruktur yang berorientasi pengembangan investasi dan pengembangan komoditas, serta (d) peningkatan SDM dan Ilmu dan teknologi secara terus-menerus.

Adapun sasaran pengembangan Wilayah Papua pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Papua, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 kawasan ekonomi



khusus, 1 kawasan industri, pengembangan 5 kawasan adat dan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.

2. Sementara itu, untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Wilayah Pulau Papua, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi 9,5 persen di tahun 2019; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 22,63 persen di tahun 2019; (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar rata-rata 61,40 pada tahun 2019.
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Papua, maka akan dilakukan optimalisasi peran 2 kota otonom berukuran sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer, dan hub untuk Pulau Papua dan Maluku dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara.
4. Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, maka akan dilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 340 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 140 desa.
5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat 4 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
7. Untuk meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah di Wilayah Papua ditunjukkan dengan: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 10 persen untuk propinsi dan 7 persen untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35 persen dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 35 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 provinsi dan 20 kabupaten/kota di wilayah Papua; (4) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50 persen dan S2-S3 sebesar 5 persen; (5) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen



pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Papua sebesar 30 angkatan; (6) Terlaksananya evaluasi otsus dan pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus; (7) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Papua (dengan proyek awal Provinsi Papua); (8) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (9) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 40 persen; (10) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (11) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Papua; (12) Terlaksananya penguatan kelembagaan Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua dan Papua Barat.

8. Sasaran penanggulangan bencana di Wilayah Papua adalah mengurangi Indeks Risiko Bencana pada 10 kabupaten/kota sasaran (Kota Jayapura, Kota Sorong, Kota Manokwari, Kabupaten Merauke, Sarmi, Yapen, Nabire, Raja Ampat, Teluk Bintuni dan Biak Numfor) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKW, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Papua semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Papua terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 1,9 persen (2013) menjadi 2,6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Papua dapat dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3 sebagai berikut.

TABEL 2.1
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PAPUA PER PROVINSI
TAHUN 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Papua Barat	7.9	10.3	14.7	16.4	16.6
Papua	14.1	15.0	16.7	17.6	17.7

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014



TABEL 2.2
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH PAPUA PER PROVINSI TAHUN
2015-2019

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Papua Barat	25.6	23.5	21.4	19.4	17.4
Papua	30.9	28.5	26.1	23.8	21.5

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 2.3
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH PAPUA PER PROVINSI
TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Papua Barat	5.1	4.8	4.6	4.3	4.1
Papua	3.4	3.2	3.1	3.0	2.8

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

2.5. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Papua

2.5.1. Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Kawasan Papua difokuskan pada pengembangan industri/hilirisasi berbasis komoditas unggulan. Percepatan pembangunan kawasan strategis di Wilayah Papua dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah di Wilayah Papua

Kekayaan alam di Wilayah Papua selain sektor tambang dan mineral, sektor pertanian dan perkebunan juga melimpah, dimana potensi ini dapat menjadi sektor yang mempunyai prospek baik untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, dilakukan pemetaan wilayah-wilayah yang akan dijadikan basis industri dengan mempertimbangkan potensi kekayaan alam yang menjadi komoditas unggulan daerah baik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.



a. Provinsi Papua

Wilayah yang potensial untuk dijadikan sentra industri berbasis komoditas unggulan, khususnya untuk Provinsi Papua dengan fokus 5 Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis Wilayah Adat yaitu:

1. KPE Saereri

- Wilayahnya, meliputi: Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen.
- Fokus pengembangan:
 - Peningkatan produktivitas di hulu, meliputi: perikanan laut.
 - Percepatan industrialisasi/hilirisasi, meliputi: Industri Pengalengan, Industri Perikanan Laut, Industri Pariwisata/MICE.

2. KPE Mamta

- Wilayahnya, meliputi: Kabupaten Mamberamo Raya, Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Kota Jayapura.
- Fokus pengembangan:
 - Peningkatan produktivitas di hulu, meliputi: kelapa sawit, cokelat.
 - Percepatan industrialisasi/hilirisasi, meliputi: Industri Kelapa Sawit, Industri Cokelat, Industri Pariwisata Danau Sentani.

3. KPE Me pago

- Wilayahnya, meliputi: Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Mimika.
- Fokus pengembangan:
 - Peningkatan produktivitas di hulu, meliputi: Sagu, Buah Merah, Ubi jalar.
 - Percepatan industrialisasi/hilirisasi, meliputi: Industri Sagu, Industri Buah Merah, Industri Ubi jalar, Industri Pariwisata.

4. KPE La pago

- Wilayahnya, meliputi: Kabupaten Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yalimo, Yahukimo, Puncak, dan Puncak Jaya.
- Fokus pengembangan:
 - Peningkatan produktivitas di hulu, meliputi: Sagu, Buah Merah, Ubi Jalar.



- Percepatan industrialisasi/hilirisasi, meliputi: Industri Sagu, Industri Buah Merah, Industri Ubi Jalar, Industri Pariwisata.

5. KPE Ha'anim

- Wilayahnya, meliputi: Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel.
- Fokus pengembangan:
 - Peningkatan produktivitas di hulu, meliputi: Karet, Tebu, Kelapa Sawit, Padi, Perikanan, Peternakan.
 - Percepatan industrialisasi/hilirisasi, meliputi: Industri Tebu, Industri Kelapa Sawit, Industri Pengalengan Ikan, Industri Pangan, Industri Peternakan.

b. Provinsi Papua Barat

Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis di Provinsi Papua Barat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a) Pengembangan kawasan industri petrokimia;
- b) Pengembangan Industri berbasis migas dan pupuk di Teluk Bintuni;
- c) Peningkatan produktivitas ekspor untuk produk minyak-gas, pengolahan pertambangan mineral, pertanian/ perkebunan, dan hasil laut;
- d) Pengembangan kawasan pertanian di Karas dan Teluk Arguni;
- e) Pengembangan sentra ternak sapi Pola Ranch di Bomberai, Kebar, dan Salawati;
- f) Pengembangan Pala di Fakfak;
- g) Pengembangan sagu rakyat dan investasi industri komoditas sagu di Sorong Selatan;
- h) Pengembangan kawasan wisata bahari terpadu di kawasan Raja Ampat, dan kawasan wisata religi Mansinam;
- i) Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi kecil dan menengah guna mendukung potensi sektor pariwisata, terutama industri kreatif dan makanan olahan khas wilayah Sorong, Manokwari, dan Fak-fak; serta
- j) Pembinaan terhadap mutu produk usaha kecil dan menengah di Kawasan Sorong, Manokwari, dan Fak-fak.



Selain itu, di Provinsi Papua akan dikembangkan pula kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri di lima wilayah adat yaitu Jayapura, Biak, Timika, Wamena, dan Merauke; serta pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya. Sedangkan di Provinsi Papua Barat, akan dikembangkan kawasan ekonomi khusus dengan fokus industri petrokimia, pengembangan industri pengolahan pertambangan mineral, dan kawasan industri Teluk Bintuni. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.

2. Percepatan Penguatan Konektivitas

Peningkatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan-kawasan penyangga sekitarnya meliputi:

a. Provinsi Papua

Kebutuhan infrastruktur konektivitas di masing-masing wilayah adat, adalah sebagai berikut:

KPE Saereri

- 1) Pembangunan ruas jalan, antara lain: Ruas Jalan Sarmi-Ampawar-Barapasi-Sumiangga-Kimibay, Jalan Lingkar Numfor dan Kota Biak, Jalan Strategis penunjang ekonomi Pulau Biak dan Yapen, termasuk penyelesaian jalan sesuai Perpres 40/2012 tentang Pembangunan Jalan Strategis Nasional Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- 2) Mempercepat penyelesaian pembangunan transportasi darat, laut, dan udara, antara lain:
 - a) pengembangan Bandara Internasional Frans Kaisepo di Biak;
 - b) reaktivasi Pelabuhan Biak sebagai pendukung Tol Laut dan pelabuhan internasional;
 - c) Pembangunan Bandara di Yapen Waropen.
- 3) Mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih, listrik, dan telekomunikasi, yaitu:
 - a) pengembangan air bersih DAS Biak Utara dan Supiori;
 - b) PLTA Supiori;
 - c) Sejumlah PLTS yang tersebar di berbagai tempat;
 - d) Pengembangan telekomunikasi Palapa Ring.



KPE Mamta

- 1) Pembangunan ruas jalan, antara lain: Ruas Jalan Depapre-Bongkrang; ruas jalan Warumbaim-Taja-Lereh-Tengon, ruas jalan Jayapura-Wamena-Mulia, jalan ring road Kota Jayapura, termasuk penyelesaian jalan sesuai Perpres 40/2012 tentang Pembangunan Jalan Strategis Nasional Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih, listrik, dan telekomunikasi yang terdiri dari:
 - a) pengembangan air bersih Danau Sentani;
 - b) PLTA Mamberamo;
 - c) PLTA Genyem;
 - d) PLTA Hotekamp;
 - e) PLTS yang tersebar di berbagai tempat;
 - f) pengembangan telekomunikasi Palapa Ring.
- 3) Mempercepat pembangunan transportasi darat, udara, dan laut, yang terdiri dari:
 - a) pengembangan Bandara Internasional Sentani;
 - b) pengembangan Pelabuhan Peti Kemas Depapre;
 - c) pengembangan Pelabuhan Jayapura;
 - d) pembangunan Terminal Tipe A di Kota Jayapura;
 - e) pengembangan Terminal Tipe B di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, dan Kota Jayapura;
 - f) penyelesaian pembangunan Jembatan Holtekamp.

KPE Me Pago dan KPE La Pago

- 1) Mempercepat pembangunan infrastruktur listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang terdiri dari:
 - a) pengembangan air bersih DAS Baliem;
 - b) pengembangan energi listrik dengan mengembangkan PLTA Urumuka, PLTA Baliem, PLTMH yang tersebar di berbagai tempat, dan PLTS yang tersebar di berbagai tempat;
 - c) Pengembangan telekomunikasi Palapa Ring.
- 2) Pembangunan transportasi darat, udara, dan laut yang terdiri dari:
 - a) pengembangan Bandara Internasional Moses Kilangin;



- b) pengembangan Pelabuhan Pomako Timika sebagai hub Tol Laut dan pusat distribusi logistik ke wilayah Pegunungan Tengah;
 - c) pengembangan Bandara Wamena;
 - d) pengembangan Bandara Dekai;
 - e) pengembangan Dermaga Kenyam;
 - f) pengembangan Dermaga Suru-suru;
- 3) Pembangunan jaringan kereta api mulai dari Timika ke Pegunungan Tengah;
 - 4) Pembangunan ruas jalan, antara lain: ruas jalan Sumohai-Dekai-Oksibil-Iwur-Waropko, ruas jalan Enarotali-Tiom, ruas jalan Wamena-Habema-Kenyam, ruas jalan Timika-Potowaiburu-Wagete-Nabire, ruas jalan Yeti-Ubrub, termasuk penyelesaian jalan sesuai Perpres 40/2012 tentang Pembangunan Jalan Strategis Nasional Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - 5) Mempercepat daerah irigasi Nabire yang terdiri dari pengembangan jaringan irigasi dan pengembangan pertanian.

KPE Ha Anim

- 1) Pembangunan ruas jalan, antara lain: ruas jalan Okaba-Sanomere-Bade, ruas jalan Merauke-Okaba-Buraka-Wanam-Bian-Wogikel, ruas jalan Okaba-Kumbe-Kuprik-Jagebob-Erambu, termasuk penyelesaian jalan sesuai Perpres 40/2012 tentang Pembangunan Jalan Strategis Nasional Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- 2) Mempercepat pembangunan transportasi darat, udara, dan laut yang terdiri dari:
 - a) pengembangan Bandara Internasional Mopah;
 - b) pengembangan Pelabuhan Merauke.
- 3) Mempercepat pembangunan jaringan irigasi rawa di Merauke yang terdiri dari:
 - a) pembangunan *long storage*,
 - b) pembangunan bendungan serta embung.
- 4) Mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih, listrik, dan telekomunikasi yang terdiri dari:
 - a) pengembangan air bersih di Kali Maro;



- b) Pembangkit Listrik Tenaga Ombak;
- c) PLTS Makro;
- d) pengembangan Palapa Ring.

b. Provinsi Papua Barat

Kebutuhan infrastruktur konektivitas di Provinsi Papua Barat, adalah sebagai berikut:

- a) Jaringan Jalan akses dari KI Teluk Bituni menuju ke pelabuhan;
- b) Konektivitas Kawasan Industri Arar, Kawasan Peternakan (Salawati, Bomberai, Kebar), dan lumbung pangan Sorong Selatan, yang terhubung dengan Kota Sorong dan Manokwari;
- c) Pengembangan pelabuhan Arar di Sorong;
- d) Pembangunan Dermaga di Teluk Bintuni;
- e) Pembangunan Pelabuhan Seget sebagai bagian dari Tol Laut;
- f) Pembangunan bandara Segun di Kabupaten Sorong;
- g) Penyelesaian pembangunan ruas-ruas jalan strategis nasional sesuai Peraturan Presiden RI No. 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan Strategis Nasional Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- h) Pembangunan jaringan kereta api dari Sorong ke Manokwari;
- i) Peningkatan kualitas jalan dari Manokwari ke Bintuni;
- j) Pembangunan Bandar Udara baru di Kabupaten Fakfak (Bandara Siboru).

3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kapasitas kelembagaan di tingkat pusat maupun di daerah, serta pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dilakukan dengan strategi:

a. Provinsi Papua

Pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi berbasis wilayah adat di Provinsi Papua, dilakukan dengan strategi berikut:

- 1) Pembentukan SDM Unggul, akan dibangun *center of knowledge* yang bertujuan memperkuat penguasaan pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi penduduk Papua khususnya yang berada dalam usia sekolah;



- 2) Penguasaan IPTEK, melalui kerjasama teknis, aliansi strategis dan kerjasama riset, serta pendidikan dan pemagangan dengan Badan Litbang Pemerintah dan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta;
- 3) Pengembangan *technopark* sebagai *center of excellence* pada 5 sektor unggulan, yaitu:
 - a) pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta industri pengolahannya di kawasan adat Ha-Anim;
 - b) pertanian, serta industri pengolahannya perkebunan, dan perikanan serta industri pengolahannya di kawasan adat Saereri;
 - c) pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan pertambangan serta industri pengolahannya di kawasan adat La-Pago;
 - d) pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan pertambangan serta industri pengolahannya di kawasan adat Mee-Pago;
 - e) pertanian perkebunan dan perikanan, serta industri pengolahannya di kawasan adat Mamta.
- 4) Mewujudkan sumberdaya manusia tepat guna sesuai kebutuhan hingga tahun 2025, dalam rangka pencapaian daya saing tinggi;
- 5) Pembangunan dan peningkatan Balai Latihan Kerja di Merauke, Biak, Timika, Nabire dan Jayapura;
- 6) Pembangunan politeknik agroindustri pengembangan komoditas unggulan di masing-masing wilayah adat;
- 7) Pengembangan SMK pertanian, pariwisata, dan pertambangan di Jayapura, Biak, Sarmi, Merauke, Timika, Nabire, dan Wamena;
- 8) Pengembangan riset dan lembaga standarisasi mutu di Biak.

b. Provinsi Papua Barat

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di Provinsi Papua Barat, dilakukan dengan strategi berikut:

- 1) Pembinaan kelembagaan pengelola kawasan untuk mendukung pengelolaan kawasan yang berdaya saing;
- 2) Penguatan kemampuan Pemda dalam menyusun peraturan pemanfaatan lahan ulayat bersama masyarakat adat untuk memberikan kemudahan investasi.



- 3) Penyiapan tenaga kerja berkualitas dengan kompetensi unggulan di bidang industri petrokimia dan pengolahan pertambangan mineral, pertanian, kawasan Arar, kawasan peternakan Bomberai, Kebar dan Salawati;
- 4) Pembangunan *Science Park* berteknologi tinggi sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan;
- 5) Pelatihan dan pendampingan SDM untuk meningkatkan kompetensi untuk mengelola produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan di masing-masing kawasan pengembangan ekonomi;
- 6) Peningkatan kapasitas Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi;
- 7) Pendampingan dalam proses produksi dan manajemen usaha-usaha masyarakat;
- 8) Pembangunan *Technology Park* bidang pangan dan maritim untuk meningkatkan inovasi teknologi;
- 9) Restrukturisasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan pengembangan ekonomi.

4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Dalam upaya pengembangan kawasan strategis di Wilayah Papua diperlukan sinergisasi dan sinkronisasi regulasi melalui strategi berikut:

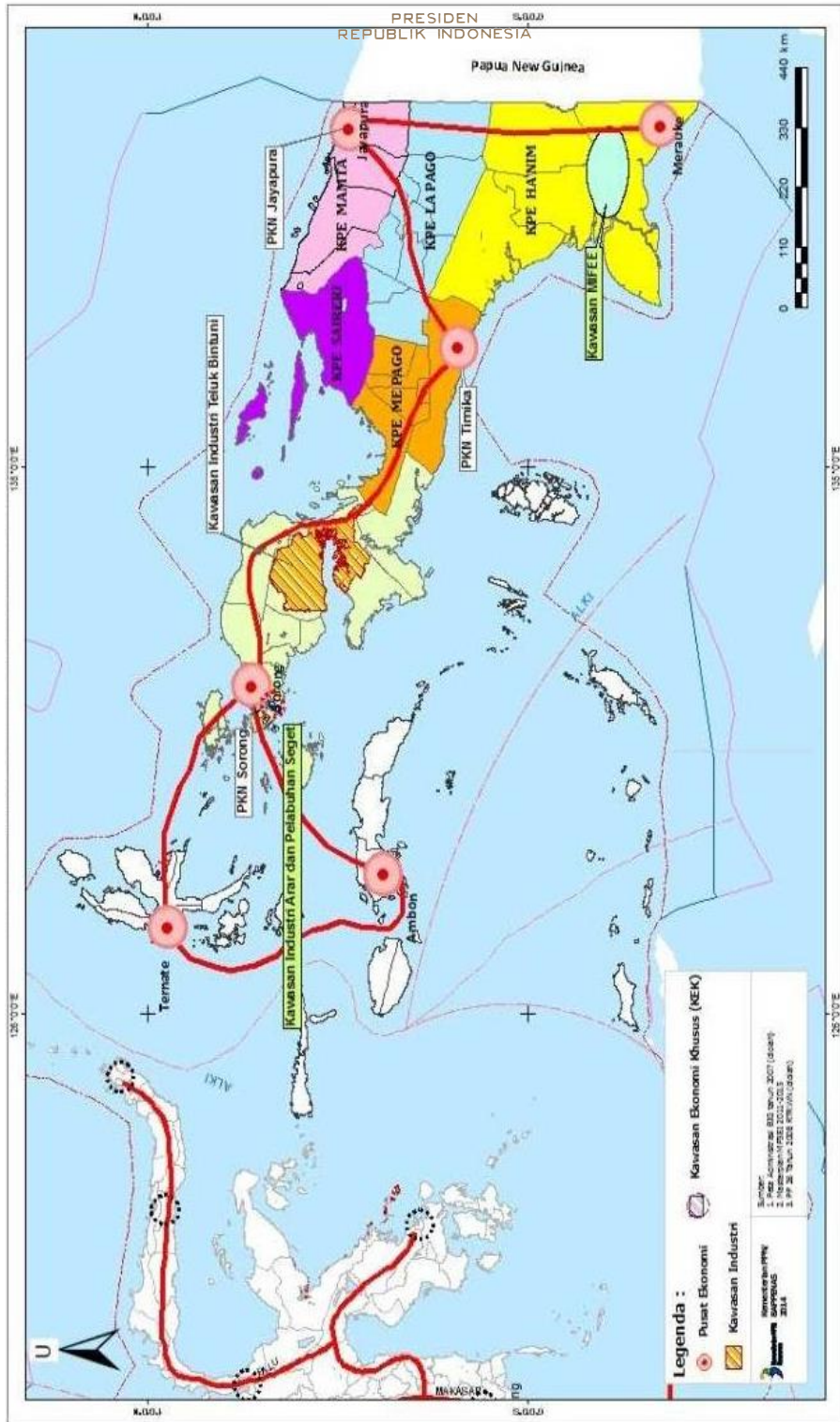
- a) Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal di semua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di KEK;
- b) Regulasi penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri untuk mendorong pengembangan potensi-potensi ekonomi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- c) Regulasi pembangunan kawasan pembangunan ekonomi berbasis wilayah adat;
- d) Penetapan regulasi untuk mengatur pemanfaatan tanah ulayat dalam rangka memudahkan investasi;
- e) Pemetaan dan penegasan batas (deliniasi) hak ulayat khususnya pada kawasan strategis yang dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;



- f) Memfasilitasi terbitnya sertifikasi hak ulayat;
- g) Regulasi pelayanan minimum penyelesaian izin alih fungsi lahan untuk pembangunan fasilitas layanan publik;
- h) Sosialisasi kepada masyarakat adat dan investor terhadap regulasi pemanfaatan lahan ulayat untuk investasi di kawasan MIFEE dan kawasan industri Arar, kawasan peternakan Bomberai, Kebar, dan Salawati;
- i) Pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di bidang perizinan perindustrian, perdagangan, pertanahan, dan penanaman modal di Kawasan MIFEE sebagai KEK, Kawasan Industri Arar sebagai KEK, dan Kawasan Industri di Pulau Papua;
- j) Pelimpahan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait kepada pengelola kawasan strategis nasional dan kawasan-kawasan industri lainnya;
- k) Sosialisasi kepada masyarakat adat terhadap regulasi pemanfaatan lahan ulayat untuk investasi di Kawasan Biak dan kawasan ekonomi berbasis kesatuan adat;
- l) Pelibatan desa dan warga desa pemilik tanah adat sebagai pemegang saham (*shareholdings*) dalam pelaksanaan program-program investasi pembangunan perdesaan; serta
- m) Pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di bidang perijinan perindustrian, perdagangan, pertanahan di Kawasan Biak;
- n) Regulasi pelibatan BUMN dan BUMD dalam pemasaran hasil-hasil produk Papua dan Papua Barat di pasar yang lebih luas.



GAMBAR 2.1.
PETA LOKASI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH PAPUA RPJMN 2015-2019





2.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

2.5.2.1. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Papua diprioritaskan pada percepatan keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa dengan kota, melalui penguatan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) berbasis kewilayahan melalui perwujudan optimalisasi peran 2 kota sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan hub untuk Pulau Papua dan Pulau Maluku dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) serta sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara serta pembangunan 2 kota baru publik dan mandiri sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kawasan perkotaan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan.

Untuk itu, pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Papua juga diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang diprioritaskan pada bidang perdagangan dan jasa, industri, dan pengangkutan intermoda (pembangunan *transshipment point*) untuk meningkatkan konektivitas antara kawasan strategis dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta pembangunan pusat pelayanan administrasi pelintas batas negara.

Percepatan pembangunan kawasan perkotaan di Wilayah Papua dilakukan melalui berbagai strategi, sebagai berikut:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

- a. Mengembangkan 2 kota sedang di pulau Papua, yakni Sorong dan Jayapura dalam rangka mempercepat perannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer, dan hub untuk Pulau Papua dan Pulau Maluku dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional serta sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara;
- b. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan keterkaitan dengan desa-kota sekitar;
- c. Meningkatkan aksesibilitas antar PKN (Timika), PKW (Fak-fak, Manokwari, Merauke), dan PKL (Misool) disekitarnya melalui penyediaan simpul transportasi khususnya simpul transportasi laut dan udara.



- 2. Percepatan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman di Kota Sedang dan Kota Baru Publik Wilayah Papua**
 - a. Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman sesuai dengan peran dan tipologi kota serta kearifan lokal Wilayah Papua;
 - b. Meningkatkan aksesibilitas antar kota melalui penyediaan sarana transportasi khususnya transportasi laut termasuk penyeberangan yang didukung oleh transportasi terpadu dan optimal sesuai dengan tipologi dan kondisi geografis wilayah Papua
 - c. Menyediakan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan serta penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik bagi masyarakat;
 - d. Mengembangkan sarana sosial budaya yang sesuai dengan kearifan lokal;
 - e. Menyediakan dan Meningkatkan sarana ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa serta dapat mendukung pengembangan ekonomi kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar;
 - f. Mendorong berkembangnya industri pengolahan yang didukung oleh Pelabuhan Nasional Sorong dan Jayapura sebagai pusat koleksi dan distribusi di Pulau Papua;
 - g. Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik antar suku.
- 3. Perwujudan Kota yang Berketahanan terhadap Iklim dan Bencana**
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap iklim dan bencana (*urban resilience*);
 - b. Membangun infrastruktur mitigasi terhadap bencana alam yang dapat melindungi aset-aset sosial ekonomi masyarakat khususnya bencana sosial, banjir dan longsor;
 - c. Mengembangkan sistem peringatan dini termasuk petunjuk tindakan yang harus dilakukan pada saat ada peringatan;
 - d. Menerapkan pendekatan lingkungan dalam manajemen sumber daya alam (SDA) untuk mengurangi resiko bencana.
- 4. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan**
 - a. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur pemerintah melalui pendampingan, pembinaan, pelatihan dan penilaian kinerja dalam



- merencanakan, membangun dan mengelola kota berkelanjutan;
- b. Meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah kota melalui pendampingan secara langsung dari pemerintah pusat;
 - c. Membangun pusat data dan informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses;
 - d. Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan pembangunan Kota Berkelanjutan;
 - e. Memperkuat peran lembaga daerah dan masyarakat dalam mitigasi bencana daerah;
 - f. Merevitalisasi kelembagaan di pusat dan daerah untuk Percepatan Pembangunan Kawasan Papua dan Papua Barat.

2.5.2.2. Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, arah kebijakan pengembangan desa (selanjutnya disebut kampung) dan kawasan perdesaan (selanjutnya disebut perkampungan) di Wilayah Papua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana kampung, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan kampung dan kawasan perkampungan diarahkan pula untuk membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perkampungan melalui integrasi perkampungan mandiri pada 4 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.7. Dalam rangka percepatan pembangunan kampung dan kawasan perkampungan termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, serta pulau-pulau kecil terluar di Wilayah Papua akan dilakukan:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Kampung

- a. Mendukung program khusus Gerbangmas Hasrat Papua (Gerakan Bangkit Mandiri Dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua) untuk mempercepat pembangunan di bidang pendidikan dasar, kesehatan yang fokus pada jaminan seribu hari pertama kehidupan, dan perumahan sehat sederhana;
- b. Menyediakan layanan puskesmas keliling dan membangun puskesmas yang memiliki kelengkapan obat-obatan yang cukup;
- c. Meningkatkan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan khususnya di kampung-kampung terpencil;



- d. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, baik darat, air, maupun udara, khususnya pada pembangunan bandara perintis;
- e. Meningkatkan ketersediaan jaringan listrik (tenaga surya, tenaga air, dll) dan jaringan telekomunikasi yang menjangkau kampung terpencil, pulau-pulau, dan kampung perbatasan.

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat kampung

- a. Meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan;
- b. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis lokal melalui pendampingan-pendampingan yang intensif;
- c. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat kampung;
- d. Memberikan program jaminan sosial untuk kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang didukung dengan upaya pemberian jaminan sosial daerah;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi (benih, pupuk, jaringan irigasi, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar), pasca panen, pengolahan, dan pasar kampung;
- f. Mendukung Program Strategis Pengembangan ekonomi dan kelembagaan kampung (PROSPEK) yang berorientasi penguatan ekonomi masyarakat dan kemandirian kampung dengan mengembangkan sistem produksi tanam-petik-olah-jual hasil produksi.

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Keberdayaan, dan Pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Kampung

- a. Menguatkan lembaga adat dan kampung Adat, perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku termasuk hak atas tanah adat/ulayat dan tapal batas Desa Adat melalui pendampingan;
- b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kesehatan, khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal (bidan desa, dukun beranak);
- c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat (termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh lokal) dan kelompok masyarakat (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI) dalam membangun desa melalui penguatan sosial budaya masyarakat;



- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, baik pendidikan formal, maupun pendidikan dan pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan berbasis potensi lokal;
 - e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah dan SDA termasuk pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang berkelanjutan;
 - f. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kebijakan *shareholding* pemerintah, kampung, dan pihak ketiga melalui pendampingan intensif.
- 4. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan**
- a. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa;
 - b. Meningkatkan kapasitas pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan kampung, (ii) Pengelolaan aset dan keuangan kampung, (iii) Pelayanan publik dan administrasi pemerintahan kampung, (iv) Penataan kampung; (v) penyiapan peta kampung dan penetapan batas kampung secara digital;
 - c. Menguatkan pemerintah kampung, masyarakat, dan kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;
 - d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan kampung;
 - e. Fasilitasi pengembangan data dan informasi kampung yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan kampung.
- 5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perkampungan**
- a. Menjamin pelaksanaan redistribusi lahan kepada petani, buruh lahan, dan nelayan (*land reform*);
 - b. Menekan laju alih fungsi lahan pertanian, hutan, dan kawasan pesisir secara berkelanjutan;
 - c. Membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
 - d. Mendorong terlaksananya program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola *shareholding* melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
 - e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan

lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana;

- f. Rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir, daerah aliran sungai, dan pulau-pulau kecil.

6. Pengembangan ekonomi kawasan perkampungan untuk mendorong keterkaitan kampung-kota

- a. Mewujudkan sentra produksi perikanan budidaya di kawasan Samate, P.Rembombo, P.Yefman, P. Matan, P. Senapan, Muara Tami, Muara Heram, dan sentra produksi pertanian padi di kawasan Prafi, Masui, Sidey, Tanah Miring, Kurik, Malind;
- b. Meningkatkan akses masyarakat kampung terhadap modal usaha, pemasaran, dan informasi pasar;
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat kampung terhadap lembaga pendukung ekonomi kampung seperti koperasi, BUMKampung, dan lembaga ekonomi mikro lainnya;
- d. Mengembangkan kerjasama antar daerah, dan antar pemerintah-swasta.

2.5.2.2. Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Papua

Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Papua diarahkan dengan memperkuat sedikitnya 4 pusat pertumbuhan, yaitu kawasan Misool dan sekitarnya (Provinsi Papua Barat), Manokwari dan sekitarnya (Provinsi Papua Barat), Arso dan sekitarnya (Provinsi Papua), serta kawasan Merauke dan sekitarnya (Provinsi Papua). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata (lihat Tabel 2.7). Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Papua adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Papua, pelabuhan Merauke, Selawati dan Saonek (Kab. Raja Ampat), bandar udara Merauke dan Rendani (Kab. Manokwari), serta angkutan sungai yang melayani Kawasan Merauke dan Raja Ampat;
- b. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah;
- c. Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri, dengan prioritas pengembangan PLTU Jayapura-Holtekamp, PLTMG Mobile Manokwari, dan PLTU Andai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. **Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, dan pariwisata.**
 - a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di Kawasan Manokwari, Arso, dan Marauke, serta sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan/kelautan di Kawasan Misool dan Arso;
 - b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat-pusat pertumbuhan dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasarana produksi;
 - c. Mengembangkan daya tarik wisata bahari dan Taman Nasional Laut di Kawasan Pariwisata Raja Ampat dan sekitarnya, melalui peningkatan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas penerbangan menuju ke Sorong-Raja Ampat, pengembangan fasilitas kapal yacht, resort, dan fasilitas wisata olah raga air, dan toko souvenir khas lokal;
 - d. Membangun bank pertanian dan perikanan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan/kelautan.

3. **Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan desa-kota**
 - a. Menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah;
 - b. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektor pertanian dan perikanan;
 - c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus dan kawasan ekonomi terpadu, serta kerjasama di wilayah-wilayah perbatasan.
 - d. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian laut dan pesisir serta mitigasi bencana, terutama di Kawasan Perdesaan Pesisir Misool, Manokwari, Arso, dan Merauke.

Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.4-2.6 berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 2.4
LOKASI PRIORITAS KOTA SEDANG YANG
BERFOKUS PADA UPAYA PEMERATAAN WILAYAH DI PAPUA

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
P1	Sorong (PKN)	Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi pada pengembangan kegiatan industri pengolahan: hasil hutan, bahan tambang dan hasil perikanan serta sebagai Penghubung/Hub Utama untuk Wilayah Papua dan Maluku.
P2	Jayapura (PKN)	Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang difokuskan dalam pengembangan Perdagangan dan Jasa (outlet pemasaran produksi tanaman pangan, hasil hutan, logam, dan perikanan), Industri (pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pertambangan), serta dikembangkan sebagai transshipment point di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pusat pelayanan administrasi pelintas batas negara (perbatasan Indonesia-PNG-Palau).

Sumber : Bappenas, 2014

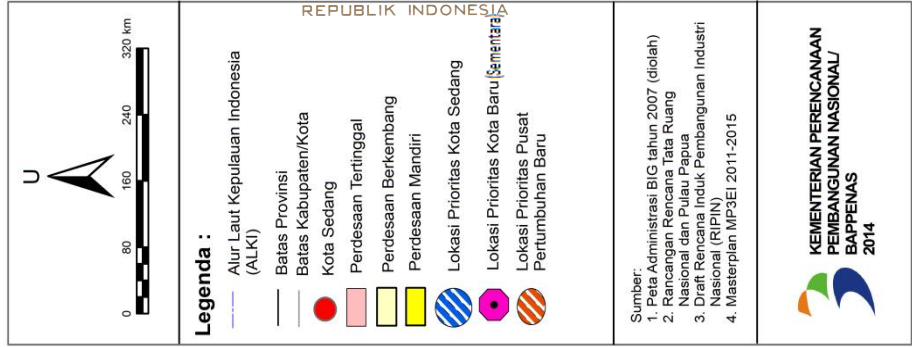
TABEL 2.5
LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BARU PUBLIK YANG MANDIRI
DAN TERPADU DI WILAYAH PAPUA

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
B1	Sorong	Sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (<i>urban sprawl</i>) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya
B2	Jayapura	Sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (<i>urban sprawl</i>) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya

Sumber : Bappenas, 2014; Lokasi Prioritas: Data Sementara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



GAMBAR 2.2.
LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI WILAYAH PULAU PAPUA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 2.6
LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KETERKAITAN DESA-KOTA UNTUK
MEMPERKUAT PUSAT PERTUMBUHAN DI PAPUA

Kode	Lokasi Prioritas	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
D1	Misool dan sekitarnya (Kab. Raja Ampat, Prov. Papua Barat)	Perkotaan Misool Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya: Samate, Pulau Rembombo, Pulau Yefman, Pulau Matan, Pulau Senapan Kawasan Pariwisata: KSPN Raja Ampat Kota Otonom Terdekat : Sorong	Ikan kerapu Rumput laut Wisata Taman Nasional Laut Wisata bahari
D2	Manokwari dan sekitarnya (Kab. Manokwari, Prov. Papua Barat)	PKW Manokwari Kawasan Agropolitan (Padi): Prafi, Masui, Sidey	Padi Kako
D3	Arso dan sekitarnya (Kab. Keerom, Prov. Papua)	PKW Arso Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya: Muara Tami dan Muara Heram. Kota Otonom Terdekat : Jayapura	Jagung Ikan Nila
D4	Merauke dan sekitarnya (Kab. Merauke, Prov. Papua)	PKW dan PKSN Merauke Kawasan Agropolitan (Padi): Tanah Miring, Kurik, Malind KPB Salor Kawasan MIFEE	Padi Kelapa Sawit

Sumber : Bappenas, 2014

2.5.3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan

2.5.3.1. Pengembangan Daerah Tertinggal

Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian

masyarakat yang berbasis potensi lokal: pengembangan industri kecil berbasis komoditas lokal, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari; pengembangan potensi budaya dan keanekaragaman hayati melalui pariwisata budaya dan lingkungan hidup (taman nasional dan cagar alam) yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan terutama pada 21 kabupaten terisolir di Provinsi Papua. Pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelayanan Publik Dasar

Mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

- 1) Pengembangan Kelas Calistung (baca, tulis, dan menghitung) di wilayah terisolir dan wilayah perbatasan dengan penyediaan sekolah kecil, sekolah kecil terintegrasi dan penyediaan guru kunjung melalui proses kerjasama dengan lembaga keagamaan;
- 2) Sekolah Menengah berasrama melalui penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan keahlian profesional di wilayah terisolir dan wilayah Perbatasan, khususnya di wilayah Me Pago, La Pago, Anim Ha;
- 3) Penyiapan sumber daya lokal sebagai kader pendidik di seluruh kampung;
- 4) Pemerataan distribusi tenaga pendidik khususnya di bagian pegunungan tengah dan perbatasan negara;
- 5) Peningkatan program Sarjana Mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SM3T), khususnya untuk penempatan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- 6) Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan khususnya di bagian pegunungan tengah dan perbatasan negara;
- 7) Pemberian tunjangan khusus bagi guru di bagian pegunungan tengah dan perbatasan negara;
- 8) Penyediaan rumah dinas guru dan tenaga kependidikan di wilayah-wilayah terisolir dan perbatasan;
- 9) Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama di daerah terisolir dan perbatasan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10) Pengembangan asrama sekolah khususnya di bagian pegunungan tengah wilayah Papua
- 11) Penyediaan bus sekolah khususnya di bagian pegunungan tengah wilayah Papua;
- 12) Pengembangan pendidikan jarak jauh khususnya di bagian pegunungan tengah wilayah Papua;
- 13) Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C) khususnya di bagian pegunungan tengah wilayah Papua;
- 14) Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untuk daerah tertinggal;
- 15) Penyelenggaraan program PAUD;
- 16) Pengembangan kurikulum untuk meningkatkan kemampuan dasar dan pengembangan minat bakat melalui program olah raga dan kesenian lokal;
- 17) Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan dasar dan penunjang khususnya di bagian pegunungan tengah wilayah Papua.

b. Bidang Kesehatan

- 1) Pemberian tunjangan tenaga kesehatan Ha Anim, wilayah terisolir dan wilayah perbatasan, terutama di wilayah adat La Pago, Mee Pago, Ha Anim;
- 2) Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan, wilayah terisolir dan wilayah perbatasan, terutama di wilayah adat La Pago, Mee Pago, Ha Anim;
- 3) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana kesehatan di wilayah terisolir dan perbatasan, terutama di wilayah adat La Pago, Mee Pago, Ha Anim;
- 4) Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) sebagai tempat pelatihan kepada kader-kader kesehatan di setiap kampung, serta penyediaan energi listrik, air bersih dan sanitasi;
- 5) Pemberdayaan masyarakat sebagai kader kesehatan di setiap kampung;
- 6) Pengadaan sarana kesehatan keliling khususnya di wilayah Saereri dan Mamta;
- 7) Pengadaan sarana kesehatan terapung, diutamakan di wilayah Ha Anim dan Mamta;
- 8) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama terutama di kawasan perbatasan;
- 9) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerah tertinggal dan perbatasan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10) Pengembangan obat-obat tradisional sebagai alternatif pengobatan sesuai dengan budaya dan potensi lokal;
- 11) Pengembangan telemedis khususnya di wilayah terisolir dan kawasan perbatasan;
- 12) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular HIV Aids, TB Paru, dan Malaria melalui sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan Pusat Aids-Tuberculosis-Malaria.

c. Bidang Energi

- 1) Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU dan Biomass khususnya di Kabupaten Yahukimo, Puncak Jaya, Paniai, Pegunungan Bintang, Yalimo, Tolikara, Nduga, Dogiyai, Deiyai, Lanny Jaya, dan kawasan perbatasan;
- 2) Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian 30-60 kWh;
- 3) Penyediaan energi biogas yang ramah lingkungan khususnya di bagian utara dan selatan Papua;
- 4) Penyediaan bahan bakar minyak ke wilayah terpencil khususnya di wilayah pegunungan tengah dan perbatasan;
- 5) Pengembangan Depo BBM di daerah terisolir, khususnya di pegunungan tengah.

d. Bidang Informasi dan Telekomunikasi

- 1) Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi diutamakan untuk menghubungkan wilayah perbatasan, bagian tengah Papua, dan pusat-pusat pertumbuhan;
- 2) Pembangunan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI diutamakan di Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Yalimo, Nduga, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Puncak Jaya, Yahukimo, Maybat, dan Tambraw;
- 3) Pendirian Media Center di setiap SKPD untuk penyebarluasan program dan kebijakan;
- 4) Pengembangan jaringan internet;
- 5) Pengadaan M-PUSTIKA (*Mobile* Pusat Teknologi Informasi Komunitas) berupa kendaraan roda dua dan roda empat.

e. Bidang Permukiman dan Perumahan

- 1) Pembangunan perumahan layak huni khususnya di wilayah terisolir dan perbatasan dalam rangka pemenuhan target 6.000 unit rumah selama 5 tahun;
- 2) Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di seluruh kampung terutama di wilayah terisolir dan perbatasan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3) Perbaiki lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di wilayah pegunungan tengah dan kawasan perbatasan.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana induk dan rencana aksi pengembangan ekonomi berbasis agroindustri berdasarkan *masterplan* pengembangan komoditas, serta menggunakan pendekatan berbasis lima wilayah adat;
- b. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan *Cold Storage* di setiap sentra perikanan;
- c. Penyediaan bibit tanaman agroindustri dan hewan ternak terutama di wilayah pembangunan Ha Anim dan La Pago;
- d. Penyediaan pengolahan limbah agroindustri perkebunan dan peternakan;
- e. Penegakkan imbal jasa lingkungan bagi masyarakat di kawasan konservasi;
- f. Pengembangan pusat informasi dan teknologi, serta pengembangan SDM bagi pelaku usaha khususnya sub-sektor perkebunan dan perikanan laut, kehutanan yang diprioritaskan pada wilayah Mamta dan Saereri;
- g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan tenaga pendamping;
- h. Penurunan biaya distribusi bahan pokok dan melancarkan distribusi kebutuhan bahan pokok;
- i. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pengembangan produk potensial lokal;
- j. Pengembangan jaringan irigasi;
- k. Pembangunan bendungan dan embung sebagai pendukung irigasi;
- l. Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen;
- m. Pengembangan sentra kuliner pengolahan hasil laut di wilayah pesisir;
- n. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan infrastruktur, promosi, dan peningkatan peran masyarakat adat, khususnya di Kabupaten



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak, Biak Numfor, dan Kabupaten Merauke;

- o. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian, museum;
- p. Pembangunan pasar di pusat Ibu Kota Distrik.

3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas

Peningkatan konektivitas di Wilayah Papua difokuskan pada pembukaan keterisolasian wilayah Pegunungan Tengah dan perbatasan dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembuatan sistem konektivitas laut untuk mendistribusikan hasil bumi menuju lokasi di luar kawasan Papua;
- b. Penyusunan masterplan transportasi dengan pemetaan status jalan dan sinergi kewenangan pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka akses seluruh kabupaten dan distrik;
- c. Pengembangan 15 ruas jalan strategis sepanjang 966 Km di Provinsi Papua yang meliputi daerah tertinggal seperti Kabupaten Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yapen, Memberamo Raya, dan Waropen; serta di Provinsi Papua Barat yang meliputi daerah tertinggal tertinggal seperti Kabupaten Tambrauw, Sorong Selatan, Maybrat, dan non tertinggal seperti Kabupaten Manokwari Selatan;
- d. Pembangunan jalan yang menghubungkan kampung-kampung dan distrik yang masih terisolir dan kawasan perbatasan;
- e. Pengembangan bandar udara perintis serta penyediaan pesawat udara perintis di wilayah terisolir dan perbatasan;
- f. Pengembangan pelabuhan, dermaga dan moda transportasi sungai, danau, dan laut sebagai penghubung rute regional dan antarpulau;
- g. Pengembangan terminal dan prasarana penunjang transportasi darat;
- h. Pembangunan sentra logistik;
- i. Pembangunan Pondok Singgah di rute-rute jalan pejalan kaki di wilayah Pegunungan Tengah.

4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Penguatan Kemampuan SDM dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) difokuskan pada afirmasi pendidikan bagi putera puteri asli Papua, peningkatan kapasitas Orang Asli Papua (OAP), serta peningkatan kapasitas aparatur di dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- b. Pemantapan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Papua dan Papua Barat;
- c. Peningkatan kualitas aparatur di tingkat kampung, distrik, dan daerah dalam memberikan pelayanan yang memenuhi SPM;
- d. Peningkatan jumlah dan kapasitas pemerintah daerah dalam monitoring dan evaluasi pencapaian SPM Pelayanan dasar publik di daerah tertinggal;
- e. Pembangunan pusat penelitian dan pengembangan;
- f. Pelatihan ketrampilan bagi peningkatan teknologi tepat guna sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan);
- g. Pengembangan komoditas Unggulan dan potensi (lokal) untuk ketahanan pangan di wilayah Papua;
- h. Afirmasi putera puteri asli Papua dalam pendidikan menengah, afirmasi pendidikan tinggi, dan sekolah kedinasan;
- i. Pengembangan kelembagaan bagi peningkatan kapasitas Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan akses terhadap pusat-pusat kegiatan perekonomian;
- j. Peningkatan kesempatan pemagangan (internship industri mitra) bagi putera puteri asli Papua;
- k. Pengembangan dan peningkatan sarana pendidikan kejuruan dan keterampilan;
- l. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan
- m. Pendirian akademi keperawatan dan kebidanan atau politeknik kesehatan;
- n. Peningkatan kelembagaan pendidikan tinggi bidang pertanian, pariwisata, kelautan, perikanan, pertambangan dan olahan kayu;
- o. Penyediaan guru dengan pola *crash program* bekerjasama dengan LPTK;
- p. Pengembangan pendidikan khusus nonformal bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk menjadi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerahnya;
- q. Perekrutan, penempatan tenaga guru dan tenaga kesehatan (prioritas OAP);
- r. Penyelenggaraan diklat bagi motivator kampung (untuk kemandirian) Pemerintah;
- s. Perekrutan dan penempatan tenaga penyuluh di tingkat kampung;
- t. Pengembangan budaya lokal melalui inovasi dan kreatifitas yang sesuai dengan kearifan lokal, alam, dan lingkungan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- u. Peningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga keagamaan, melalui penyediaan tenaga pelayan keagamaan di daerah terpencil, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang nilai dan norma kehidupan bermasyarakat;
- v. Pembinaan, pemberian teknologi tepat guna, dan peningkatan akses kredit usaha bagi petani, peternak, nelayan, pelaku usaha industri kecil untuk pengelolaan komoditas unggulan di lima kawasan adat Provinsi Papua dan di Provinsi Papua Barat.

5. Penguatan Regulasi dan Insentif

Dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif untuk pengelolaan hasil bumi dan energi dilakukan melalui prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan strategi daerah tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- b. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- c. Pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah Papua yang asimetris;
- d. Pengaturan dan pengelolaan hak ulayat;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antar-SKPD dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah;
- f. Dialog Pembangunan Ekonomi Papua-Jakarta terkait kebijakan pengakuan dan afirmasi potensi ekonomi masyarakat lokal;
- g. Pengaturan Khusus penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mengakomodir hak-hak masyarakat adat di kampung-kampung wilayah Papua;
- h. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal;
- i. Tunjangan khusus penyuluh pertanian.

6. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan

Pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM.

7. Pengembangan Kampung

Mendukung pengembangan kampung sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan adanya pelibatan warga kampung sebagai pemilik tanah

adat dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pembangunan di daerah tertinggal.

8. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat

Pemihakan Regulasi dan Anggaran bagi keberlanjutan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, sesuai dengan kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dengan lima program utama yaitu:

- a. Peningkatan ekonomi lokal;
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan;
- d. Peningkatan infrastruktur dasar;
- e. Pemihakan terhadap Masyarakat Asil Papua.

Lima program utama tersebut didukung oleh tiga program penunjang, yaitu:

- a. Penguatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan;
- b. Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan
- c. Pengembangan kapasitas kelembagaan.

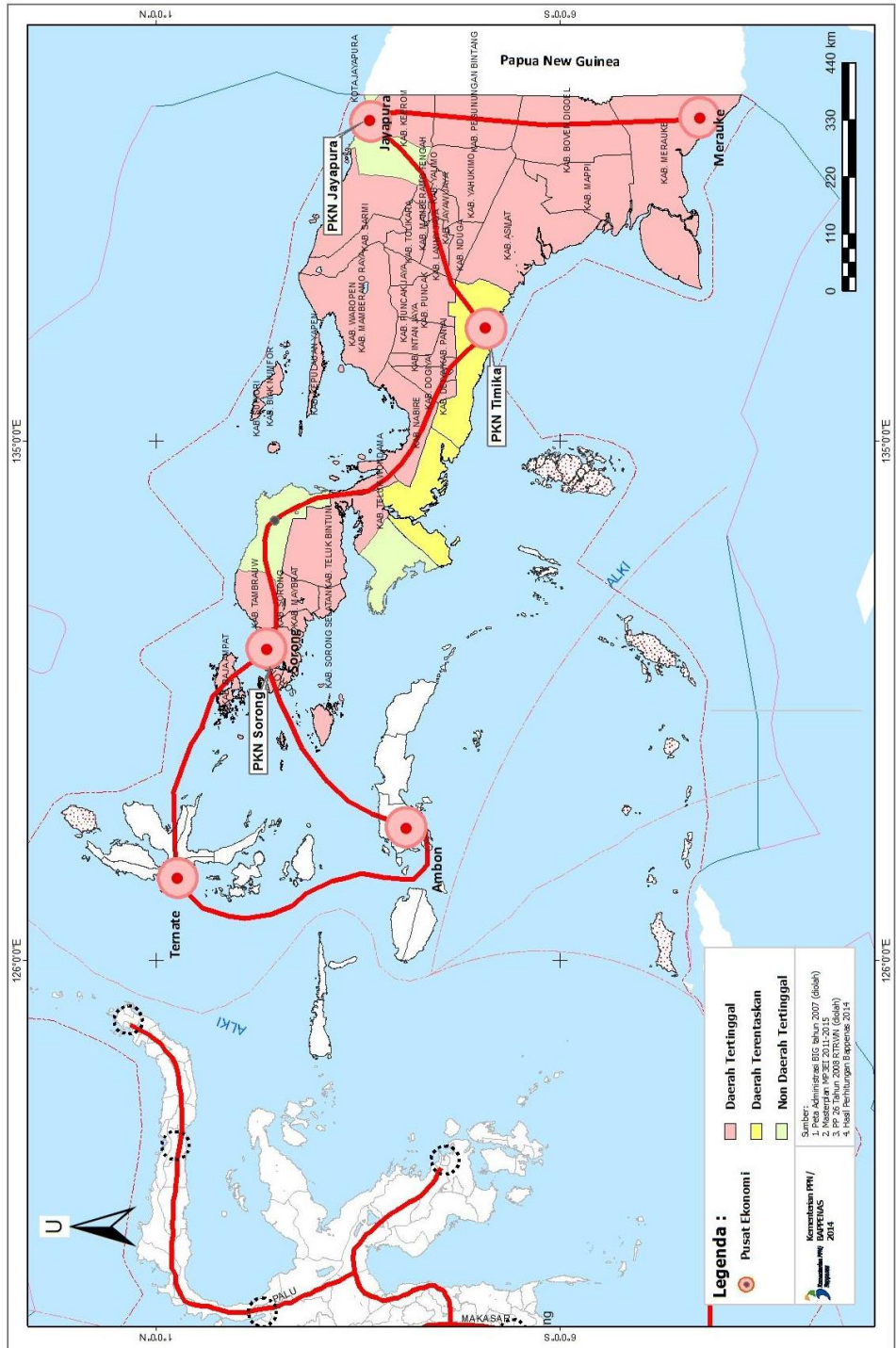
Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Papua terdiri dari 2 provinsi dengan total 42 kabupaten/kota, dimana 83,3 persen atau 35 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini sebesar 60,33, berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 9,07 persen, melampaui target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal wilayah Papua masih sebesar 32,98 persen, jauh dari target Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen.

Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Papua telah ditetapkan 35 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 2 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di wilayah Papua sebanyak 33 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 9 kabupaten tertinggal dapat terentaskan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 2.3.
PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH PULAU PAPUA 2015-2019



TABEL 2.7.
PROFIL DAERAH TERTINGGAL WILAYAH PULAU PAPUA

NO.	KABUPATEN	PENGANGGURAN (%)	PRASARANA JALAN TIDAK MANTAP (%)	ELEKTRIKISASI (%)	DESA PENGGUNA AIR BERSIH UNTUK MINUM/MEMASAK (%)	DESA TIDAK TERJANGKAP SINYAL SELULER (%)	DESA TIDAK TERJANGKAP INFORMASI DAN KOMUNIKASI (%)	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TH)	SARANA FISIK		RATA-RATA JARAK PUSKESMAS (km)	RATA-RATA JARAK PUSKESMAS PEMBANTU (km)	KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN				RATA-RATA JARAK PRAKTEK BIDAN (km)	RATA-RATA JARAK PRAKTEK DOKTER (km)	RATA-RATA JARAK PRAKTEK BIDAN (km)	Jumlah APARATUR DAERAH (D/S1 (%))	D/S1 (%))	S2/S3 (%)	AKSESIBILITAS SARANA PEMERINTAHAN		RATA-RATA JARAK KE KANTOR KABUPATEN (km)	RATA-RATA JARAK PASAR (km)	AKSESIBILITAS FISIK (RATA-RATA JARAK LEMBAGA KEUANGAN (BANK UTM) (km))	
									RATA-RATA JARAK SD (km)	RATA-RATA JARAK SMP (km)			RATA-RATA DOKTER/KECAMAATAN	RATA-RATA BIDAN/DESA	RATA-RATA KETERSEDIAAN PARAMEDIS/KECAMAATAN	RATA-RATA JARAK KE KANTOR KEKAMATAN (km)							RATA-RATA JARAK KE KANTOR KEKAMATAN (km)					
A	PAPUA BARAT	9,27	76,82	66,04	68,66	83,34	96,32	7,70	13,94	28,77	27,27	32,99	0,75	0,37	6,78	80,78	84,56	90,41	3,34	6,05	0,20	19,86	54,10	68,9	43,15	48,9	63,9	43,15
1	KAMIANA *	16,8	96,03	68,25	64,60	83,72	96,51	8,39	9,99	31,92	30,82	16,53	2,14	0,44	18,14	61,99	65,01	91,60	3,21	4,56	0,63	26,70	63,19	68,4	51,11	66,4	63,19	40,47
2	TELUK WONDAMA	11,06	99,17	40,20	82,04	88,16	86,84	7,62	6,42	15,71	15,10	12,22	1,00	0,47	6,69	99,80	99,80	95,97	2,12	1,92	0,00	9,01	53,65	66,4	40,47	66,4	53,65	40,47
3	TELUK BINTUNI	9,34	98,66	88,96	74,15	82,89	99,34	7,22	14,27	28,70	31,61	35,43	0,75	0,43	6,83	92,90	94,44	87,23	4,22	8,43	0,12	9,39	52,09	71,3	61,46	71,3	52,09	49,02
4	SORONG SELATAN	14,48	82,61	56,21	79,57	80,67	100,00	8,10	4,79	18,74	16,00	34,88	0,38	0,32	6,85	57,70	85,46	85,88	5,65	8,29	0,19	11,78	29,86	54,7	49,02	54,7	29,86	49,02
5	SORONG	3,35	29,16	85,41	71,00	66,87	90,36	8,19	22,13	31,22	19,87	33,20	0,47	0,47	7,74	62,04	57,88	89,15	3,75	6,95	0,14	25,78	95,12	66,4	37,25	66,4	95,12	37,25
6	RAJA AMPAT	5,79	92,49	71,10	38,33	75,83	97,50	7,64	6,49	17,01	25,49	22,46	0,63	0,39	4,71	87,25	84,02	95,18	2,29	2,34	0,20	36,67	47,29	68,5	29,44	68,5	47,29	29,44
7	TAMBORA'W	5,71	100,00	63,38	72,97	94,00	100,00	5,83	41,17	70,40	61,36	81,53	0,57	0,22	1,71	97,77	95,99	94,71	2,40	2,88	0,00	28,49	28,12	85,8	11,21	85,8	11,21	
8	MAYBRAT	7,63	16,48	54,82	66,63	94,57	100,00	8,64	6,26	16,45	19,87	27,64	0,08	0,19	1,54	86,78	93,88	83,60	3,05	13,03	0,32	11,07	63,51	50,2	65,26	50,2	63,51	65,26
B	PAPUA	3,33	61,60	37,89	45,61	83,35	95,81	5,13	28,67	33,43	33,06	33,91	1,58	0,56	9,35	72,94	77,33	91,81	2,61	5,29	0,29	19,01	57,95	47,5	70,87	47,5	57,95	70,87
9	MERAUKE	3,73	70,98	89,54	54,04	69,64	80,36	9,47	19,02	32,08	37,75	8,29	2,90	0,96	6,05	80,43	70,91	88,8	2,8	8,0	0,4	25,81	137,65	76,1	58,84	76,1	137,65	58,84
10	JAYAWIJAYA	2,46	19,91	30,63	67,14	76,76	98,94	5,32	3,26	9,23	8,28	8,42	0,65	0,46	5,59	27,35	99,20	81,86	6,43	11,57	0,14	4,52	21,96	13,1	28,16	13,1	21,96	28,16
11	NABIRE	3,27	42,13	91,12	74,93	66,67	81,48	7,33	82,08	49,11	32,53	16,25	1,71	1,17	13,00	55,59	53,33	85,57	4,62	8,98	0,83	29,70	1,80	64,9	82,13	1,80	64,9	82,13
12	KEPULAUAN YAPEN	4,95	56,01	59,67	59,96	65,77	91,89	6,76	11,04	14,44	14,58	9,55	1,43	0,65	14,29	27,07	26,83	87,02	4,25	8,49	0,24	8,31	3,23	17,8	27,94	17,8	3,23	27,94
13	BAK NUFOR	4,88	78,86	95,25	44,77	76,47	84,49	9,67	1,22	4,79	7,65	8,55	1,11	0,61	8,84	50,11	49,36	85,28	4,36	9,28	1,08	7,28	6,78	22,2	34,85	6,78	22,2	34,85
14	PANIAI	1,21	99,26	26,87	35,06	71,43	97,14	6,23	22,12	16,96	16,71	61,66	1,30	0,53	6,10	30,24	88,99	87,88	2,01	9,11	1,01	8,23	10,81	36,0	26,48	10,81	36,0	26,48
15	PUNCAK JAYA	22,27	56,34	6,65	17,38	96,69	100,00	6,13	12,43	24,22	33,68	42,31	9,13	0,54	16,75	69,76	68,96	84,11	2,05	12,74	1,10	14,59	4,73	48,7	81,49	4,73	48,7	81,49
16	MIMIKA *	3,24	66,48	88,72	87,30	67,06	98,82	6,94	5,04	23,13	23,13	34,98	4,58	0,86	12,83	62,66	62,67	89,84	2,66	7,40	0,10	21,25	2,95	49,2	54,59	2,95	49,2	54,59
17	BOVEN DIGOEL	-	98,12	73,98	69,96	90,00	99,09	3,65	25,56	51,81	35,59	46,04	0,85	0,65	7,05	88,96	83,14	89,91	2,81	7,28	0,00	19,40	115,05	57,9	104,18	115,05	57,9	104,18
18	MAPPI	-	93,37	18,69	46,97	73,72	99,27	4,37	79,54	68,74	60,18	54,91	2,30	0,50	12,50	94,33	84,65	94,56	1,50	3,94	0,00	43,82	132,15	73,7	78,42	132,15	73,7	78,42
19	ASMAT	0,29	19,49	9,57	78,94	86,33	99,28	4,44	45,33	52,98	48,65	50,98	3,63	0,81	13,63	92,37	90,60	96,46	1,02	2,18	0,34	51,63	132,23	98,2	59,20	132,23	98,2	59,20

LANJUTAN...

NO.	KABUPATEN	PENGANGGURAN (%)	PRASARANA JALAN TIDAK MANTAP (%)	ELEKTRIKIFIKASI (%)	DESA PENGUNTA AIR BERSIH UNTUK MINUM/MEASUK (%)	KETERSEDIAAN SARANA DAN INFORMASI KOMUNIKASI	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TH)	SARANA FISIK PENDIDIKAN (%)		RATA RATA JARAK PUSKESMAS (km)	RATA RATA JARAK PUSKESMAS PEMBANTU (km)	KETERSEDIAAN KESEHATAN				JUMLAH APARATUR DAERAH BERDASARKAN PENDIDIKAN				AKSESIBILITAS KE SARANA FISIK KEGIATAN EKONOMI			
								RATA-RATA JARAK SD (km)	RATA-RATA JARAK SMP (km)			RATA-RATA DOKTER/KECAMATAN	KETERSEDIAAN BIDAN/DESA	RATA-RATA KETERSEDIAAN (OKTUBIDA N/PARAMEDIS)	PRAKTER DOKTER (km)	PRAKTER BIDAN (km)	RATA-RATA JARAK KE KANTOR KECAMATAN (km)	RATA-RATA JARAK KE KANTOR KABUPATEN (km)	RATA-RATA JARAK PASAR (km)	RATA-RATA JARAK LEMBARA KRUANGAN (km)			
20	YAHUKIMO	1.09	67.85	2.78	33.11	96.14	99.81	2.93	18.31	53.07	68.32	32.32	0.39	0.13	4.59	90.10	90.71	92.83	3.72	2.98	0.47	66.3	92.07
21	PEGUNUNGAN BINTANG	-	89.42	8.99	39.71	94.26	97.95	2.62	70.48	75.31	72.51	70.71	0.27	0.12	2.30	93.02	91.69	94.29	1.54	3.62	0.55	87.8	81.74
22	IOLIKARA	0.44	82.34	2.32	3.14	82.05	99.61	3.48	43.02	66.73	74.35	59.05	0.30	0.35	3.42	99.09	99.06	93.69	2.45	3.86	0.00	89.2	87.61
23	SARMI	5.28	8.28	77.69	63.27	84.88	100.00	7.02	11.18	20.52	27.42	24.48	0.50	0.28	5.40	62.77	62.94	91.42	3.56	5.02	0.00	22.94	97.27
24	KEEROM	3.14	51.22	86.48	87.82	59.02	63.30	7.45	26.53	27.68	19.50	16.68	3.14	0.64	21.71	49.25	71.23	95.07	2.10	2.83	0.00	19.34	86.52
25	WAROPEN	-	87.55	62.46	72.91	78.16	96.55	6.56	59.47	39.27	41.90	38.34	0.10	0.36	9.30	60.49	69.91	87.25	4.75	8.00	0.00	14.42	69.08
26	SUPORI	2.61	55.27	39.98	69.39	86.84	100.00	8.15	1.00	8.79	17.53	5.53	0.40	0.45	6.00	96.10	96.07	96.14	1.66	2.21	0.00	10.12	31.63
27	MAMBERAMO RAYA	-	47.92	25.91	62.78	87.18	100.00	5.21	56.02	66.22	58.08	52.82	2.20	0.03	8.80	99.80	99.80	95.22	2.56	2.22	0.00	56.93	83.73
28	NDUGA	1.13	100.00	1.86	11.07	100.00	100.00	2.82	12.74	28.60	9.53	17.13	1.00	0.44	12.00	86.81	99.80	96.06	2.71	0.00	0.63	10.06	41.69
29	LANNY JAYA	1.05	55.67	2.01	5.79	93.01	100.00	3.75	5.04	7.91	9.52	32.64	0.20	0.60	12.70	71.80	95.23	92.48	0.57	6.95	0.00	7.05	30.70
30	MAMBERAMO TENGAH	0.15	100.00	14.36	0.15	89.83	100.00	2.94	13.66	19.98	13.51	18.20	1.80	1.02	26.80	81.94	94.92	94.91	0.00	5.09	0.00	16.45	61.42
31	YALIMO	0.53	20.69	30.41	41.42	96.30	100.00	2.85	33.40	26.80	28.89	16.93	1.60	0.93	6.00	90.05	90.05	96.41	2.73	0.87	0.00	12.03	48.71
32	PUNCAK	-	97.33	2.36	17.80	98.75	100.00	2.86	19.37	22.82	41.17	54.37	0.25	0.38	4.63	62.67	62.67	100.00	0.00	0.00	0.00	9.41	33.11
33	DOGIYAI	6.87	11.10	31.62	20.50	69.62	100.00	4.17	28.04	28.68	28.46	51.34	0.20	0.22	4.00	76.36	88.04	96.66	2.40	0.94	0.00	16.29	60.51
34	INTAN JAYA	0.51	17.65	1.30	19.27	97.30	100.00	2.30	31.50	37.24	53.09	58.72	0.33	0.08	2.33	70.56	66.64	89.47	2.92	7.60	0.00	23.06	52.43
35	DEIYAI	0.81	70.00	41.86	47.01	96.67	100.00	2.97	38.71	25.50	10.06	24.41	0.40	1.40	5.80	99.80	30.57	95.08	2.27	1.64	1.01	8.98	24.84
	RATA RATA WILAYAH	6.30	69.2	44.33	50.88	83.35	95.93	5.71	21.31	31.10	30.16	33.45	1.17	0.46	8.06	76.86	80.95	91.11	2.97	5.67	0.25	19.44	56.03
	RATA RATA DATANG	5.41	55.41	76.88	55.58	47.97	78.18	7.17	13.5	13.43	14.22	12.96	8.77	1.06	39.58	34.00	34.36	92.28	2.48	5.02	0.22	12.61	53.97
	RATA RATA NASIONAL	7.24	48.78	83.18	66.55	32.11	48.63	7.9	8.73	7.97	8.91	7.6	11.2	1.12	37.46	18.51	16.69	89.85	3.03	6.70	0.42	10.32	48.25

Sumber: BPS 2012, Polek 2011
 Keterangan: *) 70 Kabupaten terentaskan (menurut Kepmen PDT No. 141 Tahun 2014 tentang Penerapan Kabupaten Daerah Terintegrasi yang Terentaskan Tahun 2014

2.5.3.2 . Pengembangan Kawasan Perbatasan

Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Papua difokuskan untuk meningkatkan peran kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara tetangga Papua Nugini di perbatasan darat dan terhadap negara Australia di perbatasan laut. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Papua diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Papua, yaitu PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, PKSN Merauke, serta serta mempercepat pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun 2015-2019.

Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat, yang dilakukan melalui:

1. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, pengamanan kawasan perbatasan Papua.

Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, pengamanan, dan kawasan perbatasan secara terpadu di Wilayah Papua, dilakukan dengan:

- a. Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu (satu atap) di PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke;
- b. Perbaikan aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan, khususnya sepanjang perbatasan darat Papua dengan PNG;
- c. Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara di PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke;
- d. Perkuatan fungsi pengamanan perbatasan wilayah darat (khususnya untuk daerah perbatasan RI-PNG yang memiliki topografi sulit), sungai, dan laut, baik penyediaan alutsista maupun non alutsista;
- e. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Fani, Pulau Fanildo, dan Pulau Bras dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan;
- f. Menjalin kerjasama pengamanan dan pertahanan kawasan perbatasan negara antara RI-PNG;
- g. Sosialisasi batas wilayah darat, sungai, dan batas wilayah laut RI-PNG kepada masyarakat perbatasan Wilayah Papua, serta

pelibatan peran serta masyarakat dalam menjaga pertahanan dan keamanan di perbatasan;

- h. Pengembangan standar operasional prosedur (SOP) pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparaturnya.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal.

Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasan perbatasan negara di Wilayah Papua, dilakukan dengan:

- a. Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian pangan dan perkebunan untuk kebutuhan lokal dan melayani negara Papua Nugini di PKS N Merauke, PKS N Tanah Merah, dan PKS N Jayapura, serta pengembangan Oksibil dan Arso sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya;
- b. Pengembangan kawasan agropolitan di 3 (tiga) Pusat Kegiatan Strategis Nasional di PKS N Jayapura, PKS N Tanah Merah, dan PKS N Merauke, serta pengembangan Arso sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas *supply* hasil perikanan dan kelautan melalui pengembangan sarana dan prasarana pengolahan untuk mencukupi kebutuhan lokal dan negara tetangga di Kepulauan Ayau, PKS N Jayapura, dan PKS N Merauke;
- d. Peningkatan nilai potensi pariwisata alam, budaya, dan sejarah melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi dalam dan lintas negara dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata) di Kepulauan Ayau, PKS N Merauke, dan PKS N Tanah;
- e. Pengembangan pusat perdagangan skala internasional berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara tetangga serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisional dititik lintas batas (Papua Nugini) di PKS N Jayapura, PKS N Tanah Merah, dan PKS N Merauke;
- f. Pengembangan balai-balai latihan kerja untuk meningkatkan mengelola komoditas unggulan lokal yang berorientasi pasar ke negara tetangga di kawasan perbatasan Papua dan Papua Barat;
- g. Pengembangan Kawasan Perdagangan Internasional Skouw Kota Jayapura;
- h. Pengembangan komoditi perkebunan rakyat yang sesuai dengan agroekosistem dan kearifan lokal Papua/Papua Barat berupa kopi, kakao dan pala.

3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas

Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan baik ke pusat pertumbuhan maupun konektivitas dengan negara tetangga Papua Nugini dan Australia, yang dilakukan dengan:

- a. Pembangunan ruas jalan strategis Waropko-Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang;
- b. Pembangunan jalan non status pembuka akses menuju kampung, desa-desa di Kecamatan Lokpri;
- c. Peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokpri dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi;
- d. Peningkatan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk di Wilayah Papua, khususnya di Kepulauan Ayau dan Supiori, serta konektivitasnya dengan sistem transportasi laut nasional dan internasional;
- e. Pengembangan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di Kepulauan Ayau dan Supiori;
- f. Penjaminan ketersediaan logistik, khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
- g. Pengembangan pusat pelayanan transportasi sungai, laut, dan udara internasional di PKSN Jayapura, PKSN Merauke, PKSN Tanah Merah;
- h. Penyediaan infrastruktur dasar kewilayahan terutama jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri).

4. Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di kawasan perbatasan negara di Wilayah Papua, yang dilakukan dengan:

- a. Pengembangan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumberdaya lokal (pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, dan pertambangan) di kawasan perbatasan Papua dan Papua Barat;
- b. Pengembangan sekolah bertaraf internasional, serta berasrama di Kawasan Perbatasan Keerom, Boven Digoel, dan Merauke;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Peningkatan akses pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, khususnya di distrik-distrik terdepan dan terisolir dengan penyediaan sarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah untuk meningkatkan SDM penduduk yang berkualitas;
- d. Peningkatan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handal, serta penyediaan insentif, serta sarana prasarana penunjang yang memadai khususnya di Distrik-Distrik terdepan dan terisolir;
- e. Peningkatan kapasitas aparatur wilayah perbatasan melalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar dan pelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuan Pmerumuskan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan;
- f. Pengembangan teknologi tepat guna dalam menunjang pengembangan kawasan perbatasan di Wilayah Papua.

5. Penguatan Regulasi dan Insentif

Dalam upaya mendukung keberpihakan pembangunan kepada pengembangan kawasan perbatasan. Maka, harmonisasi regulasi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Akses masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk memanfaatkan sumber daya alam bukan kayu yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung;
- b. Regulasi pengelolaan lintas batas;
- c. Regulasi Perdagangan lintas batas, Perjanjian kerjasama antara RI-Australia, maupun RI-Papua *New guinea* dalam pengembangan kawasan perbatasan negara;
- d. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan;
- f. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- g. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;
- h. Pemberian kewenangan khusus bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik;
- i. Penyusunan detail tata ruang kawasan perbatasan di Papua dan Papua Barat;
- j. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara.

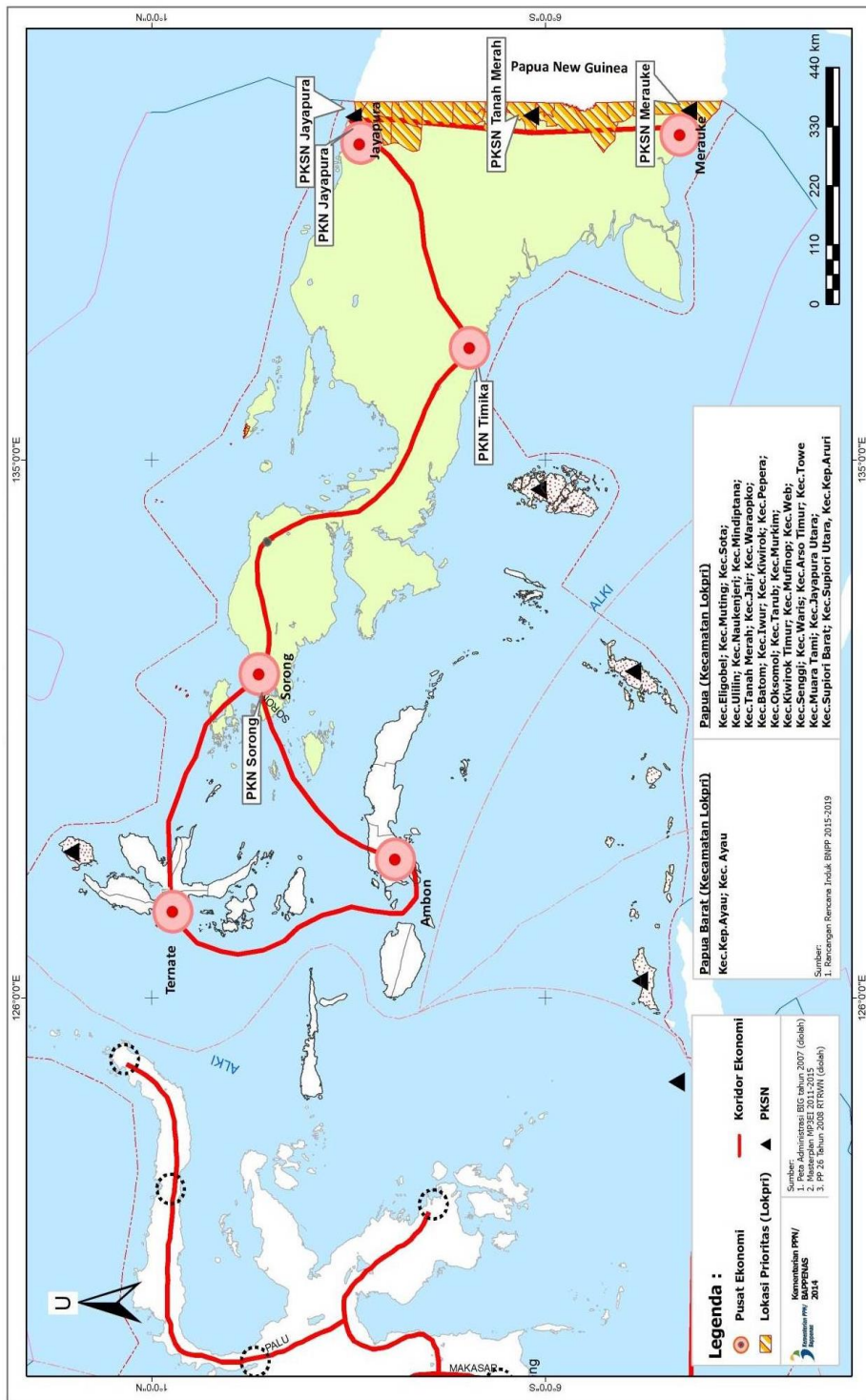
Adapun sebaran lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.4.

TABEL 2.8.
DAFTAR LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
WILAYAH PAPUA

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan Lokasi Prioritas
1	Kab. Merauke	Eligobel, Muting, Sota, Ulilin, Naukenjeri
2	Kab. Boven Digoel	Mindiptana, Tanah Merah, Jair, Waraopko
3	Kab. Pegunungan Bintang	Batom, Iwur, Kiwirok, Pepera, Oksomol, Tarub, Murkim, Kiwirok Timur, Mufinop
4	Kab. Keerom	Web, Senggi, Waris, Arso Timur, Towe
5	Kota Jayapura	Muara Tami, Jayapura Utara
6	Kab. Supiori	Supiori Barat, Supiori Utara, Kep.Aruri
7	Kab. Raja Ampat	Kep. Ayau, Ayau

Sumber : Bappenas, 2014

**GAMBAR 2.4.
PETA SEBARAN PRIORITAS (LOKPRI) KAWASAN PERBATASAN WILAYAH PULAU PAPUA 2015-2019**



2.5.4 Penanggulangan Bencana

Wilayah Papua yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan pertemuan dari tiga lempeng aktif (Lempeng Pasifik, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Filipina) sehingga rawan terhadap bencana gerakan tanah dan gempa bumi. Daratan Provinsi Papua merupakan daratan yang terbentuk akibat pergerakan aktif antara lempeng pasifik dan Indo-Australia yang menyebabkan banyak terdapat patahan aktif dan gunung-gunung, Di bagian utara wilayah Provinsi Papua Barat terdapat patahan yang paling aktif di Indonesia, yaitu patahan Sorong sehingga di wilayah Provinsi Papua Barat sering mengalami gempa bumi.

Jenis ancaman bencana yang dominan di pulau Papua adalah banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Indeks Risiko Bencana yang tinggi di Wilayah Papua dapat disebabkan tingkat ancaman (*hazard*) yang tinggi, tingkat kerentanan sedang bila dinilai dari potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian fisik (*exposures*) dan tingkat kapasitas rendah di bidang kelembagaan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Berdasarkan DIBI yang merekam kejadian bencana 1815-2014, berbagai kejadian bencana di Pulau Papua telah mengakibatkan 1.965 orang meninggal dunia, 4.584 orang luka-luka, 6.371 orang hilang, 100.189 orang mengungsi dan 10.522 rumah yang hancur/rusak.

Dalam mendukung pengembangan wilayah Papua, maka arah kebijakan penanggulangan bencana di Wilayah Papua diarahkan untuk mengurangi indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki indeks risiko tinggi bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, melalui:

- a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
- b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 untuk kota sasaran.
- c. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review rencana tata ruan provinsi/kabupaten/kota.

- d. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).
- e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah.
- f. Penyusunan rencana kontinjensi bencana alam banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi penanganan darurat bencana.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:

- a. Penguatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana di Kota Sorong, Jayapura, Manokwari, Kabupaten Nabire, Merauke, Sarmi, Teluk Bituni dan Raja Ampat.
- b. Perbaikan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam di Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Yapen dan Waropen dan pasca bencana alam lainnya.
- c. Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana.
- d. Mendorong dan menumbuhkan kearifan lokal masyarakat Papua untuk pengurangan risiko bencana.

3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, melalui:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana daerah.
- b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, banjir di Sorong, Manokwari, Nabire dan Sarmi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.
- c. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana.
- d. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kota Sorong, Jayapura, Manokwari, Kabupaten Nabire, Merauke, Sarmi, Teluk Bintuni dan Raja Ampat.
- e. Pembangunan pusat logistik kebencanaan di Wilayah Papua, yang dapat menjangkau wilayah terpencil.
- f. Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana di daerah.
- g. Melaksanakan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana di Sorong, Manokwari, Nabire, Teluk Bituni, Teluk Wondama dan Sarmi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 2.9.
PROFIL KERAWANAN DAN RISIKO BENCANA
PADA PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PAPUA

Lokasi	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Index Multi Risiko (IRBI 2013)
Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi lainnya di Papua	Kab. Biak Numfor Tinggi untuk banjir, longsor, tsunami Kab. Kep. Yapen tinggi untuk longsor, gempabumi Kab. Mimika tinggi untuk banjir, longsor, gempabumi Kab. Nabire tinggi untuk banjir, longsor, gempabumi Kab. Supiori tinggi untuk longsor Kab. Teluk Wondama tinggi untuk longsor dan tsunami Kab. Teluk Bintuni tinggi untuk banjir, gempabumi Kab. Waropen tinggi untuk banjir, longsor	Kab. Biak Numfor sedang Kab. Kep Yapen sedang Kab. Mimika sedang Kab. Nabire tinggi Kab. Supiori sedang Kab. Teluk Wondama tinggi Kab. Teluk Bintuni tinggi Kab. Waropen sedang
Kawasan Pertumbuhan lainnya	Kab. Biak Numfor Tinggi untuk banjir, longsor, tsunami Kab. Kep. Yapen tinggi untuk longsor, gempabumi Kab. Nabire tinggi untuk banjir, longsor, gempabumi Kab. Supiori tinggi untuk longsor Kab. Waropen tinggi untuk banjir, longsor	Kab. Biak Numfor sedang Kab. Kep Yapen sedang Kab. Nabire tinggi Kab. Supiori sedang Kab. Waropen sedang
KI Teluk Bintuni	Kab. Teluk Bintuni tinggi untuk banjir, gempabumi	Kab. Teluk Bintuni tinggi
KI Bongrang	Kab. Jayapura tinggi untuk banjir, longsor	Kab. Jayapura Tinggi
KI Tembaga Timika	Kab. Mimika tinggi untuk banjir, longsor, gempa bumi	Kab. Mimika sedang
KPE Wamena	Kab. Jayawijaya tinggi untuk gempabumi	Kab. Jayawijaya sedang
MIFEE Merauke	Kab. Merauke sedang untuk longsor	Tinggi
Misool dan sekitarnya (Perkotaan Samate, Kawasan Minapolitan Perikanan, Kawasan Pariwisata)	Kab. Raja Ampat tinggi untuk ancaman banjir, gempa bumi	Tinggi

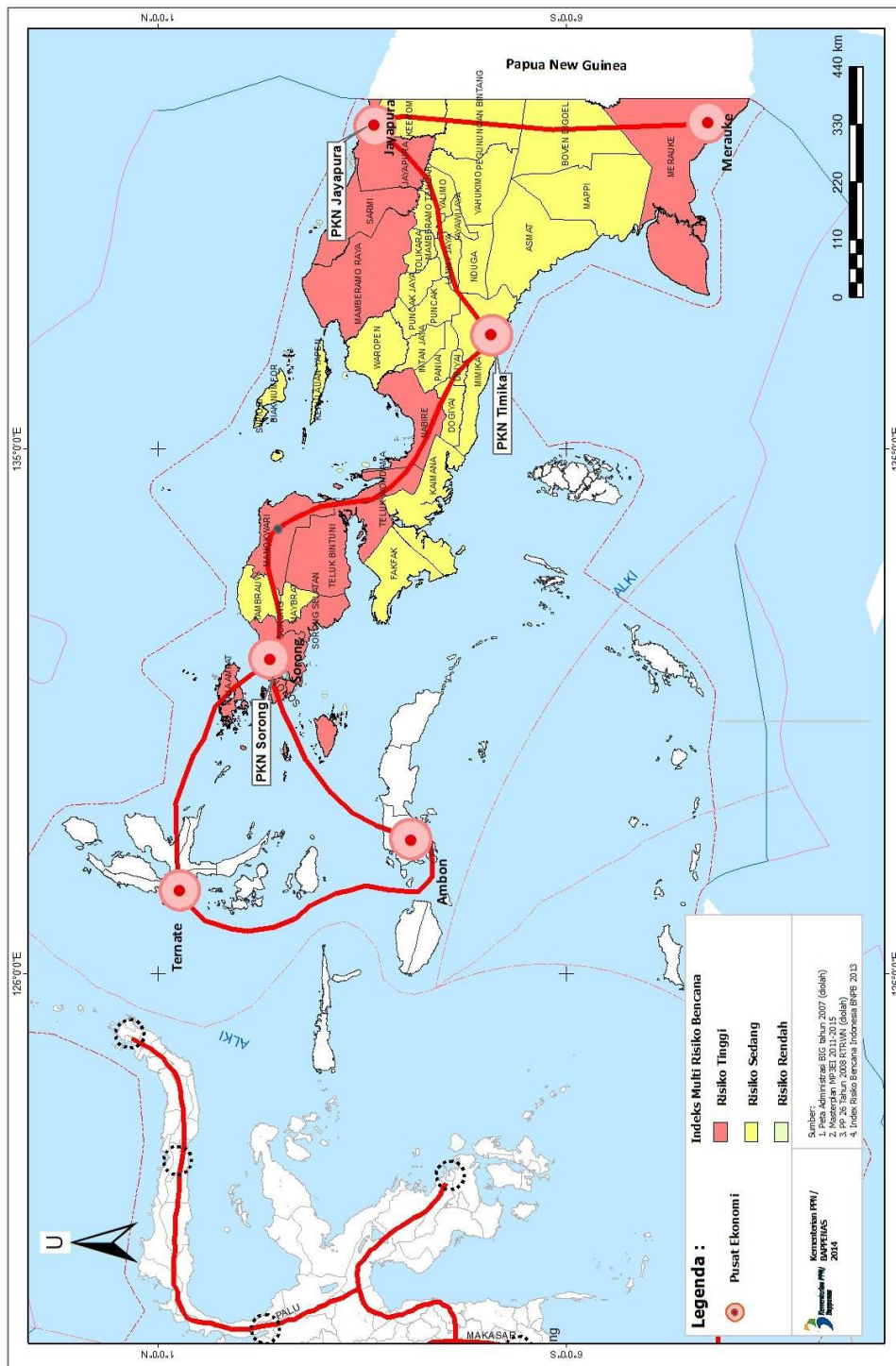


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Index Multi Risiko (IRBI 2013)
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Papua		
Sorong	Tinggi untuk ancaman:gempa bumi, tsunami, banjir	Tinggi
Timika – Kab. Mimika	Tinggi untuk ancaman:gempa bumi, banjir	Sedang
Jayapura	Tinggi untuk ancaman: banjir, longsor	Tinggi
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Papua		
Manokwari	Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir	Tinggi
Fak-fak	Tinggi untuk ancaman tanah longsor, banjir	Sedang
Biak – Kab. Biak Numfor	Tinggi untuk ancaman: banjir, longsor, tsunami	Sedang
Nabire	Tinggi untuk ancaman: gempa bumi	Tinggi
Bade – Kab. Mappi	Tinggi untuk ancaman: banjir	Sedang
Merauke	Sedang untuk ancaman: longsor	Tinggi
Sarmi	Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, longsor, tsunami, banjir	Tinggi
Arso – Kab. Keerom	Tinggi untuk ancaman: banjir, longsor	Sedang
Wamena – Kab. Jayawijaya	Tinggi untuk ancaman: banjir, longsor	Sedang
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Papua		
Tanah Merah – Kab. Boven Digoel	Tinggi untuk ancaman:banjir	Sedang
Merauke	Sedang untuk ancaman: longsor	Tinggi

Sumber : Bappenas, 2014

GAMBAR 2.5.
PETA INDEKS RISIKO BENCANA WILAYAH PULAU PAPUA 2015-2019



2.5.5 Penataan Ruang Wilayah Papua

A. Arah Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Papua

1. Kebijakan mewujudkan struktur ruang Pulau Papua dengan menggunakan prinsip pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat, meliputi:
 - a. Pengintegrasian kawasan kampung masyarakat adat dalam pengembangan Wilayah Papua;
 - b. Pengembangan pusat klaster;
 - c. Pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana untuk mengatasi indeks kerawanan dan risiko bencana yang tinggi (Tabel 2.10); dan
 - d. Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional
2. Kebijakan mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70 persen dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*) meliputi:
 - a. Pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi;
 - b. Pemertahanan kawasan hutan yang bervegetasi sesuai dengan ekosistem dan fungsinya; dan
 - c. Pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi.
 - d. Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan dengan Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.
3. Kebijakan mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian serta perikanan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan meliputi:
 - a. Pengembangan kawasan Merauke sebagai pusat pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan berbasis bisnis; dan
 - b. Pengembangan kawasan minapolitan.
4. Kebijakan mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Palau, dan Negara Australia meliputi:
 - a. Percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan Pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan

- b. Pemertahanan eksistensi 9 (sembilan) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia.
5. Kebijakan mewujudkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Pulau Papua meliputi:
 - a. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Papua;
 - b. Pemanfaatan sumberdaya alam di Kawasan Timika secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Strategi Penataan Ruang Wilayah Papua

I. Struktur Ruang Wilayah

1. Strategi untuk pengintegrasian kawasan Kampung Masyarakat Adat dengan mengintegrasikan kawasan Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan sentra produksi, kawasan perkotaan nasional, serta prasarana dan sarana wilayah. Struktur perkotaan nasional yang akan dikembangkan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.8.
2. Strategi untuk pengembangan pusat klaster, meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat klaster; dan
 - b. Mendorong pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri komoditas unggulan.
3. Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional, meliputi:
 - a. Mengembangkan dan memantapkan jaringan prasarana dan sarana transportasi sesuai dengan kondisi dan karakteristik kawasan;
 - b. Mengembangkan jaringan transportasi antarmoda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - c. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan serta bandar udara untuk melayani angkutan keperintisan; dan
 - d. Mengembangkan jaringan jalan serta jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang membuka akses kampung masyarakat adat.

Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

TABEL 2.10.
PRIORITAS LOKASI PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN PULAU PAPUA
2015-2019

Provinsi	Pusat Kegiatan dalam RTRWN		
	PKN	PKW	PKSN
Papua Barat	Sorong (I/C/1)	Fak-Fak (I/C/1)	
		Manokwari (I/C/1)	
		Ayamuru (II/C/1)	
Papua	Timika (I/C/1)	Biak (I/C/1)	Jayapura (I/A/1)
	Jayapura (I/C/1)	Nabire (II/C/1)	Tanah Merah (I/A/1)
		Muting (II/C/2)	Merauke (I/A/1)
		Bade (II/C/2)	
		Merauke (I/C/1)	Manokwari
		Sarmi (II/C/2)	Biak
		Arso (I/C/1)	
		Wamena (II/C/1)	

Sumber : Diolah, Bappenas 2014

II. Pengembangan Kawasan Lindung

1. Strategi untuk pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi, meliputi:
 - a. Mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat; dan
 - b. Mengembangkan nilai ekonomi dan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam dan pelestarian alam.
2. Strategi pemertahanan kawasan hutan yang bervegetasi sesuai dengan ekosistemnya, dilakukan dengan:
 - a. Implementasi pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - b. Perlindungan mata air di Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas;
 - c. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS;
 - d. Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- mempertimbangkan morfologi tanah, curah hujan, kondisi geologi, dan jenis tanamannya;
- e. Mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;
 - f. Mempertahankan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi kawasan peruntukan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat; dan
 - g. Mengendalikan alih fungsi kawasan peruntukan hutan untuk kegiatan budi daya nonhutan.
3. Strategi pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi adalah dengan mengendalikan kegiatan budidaya di laut yang mengancam keanekaragaman hayati laut.
- a. Mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;
 - b. Mempertahankan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi kawasan peruntukan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat; dan
 - c. Mengendalikan alih fungsi kawasan peruntukan hutan untuk kegiatan budi daya nonhutan.
4. Strategi pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi adalah dengan mengendalikan kegiatan budidaya di laut yang mengancam keanekaragaman hayati laut.

III. Pengembangan Kawasan Budidaya

1. Strategi untuk pengembangan kawasan Merauke sebagai pusat pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan berbasis bisnis, meliputi:
 - a. Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
 - b. Mengembangkan prasarana sumberdaya air untuk meningkatkan luasan kawasan pertanian tanaman pangan.
2. Strategi untuk pengembangan kawasan minapolitan, meliputi mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang didukung teknologi tepat guna dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Strategi perwujudan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian serta perikanan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan, dilakukan dengan:
 - a. Mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung industri pengolahan ramah lingkungan;
 - b. Mengembangkan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan kawasan pertanian tanaman pangan;
 - c. Mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis komoditas perikanan;
 - d. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang dilengkapi prasarana dan sarana dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat.
4. Strategi percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Mempercepat pengembangan PKSNI sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
 - b. Mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara.
5. Strategi untuk pemertahanan eksistensi 9 (sembilan) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia dengan mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT.

IV. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional

Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dikembangkan 2 (dua) KSN yang mendukung pengembangan wilayah di Pulau Papua. Strategi pengembangan KSN di Pulau Papua dapat dilihat pada Tabel 2.11.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 2.11.
STRATEGI PENGEMBANGAN KSN DI PULAU PAPUA

No	KSN	Tipe	Strategi	K/L
1	Kawasan Perbatasan Papua	Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	Pengelolaan kawasan lindung dengan memberdayakan masyarakat adat di Kawasan Perbatasan Papua	Kementerian Agraria dan Tata Ruang BNPP Kementerian Pertahanan
2	Kawasan Timika	Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam	Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertambangan yang produktif dan berdaya saing internasional di Kawasan Timika	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian ESDM

Sumber : Diolah, Bappenas 2014

2.5.6. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Arah kebijakan pengembangan Wilayah Papua yakni peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang mendorong pelestarian pembangunan berbasis masyarakat adat dan lingkungan, dengan strategi :

1. Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat;
2. Penguatan regulasi sinergi perencanaan dan penganggaran;
3. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada tiap pemerintah daerah yang terintegrasi dengan manajemen kinerja;
4. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha;
5. penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah;
6. Peningkatan proporsi belanja modal;
7. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line;
8. Penataan mekanisme dalam proses monitoring dana transfer Otsus melalui pelibatan aktif masyarakat;
9. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah;
10. Perbaiki pelaksanaan kebijakan otonomi khusus.
11. Pengembangan terobosan percepatan pembangunan.

2.6. Kaidah Pelaksana Pengembangan Wilayah Papua

2.6.1. Prioritas Program Pembangunan

2.6.1.1. Provinsi Papua

TABEL 2.12.
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI PAPUA

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan akses kereta api mulai dari Timika ke Pegunungan Tengah
PERHUBUNGAN UDARA
2. Pembangunan Bandara Taria*
3. Pembangunan Bandara Keenyam*
4. Pembangunan Bandara Aboy*
5. Pembangunan Bandara Koroway Batu*
6. Pengembangan Bandara Sentani
7. Perpanjangan Bandara Mopah Merauke
8. Pembangunan Bandara Elelim
9. Pembangunan Bandara Kiworok
10. Pembangunan Bandara Sinak Baru
11. Pembangunan Bandara Nabire Baru
12. Pengembangan Bandara Sentani
13. Pengembangan Bandara Frans Kaisiepo Biak
14. Pengembangan Bandara Wamena
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Jayapura*
2. Pengembangan Pelabuhan Pomako
3. Pengembangan Pelabuhan Serui
4. Pembangunan Pelabuhan Bade
5. Pembangunan Dermaga Terminal Penumpang dan Peti Kemas Pelabuhan Depapre
6. Pengembangan Pelabuhan Nabire
7. Pengembangan Pelabuhan Agats
8. Pengembangan Pelabuhan Amamapare
9. Pengembangan Pelabuhan Sarmi
10. Pengembangan Pelabuhan Waren
11. Penanganan kapasitas kargo Pelabuhan Laut Timika
12. Pembangunan terminal agribisnis, pergudangan, dan pelabuhan ekspor di Serapuh & Wogikel



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
13. Pengembangan Pelabuhan Merauke*
14. Pengembangan Pelabuhan Asmat
15. Pembangunan Dermaga Tanah Merah
16. Pembangunan Dermaga Keppi
17. Pengembangan Pelabuhan Mumugu
18. Pengembangan Pelabuhan Asiki
19. Pengembangan Pelabuhan Moor
JALAN
1. Pembangunan Jalan Sumohai - Dekai - Oksibil - Iwur - Waropko
2. Pembangunan Jalan Depapre - Bongkrang
3. Pembangunan Jalan Enarotali - Tiom
4. Pembangunan Jalan Wamena - Habema - Kenyam
5. Pembangunan Jalan Warumbaim - Taja - Lereh - Tengon
6. Pembangunan Jalan Sarmi - Ampawar - Barapasi - Sumiangga - Kimibay
7. Pembangunan Jalan Jayapura - Wamena - Mulia
8. Pembangunan Jalan Okaba - Sanomere - Bade
9. Pembangunan Jalan Merauke - Okaba - Buraka - Wanam - Bian - Wogikel
10. Pembangunan Jalan Ring Road Kota Jayapura
11. Pembangunan Jalan Timika - Potowaiburu - Wagate - Nabire
12. Pembangunan Jalan Lingkar Numfor
13. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Biak
14. Pembangunan Jembatan Holtekam
15. Pembangunan Jalan Okaba-Sanomere-Bade
16. Pembangunan Jalan Erambu-Jagebok-Kuprik-Merauke
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Waren*
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kaonda Kab. Kep. Yapen *
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Numfor Kab. Kab. Biak Numfor *
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Timika
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Agats
6. Pemb. Dermaga Sungai di Kab. Memberamo
7. Pemb. Dermaga Sungai di Kab. Mappi
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTMG Mobile PP (Jayapura) 50 MW
2. PLTMG Jayapura Peaker 40 MW
3. PLTU Jayapura 30 MW
4. PLTMG Merauke 20 MW
5. PLTMG Nabire 20 MW
6. PLTMG Biak 15 MW
7. PLTU Biak 14 MW
8. PLTU Nabire - Kalibobo 14 MW
9. PLT Biomass Merauke 10 MW
10. PLTMG Serui 10 MW
11. PLTMG Timika Peaker 10 MW
12. PLTA Urumka (Penyiapan) 300 MW



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
13. PLTS Komunal
14. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
15. PLTA Supiori 5 MW
INFRASTRUKTUR ENERGI
1. Depo BBM
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan backbone Palapa Ring, Telekomunikasi Informatika
2. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
3. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Embung di Kab. Mimika (Tersebar)
2. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Makbalin Distrik Mayamuk Makbalin
3. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Majaran 1 Distrik Mayamuk Majaran
4. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Majaran 2 Distrik Mayamuk Majaran
5. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Sisipan I. Distrik Salawati
6. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Sisipan II. Distrik Salawati
7. Rehabilitasi Embung Majener I. Distrik Moisigin
8. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Matawolot II . Distrik Salawati
9. Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Klamalu II . Distrik Aimas Klamalu
10. Pembangunan Jaringan Air Baku Warsamson (SPAM Regional) Kab. Sorong
11. Pembangunan Bendung dan Jaringan Air Baku di Kab. Raja Ampat
12. Pembangunan Bendung dan Jaringan Air Baku Ransiki di Kab. Manokwari Selatan
13. Pembangunan Intake dan Jaringan Air Baku di Kab. Sorong Selatan (tersebar)
14. Pembangunan Bendung Wanggar (2300 Ha) Nabire
15. Pengendalian Banjir Kabupaten Keerom Keerom
16. Pengendalian Banjir Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi Sarmi
17. Pengendalian Banjir Kota Sarmi Kabupaten Sarmi Sarmi
18. Pengendalian Banjir S. Titiwuk Kabupaten Sarmi Sarmi
19. Pengendalian Banjir Sungai Yahim Kabupaten Jayapura Jayapura
20. Pengendalian Banjir Sungai Dobokurung Kabupaten Jayapura Jayapura
21. Pengendalian Banjir Distrik Lereh Kabupaten Jayapura Jayapura
22. Pengendalian Banjir Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura Jayapura
23. Pengendalian Banjir Sungai Wanggar Kabupaten Nabire Nabire
24. Pengendalian Banjir Sungai Nabire Kabupaten Nabire Nabire
25. Pengendalian Banjir Sungai Musairo Kabupaten Nabire Nabire
26. Pengendalian Banjir Sungai Maryadei Kabupaten Yapen Yapen
27. Pengendalian Banjir Sungai Mantembu Kabupaten Yapen Yapen
28. Pengendalian Banjir Sungai Newi Kabupaten Yapen Yapen
29. Pengendalian Banjir Sungai Woru Kabupaten Yapen Yapen
30. Pengendalian Banjir Sungai Uwe Kabupaten Jayawijaya Jayawijaya
31. Pengendalian Banjir Sungai Elokorak Kabupaten Jayawijaya Jayawijaya
32. Pengendalian Banjir Sungai Digoel Kabupaten Boven Digoel Boven Digoel
33. Pembangunan Pengaman Pantai Anggaduber Kab. Biak Numfor Biak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
Numfor
34. Pembangunan Pengaman Pantai Maff Kabupaten Nabire Nabire
35. Pembangunan Pengaman Pantai Sarmi Kabupaten Sarmi Nabire
36. Pembangunan Pengaman Pantai Animi Kab. Biak Numfor Biak Numfor
37. Pembangunan Pengaman Pantai Wadibu Kab. Biak Numfor Biak Numfor
38. Pembangunan Pengaman Pantai Soba Kab. Biak Numfor Biak Numfor
39. Pembangunan Pengaman Pantai Anggopi Kab. Biak Numfor Biak Numfor
40. Pembangunan Pengaman Pantai Skouw Sae Kota Jayapura Jayapura
41. Pembangunan Pengaman Pantai Warbefondi Kab. Supiori Supiori
42. Pembangunan Pengaman Pantai Maryadori Kab. Supiori Supiori
43. Pembangunan Pengaman Pantai Warpen Kab. Waropen Waropen
44. Pembangunan Pengaman Pantai Biak Kab. Biak Numfor Biak Numfor
45. Pembangunan Pengaman Pantai Skow Kota Jayapura Jayapura
46. Pembangunan Pengaman Pantai Holtekamp Kota Jayapura Jayapura
47. Pembangunan Pengaman Pantai Lampu Satu Kabupaten Merauke (Lanjutan) Merauke
48. Pembangunan KTA/PAH/Bendali di Kabupaten Merauke Merauke
49. Pembangunan Embung di Kabupaten Merauke Merauke
50. Pembangunan Embung di Kabupaten Timika Merauke
51. Pembangunan Embung di Kabupaten Sarmi Merauke
52. Pembangunan Embung di Kabupaten Tolikara Tolikara
53. Pembangunan Embung di Kabupaten Boven Digul Boven Digoel
54. Pembangunan Embung di Kabupaten Lanny Jaya Lanny Jaya
55. Pembangunan Long Storage di Kabupaten Merauke Merauke
56. Pembangunan sarana tampungan air baku rawa Biru distrik Sota Merauke
57. Pembangunan jaringan dan intake Danau Sentani untuk kota Jayapura dan Kota Sentani tahap III (lanjutan) Kota Jayapura
PENDIDIKAN
1. KIP SD/SMP/SMA/SMK
2. Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan
3. Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian
4. USB SD/SMP
5. Tunjangan Khusus Dikdas/Dikmen
6. BOS SMA/SMK
7. USB SMA/SMK
8. Pendirian Akademi Komunitas
9. Pengembangan Politeknik Perikanan dan Kelautan di Kab. Biak
10. Pengembangan Politeknik Pertanian di Kab. Jayawijaya, Nabire, dan Merauke
11. Penguatan dan Peningkatan Fak. Kedokteran UNCEN
12. Pengembangan kelas Calistung (melalui penyediaan SD kecil termasuk tempat tinggal guru)
13. SD yang terintegrasi dengan PKBM dan PAUD
14. Pembangunan, dan pengembangan SD-SMP Satap berasrama
15. Sekolah Menengah berasrama yang menyelenggarakan pendidikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
menengah dan keterampilan hidup
16. Penyediaan guru dengan pola crash program bekerjasama dengan LPTK
17. Penyediaan rumah guru
KESEHATAN
1. Pengembangan RS Rujukan regional di 5 wilayah
2. Pembangunan Rumah sakit pratama di supiori, sarmi, tolikara, dogiai, mindiptana.
3. Integrasi KIS, KPS, dan BPJS (dari 2.7 juta penduduk papua hanya sekitar 2,325 juta penduduk papua yang ter cover dalam JKN, sisanya di cover dengan KPS)
4. KIS mencakup 2,7 juta jiwa dengan dukungan KPS (<i>toping up</i>) premi sebesar Rp. 25.500. Dengan premi tersebut kami minta kompensasi : 1. Kapitasi pelayanan dasar diharapkan naik 100%; 2. Tarif INA CBGs a) untuk rumahsakit bergerak tipe D mengikuti tarif tipe C; b) Tipe C mengikuti tarif tipe B; c) tarif tipe B mengikuti tarif tipe A; 3, Pengembangan obat alami (pusat riset obat alami tradisional dan pabrik industri); 4, Dukungan program 1000 HPK; 5, Penyediaan balai pelatihan kesehatan (baru ada 60); dan 6, Peningkatan balai laboratorium kesehatan daerah
PERUMAHAN
Pembangunan rumah layak huni di kampung-kampung Papua

2.6.1.1. Provinsi Papua Barat

TABEL 2.13
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI PAPUA BARAT

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN
1. Pembangunan Kereta Api Sorong-Manokwari
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok
2. Pengembangan Bandara Bintuni
3. Pembangunan Bandara Segun
4. Pembangunan Bandara Werur
5. Pengembangan Bandara Rendani
6. Bandara Segun di Kabupaten Sorong



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
7. Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Kaimana
2. Pembangunan Pelabuhan Seget
3. Pengembangan Pelabuhan Owi
4. Pengembangan Pelabuhan Teminabuan
5. Pengembangan Pelabuhan Saunek
6. Pengembangan Pelabuhan Kokas
7. Pembangunan Faspel Laut Arar
8. Pengembangan Pelabuhan Arardi Sorong *
9. Pengembangan Pelabuhan Fak Fak
10. Pembangunan Pelabuhan Biak
11. Pembangunan Pelabuhan Saukorem
12. Pelabuhan Abun di Kabupaten Tambraw
13. Pelabuhan Bomberai di Kabupaten Fakfak
14. Pelabuhan Maruni di Kabupaten Manokwari
JALAN
1. Pembangunan Jalan Mameh-Wendesi-Ambuni-Tandia
2. Pembangunan Jalan Manokwari – Bintuni
3. Pembangunan Jalan Sorong - Pelabuhan Arar
4. Pembangunan Jalan Lingkar Raja Ampat
5. Pembangunan Jalan Susumuk - Bintuni
6. Pembangunan Jalan Tandia - Yahour
7. Pembangunan Jalan Fakfak - Bourof - Windesi
8. Pembangunan Jalan Yaur - Windesi – Mameh – Manokwari
9. Pembangunan Jalan Manokwari – Sorong
10. Pembangunan Jalan Kaimana - Bourof
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Raja Ampat*
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kaimana
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Fak-Fak*
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Arar
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Waigeo
6. Pengembangan Dermaga Folley (Pulau Misol)
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTU Klalin 30 MW
2. PLTMG Mobile PP Manokwari 20 MW
3. PLTU Andai 14 MW
4. PLTMG Fak-Fak 10 MW



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
5. PLTMG Bintuni 10
6. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan backbone Palapa Ring, Telekomunikasi Informatika
2. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
3. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Lanjutan Pembangunan Bendung Wariori di Kab. Manokwari
2. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Oransbari 3.016 Ha (Jaringan Sekunder) di Kab. Manokwari
3. Pembangunan Jaringan Irigasi D. I Mariyat 1.500 Ha (Jaringan Primer) di Kab. Sorong
4. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa 750 Ha Wonosobo di Kab. Sorong
5. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa 750 Ha Kampung Segun di Kab. Sorong
6. Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Danau Ayamaru di Kab. Maybrat
7. Pengendalian Banjir Sungai Aimasi Kab. Manokwari
8. Pengendalian Banjir Sungai Ransiki Kab. Manokwari Selatan
9. Pengendalian Banjir Sungai Wariori Kab. Manokwari
10. Pengendalian Banjir Sungai Tubhi Kab. Teluk Bintuni
11. Pengamanan Pantai Pasir Putih di Kab. Manokwari
12. Pengamanan Pantai Wosi dan Rendani di Kab. Manokwari
13. Pengamanan Pantai Kaimana di Kab. Kaimana
14. Pengamanan Pantai Rado di Kab. Teluk Wondama
15. Pengamanan Pantai Miey di Kab. Teluk Wondama
16. Pengamanan Pantai Biriosi Wirsi di Kab. Manokwari
17. Pengamanan Pantai Maruni Maripi di Kab. Manokwari
18. Pengaman Pantai di Kab. Teluk Bintuni (Tersebar)
19. Pengaman Pantai di Kab. Nabire (Tersebar)
20. Pengaman Pantai di Kab. Mimika (Tersebar)
21. Pengamanan Pantai Oransbari di Kab. Manokwari Selatan
22. Pengamanan Pantai Ransiki di Kab. Manokwari Selatan
23. Pengamanan Pantai Tanjung Kasuari Kota Sorong
24. Pengamanan Pantai Pulau Fani Kab. Raja Ampat
25. Pengamanan Pantai Makbon Kota Sorong
26. Pengamanan Pantai Sausapor Kab. Tambrauw
27. Pengamanan Pantai Seget Kab. Sorong
28. Pengamanan Pantai Sailolof Kab. Sorong
29. Pengamanan Pantai Kotam Kab. FakFak
30. Pembangunan Embung di Kab. Raja Ampat (tersebar)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
31. Pembangunan Embung di Kab. Sorong (Tersebar)
32. Pembangunan Embung di Kab. Fak-Fak (Tersebar)
33. Pembangunan Embung di Kab. Manokwari (Tersebar)
34. Pembangunan Embung di Kab. Teluk Bintuni (Tersebar)
35. Pembangunan Embung di Kab. Nabire (Tersebar)
36. Pembangunan Embung di Kab. Sorong Selatan (Tersebar)
37. Pembangunan Embung di Kab. Kaimana (Tersebar)
38. Pembangunan Embung di Kab. FakFak (Tersebar)
39. Pembangunan Embung di Kab. Teluk Bintuni (Tersebar)
40. Pembangunan Embung di Kab. Nabire (Tersebar)
41. Pembangunan Embung di Kab. Dogiyai (Tersebar)
PENDIDIKAN
1. Sekolah berpola asrama untuk SMP dan SMA
KESEHATAN
1. Pengembangan RS Daerah Kab. Sorong untuk praktek mahasiswa FK Universitas Negeri Papua (alkes). Dalam jangka menengah, Papua Barat mengusulkan untuk dikembangkannya RSP.

2.6.2. Kerangka Regulasi

Pelaksanaan pembangunan Wilayah Papua tidak terlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a. Regulasi pengelolaan lintas batas;
- b. Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Perpajakan Kepabeanan, dan Cukai di Kawasan Ekonomi Khusus serta aturan turunannya;
- c. Penyelesaian Peraturan tentang Ketenagakerjaan di Kawasan Ekonomi Khusus;
- d. Penyelesaian Peraturan tentang Pelimpahan Kewenangan perdagangan, keimigrasian, perindustrian, pertanahan, tenaga kerja dari kementerian/lembaga terkait kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;
- e. Regulasi Perdagangan lintas batas, Perjanjian kerjasama antara RI-Australia, maupun RI-Papua New guinea dalam pengembangan kawasan perbatasan negara;
- f. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- g. Penetapan Perpres RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kawasan Perbatasan Papua; dan Perpres RTR KSN Kawasan Timika; serta

- Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 57/2014 tentang RTR Pulau Papua;
- h. Peraturan perundangan terkait pelimpahan kewenangan ijin investasi pada kawasan-kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri nasional lainnya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - i. Regulasi untuk mengatur pemanfaatan tanah ulayat;
 - j. Regulasi penetapan Kawasan MIFEE dan Kawasan Industri Arar sebagai KEK;
 - k. Regulasi dalam rangka penguatan Otonomi Khusus.

2.6.3. Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan pembangunan Wilayah Papua tidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan;
- b. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan;
- c. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;
- d. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik;
- e. Pelimpahan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait kepada pengelola kawasan strategis nasional dan kawasan-kawasan industri lainnya;
- f. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi di KEK, KI, dan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya;
- g. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di bidang perizinan perindustrian, perdagangan, pertanahan di KEK, KI dan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya;
- h. Penyiapan kemampuan pengelolaan investasi pada usulan KEK di provinsi Papua dan Papua Barat;
- i. Melakukan deliniasi hak ulayat pada kawasan kawasan strategis yang dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- j. Peningkatan koordinasi antara Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (BKPRD) Provinsi di Wilayah Papua dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau;
- k. Penguatan kelembagaan koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan wilayah Papua yang melibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

BAB 3

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU

3.1 Capaian Kinerja Saat Ini

- Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Kepulauan Maluku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan Wilayah Kepulauan Maluku selama kurun waktu 2009-2013 sebesar 6,4 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Sementara itu, peranan Wilayah Kepulauan Maluku dalam pembentukan PDB nasional mengalami peningkatan dari 0,25persen (2009) menjadi 0,28 persen (Triwulan II 2014).
- Pemerintah Provinsi di Wilayah Kepulauan Maluku telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin tahun 2009 sebesar 20,86 persen hingga 2014 (Maret) sebesar 14,32 persen akan tetapi masih berada di atas angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen (2009) dan 11,25 persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pemerintah Provinsi di Wilayah Kepulauan Maluku juga telah berhasil menurunkan TPT tetapi berada diatas TPT nasional sebesar 8,99 persen (2009) dan 6,21 persen (Feb, 2014), kecuali di Provinsi Maluku Utara.
- Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka di Wilayah Kepulauan Maluku dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi di Wilayah Kepulauan Maluku. Namun demikian, pencapaian IPM di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara masih perlu ditingkatkan karena masih di bawah IPM nasional 73,81 (2013).
- Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, seluruh provinsi di Wilayah Kepulauan Maluku mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini diindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi di wilayah Kepulauan Maluku lebih tinggi dibandingkan Rasio Gini Nasional sebesar 0,37 (2009) dan 0,41 (2013). Kedepan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

3.2 Potensi dan Keunggulan Wilayah

Perekonomian Wilayah Kepulauan Maluku berpotensi pada dua sektor utama, yakni sektor pertanian terutama perikanan, sektor pertambangan terutama nikel dan tembaga, dan sektor pariwisata, terutama pariwisata bahari.

- Potensi perikanan Wilayah Kepulauan Maluku menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen makanan laut terbesar di Asia Tenggara. Kemudian dalam konteks global, berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Wilayah Kepulauan Maluku dikenal sebagai produsen skala besar komoditas perikanan di Indonesia (terutama Provinsi Maluku Utara). Potensi terbesar dari sektor perikanan dan kelautan Wilayah Kepulauan Maluku berasal dari perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2012 mencapai 688.241 ton dan untuk perikanan budidaya sebesar 600.383 ton. Dalam hal produksi perikanan tuna, Wilayah Kepulauan Maluku menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil tuna terbesar, dengan peringkat ketiga dunia.
- Selain potensi perikanan dan kelautan, Wilayah Kepulauan Maluku memiliki potensi pertambangan dan energi yang cukup besar, terutama untuk nikel dan tembaga. Wilayah Kepulauan Maluku merupakan penyumbang terbesar pertambangan nikel di Indonesia dengan cadangan nikel sebesar 39 persen dan tembaga sebesar 92.48 persen dari total nasional. Nikel dan tembaga merupakan sumber daya alam yang cukup potensial di Wilayah Kepulauan Maluku, namun belum memiliki hasil produksi yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Hasil ekstraksi produk tambang nikel dan tembaga secara umum dilakukan tanpa melalui proses pengolahan untuk memberikan nilai tambah bagi hasil produksi, sehingga kontribusi sektor-sektor tersebut dalam memajukan perekonomian lokal kurang optimal. Hal ini merupakan peluang investasi bagi investor untuk pengembangan usaha disektor pertambangan di Wilayah Kepulauan Maluku.
- Potensi pariwisata bahari di Wilayah Kepulauan Maluku antara lain taman laut yang tersebar terutama di Provinsi Maluku. Selain itu Wilayah Kepulauan Maluku juga mempunyai aneka ragam adat-istiadat dan budaya yang apabila seluruh potensi pariwisata tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, akan menjadikan Wilayah Kepulauan Maluku sebagai salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia bahkan dunia. Selama kurun waktu 2011-2013, jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara, ke Wilayah Kepulauan Maluku meningkat

pesat dari 16.004 wisatawan pada tahun 2011 menjadi 52.360 wisatawan pada tahun 2013.

3.3 Tema Pengembangan Wilayah Maluku

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Kepulauan Maluku, maka tema besar Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku sebagai:

- Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional
- Percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan;
- Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga;
- Pariwisata bahari.

3.4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Maluku

Tujuan pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan komoditas perikanan tangkap dan budidaya, (b) pengembangan sektor pertambangan khususnya komoditas nikel dan tembaga, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun sasaran pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Kepulauan Maluku, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 Kawasan Ekonomi Khusus, 1 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.
2. Sementara itu, untuk mengurangi adanya kesenjangan antar Wilayah Kepulauan Maluku, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 11 kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,26 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14,31 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,90.
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Maluku, maka akan dilakukan optimalisasi peran 2 kota otonom berukuran sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam

bentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara.

4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran memenuhi standar pelayanan minimum desa di desa-desa tertinggal dan meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri.
5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat 3 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 4 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
7. Sasaran untuk Otonomi Daerah adalah: 1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 20% untuk propinsi dan 7% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 30% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 provinsi dan 10 kabupaten/kota di wilayah Maluku; (4) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 5%; (5) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Maluku sebesar 30 angkatan; (6) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (7) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 85%; (8) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 75%; (9) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (10) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Maluku.
8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 12 kabupaten/kota sasaran (Kota Ambon, Kota Ternate, Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan, Pulau Morotai dan Sula) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

sebagai PKN, PKSN, PKW, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB wilayah Kepulauan Maluku terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 0.28 persen (2013) menjadi 0.31 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Maluku. Secara rinci pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 diwilayah Kepulauan Maluku dapat dilihat pada Tabel 3.1 sampai dengan Tabel 3.3 sebagai berikut.

TABEL 3.1.
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU
PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Maluku	6.9	7.3	8.3	8.4	8.6
Maluku Utara	5.9	6.3	7.0	7.5	7.8

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 3.2.
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH KEPULAUAN MALUKU
PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Maluku	18.9	17.9	16.5	15.0	13.6
Maluku Utara	6.6	6.1	5.6	5.1	4.6

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 3.3.
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH KEPULAUAN MALUKU
PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Maluku	7.0	6.7	6.4	6.1	5.9
Maluku Utara	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6

Sumber :Perhitungan Bappenas, 2014

3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Maluku

3.5.1 Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pembangunan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Kepulauan Maluku diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional dan internasional berbasis pengembangan **produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional, diarahkan untuk pengembangan industri berbasis komoditas perikanan, pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga, serta industri pariwisata bahari.**

Fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di Pulau Maluku meliputi: Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Maluku, pengembangan Kawasan Industri Buli di Provinsi Maluku Utara, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya di Provinsi Maluku.

Percepatan pembangunan kawasan strategis dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Kepulauan Maluku

Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis erat kaitanya dengan memberdayakan masyarakat berbasis potensi ekonomi wilayah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan. Strategi yang dilakukan adalah:

- a) Menyiapkan kawasan pengembangan komoditas perikanan dan pariwisata bernilai tambah tinggi;
- b) Mengembangkan pusat-pusat industri pengolahan produk perikanan, jasa pariwisata dan logistik berdaya saing internasional;
- c) Meningkatkan produktivitas hasil olahan perikanan di dalam dan sekitar pusat industri.
- d) Menyiapkan kawasan pengelolaan klaster-klaster komoditas unggulan kawasan berupa perikanan tangkap (ikan pelagis dan ikan demersal) dan perkebunan (kelapa, cengkeh, pala, cokelat, dan kopi);
- e) Meningkatkan produktivitas produk turunan dari kelapa, kakao, cengkih, dan pala.

2. Percepatan Penguatan Konektivitas

Peningkatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan-kawasan penyangga sekitarnya meliputi:

- a) Pengembangan dan rehabilitasi Bandar Udara Morotai, Bandar Udara di Tual, dan Bandar Udara Sultan Babullah di Ternate;
- b) Pengembangan Pelabuhan Sofifi-Kaiyasa;
- c) Pembangunan Pelabuhan di KI Buli;
- d) Pembangunan jalan akses Pelabuhan ke KI Buli; dan dari KI Buli menuju Kabupaten Halmahera Timur;
- e) Peningkatan kualitas jalan dari Maba ke Buli;
- f) Pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Ambon, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Matui-Jailolo, Pelabuhan Labuha/Babang;
- g) Pembangunan dermaga kapal di Waisamu, Pelabuhan Pengumpul Dokyar, Pelabuhan Areate, dermaga laut di Makariki, pelabuhan kontainer di Passo, dermaga penyeberangan Fatkayon, dermaga penyeberangan Gane Timur, dermaga penyeberangan Bicoli-Maba Selatan, dermaga penyeberangan Weda, dan dermaga Ferry Airmanang;
- h) Pembangunan pelabuhan dan dermaga, antara lain: dermaga kapal di Waisamu, Pelabuhan Areate, dermaga laut di Makariki, pelabuhan kontainer di Passo, dermaga penyeberangan Bicoli-Maba Selatan, dan dermaga penyeberangan Weda;
- i) Pengembangan Pelabuhan Sofifi-Kaiyasa, Pelabuhan Subaim; Pelabuhan Malbufa, Pelabuhan Tikong, Pelabuhan Wayaluar-Obi; Pelabuhan Saketa; Pelabuhan Bosua;
- j) Pengembangan dan rehabilitasi Bandar Udara Oesman Sadik Labuha.

3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat maupun di daerah, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dilakukan dengan strategi:

- a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola dan Perusahaan dalam bidang perencanaan, penganggaran, pengelolaan kawasan dan investasi;
- b) Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan tenaga terampil untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang perikanan, perkebunan, perdagangan, dan logistik;
- c) Penyiapan tenaga kerja berkualitas di sekitar kawasan dalam bidang industri pengolahan berteknologi tinggi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d) Peningkatan koordinasi antara Badan Pengelola/ Perusahaan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;
- e) Pembangunan *Science Park* bidang perikanan dan maritim berteknologi tinggi sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan.
- f) Memberikan pembinaan kelembagaan yang mendukung perubahan pola pikir bisnis berorientasi daya saing secara komparatif dan kompetitif;
- g) Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola komoditas unggulan agroindustri, peternakan, perikanan, distribusi dan pemasaran;
- h) Pembangunan *Techno Park* bidang komoditas kelapa, kakao, cengkih, dan pala serta logistik untuk meningkatkan inovasi teknologi.

4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Dalam upaya pengembangan kawasan strategis di Wilayah Kepulauan Maluku diperlukan sinergi dan sinkronisasi regulasi melalui strategi berikut:

- a) Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di KEK;
- b) Membuat regulasi terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kepada administrator kawasan-kawasan pertumbuhan;
- c) Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal.
- d) Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Kabupaten/Kota di pusat-pusat pertumbuhan;
- e) Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi.

3.5.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

3.5.2.1 Pengembangan Kawasan Perkotaan

Arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Maluku diprioritaskan pada peningkatan keterkaitan dan manfaat antar kota dan desa dengan kota, melalui penguatan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) berbasis kepulauan melalui optimalisasi 2 kota sedang yakni Ambon dan Ternate sebagai pusat pertumbuhan ekonomi skala Provinsi dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Untuk itu, pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Maluku juga diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal pada bidang perikanan yang didukung bidang perdagangan jasa dan pengangkutan intermoda (pembangunan *transshipment point*) untuk meningkatkan konektivitas antara kawasan strategis dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta pembangunan pusat pelayanan administrasi pelintas batas negara dan antar pulau.

Strategi pembangunan perkotaan Wilayah Kepulauan Maluku tahun 2015-2019 yaitu:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

- a. Mengembangkan 2 kota sedang di pulau maluku, yakni ambon dan ternate dengan peran sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) serta sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara;
- b. Meningkatkan konektivitas antar pusat kegiatan maupun antar pulau melalui pengembangan sistem transportasi berbasis udara dan kemaritiman salah satunya dengan peningkatan kapasitas pelabuhan di Ambon.

2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman pada kota sedang di Wilayah Maluku

- a. Meningkatkan aksesibilitas antar kota melalui penyediaan sarana transportasi umum antarmoda khususnya transportasi laut dan udara secara terpadu dan optimal;
- b. Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman melalui pembangunan infrastruktur;
- c. Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi, pengembangan jalur pariwisata dan distribusi-koleksi kegiatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ekonomi wilayah yang mampu mengakomodasi pasar rakyat, sektor informal termasuk kegiatan koperasi dan Usaha mikro kecil Menengah (UMKM) dan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan untuk Kota Ambon;

- d. Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya melalui pengembangan sarana prasarana dan tenaga terampil di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial berbasis pada kondisi dan potensi lokal kota Ambon dan Ternate;
- e. Meningkatkan kondisi keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik, serta peningkatan modal sosial masyarakat kota.

3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap Bencana

- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk tanggap, siap, dan tahan terhadap terjadinya bencana sehingga mampu kembali pada kondisi semula (*urban resilience*) terutama untuk bencana gelombang pantai dan abrasi, konflik sosial dan kejadian luar biasa;
- b. Membangun infrastruktur mitigasi bencana gelombang pantai dan abrasi, konflik sosial dan kejadian luar biasa untuk melindungi aset-aset sosial ekonomi melalui ;
- c. Mengembangkan konsep *green openspace* (ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan videotron)), dan *green waste* (pengelolaan sampah melalui 3R¹) untuk pengurangan tingkat pencemaran di darat dan laut.

4. Peningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

- a. Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi pemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota berkelanjutan;
- b. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola kota berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara bersikembungan;
- c. Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha bagi para pelaku ekonomi termasuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
- d. Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota, untuk mewujudkan kota berkelanjutan;

¹3R: pengurangan (*Reduce*), pemanfaatan kembali (*Re-use*), dan Daur Ulang (*re-cycle*)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Mengembangkan dan menyediakan pusat data informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses melalui penyediaan peta kota dan kawasan perkotaan dan updating data base perkotaan;
- f. Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialog perencanaan dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan, maupun dalam pembangunan kota berkelanjutan, seperti: pembangunan infrastruktur perkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruang kota.

3.5.2.2 Pengembangan Kawasan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, arah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan di Wilayah Kepulauan Maluku adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan diarahkan pula untuk membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi perdesaan mandiri pada 3 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.5. Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, serta pulau-pulau kecil terluar di Wilayah Kepulauan Maluku akan dilakukan:

- 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografisnya**
 - a. Membangun sarana dan prasarana dasar perumahan khususnya sarana prasarana air bersih di desa-desa di pulau-pulau terluar;
 - b. Membangun sarana dan prasarana pendidikan, khususnya sekolah dasar dan sekolah menengah dengan asrama di Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Pulau-Pulau Terselatan, Pulau Buru, Pulau Seram Bagian Timur;
 - c. Membangun sarana prasarana kesehatan (pos kesehatan desa, pustu, puskesmas keliling) di desa tertinggal dan berkembang termasuk desa-desa di pulau-pulau kecil terluar;
 - d. Meningkatkan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di desa tertinggal dan berkembang termasuk desa-desa di pulau-pulau kecil terluar;
 - e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan transportasi, baik darat, air, maupun udara yang mendukung

konektifitas antar pulau seperti pelabuhan lokal Namlea, Waplau, Ilat, Masarete, Parang, dan Kota Tua;

- f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi khususnya di pulau-pulau kecil terluar dan desa-desa terpencil yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru dan Buru Selatan.

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi

- a. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, dan jaminan sosial bagi masyarakat desa;
- b. Revitalisasi dan penguatan peran lembaga lokal dalam memberdayakan masyarakat miskin dan rentan;
- c. Memberikan jaminan terhadap pasokan energi bagi kegiatan ekonomi nelayan dan bantuan permodalan khususnya bagi nelayan di wilayah perbatasan;
- d. Mendukung terwujudnya desa mandiri benih dengan meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi (benih, pupuk, jaringan irigasi, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasi nelayan), pasca panen, pengolahan, dan pasar desa;
- e. Meningkatkan keberdayaan petani dan nelayan dalam memanfaatkan teknologi (*bio-energi, biofloc*);
- f. Rehabilitasi, revitalisasi, dan pengembangan jaringan irigasi dan pembangunan bendungan khususnya di wilayah Maluku Utara.

3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi

- a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, melalui fasilitasi dan pendampingan pengembangan kewirausahaan;
- b. Memperkuat lembaga adat dan Desa Adat, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- c. Memperkuat peran pemuda, perempuan, dan kaum marjinal dalam perekonomian, pendidikan, dan pembangunan desa;
- d. Meningkatkan peran dan kapasitas tenaga kesehatan lokal (dukun beranak), khususnya di desa-desa di pulau-pulau kecil terluar;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di desa tertinggal termasuk desa-desa di pulau-pulau terluar;
- f. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kebijakan *shareholding* pemerintah, desa, dan pihak ketiga.

4. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan

- a. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa;
- b. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, (ii) Pengelolaan aset dan keuangan desa, (iii) Pelayanan publik dan administrasi pemerintahan desa, (iv) Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital; serta (v) Penataan desa;
- c. Memperkuat pemerintah desa, masyarakat, dan kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;
- d. Menyiapkan dan mengembangkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.

5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi

- a. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
- b. Menata ruang kawasan perdesaan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian, hutan, dan kawasan pesisir secara berkelanjutan;
- c. Fasilitasi peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana;
- d. Revitalisasi dan penguatan peran lembaga lokal dalam adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mendukung penghidupan berkelanjutan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Mengembangkan sistem pengelolaan pesisir laut yang berkelanjutan (SASI) yang telah ada sebagai usaha mewujudkan kemandirian pangan;
- f. Rehabilitasi dan konservasi daerah aliran sungai, daerah pesisir, dan pulau-pulau kecil.

6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota

- a. Mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional dengan mengembangkan sentra-sentra industri perikanan di kawasan Morotai, Ambon, Banda, Wahai (Seram Utara), Tual, Dobo, Saumlaki, Kotania Seram Bagian Barat, Namrole dan Klishatu (Maluku Barat Daya), dan sentra pertanian tanaman lokal (padi, sagu, jagung, rumput laut).
- b. Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar;
- c. Mendukung kegiatan perikanan masyarakat dengan penjaminan mutu benih unggul dan penguatan unit pembenihan rakyat;
- d. Mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya;
- e. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan migas serta mendorong pengembangan industri pengolahan migas oleh masyarakat;
- f. Mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta, termasuk dalam pengelolaan BUMDesa.

3.5.2.3 Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa di Wilayah Kepulauan Maluku

Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Maluku diarahkan dengan memperkuat sedikitnya 3 pusat pertumbuhan, yaitu kawasan Morotai dan sekitarnya (Provinsi Maluku Utara), Maba dan sekitarnya (Provinsi Maluku Utara), serta Bula dan sekitarnya (Provinsi Maluku). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata (lihat Tabel 3.5). Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Maluku adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota Kecil, dan antar Kota Kecil dan Desa, serta antar pulau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Mempercepat pembangunan sistem transportasi terpadu antar gugus-gugus pulau untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Kepulauan Maluku, pelabuhan Subaim, serta angkutan penyebrangan yang melayani antar gugus pulau Maluku;
- c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah;
- d. Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri, dengan prioritas pengembangan PLTMG Seram.

2. Perwujudan Keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi Hulu dan Hilir Desa-Kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi

- a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di Kawasan Maba dan Bula, serta sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan/kelautan di Kawasan Daruba;
- b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan (lihat Tabel 3.5) dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasarana produksi;
- c. Mengembangkan daya tarik wisata bahari dan kepulauan di Kawasan Pariwisata Morotai dan sekitarnya melalui peningkatan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi perbaikan dermaga dan akses jalur darat, laut, dan antar pulau menuju obyek wisata, peningkatan kualitas homestay dan rumah makan, serta fasilitas umum wisata bahari;
- d. Membangun bank pertanian dan perikanan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan.
- e. Mengembangkan *Techno Park* berbasis pertanian dan perikanan/kelautan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan desa-kota

- a. Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah;
- b. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dalam tata kelola ekonomi lokal;
- c. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektor pertanian dan perikanan/ kelautan;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian laut dan pesisir serta mitigasi bencana, terutama di Kawasan Perdesaan Pesisir Daruba, Maba, dan Bula.

Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan Tabel 3.4 serta Tabel 3.5.

TABEL 3.4.
LOKASI PRIORITAS KOTA SEDANG YANG BERFOKUS PADA UPAYA PEMERATAAN WILAYAH KEPULAUAN MALUKU

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
P1	Ternate (PKN)	Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) untuk mendukung sektor produksi wilayah yaitu hortikultura; tanaman tahunan; dan industri Pengolahan perikanan serta sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan.
P2	Ambon (PKN)	Sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) yang berorientasi pada kegiatan industri pengolahan perikanan, sebagai hub untuk Kawasan Papua dan Maluku, serta mendorong sebagai pusat kegiatan pariwisata kawasan Indonesia Timur.

Sumber : Bappenas, 2014

TABEL 3.5.
LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KETERKAITAN DESA-KOTA UNTUK MEMPERKUAT PUSAT PERTUMBUHAN DI MALUKU

Kode	Lokasi Kawasan	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
D1	Daruba dan sekitarnya (Kab. Pulau	<ul style="list-style-type: none">• PKSN Daruba• Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap:	<ul style="list-style-type: none">• Perikanan Tangkap• Wisata bahari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

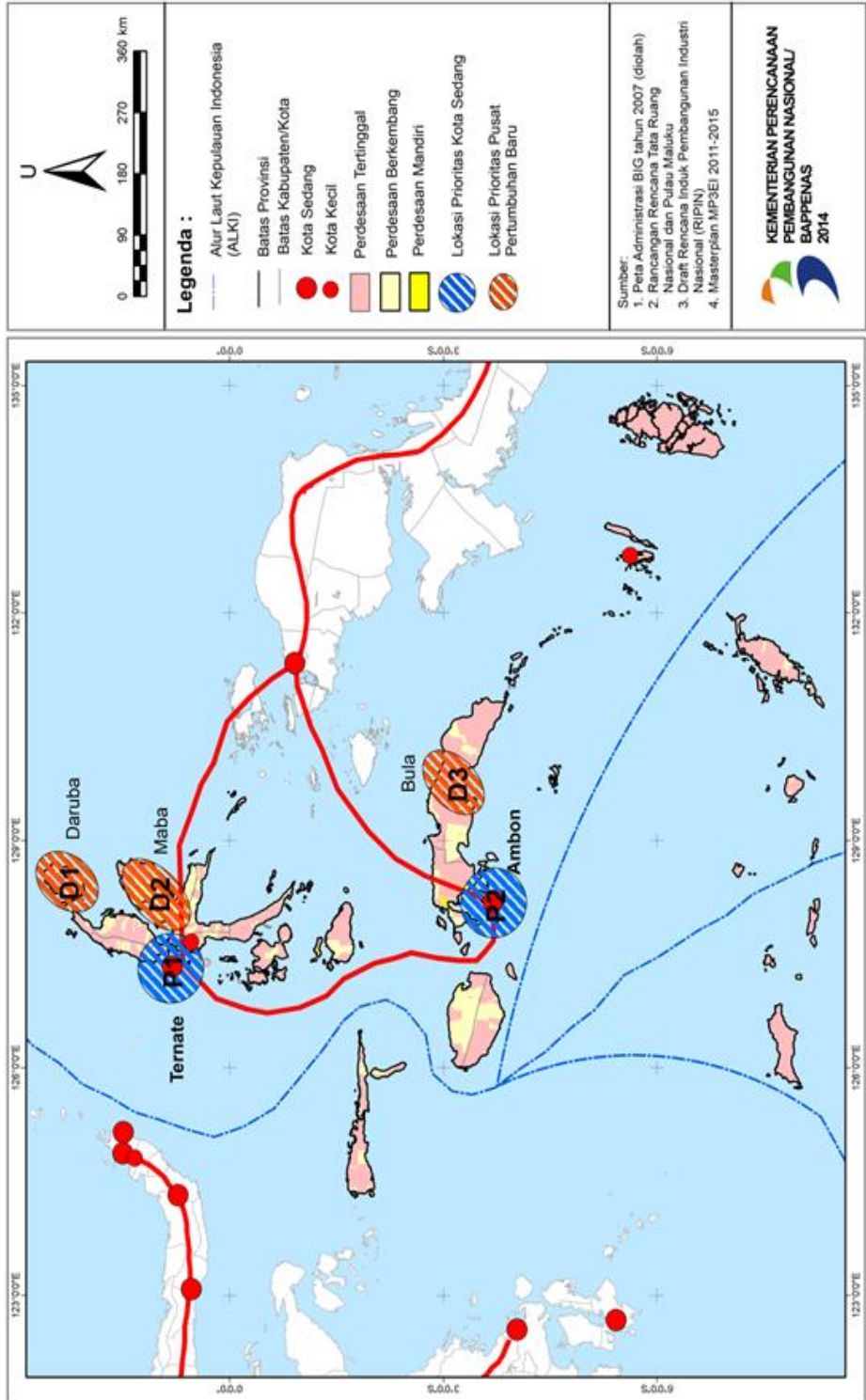
Kode	Lokasi Kawasan	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
	Morotai, Prov. Maluku Utara)	Morotai • Kawasan Pariwisata: KSPN Morotai • Kawasan Transmigrasi: Morotai	dan kepulauan
D2	Maba dan sekitarnya (Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara)	• Perkotaan Maba • Kawasan Agropolitan (Padi): Wasile, Wasile Timur, Maba Tengah • Kawasan Transmigrasi: Subaim • Kota Otonom Terdekat : Tidore Kepulauan	• Padi • Jagung • Sagu
D3	Bula dan sekitarnya (Kab. Seram Bagian Timur, Prov. Maluku)	• PKW Bula • KPB Kobisonta • Kawasan Transmigrasi: Bula, • Pusat pertumbuhan kawasan Seram.	• Cengkeh • Palawija • Kakao

Sumber : Bappenas, 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 3.2.
PETA LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
WILAYAH KEPULAUAN MALUKU



3.5.3 Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan

3.5.3.1 Pengembangan Daerah Tertinggal

Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan. Pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelayanan Publik Dasar

Mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

- 1) Pemerataan distribusi tenaga pendidik diutamakan di Kabupaten Buru, Kepulauan Sula, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Barat Daya;
- 2) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik diutamakan di Kabupaten Buru, Kepulauan Sula, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Barat Daya;
- 3) Pemberian tunjangan tenaga pendidik diutamakan di bagian Kabupaten Buru, Kepulauan Sula, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Barat Daya;
- 4) Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik diutamakan di Kabupaten Buru, Kepulauan Sula, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Barat Daya;
- 5) Penyelenggaraan guru kunjung di pulau-pulau kecil dan perbatasan;
- 6) Pengembangan sekolah kecil, diutamakan di Pulau Morotai, Kabupaten Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Maluku Tenggara Barat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7) Penyelenggaraan sekolah satu atap di wilayah kepulauan, diutamakan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Buru, dan Morotai;
- 8) Pembangunan sekolah berasrama di wilayah kepulauan, diutamakan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Buru, dan Morotai;
- 9) Pengembangan asrama sekolah diutamakan di bagian utara Kepulauan Maluku;
- 10) Pengembangan pendidikan jarak jauh;
- 11) Penyediaan bus sekolah di daerah tertinggal;
- 12) Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C);
- 13) Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untuk daerah tertinggal.

b. Bidang Kesehatan

- 1) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan diutamakan di kepulauan Aru dan Halmahera Tengah, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat;
- 2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan diutamakan di kepulauan Aru dan Halmahera Tengah, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat;
- 3) Pemberian tunjangan tenaga kesehatan diutamakan di kepulauan Aru dan Halmahera Tengah, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat;
- 4) Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan diutamakan di Kepulauan Aru dan Halmahera Tengah;
- 5) Pengadaan sarana kesehatan keliling di daerah tertinggal dan perbatasan;
- 6) Pengadaan puskesmas terapung di wilayah Kepulauan Maluku;
- 7) Pengadaan rumah sakit terapung di wilayah Kepulauan Maluku;
- 8) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di daerah tertinggal dan perbatasan diutamakan di Kepulauan Aru dan Halmahera Tengah;
- 9) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerah tertinggal dan perbatasan;
- 10) Pengembangan telemedis di daerah tertinggal.

c. Bidang Energi

- 1) Pengembangan PLTMH, PLTS, dan PLTMG diutamakan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kepulauan Aru;
- 2) Pengembangan energi biogas ramah lingkungan;
- 3) Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian 30-60 kWh;
- 4) Penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencil.

d. Bidang Informasi dan Telekomunikasi

- 1) Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi khususnya di desa-desa yang tersebar di Kepulauan Maluku;
- 2) Pembangunan menara penguat sinyal dan RRI dan TVRI, khususnya di Kabupaten Aru, Buru, Buru Selatan, Maluku Barat Daya Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, dan Pulau Morotai;
- 3) Pengembangan jaringan internet;

e. Bidang Permukiman dan Perumahan

- 1) Pembangunan perumahan layak huni di kawasan Wilayah Kepulauan Maluku;
- 2) Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di kawasan kepulauan Maluku;
- 3) Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di kawasan perhutanan, perairan, dan pesisir.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana induk dan rencana aksi pengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri, perkebunan, pangan-hortikultura, dan perikanan laut;
- b. Berdasarkan Penetapan Kawasan Pertanian Nasional hanya Kabupaten Halmahera Timur fokus dikembangkan komoditi padi, sedangkan kedelai dikembangkan di Kabupaten Maluku



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tenggara, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur. Untuk komoditi perkebunan difokuskan pada pala dan cengkeh dikembangkan di Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, dan Buru Selatan.

- c. Pengembangan kawasan pusat industri perikanan laut di wilayah Ambon dan Tual;
- d. Pengembangan kawasan industri di wilayah Seram Utara, Maluku Tenggara, dan Buru
- e. Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis perikanan laut, dan pengolahan hasil-hasil laut mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;
- f. Fasilitasi bantuan peralatan penangkapan ikan dengan sistem informasi lokasi;
- g. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan *Cold Storage* disetiap sentra perikanan;
- h. Pengembangan sentra produksi dan pusat pemasaran rumput laut dan perikanan di Maluku Utara dan Maluku;
- i. Pengembangan sentra kuliner pengolahan hasil laut di wilayah pesisir;
- j. Pemberian bantuan bibit pertanian dan perkebunan;
- k. Pengembangan jaringan irigasi;
- l. Pembangunan embung untuk mendukung jaringan irigasi;
- m. Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen;
- n. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan infrastruktur, sarana, promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat, khususnya di Pulau Morotai, Halmehara, Buru, Banda, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat;
- o. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian, museum;
- p. Pengembangan koperasi simpan pinjam;
- q. Pemberian skema kredit yang afirmatif bagi petani, nelayan, dan peternak;
- r. Pembangunan pasar kecamatan.

3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas

Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah dengan prioritas program sebagai berikut:

- a. Pengembangan 12 pelabuhan perikanan di Maluku, yaitu: (i) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN): Tantui/Ambon dan Dumar/Tual, (ii) Pelabuhan Penurunan Ikan (PPI): Eri/Ambon,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Taar/Tual, Amahai, Kayeli/Buru, Ukurlarang/ Maluku Tenggara Barat, Klishatu/Wetar, Kalar-kalar/Aru, (iii) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): Dobo, Tamher Timur/Seram Bagian Timur, Piru/Seram Bagian Barat); (iv) Pelabuhan Perikanan di Maluku Utara (Pulau Morotai) dan Sofifi;
- b. Peningkatan kapasitas sarana pelabuhan khususnya untuk mendukung pengembangan sektor agroindustri perkebunan;
 - c. Peningkatan kapasitas pelabuhan kapal penumpang dan ferry;
 - d. Pengadaan unit armada ferry baru di wilayah Maluku;
 - e. Pengembangan pelabuhan penyeberangan di pulau-pulau kecil yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara;
 - f. Pengembangan pelabuhan ferry untuk mendukung jalur operasional Trans Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah;
 - g. Pengembangan dermaga penyebrangan di pulau-pulau kecil yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara;
 - h. Pengembangan kapal perikanan tangkap 30 GT di kawasan perbatasan bagian utara dan barat daya wilayah Maluku;
 - i. Pengembangan bandara perintis di kawasan kepulauan dan perbatasan;
 - j. Pembangunan jalan dan jembatan Trans Maluku yang meliputi Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, dan Pulau Morotai;
 - k. Peningkatan Jalan Dawang-Waru-Airnanang di Kabupaten Seram Bagian Timur; Jalan Lintas Seram-Saleman di Kabupaten Maluku Tengah; dan Jalan Piru - Loki dan Taniwel - Saleman di Kabupaten Seram Bagian Barat; Jalan Weda - Matuting - Gane, Sake - Dehep - Payahe di Halmahera Selatan; serta Jalan Leksuka-Namrole di Buru Selatan;

4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan pemangku kepentingan pembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerah yang terintegrasi untuk menunjang pengelolaan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan. Strategi ini meliputi aspek peraturan perundangan, tata kelola, SDM, rumusan dokumen kebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pemenuhan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan, listrik, informasi, dan telekomunikasi di daerah tertinggal dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;
- b. Pengembangan dan peningkatan sarana pendidikan kejuruan, politeknik kelautan dan perikanan di bagian utara, tengah, dan tenggara wilayah Maluku;
- c. Pengembangan pusat informasi pemasaran serta teknologi, pendidikan, pelatihan untuk menunjang pengembangan SDM pelaku usaha khususnya sektor perkebunan dan perikanan laut;
- d. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan;
- e. Pengembangan keterampilan pengolahan pangan dan perikanan.

5. Penguatan Regulasi dan Insentif

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, bentuk afirmasi yang lebih nyata dan konkrit dilakukan dengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pelaksanaan prioritas program sebagai berikut:

- a. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antar-SKPD dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah;
- c. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal;
- d. Tunjangan khusus penyuluh pertanian.

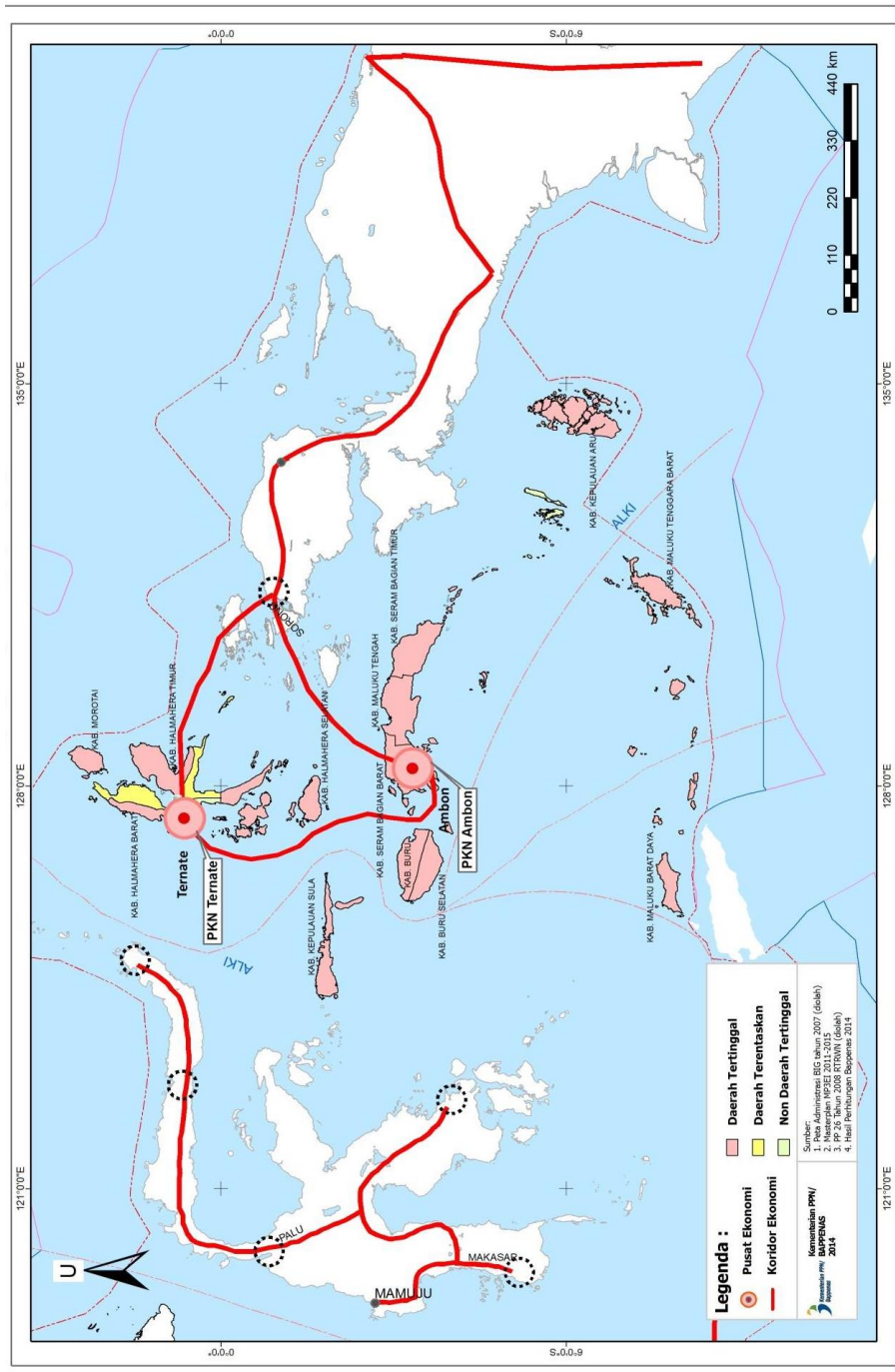
6. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan

Pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM.

7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan.

GAMBAR 3.3.
PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH KEPULAUAN MALUKU RPJMN 2015-2019



Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah wilayah Maluku terdiri dari 2 provinsi dengan total 21 kabupaten/kota, dimana 61,90 persen atau 13 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini sebesar 69,77, berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,86 persen, jauh dari target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal wilayah Maluku masih sebesar 18,65 persen, jauh dari target Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen.

Dalam periode RPJMN 2010-2014 di Wilayah Kepulauan Maluku telah ditetapkan 15 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 terdapat 2 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Akan tetapi, terdapat 1 kabupaten dengan status Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran yang masuk kategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Pulau Taliabu. Dengan demikian pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di Maluku diperkirakan sebanyak 14 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 11 kabupaten tertinggal dapat terentaskan.

3.5.3.2 Pengembangan Kawasan Perbatasan

Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kepulauan Maluku difokuskan untuk meningkatkan peran kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Australia, Palau, dan RDTL.

Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kepulauan Maluku diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Maluku, yaitu PKSN Saumlaki, Dobo, Ilwaki, dan Daruba, serta mempercepat pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun 2015-2019.

Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berinteraksi dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat. Strategi tersebut dilakukan sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1. Penguatan Pengelolaan Dan Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan Dan Pengamanan Kawasan Perbatasan Maluku.

Penguatan pengelolaan dan fasilitas penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan kawasan perbatasan secara terpadu di Wilayah Kepulauan Maluku, dilakukan dengan:

- a. Mengembangkan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu (satu atap);
- b. Mengembangkan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan Maluku dan Maluku Utara, serta penanganan illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing;
- c. Membenahi aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan Maluku dan Maluku Utara;
- d. Meningkatkan upaya perundingan dalam penetapan dan penegasan batas laut wilayah negara RI-Palau, RI-Australia, dan RI-RDTL;
- e. Penguatan fungsi pengamanan perbatasan wilayah darat dan laut dalam menjaga kedaulatan RI-RDTL dan RI-Australia.
- f. Sosialisasi batas laut wilayah negara RI-Palau, RI-Australia, maupun RI-RDTL kepada masyarakat perbatasan Wilayah Maluku, serta pelibatan peran serta masyarakat dalam menjaga pertahanan dan keamanan di perbatasan.
- g. Meningkatkan hubungan diplomatik RI-Palau, RI-Australia, dan RI-RDTL dalam konteks kerjasama lintas batas negara di bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial-budaya.
- h. Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparaturnya pengamanan perbatasan.
- i. Mendayagunakan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Kisar, Pulau Larat, Pulau Leti, Pulau Lirang, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Panambulai, Pulau Selaru, dan Pulau Wetar dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasan perbatasan negara di Wilayah Kepulauan Maluku, dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan tangkap dan sumber daya kelautan terutama rumput laut dan kerapu melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran di PKS N Saumlaki, PKS N Ilwaki, PKS N Dobo, dan PKS N Morotai;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Meningkatkan nilai potensi pariwisata bahari melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata) di PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Morotai;
- c. Mengembangkan pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan, dan pertambangan;
- d. Meningkatkan investasi pada sektor perikanan dan kelautan melalui kerjasama ekonomi RI-Palau dan RI-Philipina, termasuk di dua pulau terluar di sekitar Pulau Morotai, yaitu P. Sopi dan P. Bere-bere salah satunya yang mendesak yaitu penyediaan Kapal Tangkap 30 GT;
- e. Mengembangkan pusat perdagangan berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara tetangga (Australia, RDTL, dan Palau) di PKSN Morotai, PKSN Dobo, PKSN Dobo dan PKSN Ilwaki;
- f. Mengembangkan program transmigrasi di kawasan perbatasan dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri di Maluku dan Maluku Utara;
- g. Mengembangkan balai-balai latihan kerja untuk meningkatkan mengelola komoditas unggulan lokal yang berorientasi pasar ke negara tetangga (Australia, RDTL, dan Palau).

3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas

Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan negara di Wilayah Kepulauan Maluku, dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk di Wilayah Maluku, 3 (tiga) gugus pulau perbatasan di Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, serta konektivitasnya dengan sistem transportasi laut regional, nasional dan internasional;
- b. Pembangunan jalan non status pembuka akses menuju kampung, desa-desa di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri);
- c. Meningkatkan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi;
- d. Mengembangkan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk terutama pelabuhan di Pulau Leti dan pengadaan armada pengawasan perikanan 11 unit sebagai sarana pengawasan;
- e. Menjamin ketersediaan logistik, khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;

- f. Mengembangkan pusat pelayanan transportasi udara nasional dan internasional di PKS Saumlaki, Dobo, Ilwaki, dan Daruba;
- g. Menyediakan infrastruktur dasar kewilayahan terutama jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri).
- h. Penyediaan BTS dan penyediaan pusat layanan internet di kecamatan perbatasan Provinsi Maluku.

4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu mengelola sumber daya alam di kawasan perbatasan dapat melakukan aktivitas dengan negara tetangga dan turut mendukung upaya peningkatan kedaulatan negara dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berkualitas, dilakukan dengan:

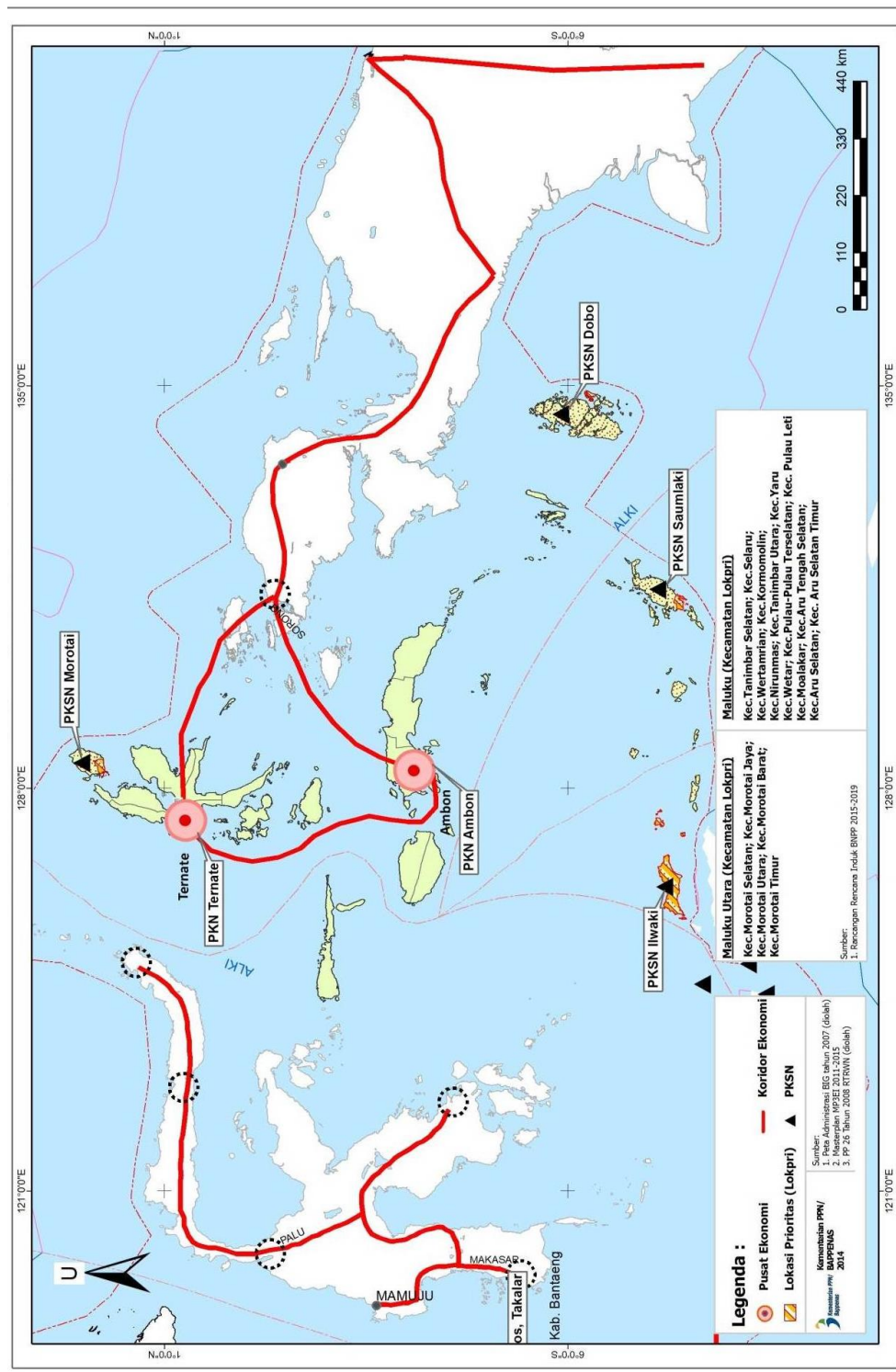
- a. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumber daya lokal (kelautan, perkebunan, pariwisata, maupun pertambangan) di kawasan perbatasan Maluku dan Maluku Utara;
- b. Mengembangkan sekolah satu atap berasrama di Kawasan Perbatasan Maluku dan Maluku Utara;
- c. Meningkatkan akses pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, termasuk di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk dengan penyediaan sarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah;
- d. Menyediakan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handal serta penyediaan insentif, serta sarana prasarana penunjang yang memadai, khususnya di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk terutama pengadaan dan revitalisasi alat-alat kesehatan pada Rumah Sakit Kepulauan Aru;
- e. Peningkatan status puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap di Provinsi Maluku;
- f. Meningkatkan kapasitas aparatur wilayah perbatasan melalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar dan pelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuan dan merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan;
- g. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam/potensi lokal di kawasan perbatasan.

5. Penguatan Regulasi dan Insentif

Regulasi yang perlu disusun dalam rangka afirmasi terhadap pengembangan kawasan perbatasan adalah, sebagai berikut:

- a. Akses masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung;
- b. Regulasi pengelolaan lintas batas;
- c. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI-RDTL, RI-Australia, maupun RI-Palau dalam pengembangan kawasan perbatasan negara;
- d. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan;
- f. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan;
- g. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;
- h. Pemberian kewenangan khusus bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik;
- i. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Maluku dan Maluku Utara;
- j. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara.

GAMBAR 3.4.
PETA SEBARAN LOKASI PRIORITAS (LOKPRI) KAWASAN PERBATASAN
WILAYAH KEPULAUAN MALUKU RP/JMN 2015-2019



TABEL 3.7.
DAFTAR LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
WILAYAH KEPULAUAN MALUKU

No.	Kabupaten	Kecamatan Lokasi Prioritas
1	Kab. Morotai	Morotai Selatan, Morotai Jaya, Morotai Utara, Morotai Barat, Morotai Timur
2	Kab. Maluku Tenggara Barat	Tanimbar Selatan, Selaru, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, Yaru
3	Kab. Maluku Barat Daya	Wetar, Pulau-Pulau Terselatan, Pulau Leti, Moalakar
4	Kab. Kepulauan Aru	Aru Tengah Selatan, Aru Selatan, Aru Selatan Timur

Sumber : Bappenas, 2014

3.5.4 Penanggulangan Bencana

Wilayah Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Maluku yang berada diujung patahan Sorong, dan Provinsi Maluku Utara yang sebagian besar (76,27 persen) merupakan wilayah perairan laut. Di Kepulauan Maluku terdapat 11 gunung, beberapa diantaranya merupakan gunung api aktif seperti Gunung Gamalama, Gunung Gamkonora dan Gunung Ibu. Jenis ancaman bencana alam yang sering terjadi di Kepulauan Maluku adalah banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim dan abrasi. Berdasarkan DIBI yang merekam kejadian bencana tahun 1815- 2014, berbagai kejadian bencana di Kepulauan Maluku telah mengakibatkan 3.514 orang meninggal dunia, 2.969 orang luka-luka, 213 orang hilang, 71.687 mengungsi dan 3.319 rumah hancur/rusak.

Dalam mendukung pengembangan wilayah Kepulauan Maluku, maka arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:

1. Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan, melalui:

- a. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 di kota sasaran.
- b. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/ Kota.
- c. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) berdasarkan kajian dan peta risiko di Kota Ambon, Kota Ternate, Kabupaten



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai, dan menjadi masukan untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota.

- d. Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota sasaran sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana banjir, longsor, gempa bumi dan tsunami di Kota Ambon, Kota Ternate Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:

- a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan di 12 kabupaten/kota sasaran di wilayah Kepulauan Maluku.
- b. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat yang difokuskan di 12 kabupaten/kota sasaran di wilayah Kepulauan Maluku.
- c. Bekerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di 12 kabupaten/kota sasaran di wilayah Kepulauan Maluku dengan memperhatikan karakteristik lokal.
- d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam banjir bandang di Way Ela Kabupaten Maluku Tengah dan daerah pasca bencana alam lainnya.
- e. Pemeliharaan, penataan bangunan dan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Wae Hatu Merah Apur Efir maupun daerah rawan bencana alam lainnya.
- f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi, banjir, longsor dan letusan gunung api.

3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, melalui:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah, diantaranya melalui penyediaan prasarana kantor/ gedung penanggulangan bencana daerah.
- b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, letusan gunung api, longsor dan banjir serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.
- c. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.
- e. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana di 12 kabupaten/kota sasaran di wilayah Kepulauan Maluku.
- f. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 1 (satu) unit pusat logistik di wilayah Pulau Maluku yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.
- g. Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana di 12 kabupaten/kota sasaran.
- h. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di 12 kabupaten/kota sasaran.

TABEL 3.8.
PROFIL KERAWANAN DAN RISIKO PKN, PKW DAN PKS
DI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU

Lokasi	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Kelas Multi Risiko (IRBI 2013)
Kawasan Pertumbuhan di Kab. Maluku Tengah	Tinggi untuk gempa bumi, gelombang dan abrasi	Tinggi
KEK Morotai/Kab. Morotai (Perkotaan Morotai Selatan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Transmigrasi)	Tinggi untuk gempa bumi, tsunami, banjir	Tinggi
Kawasan Industri Buli	Halmahera Timur tinggi untuk bencana banjir, gempa bumi, longsor dan tsunami.	Tinggi
Maba dan sekitarnya (Kawasan Agropolitan Wasile, Kawasan Transmigrasi, dekat PKW Tidore Kepulauan)	Kab. Halmahera Timur tinggi untuk ancaman banjir dan abrasi	Tinggi
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Maluku		
Ambon	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung api,	Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

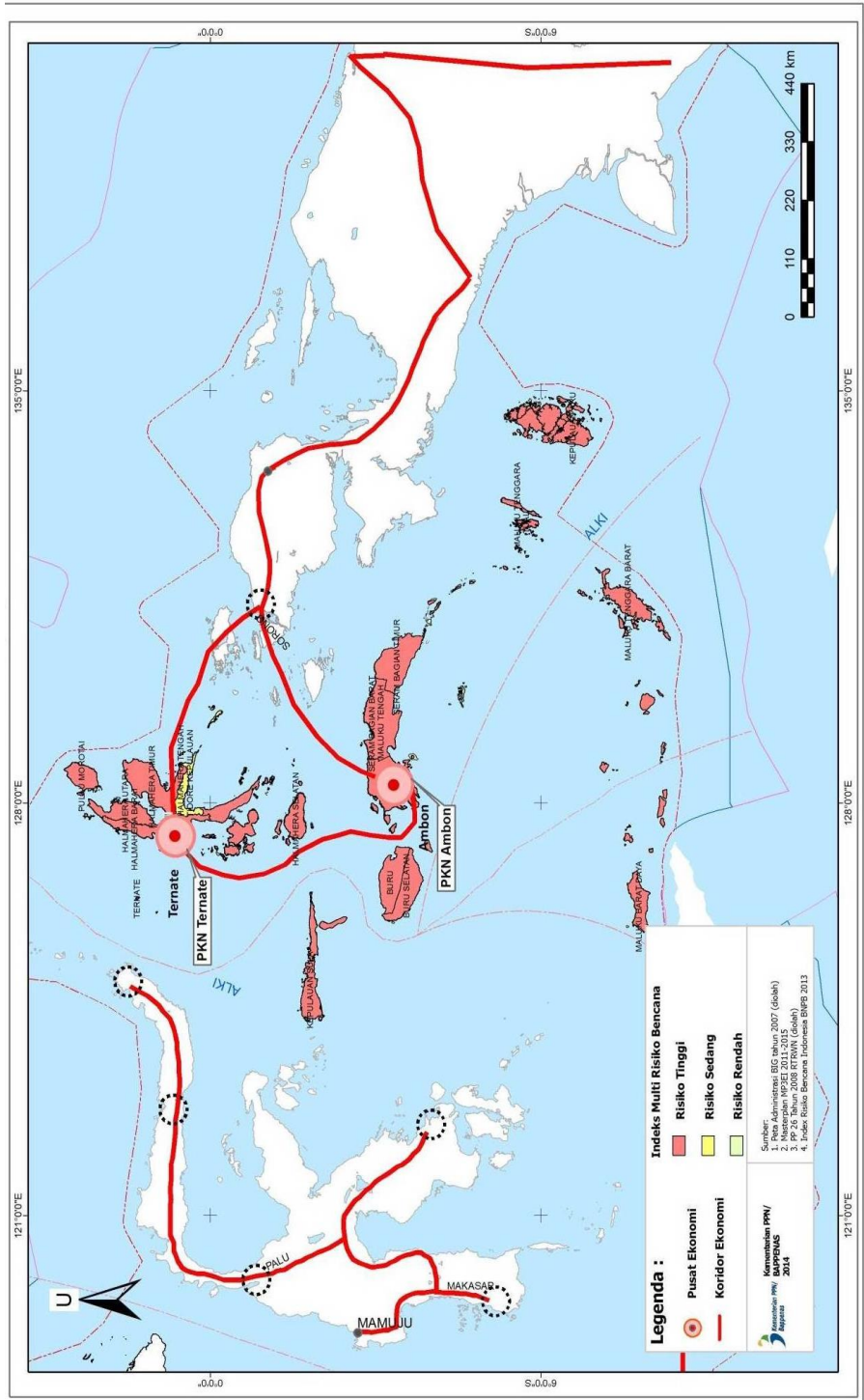
Lokasi	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Kelas Multi Risiko (IRBI 2013)
	cuaca ekstrim dan abrasi,	
Ternate	Tinggi untuk ancaman: gempabumi, cuaca ekstrim	Tinggi
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Maluku		
Masohi – Kab. Maluku Tengah	Tinggi untuk ancaman: gempabumi, cuaca ekstrim dan abrasi, kekeringan	Tinggi untuk Kab. Maluku Tengah
Werinama – Kab. Seram Bagian Timur	Tinggi untuk ancaman: cuaca ekstrim dan abrasi	Tinggi untuk Kab. Seram Bagian Timur
Kairatu - Kab. Seram Bagian Barat	Tinggi untuk ancaman: Abrasi	Tinggi untuk Kab. Seram Bagian Barat
Tual – Kab. Maluku Tenggara	Tinggi untuk ancaman: banjir, abrasi,	Tinggi untuk Kab. Maluku Tenggara Barat Tinggi untuk Kab. Tual
Namlea – Kab. Buru	Tinggi untuk ancaman: banjir, gempa bumi, abrasi,	Tinggi untuk Kab. Buru
Wahai – Kab. Maluku Tengah	Tinggi untuk ancaman: Gempa bumi, abrasi, kekeringan	Tinggi untuk Kab. Maluku Tengah
Tidore Kepulauan	Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, gunung api, tsunami, banjir	Tinggi untuk Kab. Kepulauan Tidore
Tobelo – Kab. Halmahera Utara	Tinggi untuk ancaman: Gempa bumi, tanah longsor	Tinggi untuk Kab. Halmahera Utara
Labuha – Kab. Halmahera Selatan	Tinggi untuk ancaman: banjir, gempa bumi, angin topan	Tinggi untuk Kab. Halmahera Selatan
Sanana – Kab. Kepulauan Sula	Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, tsunami, banjir	Tinggi untuk Kab. Kepulauan Sula
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Maluku		
Saumlaki – Kab. Maluku Tenggara Barat	Tinggi untuk ancaman: cuaca ekstrim dan abrasi,	Tinggi untuk Kab. Maluku Tenggara Barat
Ilwaki – Kab. Maluku Barat Daya	Tinggi untuk ancaman: cuaca ekstrim dan abrasi	Tinggi untuk Kab. Maluku Barat Daya
Dobo – Kab. Kepulauan Aru	Tinggi untuk ancaman: cuaca ekstrim, tsunami	Tinggi untuk Kab. Kepulauan Aru
Daruba – Kab. Morotai	Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, tsunami, banjir	Tinggi untuk Kabupaten Pulau Morotai

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 3.5.
PETA INDEKS RISIKO BENCANA WILAYAH KEPULAUAN MALUKU



3.5.5 Penataan Ruang Wilayah Maluku

A. Arah Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kepulauan Maluku

1. Kebijakan mewujudkan struktur ruang wilayah Kepulauan Maluku melalui kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana dengan sistem jaringan prasarana yang handal serta memperhatikan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan.
2. Kebijakan mewujudkan sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana meliputi:
 - a. Pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana;
 - b. Pengembangan jaringan transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah;
 - c. Pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau; dan
 - d. Pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana.
3. Kebijakan mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan melalui pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan.
4. Kebijakan mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil meliputi:
 - a. Pengembangan dan rehabilitasi sentra perkebunan; dan
 - b. Pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambangan mineral.
5. Kebijakan mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau meliputi:
 - a. Percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - b. Pemertahanan eksistensi PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) meliputi:
 - a. Pengembangan KSN Perbatasan dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Pengembangan KSN untuk mendukung Kepulauan Maluku sebagai lumbung ikan nasional;

B. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kepulauan Maluku

I. Struktur Ruang Wilayah

1. Strategi pengembangan jaringan transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah, dilakukan dengan:
 - a. Mengembangkan jaringan transportasi antarmoda yang menghubungkan Pulau Kecil berpenghuni dengan kawasan perkotaan nasional; dan
 - b. Mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan dermaga di Pulau Kecil berpenghuni.
2. Strategi pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau, dilakukan dengan:
 - a. Mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan lintas penyeberangan pada pulau-pulau dalam Gugus Pulau; dan
 - b. Mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan dan bandar udara.
3. Strategi pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana yaitu dengan mengembangkan dan merehabilitasi prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami.

Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.9.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 3.9
PRIORITAS LOKASI PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN KEPULAUAN
MALUKU 2015-2019

Provinsi	Pusat Kegiatan dalam RTRWN		
	PKN	PKW	PKSN
Maluku	Ambon (I/C/1)	Masohi (I/C/1)	Saumlaki (I/A/2)
		Werinama (II/C/2)	Ilwaki (II/A/2)
		Kairatu (II/C/1)	Dobo (II/A/2)
		Tual (II/C/1)	
		Namlea (II/C/1)	
		Wahai (II/B)	
		Bula (II/B)	
Maluku Utara	Ternate (I/C/1)	Tidore (I/C/1)	Daruba (I/A/2)
		Tobelo (II/C/2)	
		Labuha (II/C/1)	
		Sanana (II/C/2)	

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014

II. Pengembangan Kawasan Lindung

1. Strategi penetapan dan pelestarian kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi meliputi:
 - a. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan yang termasuk dalam Segitiga Terumbu Karang yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
 - b. Mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan transportasi perairan yang berpotensi merusak fungsi ekologis kawasan konservasi di laut.
2. Strategi pengendalian wilayah perairan di sekitar Koridor Ekosistem meliputi mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan aktivitas transportasi pada Koridor Ekosistem.
3. Strategi mempertahankan luasan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi meliputi:
 - a. Melestarikan kawasan suaka alam dan pelestarian alam dalam kesatuan Gugus Pulau; dan
 - b. Mempertahankan luasan dan merehabilitasi kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS;
 - d. Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan DAS dengan mempertimbangkan morfologi tanah, curah hujan, kondisi geologi, dan jenis tanamannya.
4. Strategi pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan meliputi:
 - a. Mengembangkan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan sebagai kawasan minapolitan yang berkelanjutan; mempertahankan, memelihara, dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial; dan
 - b. Meningkatkan keterkaitan sentra produksi perikanan dengan kawasan perkotaan nasional.
 4. Strategi pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana, dilakukan dengan:
 - a. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; dan
 - b. Mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional.

III. Pengembangan Kawasan Budidaya

1. Strategi pengembangan dan rehabilitasi sentra perkebunan dilakukan dengan mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan.
2. Strategi pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambangan mineral, dilakukan dengan:
 - a. Merehabilitasi sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. Mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberadaan Pulau Kecil.
3. Strategi untuk percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup dengan mempercepat pengembangan PKS sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, dan simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;

4. Strategi untuk pemertahanan eksistensi PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia meliputi dengan mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meati Marang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Liran.

IV. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional

Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dikembangkan 3 (tiga) KSN yang mendukung pengembangan wilayah di Kepulauan Maluku. Strategi pengembangan KSN di Kepulauan Maluku dapat dilihat pada Tabel 3.10.

TABEL 3.10
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
DI KEPULAUAN MALUKU

	KSN	Tipe	Strategi	K/L
1	Kawasan Perbatasan Maluku	Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	Mengembangkan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara) di Kawasan Perbatasan Maluku, Kawasan Perbatasan Maluku Utara-Papua Barat	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (PU) - BNPP - Kementerian Pertahanan
2	Kawasan Perbatasan Maluku Utara-Papua Barat			
3	Kawasan Laut Banda	Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam	Mengembangkan Kawasan Laut Banda sebagai Lumbung Ikan Nasional dengan memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (PU) - Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.

3.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Arah kebijakan pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku yakni peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang mendorong pembangunan ekonomi dan pelayanan publik berbasis kepulauan, dengan strategi:

1. Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat;
2. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
3. penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah.
4. Peningkatan proporsi belanja modal;
5. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line;
6. Penguatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah.

3.6 Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Maluku

3.6.1 Prioritas Program Pembangunan

3.6.1.1 Provinsi Maluku

Tabel 3.11
Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
di Provinsi Maluku

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Ambon*
PERHUBUNGAN UDARA
1. Perpanjangan Runway Bandara di Tual
2. Pengembangan Bandar Udara Amahai*
3. Pembangunan Bandara Namniwel*
4. Pembangunan Bandara Moa*
5. Pengembangan Bandara Sultan Babullah
6. Pengembangan Bandara Tepa (Kab. Maluku Barat Daya) untuk membuka keterisolasian
7. Pengembangan Bandara 1. Pattimura (Kota Ambon)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
8. Pengembangan Bandara Dobo (Kab. Kepulauan Aru)
9. Pengembangan Bandara Namrole (Kab. Buru)
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pembangunan Dermaga Kapal di Waisamu
2. Pembangunan Pelabuhan Areate
3. Pembangunan Dermaga Laut di Makariki
4. Pelabuhan Container di Passo
5. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Ambon*
6. Pelabuhan Ilath (Kab. Buru)
7. Pelabuhan Loki (Kab. Seram Bagian Barat)
8. Pelabuhan Pelita Jaya (Kab. Seram Bagian Barat)
9. Pelabuhan Tifu (Kab. Buru Selatan)
10. Pelabuhan Wamsisi (Kab. Buru Selatan)
11. Pelabuhan Kur (Kota Tual)
12. Pelabuhan Taniwel (Kab. Maluku Tengah)
13. Pelabuhan Fogi (Kab. Buru Selatan)
14. Pelabuhan Tual (Kota Tual)
15. Pelabuhan Dobo (Kab. Kepulauan Aru)
16. Pelabuhan Dawelor (Kab. Maluku Barat Daya)
17. Pelabuhan Mahaleta (Kab. Maluku Barat Daya)
18. Pelabuhan Yos Sudarso (Kota Ambon)
19. Pelabuhan Tulehu (Kab. Maluku Tengah)
20. Pelabuhan Amahai (Kab. Maluku Tengah)
21. Pelabuhan Saparua (Kab. Maluku Tengah)
22. Pelabuhan Tual (Kota Tual)
23. Pelabuhan Saumlaki (Kab. Maluku Tenggara Barat)
24. Rehab/Pengembangan Pelabuhan Larat (Kab. Maluku Tenggara Barat)
25. Pelabuhan Wonreli (Kab. Maluku Barat Daya)
26. Pembangunan kapal barang dan penumpang 7 unit
27. Pengembangan Pelabuhan Namrole
28. Pengembangan Pelabuhan Larat
29. Pengembangan Pelabuhan P.Buano
30. Pengembangan Pelabuhan Namlea
31. Pengembangan Pelabuhan Marlasi
32. Pengembangan Pelabuhan Kobrur
33. Pengembangan Pelabuhan Teor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
34. Pengembangan Pelabuhan Kroing
JALAN
1. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Ibra--Damar-Tetoat (P. Tual)
2. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Barat Pulau Seram (Kairatu-Piru-Traniwei-Lisabota-Saleman)*
3. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Pulau Ambon (Laha-Alang-Wukasibu-Asilulu-Kaitetu-Hitu-Morela-Liang)*
4. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Selatan Pulau Seram (Haya-Tehoru-Warin-Kotabaru-Airnanang)
5. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Timur Pulau Seram (Airnanang-Musiwang-Waru-Bula)
6. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Leksuka - Namrole (P. Buru)
7. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Tual - Ngadi - Tamedan - Ohoitu (P. Tual)
8. Pembangunan flyover Sudirman
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wonreli
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sewaru
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Moa
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Lakor
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P.Sermata
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tepa
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Sanana
8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Teluk Bara
9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tual
10. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Adaut
11. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Geser
12. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Teor *
13. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kesui*
14. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wunlah*
15. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Gorom*
16. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kur (Kota Tual) untuk membuka keterisolasian
17. Pelabuhan Penyeberangan Lamerang (Kab. Kepulauan Aru)
18. Pembangunan Ferry Jenis RoRo 500 BWT (5 unit)
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTMG Mobile PP (Ambon) 70 MW



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
2. PLTMG Ambon Peaker 30 MW
3. PLTMG Langgur 20 MW
4. PLTMG Seram Peaker 20 MW
5. PLTP Tulehu (FTP2) 2x10 MW
6. PLTMG Namlea 10 MW
7. PLTMG Dobo 10 MW
8. PLTMG Saumlaki 10 MW
9. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
1. Pembangunan backbone Palapa Ring, Telekomunikasi Informatika
2. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
3. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Bendung D.I. Bula (Fufa) Seram Bagian Timur
2. Pembangunan Irigasi Lahan Kering Kec. Tanimbar Maluku Tenggara Barat
3. Pembangunan D.I. Way Simi Buru Selatan
4. Pembangunan D.I Tehoru P. Seram Buru Selatan
5. Ambon <i>Waterfront City</i> Ambon
6. Pembangunan Waduk Way Apu
7. Pembangunan Waduk Way Sapalewa
PENDIDIKAN
1. Pembangunan sarana prasarana dikdasmen, peningkatan PAUD dan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan (termasuk guru) bagi penyandang cacat
2. Pembangunan dan pengembangan pendidikan Maluku berbasis IT
3. Pembangunan sekolah satu atap berasrama dan pelatihan keterampilan untuk menjamin mutu dan akses pendidikan di Kep. Aru, Kep. Tanimbar, Kep. Babar, pulau pulau terselatan, P. Buru, SBT, SBB dan Maluku Tengah.
4. Revitalisasi peralatan untuk laboratorium SMK (teknik, pariwisata, kelautan, pertanian, peternakan) di 11 kab/kota.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana SMK perikanan.
6. Pengembangan sarana prasarana SUPM/ Sekolah Umum Perikanan Maluku
7. Pembangunan rumah dinas tenaga pendidik di wilayah terpencil, tertinggal, terisolasi.
8. Peningkatan kualitas SDM untuk tenaga kependidikan di 11 kab/kota.
9. Pengembangan IAIN Ambon, STAKPEN Ambon, dan STAKN Ambon
10. Revitalisasi Gedung Pusat Gelar Karya Seni dan Budaya Maluku



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
11. Penguatan kapasitas lembaga Kebudayaan Daerah Maluku
12. Kajian Pengembangan Nilai-nilai Budaya Maluku (diarahkan untuk muatan pendidikan)
KESEHATAN
1. Peningkatan puskesmas rawat inap menjadi RS Pratama di 39 pusat gugus pelayanan kesehatan.
2. Pembangunan RS daerah maluku sebagai RS pendidikan (RS Dr Haulusy).
PERUMAHAN
Penyediaan SPAM kawasan khusus, Kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Kawasan Perdesaan di 255 lokasi tersebar 11 Kabupaten/Kota.

3.6.1.2 Provinsi Maluku Utara

TABEL 3.12
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI
MALUKU UTARA

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Sultan Babullah Ternate
2. Pembangunan Bandara Pitu Morotai
3. Pengembangan Bandara Oesman Sadik Labuha
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Sofifi/Kaiyasa
2. Pengembangan Pelabuhan Subaim
3. Pengembangan Pelabuhan Malbufa
4. Pengembangan Pelabuhan Tikong
5. Pengembangan Pelabuhan Wayaluar-Obi
6. Pengembangan Pelabuhan Saketa
7. Pengembangan Pelabuhan Bosua
8. Pembangunan Pelabuhan Khusus di Tanjung Buli
9. Pengembangan Pelabuhan Tobelo
10. Pengembangan Pelabuhan Matui-Jailolo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
11. Pengembangan Pelabuhan Labuha/Babang
12. Pengembangan Pelabuhan Laut Falabisahaya
13. Pengembangan Pelabuhan Loleojaya
14. Pengembangan Pelabuhan Tifure
15. Pengembangan Pelabuhan Manu/Gamumu
16. Pengembangan Pelabuhan Bicoli
17. Pengembangan Pelabuhan Tapaleo
18. Pengembangan Pelabuhan Daruba
19. Pengembangan Pelabuhan Damao
20. Pengembangan Pelabuhan Dorume
21. Pengembangan Pelabuhan Galela
22. Pengembangan Pelabuhan Bisui
23. Pengembangan Pelabuhan Kotiti
24. Pengembangan Pelabuhan Indari
25. Pengembangan Pelabuhan Yaba
26. Pengembangan Pelabuhan Banemo
27. Pengembangan Pelabuhan Laiwui
28. Pengembangan Pelabuhan Wayabula
29. Pengembangan Pelabuhan Gebe
30. Pembangunan Dermaga General Cargo 100 meter - Pelabuhan Sofifi
31. Pembangunan Pelabuhan Ternate*
JALAN
1. Pembangunan Jalan Daruba - Wayabula - Sopi - Barebare
2. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Selatan (Weda - Matuting - Gane, Sakea - Dehep - Payahe)
3. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Tengah (Boboneigo-Ekor-Subaim-Lolobata-Tamtam-Akelamo-Gamloba-JaraJara-Buli-Maba-Sagea-Patani)
4. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Utara (Sidangoli-Jailolo-Goal-Kedi-Galela)
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Mangole
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Obi
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wahai
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Makian
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sofifi
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Soasio



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Weda *
8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Moti
9. Pengembangan Sisi Darat Dermaga Penyeberangan Bastiong
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTMG Mobile PP (Ternate) 30 MW
2. PLTMG Mobile PP (Sofifi) 10 MW
3. PLTMG Mobile PP Tobelo 10 MW
4. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
1. Pembangunan backbone Palapa Ring, Telekomunikasi Informatika
2. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
3. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Maba Thp. I KAB. HALMAHERA TIMUR
2. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Jailolo Thp. I KAB. HALMAHERA BARAT
3. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Bisui & Tabahidayat KAB. HALMAHERA SELATAN
4. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Obi Thp. I KAB. HALMAHERA SELATAN
5. Pembangunan Embung Pulau Sanana Kab. Kepulauan Sula
6. Pembangunan Bendung dan Jar. Irigasi D.I. Jani 650 Ha Halmahera Barat
7. Pembangunan Bendung & Jaringan Irigasi DI. Leleseng 1500 Ha Halmahera Timur
PENDIDIKAN
Peningkatan akses layanan pendidikan untuk pulau kecil dan terluar melalui SD dan SMP satu atap
KESEHATAN
Peningkatan akses layanan kesehatan terutama untuk pulau kecil dan terluar (infrastruktur dan tenaga kesehatan)
PERUMAHAN
1. Rusunawa: Sofifi, Ternate, Tobelo, Bacan/Babang, Sanana, Buli, dan Weda
2. SPAM Kota Ternate (Batang Dua dan Pulau Hiri)
3. SPAM Khusus di Pulau Morotai, Pulau Sula, dan Pulau Taliabu
4. SPAM Tidore tersebar; SPAM Halmahera Barat; SPAM Halmahera Selatan; SPAM Halmahera Tengah, SPAM Halmahera Utara;

3.6.2 Kerangka Regulasi

Pelaksanaan pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku tidak terlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Perpajakan Kepabeanaan, dan Cukai di Kawasan Ekonomi Khusus serta aturan turunannya;
2. Penyelesaian Peraturan tentang Ketenagakerjaan di Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Penyelesaian Peraturan tentang Pelimpahan Kewenangan perdagangan, keimigrasian, perindustrian, pertanahan, tenaga kerja dari kementerian/lembaga terkait kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;
4. Membuat regulasi terkait pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pengelola/Pengusahaan kawasan;
5. Regulasi pelayanan terpadu satu pintu di bidang investasi di kawasan;
6. Regulasi pengelolaan lintas batas;
7. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI-RDTL, RI-Australia, maupun RI-Palau dalam pengembangan kawasan perbatasan negara;
8. Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan *Dryport*;
9. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
10. Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No.77/2014 tentang RTR Kepulauan Maluku; penetapan Perpres RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kawasan Perbatasan Maluku dan Kawasan Maluku Utara-Papua Barat; dan Perpres RTR KSN Kawasan Laut Banda;
11. Regulasi yang mendukung implementasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan.

3.6.3 Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku tidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi di kawasan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Pelimpahan kewenangan perijinan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait kepada pengelola kawasan strategis nasional di Maluku;
3. Kemudahan masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung;
4. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan;
5. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan;
6. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;
7. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik;
8. Peningkatan koordinasi antara Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi di Wilayah Maluku dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau.

BAB 4

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA

4.1. Capaian Kinerja Saat ini

- Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Nusa Tenggara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, rata-rata pertumbuhan Wilayah Nusa Tenggara selama kurun waktu 2009 – 2013 yang sebesar 4,5 persen masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan migas nasional sebesar 5,9 persen. Peranan Wilayah Nusa Tenggara dalam pembentukan PDB nasional mengalami penurunan dari 1,5 persen (2009) menjadi 1,3 persen (Triwulan II 2014).
- Pemerintah Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara telah berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret) walaupun persentasenya masih berada di atas angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen (2009) dan 11,25 persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT), Pemerintah Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara juga telah berhasil menurunkan TPT dan sudah berada di bawah TPT nasional sebesar 7,87 persen (2009) dan 5,70 persen (Feb 2014).
- Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan selalu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi di Wilayah Nusa Tenggara. Namun demikian, pencapaian IPM di Wilayah Nusa Tenggara masih perlu ditingkatkan karena masih jauh di bawah IPM nasional sebesar 71,76 (2009) dan 73,81 (2013).
- Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, seluruh provinsi di Wilayah Nusa Tenggara mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini diindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi di Wilayah Nusa Tenggara cenderung meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2009, namun masih berada di bawah nasional sebesar 0,37 (2009) dan 0,413 (2013). Kedepan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

4.2 Potensi dan Keunggulan Wilayah

Perekonomian Wilayah Nusa Tenggara ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu pertanian, jasa-jasa, serta perdagangan, hotel dan restoran. Di luar ketiga sektor utama tersebut, sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki peran yang cukup besar.

- Sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Wilayah Nusa Tenggara. Komoditas unggulan tanaman pangan di Wilayah Nusa Tenggara yaitu jagung dengan tingkat produksi jagung sebesar 947.762 ton pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 1.335.723 ton pada tahun 2013.
- Di sektor peternakan, jumlah populasi paling dominan di Wilayah Nusa Tenggara adalah sapi potong, babi, dan kambing. Provinsi Nusa Tenggara Barat mendominasi dalam persebaran populasi sapi potong dengan jumlah populasi sapi potong di tahun 2013 mencapai 1.002 ekor, kambing mencapai 643 ekor. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur unggul dalam jumlah populasi babi yang mencapai 1.729 ekor di tahun 2013.
- Produksi perikanan dan kelautan di Wilayah Nusa Tenggara terdiri atas perikanan tangkap dan budidaya, dengan produksi terbesar perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk perkembangan budidaya perikanan, produksi terbesar adalah jenis budidaya laut dan budidaya tambak, dengan sebaran terbesar untuk produksi perikanan budidaya laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan produksi perikanan budidaya tambak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Produk kelautan Wilayah Nusa Tenggara adalah garam dan rumput laut. Dalam konteks nasional, Wilayah Nusa Tenggara merupakan lahan potensial produksi garam yang luas di Kawasan Timur Indonesia, mengingat kondisi geografisnya sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi lebih banyak sumber air laut. Sementara itu, volume produksi rumput laut pada tahun 2012 mencapai 2,649 ton di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 481 ton di Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau sekitar 41 persen dari volume produksi nasional (Statistik Kelautan dan Perikanan, 2012).
- Peran Wilayah Nusa Tenggara bidang pariwisata bagi nasional didasarkan atas potensi keadaan alam terutama bahari. Dalam hal ini Wilayah Nusa Tenggara diharapkan menjadi etalase wisata ekologis, petualangan, budaya dan bahari serta kepariwisataan yang berbasis UKM. Destinasi pariwisata yang akan diunggulkan yaitu Sail Komodo yang direncanakan sebagai destinasi wisata internasional. Gunung Kelimutu di Flores Nusa Tenggara Timur dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pulau Komodo di Nusa Tenggara Barat menjadi fokus promosi destinasi wisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2014.

- Wilayah Nusa Tenggara dengan potensi pariwisata yang beragam telah disiapkan menjadi destinasi MICE. Kegiatan MICE selain mendorong kunjungan wisatawan dalam jumlah besar juga akan memperkenalkan potensi daya tarik wisata serta citra wilayah yang positif.
- Potensi sumber daya alam mineral di Wilayah Nusa Tenggara adalah unsur logam, dengan potensi terbesar adalah bijih mangan dan tembaga. Potensi tambang bijih mangan tersebar di beberapa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, tambang bijih tembaga terbesar di Indonesia terdapat di daerah Batu Hijau, Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sumberdaya mangan di Wilayah Nusa Tenggara diperkirakan sebesar 3,44 juta ton berupa bijih mangan dan 1,03 juta ton merupakan logam. Sementara itu, cadangan mangan diestimasi sebesar 1,08 juta ton berupa bijih mangan dan sebanyak 0,45 juta ton berupa logam dan terpusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Mineral and Coal Statistics*, 2012). Saat ini, ekspor mangan masih dalam bentuk bahan mentah bijih mangan mengingat belum adanya industri pengolahandi Wilayah Nusa Tenggara. Dalam kurun waktu 2008 – 2013, ekspor mangan sendiri mengalami penurunan sebagai akibat dari penurunan harga komoditi mangan di pasar dunia.
- Komoditas SDA mineral lain yang sangat berpengaruh pada perekonomian Wilayah Nusa Tenggara adalah bijih tembaga. Produksi bijih tembaga yang telah diolah menjadi konsentrat tembaga menunjukkan tren penurunan dalam 3 tahun terakhir sebagai dampak dari terjadinya penghentian produksi pada saat perluasan lahan eksploitasi di Batu Hijau. Pada tahun 2012 produksi konsentrat tembaga di Wilayah Nusa Tenggara mencapai sekitar 73 ribu ton, dengan 20 persennya dijual ke pabrik *smelter* di Gresik, Jawa Timur dan sebagian lagi diekspor. Nilai ekspor tembaga dalam lima tahun terakhir dalam tren meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dan keterbatasan suplai di pasar dunia.

4.3 Tema Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Nusa Tenggara, maka tema besar Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara sebagai:

- Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE);
- Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut;
- Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung;
- Pengembangan industri mangan, dan tembaga.

4.4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Tujuan pengembangan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun sasaran pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Nusa Tenggara, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 Kawasan Ekonomi Khusus dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.
2. Sementara itu, untuk mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 20 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 5,90 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 15,62 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar rata-rata 68,98.
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Nusa Tenggara, maka akan diusulkan pembangunan 1 Kawasan



- Perkotaan Metropolitan yang berperan sebagai PKN dan optimalisasi 1 kota sedang sebagai *buffer* urbanisasi.
4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan pengangguran di desa-desa tertinggal dan mempercepat pembangunan ekonomi menuju desa mandiri.
 5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 5 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
 6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
 7. Sasaran Otonomi Daerah untuk Wilayah Nusa Tenggara adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 30 persen untuk propinsi dan 10 persen untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 25 persen dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 25 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 provinsi dan 20 kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara; (4) Terlaksananya *e-budgeting* di wilayah Nusa Tenggara (dengan proyek awal Provinsi NTT); (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50 persen dan S2-S3 sebesar 5 persen; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Nusa Tenggara sebesar 30 angkatan; (7) Terlaksananya pengaturan kewenangan secara bertahap di wilayah Nusa Tenggara (dengan proyek awal Provinsi NTB); (8) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (9) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100 persen; (10) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 100 persen; (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Nusa Tenggara.
 8. Sasaran Penanggulangan Bencana di Wilayah Nusa Tenggara adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 15 kabupaten/kota sasaran (Kota Mataram, Kota Kupang, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Bima,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ngada, Ende, Sikka, Manggarai, Alor dan Belu) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK maupun kawasan pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Nusa Tenggara terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 1,27 (2013) menjadi 1,31 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.3 sebagai berikut.

TABEL 4.1.
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI
WILAYAH NUSA TENGGARA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nusa Tenggara Barat	3.7	8.1	8.3	8.7	9.0
Nusa Tenggara Timur	6.0	6.2	6.8	7.6	9.5

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 4.2.
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN
WILAYAH NUSA TENGGARA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nusa Tenggara Barat	16.9	15.6	14.4	13.2	12.0
Nusa Tenggara Timur	18.4	17.0	15.7	14.3	12.9

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 4.3.
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN
WILAYAH NUSA TENGGARA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nusa Tenggara Barat	4.9	4.8	4.6	4.4	4.2
Nusa Tenggara Timur	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

4.5. Arah kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

4.5.1. Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing nasional dan internasional berbasis pengembangan industri MICE, serta pengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga. Persebaran kawasan strategis berada di beberapa provinsi, meliputi Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Percepatan pembangunan kawasan strategis dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Kepulauan Nusa Tenggara

Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis erat kaitannya dengan memberdayakan masyarakat berbasis potensi ekonomi wilayah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan. Strategi yang dilakukan adalah:

- a) Menyiapkan kawasan KEK Mandalika sebagai pusat kegiatan MICE bertaraf internasional;
- b) Meningkatkan produktivitas industri kreatif penunjang pariwisata kawasan KEK Mandalika;
- c) Meningkatkan logistik penunjang kegiatan pariwisata di kawasan KEK Mandalika;
- d) Menyiapkan kawasan pengelolaan klaster-klaster komoditas unggulan sapi, garam, rumput laut, dan jagung secara terpadu serta industri hilirnya;
- e) Pembinaan dan pendampingan pengelolaan komoditas unggulan sapi, garam, rumput laut, dan jagung untuk meningkatkan produktivitas.

2. Percepatan Penguatan Konektivitas

Peningkatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan-kawasan penyangga sekitarnya meliputi:

- a) Pengembangan Bandara Internasional Lombok dan Bandara Sultan Salahuddin Bima;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

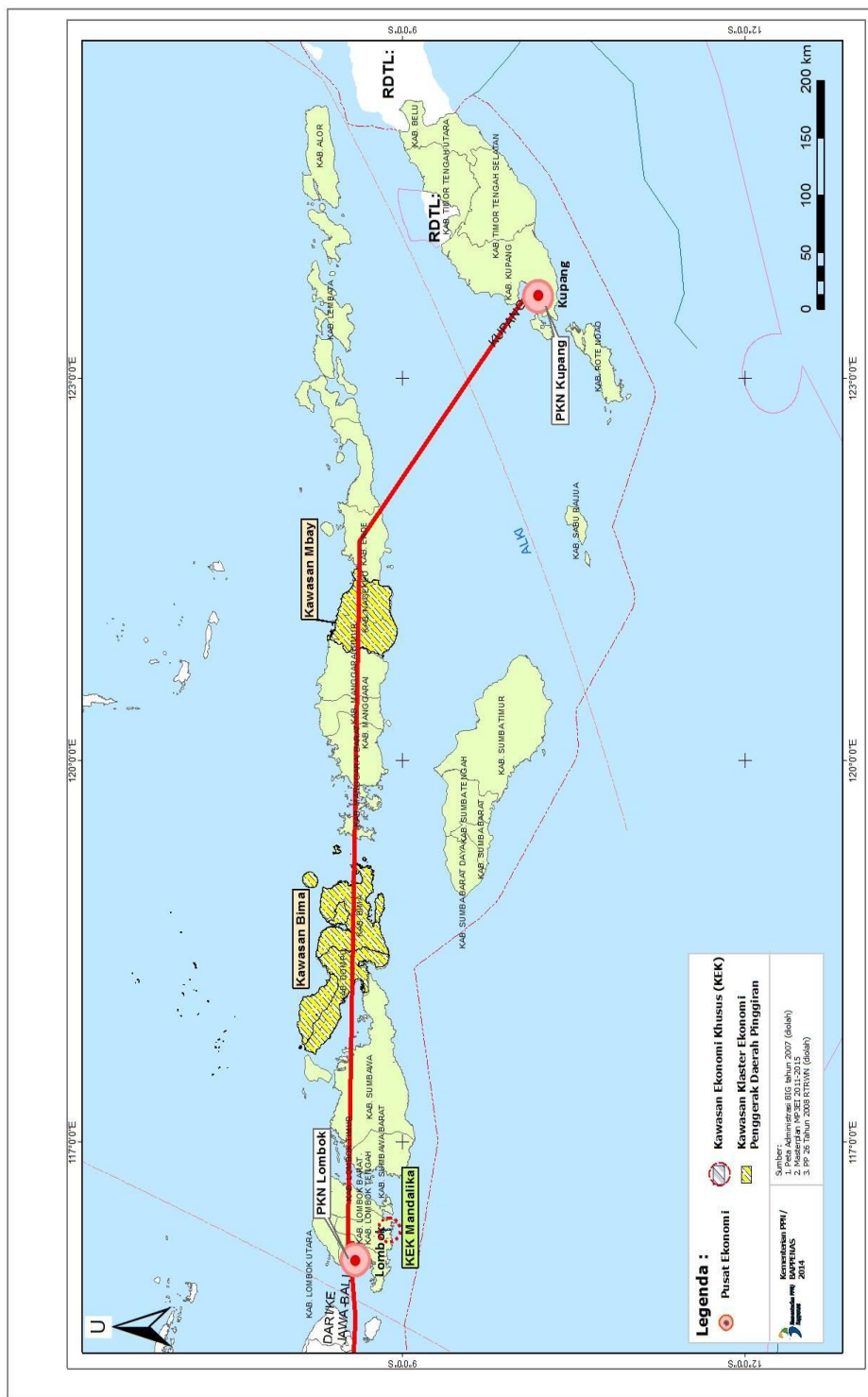
- b) Pembangunan jalan penghubung kawasan strategis;
- c) Pembangunan ruas jalan Bangau - Dompu - Ramba - Labuhan Bajo;
- d) Pembangunan bendungan penunjang kawasan strategis, diantaranya Bendungan Tanju-Mila; serta
- e) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bima, PLTP Hu'u, PLTP Mataloka dan penyediaan jaringan penyaluran energi berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) di sekitar kawasan.

3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat maupun di daerah, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dilakukan dengan strategi:

- a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola dan Perusahaan di bidang perencanaan, penganggaran, pengelolaan kawasan dan investasi;
- b) Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang industri jasa pariwisata;
- c) Peningkatan koordinasi antara Badan Pengelola/ Perusahaan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;
- d) Pembangunan *Science Park* berteknologi tinggi bidang pangan, perikanan, maritim, dan jasa pariwisata sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan;
- e) Memberikan pembinaan kelembagaan yang mendukung perubahan pola pikir bisnis berorientasi daya saing secara komparatif dan kompetitif;
- f) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga terampil untuk meningkatkan kualitas SDM terhadap kompetensinya mengelola industri peternakan sapi, garam, rumput laut, dan jagung;
- g) Pembangunan *Technology Park* bidang komoditas sapi, garam, rumput laut, dan jagung serta pariwisata untuk meningkatkan inovasi teknologi.

GAMBAR 4.1
PETA LOKASI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH NUSA TENGGARA RPJMN 2015-2019



Legenda :

-  Pusat Ekonomi
-  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
-  Kawasan Kluster Ekonomi Penggerak Daerah Pengiripan

Sumber :
 1. Rencana Strategis RPJMN 2015-2019
 2. Peraturan Menteri No. 20/2015
 3. PP. 25 Tahun 2008 RTM/N (Gubernur)

Kontribusi PPN/IMPRESAS 2014

4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Dalam upaya pengembangan kawasan strategis di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara diperlukan sinergisasi dan sinkronisasi regulasi melalui strategi berikut:

- a) Membuat regulasi terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kepada administrator kawasan-kawasan pertumbuhan;
- b) Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal.
- c) Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antar instansi dan antara Kabupaten/Kota, provinsi, dan pusat di pusat-pusat pertumbuhan;
- d) Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi.

4.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

4.5.2.1. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Nusa Tenggara diprioritaskan pada percepatan keterkaitan dan manfaat antar kota dan desa dengan kota, melalui Penguatan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) melalui pembentukan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, yaitu Kawasan Perkotaan Metropolitan Gumi Rinjani Raya (Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara) (lihat tabel 4.4). Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Nusa Tenggara juga diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang diprioritaskan pada bidang pariwisata, pengolahan sektor primer, dan pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Percepatan pembangunan kawasan perkotaan di Wilayah Nusa Tenggara dilakukan melalui berbagai strategi, sebagai berikut:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

- a. Membentuk Kawasan perkotaan metropolitan (Mataram Raya) yang berperan sebagai PKN dalam rangka membangun koridor ekonomi wilayah timur Indonesia, mengurangi urbanisasi dari Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, dan NTT ke Kota Mataram;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Meningkatkan aksesibilitas berbasis kepulauan antar PKN (kawasan perkotaan Sarbagita), PKW (Praya, Raba, dan Sumbawa Besar), dan PKL (Ende) disekitar Kota Mataram melalui penyediaan simpul transportasi terutama laut dan udara;
- c. Mengembangkan konektivitas dengan Pulau Bali pada sektor unggulan pariwisata.

2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman pada kawasan Metropolitan Mataram Raya dan Kota Sedang di Wilayah Nusa Tenggara

- a. Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman;
- b. Meningkatkan aksesibilitas antar kota melalui penyediaan sarana transportasi umum antarmoda khususnya transportasi laut dan darat secara terpadu dan optimal sebagai penghubung Nusa Tenggara Bagian Barat dan Bagian Timur;
- c. Menyediakan sarana prasarana pemerintahan dan ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata yang mampu mengakomodasi kegiatan koperasi, UMKM, industri pengolahan kecil dan menengah;
- d. Menyediakan sarana pengolahan perindustrian khususnya industri pengolahan untuk mengakomodasi dan mengembangkan kawasan perindustrian yang sudah ditetapkan;
- e. Menyediakan pelayanan prasarana sarana kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keamanan kota serta meningkatkan modal sosial masyarakat serta memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat kota.

3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap Bencana

- a. Mewujudkan penyelenggaraan ruang yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana (*urban resilience*).
- c. Membangun infrastruktur kota dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana;
- d. Mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijau melalui: *green openspace* (ruang terbuka hijau), *green waste* (pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R) untuk pengurangan tingkat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pencemaran di darat, laut, dan udara, pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan daur ulang.

4. Perwujudan Kota Cerdas dan Daya Saing Kota

- a. Mengembangkan pencitraan kota (*city branding*) melalui produk unggulan, SDM unggulan dan memiliki karakter sosial budaya lokal yakni potensi pariwisata;
- b. Meningkatkan jumlah tenaga kerja ahli dan terampil melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan tinggi dan pelatihan kejuruan (*higher education and vocational training*) di bidang pariwisata agar memiliki daya saing dan kemampuan memasarkan produk unggulan (pertanian);
- c. Menyediakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung kegiatan seluruh sektor dalam bentuk *e-government* pada sektor pemerintahan, *e-commerce* pada sektor perdagangan, *e-procurement* atau lelang elektronik
- d. Menyediakan layanan publik serta perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana kota melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bentuk *e-government* dan *e-commerce*;
- e. Mengembangkan pasar keuangan dalam bentuk penyediaan kredit lunak kepada industri kecil, koperasi dan UMKM.

5. Kebijakan untuk Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

- a. Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi pemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota;
- b. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola kota berkelanjutan, baik melalui kota layak dan nyaman, kota hijau, maupun kota cerdas, melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara bersikembungan;
- c. Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha bagi para pelaku ekonomi termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- d. Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota, untuk mewujudkan kota berkelanjutan;
- e. Mengembangkan dan menyediakan pusat data informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses;
- f. Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialog perencanaan dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan, maupun dalam pembangunan kota berkelanjutan, seperti:

pembangunan infrastruktur perkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruang kota.

4.5.2.2 Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, arah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan di Wilayah Nusa Tenggara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan diarahkan pula untuk membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi perdesaan mandiri pada 4 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.5. Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, serta pulau-pulau kecil terluar di Wilayah Nusa Tenggara akan dilakukan:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografisnya

- a. Membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar bidang pendidikan, khususnya PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah di desa tertinggal dan desa perbatasan;
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan melalui penyediaan poskesdes dan/atau puskesmas di desa tertinggal, desa berkembang, dan desa perbatasan;
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan di kawasan desa tertinggal dan berkembang khususnya dalam penyediaan air bersih;
- d. Meningkatkan distribusi dan penguatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan termasuk tenaga medis lokal khususnya di desa-desa terpencil;
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara;
- f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan listrik (tenaga surya, tenaga air, mikro hidro, dll) dan jaringan telekomunikasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi

- a. Meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan sesuai karakter lokal;
- b. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis sumberdaya lokal;
- c. Memberikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan di Desa;
- d. Meningkatkan keberdayaan petani dan nelayan dalam memanfaatkan teknologi (*bio-energi, biofloc*).
- e. Mendukung terwujudnya desa mandiri benih dengan menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi (benih, pupuk, jaringan irigasi, revitalisasi bendungan, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasi nelayan), pasca panen (sistem logistik), pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa.

3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat perdesaan, melalui fasilitasi dan pendampingan berkelanjutan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan desa;
- b. Menguatkan dan melestarikan lembaga adat dan Desa Adat (*lodok lingko, ngende, papalele, awig-awig*), serta perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- c. Menguatkan peran lembaga adat/masyarakat adat dalam pembangunan desa melalui kerjasama antar lembaga adat/masyarakat adat dan antara lembaga adat/masyarakat adat dengan Pemerintah Desa;
- d. Menguatkan peran pemuda, perempuan, dan kaum marjinal dalam perekonomian, ketahanan pangan, dan pendidikan (arisan pendidikan, PUK/JARPUK, *papalele*/pedagang pinggiran, lumbung pangan desa);
- e. Meningkatkan peran dan kapasitas tenaga kesehatan lokal (dukun beranak), khususnya di desa-desa di pulau-pulau kecil terluar;
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di desa tertinggal;
- g. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bidang kewirausahaan berbasis potensi lokal; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

h. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kebijakan *shareholding* pemerintah, desa, dan pihak ketiga;

4. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan

- a. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa;
- b. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pemerintahan desa;
- c. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, (ii) Pengelolaan aset dan keuangan desa, (iii) Pelayanan publik dan administrasi pemerintahan desa, (iv) Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital; (v) Penataan desa;
- d. Menguatkan pemerintah desa, masyarakat, dan kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;
- e. Menyiapkan dan mengembangkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa;
- f. Mengembangkan peran kader desa (*community center*) untuk perlindungan dan pemberdayaan buruh migran dan keluarganya.

5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi

- a. Meningkatkan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dan kawasan pesisir antara lain melalui redistribusi lahan kepada petani, buruh tani, dan nelayan (*land reform*);
- b. Fasilitasi penentuan tapal batas Desa yang rawan konflik;
- c. Menjamin hak bagi desa-desa dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berskala lokal yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana;
- d. Fasilitasi peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui pengenalan kembali keragaman potensi pangan lokal;
- e. Fasilitasi peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi melalui penggunaan dan pemeliharaan energi alternatif (surya, mikro hidro);

- f. Fasilitasi penyediaan sistem pertanian tadah hujan berbasis kearifan lokal;
- g. Rehabilitasi dan konservasi daerah pesisir, daerah aliran sungai, dan pulau-pulau kecil.

6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota

- a. Mewujudkan sentra industri perikanan (rumput laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya) terutama di kawasan Jerowaru, Keruak, Lape, dan pertanian unggulan (gaharu, cendana, kemiri, mete, padi, jagung) terutama di kawasan Moyo Hilir, Moyo Utara, Utan, Dompu, Soa, serta peternakan modern (sapi) di kawasan Ngada dan Ende;
- b. Mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti bank khusus petani, koperasi, BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya;
- c. Mendorong pelaksanaan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola *shareholding* melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
- d. Fasilitasi dan pemberian dukungan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha yang mendukung wisata bahari di kawasan Ende-Kelimutu dan wisata pegunungan di Rinjani.

4.5.2.3. Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Nusa Tenggara

Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Nusa Tenggara diarahkan dengan memperkuat sedikitnya 5 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu Kawasan Praya dan sekitarnya (Provinsi NTB), Sumbawa Besar dan sekitarnya (Provinsi NTB), Raba dan sekitarnya (Provinsi NTB), Labuhan Bajo dan sekitarnya (Provinsi NTT), serta Kawasan Ende dan sekitarnya (Provinsi NTT). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata (lihat Tabel 4.6). Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota Kecil, dan antar Kota Kecil dan Desa, serta antar Pulau

- a. Mempercepat pembangunan sistem transportasi terpadu antar gugus-gugus pulau untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Nusa Tenggara, pelabuhan yang melayani Kawasan Lombok Timur,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumbawa Besar, Labuhan Bajo, dan Ende, bandara internasional Lombok (Praya), bandara Komodo serta angkutan penyeberangan yang melayani kepulauan Nusa Tenggara untuk mendorong poros maritim;

- c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah;
- d. Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri, dengan prioritas pada pengembangan PLTU Lombok Timur.

2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi

- a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di Kawasan Praya, Sumbawa Besar, Raba, dan Ende, serta sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan/ kelautan di Kawasan Praya dan Sumbawa Besar;
- b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan (lihat Tabel 4.6) dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasarana produksi;
- c. Mengembangkan daya tarik wisata Taman Nasional dan sejarah di Kawasan Pariwisata Rinjani melalui peningkatan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi perbaikan akses menuju obyek wisata, peningkatan kualitas hotel, rumah makan, dan fasilitas umum.
- d. Meningkatkan daya tarik wisata Taman Nasional dan bahari di Kawasan Pariwisata Komodo melalui peningkatan kapasitas dan kualitas penerbangan menuju ke Bajo dan Ruteng, pengembangan dan peningkatan kapasitas, rute, dan fasilitas pelayaran dan jalur darat menuju destinasi wisata, peningkatan fasilitas pendukung wisata trekking dan hiking, wisata pantai dan bahari, serta wisata pedesaan.
- e. Mengembangkan daya tarik wisata Taman Nasional dan bahari di Kawasan Pariwisata Ende-Kelimutu melalui peningkatan ketersediaan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi pengembangan dan peningkatan fasilitas pelayaran dan jalur darat menuju destinasi wisata, pengembangan akomodasi wisata ecolodge, toko souvenir, restoran dan rumah makan tradisional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. Membangun bank pertanian dan perikanan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan; dan
- g. Mengembangkan *Techno Park* berbasis pertanian dan perikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa.

3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan Masyarakat dalam Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa

- a. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien;
- b. Mengembangkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah;
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalam tata kelola ekonomi lokal;
- d. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektor pertanian dan perikanan;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian laut dan pesisir serta mitigasi bencana, terutama di Kawasan Perdesaan Pesisir Praya, Sumbawa, Raba, dan Ende;

Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Tabel 4.4 - 4.6.

TABEL 4.4.
LOKASI PRIORITAS KAWASAN STRATEGIS NASIONAL PERKOTAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI WILAYAH NUSA TENGGARA

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
K1	Kawasan Perkotaan Metropolitan Mataram Raya (Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara)	Diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti kehutanan, pertambangan bijih besi dan agroindustri serta industri pengolahan

Sumber : Bappenas, 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 4.5.
**LOKASI PRIORITAS KOTA SEDANG YANG BERFOKUS PADA UPAYA
PEMERATAAN WILAYAH DI WILAYAH NUSA TENGGARA**

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
P1	Kupang	Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang mengembangkan sektor perdagangan dan jasa

Sumber : Bappenas, 2014

TABEL 4.6.
**LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KETERKAITAN DESA-KOTA
UNTUK MEMPERKUAT PUSAT PERTUMBUHAN
DI WILAYAH NUSA TENGGARA**

Kode	Lokasi Kawasan	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
D1	Praya dan sekitarnya (Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Barat, Prov. NTB)	PKW Praya Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap: Lombok Timur Kawasan Transmigrasi: Keruak, Selong Belanak Kawasan Pariwisata: KSPN Rinjani Kota Otonom Terdekat : Mataram	Perikanan Tangkap Padi Wisata Taman Nasional Wisata Sejarah
D2	Sumbawa Besar dan sekitarnya (Kab. Sumbawa, Prov. NTB)	PKW Sumbawa Besar Kawasan Agropolitan (Padi): Moyo Hilir, Moyo Utara Kawasan Agropolitan (Jagung): Utan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya: Lape	Padi Jagung Rumput Laut
D3	Raba dan sekitarnya (Kab. Dompu, Prov. NTB)	PKW Raba Kawasan Agropolitan (Jagung): Dompu (Kec. Mangalewa) Kawasan Transmigrasi: Dompu, Hu'u Kota Otonom Terdekat : Bima	Jagung Sapi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

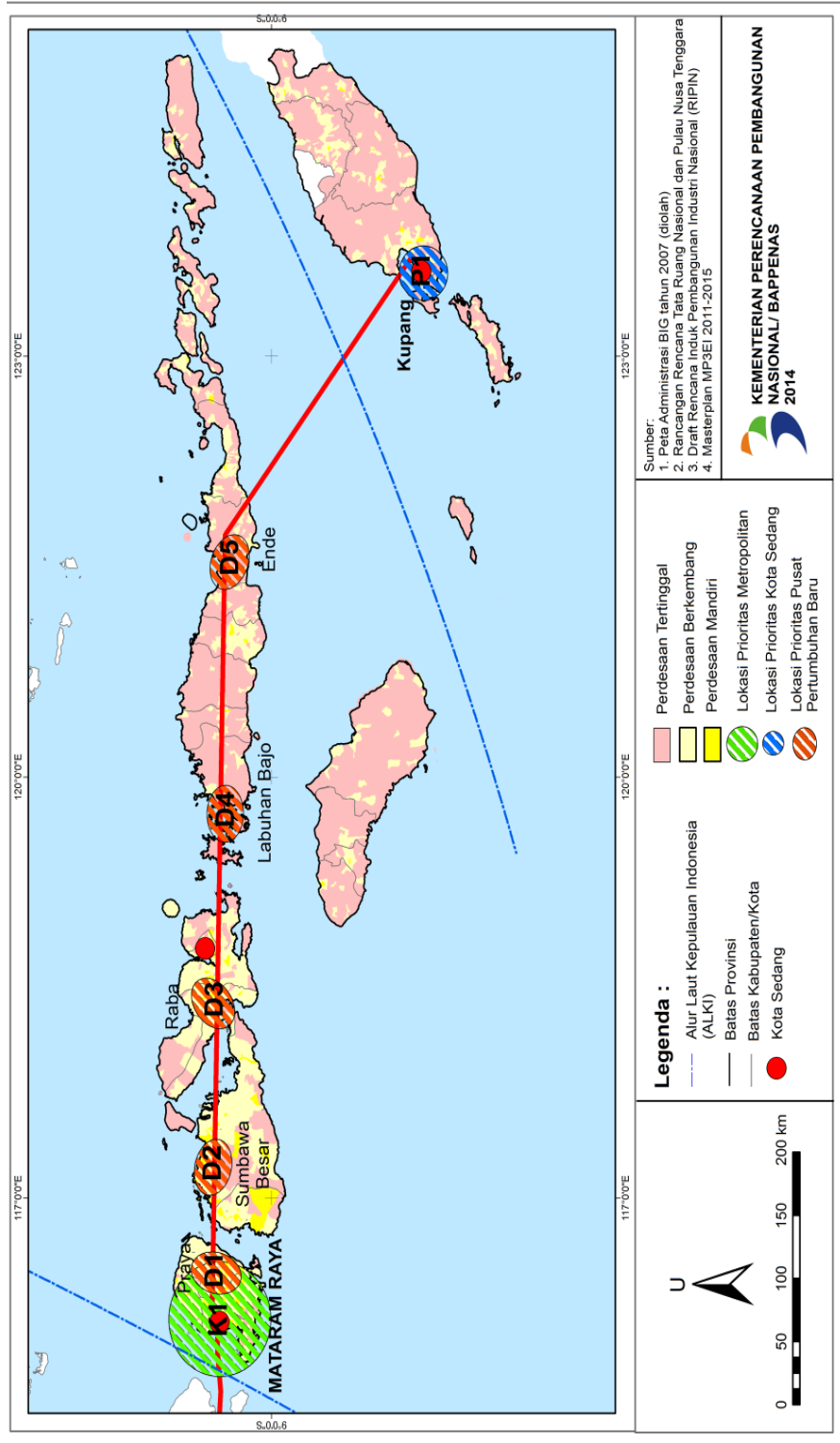
Kode	Lokasi Kawasan	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
D4	Labuan Bajo dan sekitarnya (Kab. Manggarai Barat, NTT)	PKW Labuhan Bajo Kawasan Pariwisata: KSPN Komodo	Wisata Taman Nasional Wisata Bahari
D5	Ende dan sekitarnya (Kab. Ngada, Kab. Ende, Prov. NTT)	PKW Ende Kawasan Agropolitan (Padi): Soa Kawasan Transmigrasi: Maronggela Kawasan Pariwisata: KSPN Ende-Kelimutu	Padi Kopi Sapi Wisata Budaya Wusata Pantai/ Bahari Wisata Taman Nasional

Sumber : Bappenas, 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 4.2
PETA LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI WILAYAH NUSA TENGGARA RPJMN 2015-2019



4.5.3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan

4.5.3.1. Pengembangan Daerah Tertinggal

Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis pariwisata, perikanan, dan peternakan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan. Pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelayanan Publik Dasar

Mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

1. Pemerataan distribusi tenaga pendidik di wilayah Nusa Tenggara bagian timur dan kawasan perbatasan;
2. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik di wilayah Nusa Tenggara bagian timur dan kawasan perbatasan;
3. Pemberian tunjangan tenaga pendidik di wilayah Nusa Tenggara bagian timur dan perbatasan;
4. Penyediaan rumah dinas guru dan tenaga kependidikan di wilayah Nusa Tenggara bagian timur dan perbatasan;
5. Penyelenggaraan guru kunjung di wilayah Nusa Tenggara bagian timur dan kawasan perbatasan;
6. Pengembangan sekolah kecil di wilayah Nusa Tenggara bagian barat;
7. Penyelenggaraan sekolah satu atap di daerah tertinggal dan perbatasan (SD, SMP, SMA/SMK);
8. Pembangunan sekolah berasrama di wilayah Nusa Tenggara bagian timur dan perbatasan;
9. Pengembangan asrama sekolah;
10. Penyediaan bus sekolah;
11. Pengembangan pendidikan jarak jauh;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

12. Pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok belajar paket A,B,C);
13. Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untuk daerah tertinggal.

b. Bidang Kesehatan

1. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua, Belu, Rote Ndao, Ende, Timor Tengah Selatan, dan Alor;
2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua, Belu, Rote Ndao, Ende, Timor Tengah Selatan, dan Alor;
3. Pemberian tunjangan tenaga kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua, Belu, Rote Ndao, Ende, Timor Tengah Selatan, dan Alor;
4. Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di bagian timur Nusa Tenggara dan perbatasan;
5. Pengadaan sarana kesehatan keliling di bagian timur Nusa Tenggara dan perbatasan;
6. Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulau kecil terluar;
7. Pengadaan rumah sakit terapung di kawasan pulau kecil terluar;
8. Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di bagian timur Nusa Tenggara dan perbatasan;
9. Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerah tertinggal dan perbatasan;
10. Pengembangan telemedis di daerah tertinggal.

c. Bidang Energi

1. Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU, PLTMG, PLTGU diutamakan di Kabupaten Bima, Sumbawa, Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Belu, Sumba Barat, dan Sumba Timur;
2. Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian 30-60 kWh;
3. Pengembangan energi biogas ramah lingkungan;
4. Penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencil dan perbatasan;

d. Bidang Informasi dan Telekomunikasi

1. Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi khususnya yang menghubungkan wilayah perbatasan, bagian timur Nusa Tenggara, dan pusat-pusat pertumbuhan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Pembangunan menara penguat sinyal dan siaran RRI dan TVRI, khususnya di Kabupaten Manggarai timur, Manggarai Barat, Sabu Raijua, Lembata, dan Sumba Tengah;
3. Pengembangan jaringan internet;
4. Pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat di wilayah Nusa Tenggara Timur.

e. Bidang Permukiman dan Perumahan

1. Pembangunan perumahan layak huni di terisolir dan perbatasan;
2. Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di wilayah terisolir dan perbatasan;
3. Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di kawasan perhutanan dan pesisir.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah tertinggal secara terpadu dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Nusa Tenggara melalui penyediaan tenaga pendamping masyarakat khususnya dalam bidang pariwisata, perikanan, dan peternakan;
- b. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya sektor pariwisata, perikanan laut, dan subsektor perikanan laut;
- c. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan *Cold Storage* di setiap sentra perikanan;
- d. Kerjasama investasi antara pemerintah daerah, sektor swasta dan pelaku usaha lainnya seperti perbankan dan koperasi;
- e. Pemberian bantuan bibit pertanian dan perkebunan;
- f. Pengembangan jaringan irigasi;
- g. Pembangunan embung untuk mendukung jaringan irigasi;
- h. Peningkatan produksi dan mutu tanaman buah berkelanjutan di bagian barat Nusa Tenggara;
- i. Peningkatan produksi komoditas jagung di Kabupaten Dompu;
- j. Peningkatan produksi ternak melalui pendayagunaan sumber daya lokal;
- k. Mengembangkan komoditi Kemiri Sunan sebagai bahan baku untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

- l. Pengembangan sentra produksi rumput laut;
- m. Pengembangan sentra kuliner pengolahan hasil laut di wilayah pesisir;
- n. Pengembangan pusat-pusat peternakan modern;
- o. Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen bidang pertanian;
- p. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan infrastruktur, sarana, promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Sumba Barat, Bima, Manggarai Barat, Ende, Alor, Flores Timur, Kupang, dan Rote Ndao;
- q. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian, museum;
- r. Pembangunan pasar kecamatan.

3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas

Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis yang diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Membuat sistem konektivitas laut untuk mendistribusikan hasil bumi menuju lokasi di luar Kepulauan Nusa Tenggara;
- b. Peningkatan kapasitas pelabuhan kapal penumpang dan *ferry*;
- c. Pengadaan unit armada *ferry* baru di wilayah Nusa Tenggara;
- d. Pengembangan dermaga penyebrangan di pulau-pulau kecil;
- e. Pengembangan jalan penghubung menuju kawasan strategis di Kabupaten Dompu, Lombok Barat, dan Manggarai Barat;
- f. Pengembangan bandara perintis, khususnya di kawasan perbatasan di daerah terisolir di Nusa Tenggara Timur;
- g. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan), khususnya pada kawasan perbatasan dan daerah terisolir di Nusa Tenggara Timur;
- h. Pembangunan pelabuhan di pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara;
- i. Pengembangan kapal perikanan tangkap 30 GT di kawasan perbatasan wilayah Nusa Tenggara;
- j. Pengembangan jalur keperintisan laut di wilayah Nusa Tenggara.

4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan pemangku kepentingan pembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerah yang terintegrasi untuk menunjang

pengelolaan pariwisata, perikanan, dan peternakan. Strategi ini meliputi aspek peraturan perundangan, tata kelola, SDM, rumusan dokumen kebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Prioritas program untuk mendukung strategi ini adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pemenuhan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan, listrik, informasi, dan telekomunikasi di daerah tertinggal dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian; dan
- b. Pengembangan pusat informasi pemasaran serta teknologi, pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM pelaku usaha untuk menunjang pengembangan usaha khususnya sektor pariwisata, perikanan laut, dan subsektor perikanan laut;
- c. Peningkatan kompetensi guru di daerah tertinggal melalui pelatihan;
- d. Pengembangan sekolah kejuruan dan politeknik;
- e. Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan;
- f. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan;
- g. Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat berbasis pengembangan pariwisata, perikanan, dan peternakan.

5. Penguatan Regulasi dan Insentif

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, bentuk afirmasi yang lebih nyata dan konkrit dilakukan dengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pengelolaan hasil bumi dan energi melalui pelaksanaan prioritas program sebagai berikut:

- a. Penyusunan Strategi Daerah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. Penyusunan rencana induk dan rencana aksi pengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri peternakan dan perikanan laut secara terpadu;
- c. Penyusunan rencana induk dan rencana aksi pengembangan pariwisata baik wisata bahari dan sosial budaya.
- d. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- e. Pengaturan dan pengelolaan hak ulayat;
- f. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antar-SKPD dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- g. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal;
- h. Tunjangan khusus penyuluh pertanian.

6. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan

Pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM.

7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan.

Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Nusa Tenggara terdiri dari 2 provinsi dengan total 32 kabupaten/kota, dimana 78,12 persen atau 25 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini sebesar 66,65, berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,31 persen, jauh dari target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal Wilayah Nusa Tenggara masih sebesar 21,43 persen, jauh dari target angka kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen.

Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Nusa Tenggara telah ditetapkan 28 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 terdapat 3 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Akan tetapi, terdapat 1 kabupaten dengan status Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran yang masuk kategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Malaka. Dengan demikian, pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di Nusa Tenggara di perkirakan sebanyak 26 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 20 kabupaten tertinggal dapat terentaskan di wilayah ini.

LANJUTAN...

NO.	KABUPATEN	PENGANGGARAN (%)	PALAN TIDAKMANTAP (%)	BAPROTHIKASI (%)	DESA PENGGUNA AIR BERSIH IN TUK	KETERSEDIAN SARANA DAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI		RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TH)	KETERSEDIAN DAN AKSESIBILITAS SARANA DAN PEDIKSIAN			RATA RATA JARAK PESIKMAS (Kilo)	RATA RATA JARAK PESIKMAS PERHEANTU (Kilo)	KETERSEDIAN TENAGA KESEHATAN		KETERSEDIAN TENAGA KESEHATAN (Kilo)		JUMLAH APARATUR DAERAH BERBASISAN PEDIKSIAN				AKSESIBILITAS SARANA PEDIKSIAN		AKSESIBILITAS SARANA PEDIKSIAN		AKSESIBILITAS SARANA PEDIKSIAN (RANGKUMUM) (Kilo)	
						DESA TIJAK TIJAK (%)	DESA TIJAK TIJAK (%)		RATA-RATA JARAK SD (Kilo)	KETERSEDIAN SD /DISA	RATA-RATA JARAK SMP / AKSESIBILITAS			RATA-RATA JARAK SMP / KETERSEDIAN	RATA RATA JARAK PESIKMAS / KETERSEDIAN	RATA RATA JARAK PESIKMAS / KETERSEDIAN	RATA RATA JARAK PESIKMAS / KETERSEDIAN	RATA RATA JARAK PESIKMAS / KETERSEDIAN	RATA RATA JARAK PESIKMAS / KETERSEDIAN	RATA RATA JARAK PESIKMAS / KETERSEDIAN	RATA RATA JARAK PESIKMAS / KETERSEDIAN	RATA RATA JARAK PESIKMAS / KETERSEDIAN	RATA RATA JARAK PESIKMAS / KETERSEDIAN	RATA RATA JARAK PESIKMAS / KETERSEDIAN	RATA RATA JARAK PESIKMAS / KETERSEDIAN		RATA RATA JARAK PESIKMAS / KETERSEDIAN
14	BELU	4.18	28.15	60.68	56.99	45.19	54.81	6.76	1.85	1.6	5.48	2.9	5.81	7.95	1.6	1.4	16.3	24.10	23.88	93.28	2.48	4.15	0.00	7.48	58.71	16.05	17.32
15	ALOR	4.12	81.52	73.45	46.11	41.71	69.14	7.56	1.50	1.3	6.74	5.5	8.37	7.16	1.9	1.1	12.9	44.59	43.53	93.60	1.61	4.79	0.00	16.30	71.17	7.18	72.84
16	LEMBATA	2.91	44.62	85.03	48.28	64.58	88.19	7.38	0.98	1.2	3.73	6.0	8.80	5.23	3.0	1.2	10.9	19.80	26.12	92.72	3.28	3.90	0.00	6.94	38.90	6.22	10.91
17	FLORES TIMUR *	2.91	67.46	80.11	80.77	49.60	80.40	7.10	0.81	1.2	3.65	3.2	6.35	5.38	1.8	1.0	21.2	17.13	56.39	94.53	1.81	3.55	0.10	7.33	35.37	9.77	20.78
18	SIKKA *	2.86	73.38	80.85	56.56	49.38	73.13	6.80	2.18	1.9	4.71	2.7	6.85	4.85	2.0	1.9	17.2	23.89	30.70	92.58	3.12	4.12	0.18	8.85	32.50	8.57	21.86
19	ENDE	2.38	50.84	89.82	82.97	42.99	76.64	7.76	5.08	1.6	5.70	4.4	8.34	13.51	2.0	0.8	15.0	29.78	37.31	88.60	4.36	7.00	0.04	9.19	50.01	11.95	23.80
20	NGADA *	0.78	41.00	83.50	66.38	41.75	54.37	7.66	2.00	1.5	6.39	5.6	10.73	5.87	2.1	1.1	35.9	25.58	20.70	90.38	4.61	5.00	0.02	10.86	33.67	11.02	22.97
21	MANGGARAI	3.64	28.15	84.82	55.44	36.91	72.48	6.87	0.79	1.5	5.13	8.2	6.66	4.47	5.9	1.3	38.2	27.48	27.02	92.34	2.98	4.59	0.09	11.71	33.81	14.77	24.62
22	ROYE NIDAO	1.31	5.97	83.83	54.54	50.00	72.73	6.71	0.60	1.6	4.93	7.5	10.85	3.31	2.1	1.8	16.5	25.57	58.13	91.94	1.78	6.98	0.00	10.48	32.04	7.66	24.80
23	MANGGARAI BARAT	2.69	74.31	64.77	54.90	57.85	80.99	6.87	2.98	2.0	9.95	8.9	13.37	8.41	3.4	0.8	35.7	35.44	38.80	94.67	2.22	3.11	0.00	14.16	71.64	13.47	36.99
24	SUMBA BARAT DAYA	1.84	69.91	38.87	25.48	35.42	100.00	5.39	0.00	2.0	5.40	7.5	6.54	4.55	2.8	1.3	24.6	29.69	39.95	92.31	2.93	4.77	0.00	6.99	31.94	7.43	25.43
25	SUMBA TENGAH	2.59	60.42	63.46	33.00	60.47	81.40	6.23	6.00	1.6	12.58	8.0	14.81	5.93	1.6	0.7	15.0	33.68	66.13	94.53	3.37	2.10	0.00	19.63	28.19	19.21	41.11
26	MANGGARAI TIMUR	1.08	53.77	42.26	54.74	78.98	73.30	6.57	2.00	1.6	9.10	15.3	10.76	7.89	4.0	0.6	52.3	39.54	38.18	97.38	1.54	1.08	0.00	27.83	72.17	18.81	48.22
28	SABU RAJUA	11.28	27.78	22.10	42.40	55.56	74.60	5.72	2.35	1.0	5.24	5.0	9.40	32.16	1.3	0.5	4.6	29.66	71.42	96.72	2.03	2.25	0.00	5.59	26.03	24.23	39.33
	RATA RATA WILAYAH	4.06	58.16	75.63	54.32	33.29	68.01	6.90	2.21	2.53	4.50	8.61	7.30	5.51	2.60	1.44	22.35	18.77	23.70	91.27	2.63	5.98	0.12	8.42	38.37	13.49	22.95
	RATA RATA DATANG	5.41	55.41	76.88	55.58	47.97	78.18	7.17	1.35	1.52	13.43	5.66	14.22	12.96	8.77	1.06	39.58	34.00	34.86	92.28	2.48	5.02	0.22	12.61	53.97	25.02	45.02
	RATA RATA NASIONAL	7.24	48.78	83.18	66.55	32.11	48.63	7.9	8.73	2.14	7.97	5.89	8.91	7.6	11.2	1.12	37.46	18.51	16.69	89.85	3.03	6.70	0.42	10.32	48.25	14.83	24.92

Sumber: BPS 2012, Feder 2011
 Kemungkinan (*) Kabupaten berbatasan langsung dengan Kabupaten lainnya dan Kota yang berbatasan langsung dengan Kota lainnya



4.5.3.2. Pengembangan Kawasan Perbatasan

Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Nusa Tenggara difokuskan untuk meningkatkan peran kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara yaitu RDTL dan Australia. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Nusa Tenggara diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Nusa Tenggara, yaitu PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu dan PKSN Kalabahi, serta Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) penanganan kawasan perbatasan tahun 2015-2019.

Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat. Strategi tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan kawasan perbatasan Nusa Tenggara

Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan kawasan perbatasan, secara terpadu di Wilayah Nusa Tenggara dengan strategi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu di PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, dan PKSN Kalabahi;
- b. Mengembangkan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara di PKSN Kefamenanu, PKSN Atambua, dan PKSN Kalabahi;
- c. Membenahi aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan di Belu, Timor Tengah Utara, Rote, Alor, dan Kupang;
- d. Meningkatkan upaya perundingan dalam penetapan dan penegasan segmen-segmen batas wilayah negara RI-RDTL;
- e. Meningkatkan kapasitas tim perunding dari tingkat teknis, strategi, hingga kebijakan (pengambilan keputusan);
- f. Mendayagunakan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Alor, Pulau Dana, Pulau Batek, Pulau Ndana dan Pulau Manggudu dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan;
- g. Memperkuat pertahanan dan pengamanan perbatasan wilayah laut dan darat baik dengan penambahan sarana dan prasarana alutsista maupun non alutsista;
- h. Menjalin kerjasama pengamanan dan pertahanan kawasan perbatasan negara antara RI-RDTL dan RI-Australia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- i. Pembentukan kerjasama patroli pertahanan dan keamanan batas wilayah Negara RI-RDTL dan RI-Australia;
- j. Sosialisasi batas wilayah laut negara RI-RDTL dan RI-Australia kepada masyarakat perbatasan Wilayah Nusa Tenggara dan Penanganan *illegal, unregulated dan unreported (IUU) Fishing*;
- k. Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparaturnya pengamanan perbatasan.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu di kawasan perbatasan negara di Wilayah Nusa Tenggara dengan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas supply perikanan tangkap dan sumber daya kelautan, peternakan, pertanian tanaman pangan, dan perkebunan melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran di PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, dan PKSN Kefamenanu;
- b. Meningkatkan nilai potensi pariwisata alam dan budaya melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata) di PKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu, dan PKSN Atambua;
- c. Mengembangkan program transmigrasi di kawasan perbatasan dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri kawasan perbatasan Nusa Tenggara Timur;
- d. Mengembangkan pusat perdagangan skala internasional berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara tetangga serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisional di titik lintas batas (RDTL dan Australia) di PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, dan PKSN Kalabahi;
- e. Mengembangkan balai-balai latihan kerja untuk meningkatkan mengelola komoditas unggulan lokal yang berorientasi pasar ke negara RDTL maupun Australia.

3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas

Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan negara di Wilayah Nusa Tenggara dengan strategi sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pembangunan jalan strategis perbatasan harus membuka akses dan terhubung jalur-jalur poros perbatasan dan jalan non status;
- b. Mempercepat pembangunan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kabupaten Timor Tengah Utara, Kupang, dan Belu, terutama desa-desa yang masih terisolir;
- c. Meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan negara di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kabupaten Alor dan Kabupaten Rote Ndao, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk di Wilayah Nusa Tenggara dengan pusat pertumbuhan/aktivitas ekonomi;
- d. Mengembangkan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
- e. Menjamin ketersediaan logistik, khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
- f. Mengembangkan pusat pelayanan transportasi laut dan udara internasional di Kupang, PKSN Kalabahi, dan PKSN Atambua;
- g. Menyediakan infrastruktur dasar kewilayahan terutama jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi-informasi di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri);
- h. Menyediakan dan menata telekomunikasi dan informasi yang masif untuk menegaskan kedaulatan telekomunikasi dan informasi di kawasan perbatasan RI-RDTL.

4. Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di kawasan perbatasan negara di Wilayah Nusa Tenggara dengan strategi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumber daya lokal (kelautan, peternakan, pertanian tanaman pangan, dan perkebunan) di kawasan perbatasan Belu, Timor Tengah Utara, Alor, Kupang, Rote Ndao;
- b. Meningkatkan akses pelayanan (pendidikan dan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, termasuk orientasi pelayanan kepada RDTL;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Menyediakan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handal serta penyediaan insentif, serta sarana prasarana penunjang yang memadai, khususnya di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
- d. Meningkatkan kapasitas aparatur wilayah perbatasan melalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar dan pelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuan dan merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan;
- e. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam/potensi lokal di kawasan perbatasan.

5. Penguatan Regulasi dan Insentif

Regulasi yang perlu disusun dalam rangka afirmasi terhadap pengembangan kawasan perbatasan adalah, sebagai berikut:

- a. Akses masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung;
- b. Regulasi pengelolaan lintas batas;
- c. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI-RDTL maupun RI-Australia dalam pengembangan kawasan perbatasan negara;
- d. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan;
- f. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan;
- g. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;
- h. Pemberian kewenangan khusus bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik.;
- i. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Nusa Tenggara Timur;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- j. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara.
- k. Regulasi yang mendukung implementasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan.

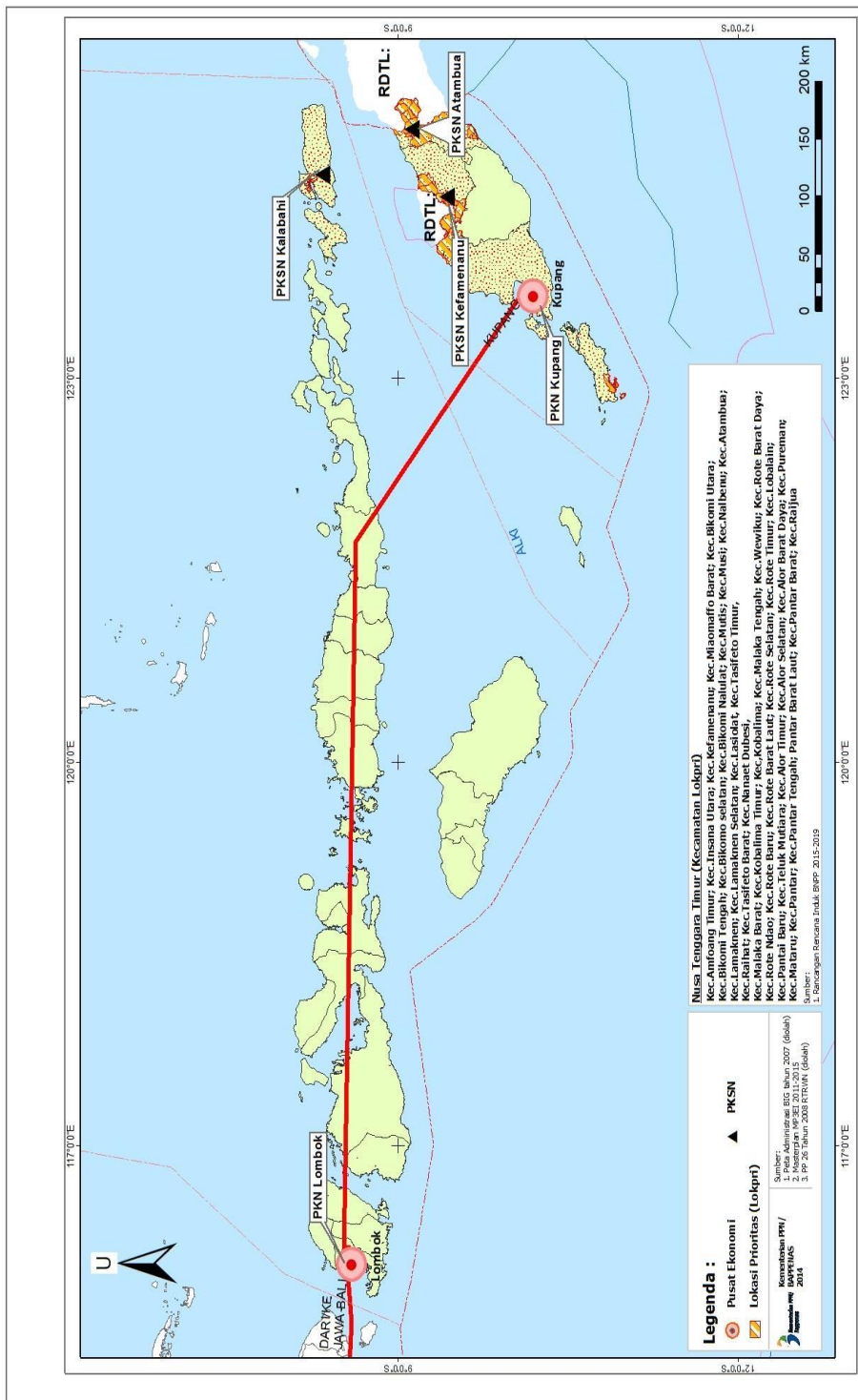
Adapun sebaran lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan dapat dilihat pada Tabel 4.8 dan Gambar 4.4.

TABEL 4.8
DAFTAR LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
WILAYAH NUSA TENGGARA

No.	Kabupaten	Kecamatan Lokasi Prioritas
1	Kupang	Amfoang Timur
2	Timor Tengah Utara	Insana Utara, Kefamenanu, Miaomaffo Barat, Bikomi Utara, Bikomi Tengah, Bikomo selatan, Bikomi Nalulat, Mutis, Musi, Nalbenu
3	Belu	Atambua, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Lasiolat, Tasifeto Timur, Raihat, Tasifeto Barat, Nanaet Dubesi, Malaka Barat
4	Malaka	Malaka Barat, Kobalima Timur, Kobalima, Malaka Tengah, Wewiku
5	Rote Ndao	Rote Barat Daya, Rote Ndao, Rote Baru, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Timur, Lobalain, Pantai Baru
6	Alor	Teluk Mutiara, Alor Timur, Alor Selatan, Alor Barat Daya, Pureman, Mataru, Pantar, Pantar Tengah, Pantar Barat Laut, Pantar Barat
7	Sabu Raijua	Raijua

Sumber: Bappenas, 2014

GAMBAR 4.4
PETA SEBARAN LOKASI PRIORITAS (LOKPRI) KAWASAN PERBATASAN
WILAYAH NUSA TENGGARA 2015-2019



4.5.4 Penanggulangan Bencana

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 566 pulau dan pulau berpenghuni sebanyak 42 pulau. Di Wilayah Nusa Tenggara Timur terdapat 19 gunung, diantaranya Gunung Rokatenda dan Gunung Ranaka kategori gunung api dengan status aktif dan 15 sungai dengan fluktuasi aliran yang cukup tinggi, pada musim penghujan berair dan banjir, sedangkan musim kemarau air berkurang, bahkan ada yang kering. Berdasarkan IRBI 2013, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur berada dalam kelas risiko tinggi.

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 16 wilayah sungai dan 16 gunung (7 di Pulau Lombok dan 9 di Pulau Sumbawa), diantaranya adalah Gunung Rinjani di Pulau Lombok dan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, merupakan gunung api dengan status aktif. Ancaman bencana di wilayah Nusa Tenggara adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor. Risiko bencana alam yang tinggi di Wilayah Nusa Tenggara dapat disebabkan tingkat ancaman yang tinggi, potensi jumlah penduduk terpapar dan kerugian harta benda yang tinggi serta kapasitas penanggulangan bencana yang belum memadai di bidang kelembagaan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Berdasarkan DIBI yang merekam kejadian bencana tahun 1815-2014, berbagai kejadian bencana di Kepulauan Nusa Tenggara telah mengakibatkan 16.589 orang meninggal dunia, 15.035 orang luka-luka, 3.365 orang hilang, 189.619 orang mengungsi dan 72.250 rumah hancur/rusak.

Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, melalui:

- a. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana, melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 pada kota sasaran.
- b. Integrasi kajian dan peta risiko dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) berdasarkan kajian dan peta risiko di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara.
- d. Penyusunan rencana kontinjensi di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara sebagai panduan kesiapsiagaan dan

operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:

- a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara;
- b. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi, yang difokuskan di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara.
- c. Bekerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam gempa bumi di Lombok Utara, Lombok Timur, letusan gunung api Rokatenda di Kabupaten Sikka dan daerah pasca bencana alam lainnya di Kepulauan Nusa Tenggara;
- e. Pemeliharaan, penataan bangunan dan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Dodokan dan Moyosari di NTB dan DAS Benain Aisessa di NTT maupun daerah rawan bencana alam lainnya; dan
- f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor.

3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, melalui:

- a. Penguatan kapasitas apratur dan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah, melalui penyediaan prasarana gedung kantor;
- b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, banjir dan letusan gunung di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- c. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- d. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan

kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor;

- e. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (*shelter*/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana tsunami dan letusan gunung api;
- f. Membangun dan memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana;
- g. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara;
- h. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 1 (satu) unit pusat logistik kebencanaan di wilayah Nusa Tenggara yang dapat menjangkau wilayah terpencil; dan
- i. Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana di daerah wilayah Nusa Tenggara.

TABEL 4.9.
PROFIL KERAWANAN RISIKO BENCANA PADA PUSAT PERTUMBUHAN
DI WILAYAH NUSA TENGGARA

Lokasi	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Kelas Multi Risiko (IRBI 2013)
KEK Mandalika-Kab. Lombok Tengah	Tinggi untuk gempa bumi	Kab. Lombok Tengah: tinggi
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Nusa Tenggara		
Kupang	Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, tsunami, banjir, cuaca ekstrem, abrasi,	Tinggi
Mataram	Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, abrasi	Tinggi
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Nusa Tenggara		
Praya - Kab. Lombok Tengah	Tinggi untuk ancaman: banjir, gempa bumi, abrasi, kekeringan	Tinggi
Raba - Kab. Bima	Tinggi untuk ancaman: banjir, gempa bumi, cuaca	Tinggi

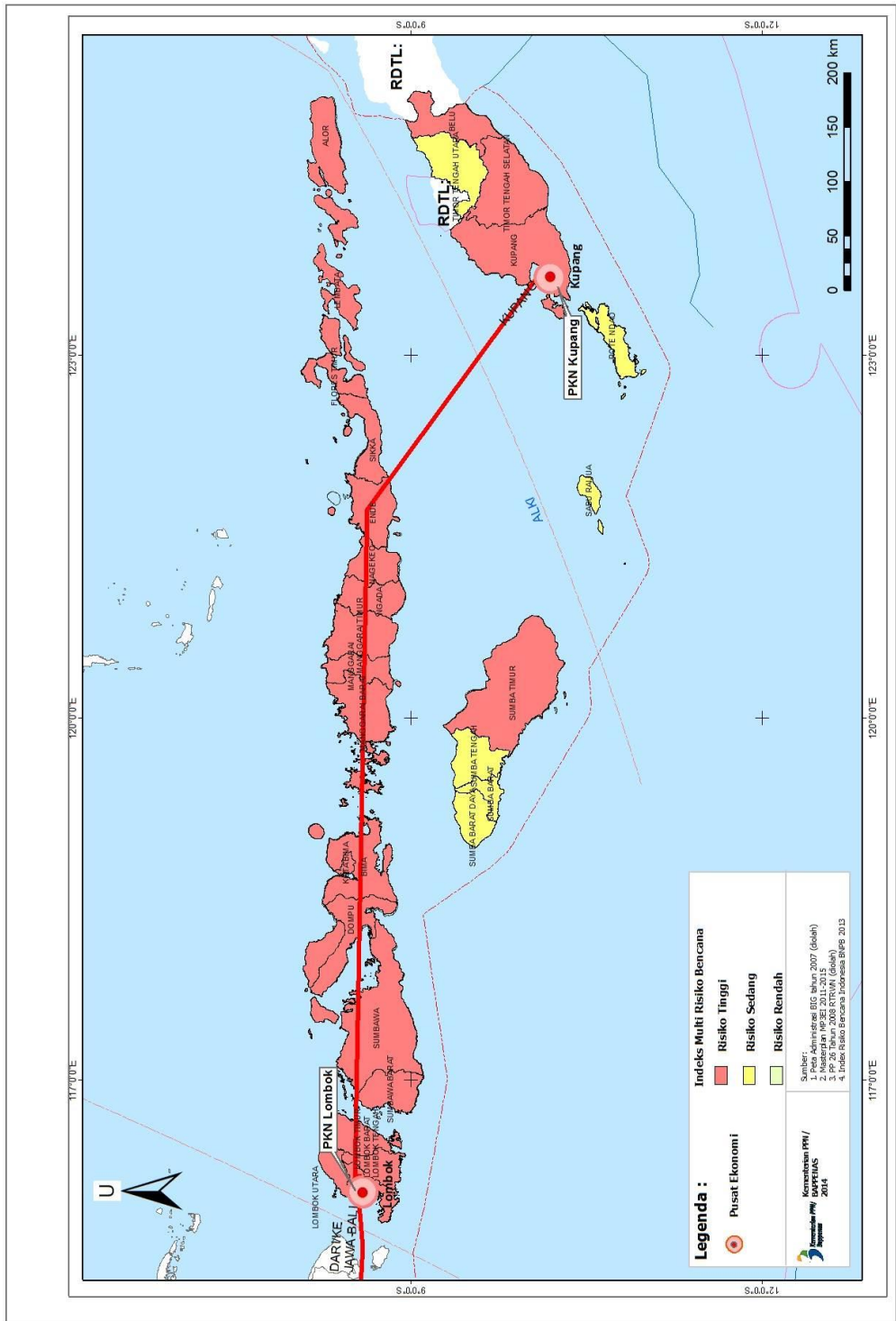


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Kelas Multi Risiko (IRBI 2013)
	ekstrim, kekeringan	
Sumbawa Besar - Kab. Sumbawa	Tinggi untuk ancaman: gempabumi, tsunami, cuaca ekstrim, banjir dan tanah longsor, letusan gunung api	Tinggi
Soe - Kab. Timor Tengah Selatan	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, cuaca ekstrim, abrasi	Tinggi
Kefamenanu - Kab. Timor Tengah Utara	Tinggi untuk ancaman: banjir, angin topan	Tinggi
Ende	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, cuaca ekstrim, abrasi	tinggi
Maumere - Sikka	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, letusan gunung api, abrasi, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim	Tinggi
Waingapu - Kab. Sumba Timur	Tinggi untuk ancaman: abrasi, cuaca ekstrim	Tinggi
Ruteng - Kab. Manggarai	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, cuaca ekstrim, abrasi	Tinggi
Labuan Bajo - Kab. Manggarai Barat	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, cuaca ekstrim	Tinggi
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nusa Tenggara		
Atambua - Kab. Belu	Tinggi untuk ancaman: angin topan, banjir dan tanah longsor	Tinggi
Kalabahi - Kab. Alor	Tinggi untuk ancaman: gempabumi, cuaca, abrasi	Tinggi
Kefamenanu - Kab. Timor Tengah Utara	Tinggi untuk ancaman: banjir, cuaca ekstrim	Tinggi
Pusat pertumbuhan ekonomi lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tinggi untuk gempa bumi, gelombang dan abrasi	Kota Bima: tinggi Kab. Bima: tinggi Kab. Dompu: tinggi
Pusat pertumbuhan ekonomi lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tinggi untuk gempa bumi, tsunami, banjir	Kab. Ngada: Tinggi

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.

GAMBAR 4.5
PETA INDEKS RISIKO BENDANAWILAYAH NUSA TENGGARA



4.5.5. Penataan Ruang Wilayah Nusa Tenggara

A. Arah Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nusa Tenggara

1. Kebijakan mewujudkan lumbung ternak nasional melalui pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan.
2. Kebijakan mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan, hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan serta kehutanan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan meliputi:
 - a. Pengembangan kawasan minapolitan; dan
 - b. Pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros Indonesia Bagian Tenggara.
3. Kebijakan mewujudkan ketersediaan air sepanjang tahun dan kelestarian ekosistem kepulauan yang mendukung kegiatan pengembangan wilayah secara berkelanjutan meliputi:
 - a. Pelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) dari luas daratan Wilayah Nusa Tenggara sesuai dengan kondisi ekosistemnya dan pelestarian kawasan keanekaragaman hayati kelautan dunia; dan
 - b. Implementasi pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas;
 - c. Perlindungan mata air di Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas;
 - d. Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan DAS dengan mempertimbangkan morfologi tanah, curah hujan, kondisi geologi, dan jenis tanamannya.
 - e. Pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun pada wilayah pesisir, pulau kecil, dan kawasan rawan bencana.
4. Kebijakan mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia melalui percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup.
5. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) meliputi pengembangan KSN Perbatasan dalam rangka

peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

B. Strategi Penataan Ruang Wilayah Nusa Tenggara

I. Struktur Ruang Wilayah

1. Strategi pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan
 - b. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat penelitian dan pengembangan peternakan.
2. Strategi pengembangan kawasan minapolitan meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis komoditas perikanan dan kelautan; dan
 - b. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan sentra perikanan dan kelautan.
3. Strategi untuk arah kebijakan pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros Indonesia Bagian Tenggara dengan mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah.

Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 4.10

TABEL 4.10
PRIORITAS LOKASI PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN
KEPULAUAN NUSA TENGGARA PERIODE 2015-2019

Provinsi	Pusat Kegiatan dalam RTRWN		
	PKN	PKW	PKSN
NTB	Mataram (I/C/1)	Praya (I/B)	
		Raba (II/B)	
		Sumbawa Besar (II/C/1)	
NTT	Kupang (I/C/1)	Soe (II/B)	Atambua (I/A/1)
		Kefamenanu (II/B)	Kalabahi (II/A/2)
		Ende (I/C/1)	Kefamenanu (I/A/2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Provinsi	Pusat Kegiatan dalam RTRWN		
	PKN	PKW	PKSN
		Maumere (I/C/1)	
		Waingapu (II/C/1)	
		Ruteng (II/C/1)	
		Labuan (I/C/1)	Bajo

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.

II. Pengembangan Kawasan Lindung

1. Strategi pelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) dari luas daratan Wilayah Nusa Tenggara sesuai dengan kondisi ekosistemnya dan pelestarian kawasan keanekaragaman hayati kelautan dunia meliputi:
 - a. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sungai, danau, dan waduk;
 - b. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS;
 - c. Mempertahankan luasan dan merehabilitasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
 - d. Meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan terutama di Pulau Kecil;
 - e. Mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan berfungsi lindung;
 - f. Mengendalikan kegiatan budi daya laut yang mengancam habitat keanekaragaman hayati laut; dan
 - g. Mencegah pengembangan pelabuhan dan/atau alur pelayaran yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir.
2. Strategi pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budidaya terbangun pada Wilayah Pesisir, Pulau Kecil, dan kawasan rawan bencana meliputi:
 - a. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan abrasi; dan

- b. Mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional.

III. Pengembangan Kawasan Budidaya

Strategi percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup meliputi:

- a. Mempercepat pengembangan PKSND sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
- b. Mengembangkan kawasan sentra produksi berbasis sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- c. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan dan pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni di Pulau Alor, dan mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni di Pulau Alor.

IV. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional

Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dikembangkan 2 (dua) KSN yang mendukung pengembangan wilayah di Kepulauan Nusa Tenggara. Strategi pengembangan KSN di Kepulauan Nusa Tenggara dapat dilihat pada Tabel 4.11.

TABEL 4.11
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA

No	KSN	Tipe	Strategi	K/L
1	Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur	Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	Pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara dan pemertahanan kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang - BNPP - Kementerian Pertahanan
2	Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau terluar dengan negara Timor Leste/Australia			- Kementerian Perhubungan - Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.

4.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Arah kebijakan pengembangan Wilayah Nusa Tenggara yakni peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang mendorong daya saing berbasis potensi ekonomi lokal dengan prinsip berkelanjutan, dengan strategi :

1. Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan;
2. Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat;
3. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada tiap pemerintah daerah yang terintegrasi dengan manajemen kinerja;
4. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
5. penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah.
6. Peningkatan proporsi belanja modal;
7. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penganggaran, salah satunya melalui penciptaan informasi anggaran pemerintah daerah melalui e-government.
8. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line;
9. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah.

4.6. Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

4.6.1. Prioritas Program Pembangunan

4.6.1.1. Provinsi Nusa Tenggara Barat

TABEL 4.12
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Sultan Salahuddin Bima
2. Pengembangan Bandara Internasional Lombok*
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Faspel Bima
2. Pembangunan Faspel Laut Pelabuhan Lombok*
3. Pengembangan Pelabuhan Lembar
4. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kayangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
5. Pengembangan Pelabuhan Badas
6. Pengembangan Pelabuhan Benete
JALAN
1. Pembangunan Jalan Akses BIL (Gerung - Patung Sapi - Gadjah Mada)
2. Pembangunan Jalan Lintas Selatan Sumbawa (Benete - Sejong - Lunyuk - Ropang - Sekokat - Plampang)
3. Pembangunan Jalan Benete - Sejong - Lunyuk
4. Pembangunan Jalan Bangau - Domp - Ramba - Lb. Bajo
5. Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Tambora (Sp.Banggo-Sp.Kempo-Doropati-Lb.Kenanga-Kawindatoi-Sp.Kore)
6. Pembangunan Jalan Mendukung KSN Rinjani
7. Pembangunan Jalan Benete - Simpang Negara
8. Pembangunan Jalan Domp-Huu
9. Pembangunan Jalan Lunyuk-Ropang-Sekokat-Toro-Sp.Domp-Domp
10. Pembangunan Jalan Pemenang - Tanjung - Bayan - Sanbella - Lb.Lombok
11. Pembangunan Jalan Penyaring-Labu Sawo dan Moyo - Sebewe (Samota)
12. Pembangunan Jalan Lembar - Sekotong - Pelangan - Lb. Poh
13. Pembangunan Jalan Sp.Banggo-Sp.Kempo-Doropati-Lb.Kenanga-Kawindatoi-Sp.Kore
14. Pembangunan Jembatan Meninting
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Plengsengan di Pel. Kayangan
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Plengsengan di Pel. Pototano
3. Pembangunan Talud di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan
4. Pembangunan Dermaga II Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Lembar 4
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pototano 2
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kayangan 2
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTGU Lombok Peaker 150 MW
2. PLTG/MG Mobile PP Lombok (Ampenan) 50 MW
3. PLTMG Sumbawa 50 MW
4. PLTMG Bima 50 MW
5. PLTU Lombok (FTP 2) 2x50 MW
6. PLTU Lombok 2 100 MW
7. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Rababaka Kompleks di Kabupaten Dompu Dompu
2. Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Dodokan Lombok Barat
3. Rehabilitasi Tanggul Banjir Sungai Babak Lombok Barat
4. Pembangunan Pengaman Pantai Bintaro/Ampenan Kota Mataram
5. Pembangunan Pengaman Pantai Batu Nampar Lombok Timur
6. Pembangunan Bendung Pengalih dan Saluran Interbasin Bendungan Tanju dan Bendungan Mila Untuk Rababaka Komplek di Kabupaten Dompu Dompu
7. Pembangunan Bendungan Tanju dan Bendungan Mila Untuk Rababaka Kompleks Dompu
8. Pembangunan Bendungan Bintangbano Sumbawa
9. Pembangunan Bendungan Mujur Lombok Tengah
10. Pembangunan Bendungan Meninting Lombok Barat
11. Pembangunan Bendungan Krekeh Sumbawa
12. Pembangunan Embung Rakyat 50 di WS Lombok Tersebar
13. Pembangunan Embung Rakyat 50 di WS Sumbawa Tersebar
PENDIDIKAN
1. Pembangunan Gedung Perpustakaan (Kabupaten Bima)
2. Pembangunan Laboratorium Komputer pada SMA/SMK/MA pada seluruh kab/kota seNTB
3. Keaksaraan dasar
KESEHATAN
1. Peningkatan status Puskesmas rawat jalan menjadi Puskesmas rawat inap
2. Pengadaan alat kesehatan
3. Penyediaan insentif untuk kader posyandu
4. Pemerataan penyediaan SDM kesehatan di fasilitas kesehatan
5. Peningkatan kelas RS Kota Bima dan RS Provinsi NTB
6. Penyediaan tenaga kesehatan (dokter spesialis jantung) di Pulau Sumbawa
7. Pembangunan poltekkes di Kabupaten Bima
8. Pembangunan Puskesmas dan peningkatan kualitas Puskesmas di Dompu
9. Pengadaan puskesmas keliling
10. Peningkatan Puskesmas menjadi RS Umum
11. Penyediaan voluntary, conseling dan testing (VCT)
12. Peningkatan sarana dan prasarana BPOM
13. Peningkatan program keluarga berencana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
14. Pemberdayaan perempuan di perdesaan
15. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap

4.6.1.2 Provinsi Nusa Tenggara Timur

TABEL 4.13
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Kupang*
PERHUBUNGAN UDARA
2. Pengembangan Bandara Komodo
3. Rehabilitasi Bandara El Tari Kupang
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pembangunan Dermaga kapal pesiar di Labuan Bajo
2. Pengembangan Dermaga Wisata di Rinca
3. Pengembangan Dermaga pariwisata di Ende
4. Pembangunan Dermaga pariwisata di Maumere
5. Pengembangan Faspel Laut Marapokot
6. Penanganan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Komodo untuk mendukung Pariwisata
7. Pembangunan Pelabuhan TenauKupang*
8. Pengembangan Pelabuhan Maritaing
9. Pengembangan Pelabuhan Baing
10. Pengembangan Pelabuhan P.Salura
11. Pengembangan Pelabuhan Kendidi/Reo
12. Pengembangan Pelabuhan Pota
13. Pengembangan Pelabuhan Maurole
14. Pengembangan Pelabuhan Atapupu
15. Pengembangan Pelabuhan Batutua
16. Pengembangan Pelabuhan Larantuka
17. Pengembangan Pelabuhan Terong



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
18. Pengembangan Pelabuhan Wulandoni
19. Pengembangan Pelabuhan Bari
20. Pengembangan Pelabuhan Ippi
JALAN
1. Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Timor (Batuputih-Panite-Oinlausi-Boking-Motamasin)
2. Pembangunan Jalan Lintas Utara Pulau Flores (Ngorang-Kondo-Reo-Riung-Megapanda-Maumere)
3. Pembangunan Jalan Poros Tengah Kupang-Timor Tengah Utara (Oilmasi - Sulamo)
4. Pembangunan Jalan Waingapu-Melolo-Baing (P. Sumba)
5. Pembangunan Jalan Perbatasan NTT - Timor Leste (Motomasin - Laktutus - Fatubesi - Dafala - Wedomu)
6. Pembangunan Jalan Perbatasan Poros Utara NTT - Timor (Faenake - Inbate - Inbate; Saenam - Nunpo; Saenam - Oenaek - Noelelo)
7. Pembangunan Jalan Batutua - Baa - Pantebaru - Eakun
8. Pembangunan Jalan Seba - Mesara
9. Pembangunan Jalan Terang - Bari - Kedindi
10. Pembangunan Jalan Lakafehan - Keliting - Wini - Sakato
11. Pembangunan Jalan Sp. Amol - Manamas
12. Pembangunan Jalan Manamas - Wini
13. Pembangunan Jalan Sp. Nurobo - Sp. Umasuker (Betun)
14. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Soe - Kapan
15. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Kapan - Nenas - Sutual
16. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Sp. Tablolong - Oelalus - Oepaha
17. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Oepaha - Buraen - Teres - Rium
18. Pembangunan Jalan Waiwadan-Lite-Waewerang
19. Pembangunan Jalan Lato-Kawaliwu-Waiwio
20. Pembangunan Jalan Lewoleba-Loang
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Hansisi
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bakalang
3. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kajadoi
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wairiang (P. Lembata)
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawapante



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Maritaing*
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Waikelo*
8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pamana*
9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawapante*
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTMG Kupang Peaker 40 MW
2. PLTMG Maumere Peaker 40 MW
3. PLTG/MG Mobile PP NTT (Kupang) 30 MW
4. PLTU Timor 1 2x25 MW
5. PLTP Mataloko (FTP 2) 20 MW
6. PLTMG Waingapu 10 MW
7. PLTMG Alor 10 MW
8. Pengembangan PLT Energi Arus Laut (Pilot Project)
9. Pengembangan EBT Sumba Iconic Island
10. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Bendung Linamnutu D.I. Bena Kab. TTS
2. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Satar Beleng (1.225 Ha) Kab. Manggarai Timur
3. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Mbaing Kab. Sumba Timur
4. Pembangunan Waduk Raknamo Kab. Kupang
5. Pembangunan Waduk Jawa Tiwa (Multi Years) Kab. Nagekeo
PENDIDIKAN
1. Pembangunan untuk mencapai target pemerataan dan jangkauan pendidikan sebaiknya mempertimbangkan persoalan karakter wilayah, potensi wilayah, dan keunggulan lokal., Pengembangan sekolah terpadu untuk mengakomodir keterjangkauan sekolah Pengembangan sekolah terpadu untuk mengakomodir keterjangkauan sekolah, Keterpaduan/sinergi pembangunan antar sektor terutama pada daerah yang terisolir
2. Pembangunan infrastruktur pendidikan untuk SATAP SMP-SMA, termasuk perpustakaan dan laboratorium
3. Meningkatkan jaminan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
KESEHATAN
1. Peningkatan sosialisasi dan advokasi KB berbasis desa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
2. Penyediaan tenaga PLKB bagi daerah dengan TFR yang tinggi
3. Pembangunan KB harus dilakukan secara terpadu lintassektor
4. Peningkatan alokasi untuk program KB
5. Peningkatan alokasi dana untuk mendukung upaya kesehatan promotif dan preventif dengan basis Posyandu
6. Peningkatan pelayanan 1000 hari pertama kehidupan balita dan anak, terutama pada wilayah rawan gizi.
7. Peningkatan pelayanan kesehatan gugus pulau terutama pulau-pulau berpenghuni terisolir
8. Peningkatan eliminasi Malaria di wilayah endemis
9. Pengembangan sistem rujukan regional
10. Peningkatan rasio tenaga kesehatan, terutama untuk daerah yang jarang penduduknya
11. Peningkatan layanan kualitas kesehatan melalui sistem Sister Hospital
12. Peningkatan dukungan pengembangan Fakultas Kedokteran UNDANA
13. Dukungan pembangunan Rumah Sakit regional di Kupang, Waingapu, dan Maumere/Ende
PERUMAHAN
1. Bantuan stimulan pembangunan/peningkatan kualitas rumah swadaya layak huni

4.6.2. Kerangka Regulasi

Pelaksanaan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tidak terlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a. Peraturan perundangan terkait dengan pelimpahan kewenangan ijin investasi di kawasan-kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri nasional lainnya;
- b. Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 56/2014 tentang RTR Kepulauan Nusa Tenggara dan Penetapan dua Perpres RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)-nya.

4.6.3. Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a. Penyiapan kemampuan pengelolaan investasi di KEK Mandalika;
- b. Promosi keunggulan wilayah KEK Mandalika kepada investor dalam/luar negeri untuk menarik minat investasi;
- c. Peningkatan koordinasi antara Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau.

BAB 5

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI

5.1. Capaian Kinerja Saat Ini

- Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Sulawesi mengalami kecenderungan meningkat. Hal ini didukung dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi yang tinggi selama kurun waktu 2009 – Triwulan II 2014 yaitu sebesar 7,8 persen atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,9 persen. Peranan Pulau Sulawesi dalam pembentukan PDB nasional juga mengalami peningkatan dari 4,5 persen (2009) menjadi 4,8 persen (Triwulan II 2014).
- Pemerintah Provinsi di Wilayah Sulawesi telah cukup berhasil dalam menurunkan persentase penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret) dengan kisaran penurunan di setiap Provinsi antara 2 – 9 persen. Walaupun demikian Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo, baik di tahun 2009 maupun di tahun 2014, masih memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional yaitu 14,2 persen (2009) dan 11,3 persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pemerintah Provinsi di Pulau Sulawesi juga telah berhasil menurunkan TPT dengan kisaran penurunan setiap Provinsi antara 1 – 4 persen dan angkanya sudah di bawah TPT nasional yaitu sebesar 7,9 persen (2009) dan 5,7 persen (Februari, 2014), kecuali Provinsi Sulawesi Utara.
- Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, Wilayah Sulawesi dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan selalu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi. Namun demikian, pencapaian IPM di Wilayah Sulawesi masih perlu ditingkatkan karena hanya Provinsi Sulawesi Utara yang berada di atas angka IPM nasional (71,76 di tahun 2009 dan 73,81 di tahun 2013).
- Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, seluruh provinsi di Wilayah Sulawesi mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini dapat diindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi di Wilayah Sulawesi yang meningkat dari tahun 2009 dibandingkan tahun 2013 dengan kisaran peningkatan di setiap provinsi antara 0,05 – 0,1. Selain itu

kesenjangan antar individu provinsi di Sulawesi rata-rata juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 0,37 (2009) dan 0,41 (2013). Oleh karena itu, masalah kesenjangan antar individu perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam proses pembangunan dengan lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

5.2. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Perekonomian Wilayah Sulawesi ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu pertanian antara lain tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; pertambangan dan penggalian; serta perdagangan dan jasa-jasa.

- Komoditas perkebunan yang paling dominan di Wilayah Sulawesi adalah Kakao. Wilayah Sulawesi merupakan produsen terbesar di Indonesia dengan memasok 67 persen produksi Kakao nasional dan produsen kedua terbesar di dunia dengan memasok sekitar 18 persen produksi Kakao dunia (Tahun 2012). Di sub sektor kehutanan, Sulawesi merupakan produsen terbesar kedua Rotan dengan angka produksi sebesar 2.540 ton di Tahun 2012.
- Wilayah Sulawesi juga memiliki potensi yang menjanjikan dalam komoditas tanaman pangan khususnya padi dan jagung. Pada tahun 2013, Sulawesi tercatat sebagai produsen beras terbesar ketiga di Indonesia yang menyumbang 10 persen produksi padi nasional. Selain itu, Wilayah Sulawesi juga menyumbang 15 persen produksi Jagung nasional dengan produksi dan luas panen paling besar (Tahun 2013).
- Begitu pula di sub sektor perikanan. Di tahun 2012 Wilayah Sulawesi merupakan produsen perikanan terbesar di Indonesia dengan memasok lebih dari 40 persen produksi perikanan tangkap dan sekitar 20 persen produksi perikanan budidaya nasional. Keunggulan Wilayah Sulawesi, baik di komoditas tanaman pangan dan perikanan, menjadikan Sulawesi berpotensi untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
- Di sisi lain, pada sub sektor pertambangan, Wilayah Sulawesi merupakan salah satu dari tiga tempat yang memiliki deposit aspal alam terbesar di dunia dan juga penghasil aspal terbesar di Indonesia yaitu di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Walaupun demikian, pada kenyataannya Indonesia masih melakukan impor aspal untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu,

produksi aspal perlu ditingkatkan paling tidak untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

- Wilayah Sulawesi juga menyimpan 50 persen cadangan nikel nasional yang didukung oleh proses produksi nikel paling maju. Kandungan nikel yang tersimpan di Wilayah Sulawesi mencakup hampir 50 persen dari cadangan nikel Indonesia dan menempati peringkat keempat dunia (60 persen). Besarnya cadangan nikel yang dimiliki Sulawesi berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut mengingat luasnya kemanfaatan nikel khususnya dalam mendukung pengembangan industri logam dan merupakan bahan baku utama besi tahan karat atau *stainless steel*.
- Semenjak diberlakukannya undang-undang larangan ekspor bahan mentah mineral di 2012, rencana pembangunan pabrik smelter di Wilayah Sulawesi merupakan salah satu yang terbanyak. Hal ini juga didukung oleh rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sulawesi bagian Tengah, Tenggara, dan Selatan yang memiliki fokus pengembangan industri pengolahan (smelter) pertambangan. Investasi pabrik smelter nikel direncanakan di Morowali, Sulawesi Tengah, Bantaeng, Sulawesi Selatan, Konawe, dan Sulawesi Tenggara. Rencana pembangunan tersebut didasari keyakinan akan ketersediaan pasokan bijih nikel dan prospek permintaan baik domestik maupun global di masa mendatang. Meskipun demikian, salah satu tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kapasitas pengolahan biji nikel adalah rendahnya kualitas bijih nikel yang masih jauh dibawah negara-negara lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya optimalisasi teknologi agar kualitas nikel yang dihasilkan dapat ditingkatkan.
- Wilayah Sulawesi juga memiliki potensi pada pengolahan biji besi terutama di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Selain sumber daya dan cadangan biji besi laterit yang besar, juga terdapat potensi pengolahan pasir besi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah untuk mendukung pengembangan industri besi baja. Sumber daya pasir besi di Wilayah Sulawesi merupakan yang terbesar di luar Wilayah Pulau Jawa. Meskipun demikian, hingga saat ini pasir besi dari Wilayah Sulawesi cenderung langsung diekspor tanpa diolah terlebih dahulu dan mengalami hambatan pengembangan industri pengolahan terutama terkait infrastruktur fisik dan energi.
- Wilayah Sulawesi menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional. Secara geografis Wilayah Sulawesi memiliki posisi yang strategis dengan Negara Filipina dan Malaysia yaitu berbatasan di 14 pulau kecil terluar dan 46 gerbang internasional. Sedangkan terkait dengan konektifitas di Indonesia,

Wilayah Sulawesi merupakan satu-satunya wilayah yang memiliki pergerakan barang tertinggi di Kawasan Timur Indonesia (data origin-destination tahun 2011). Namun demikian, pergerakan barang yang terjadi tersebut cenderung menuju dan berasal dari Wilayah Pulau Jawa-Bali yang kemudian disusul dengan Wilayah Pulau Sumatera dan Wilayah Pulau Kalimantan.

- Selain itu, Sulawesi memiliki akses transportasi lintas pulau yang menghubungkan kawasan budidaya dengan arus peti kemas yang sangat tinggi. Hal tersebut juga didukung oleh pengembangan KEK Palu dan Bitung sebagai pusat pertumbuhan distribusi barang dan menunjang penyediaan logistik di Kawasan Timur Indonesia. Kawasan ekonomi tersebut juga memiliki akses Internasional dan berperan sebagai Hub Internasional, sehingga akan menunjang aktivitas logistik dan rantai distribusi kawasan Indonesia Timur. Oleh karena itu, Sulawesi sangat berpotensi sebagai pengembangan industri berbasis logistik yang tentunya juga akan mendukung industri berbasis komoditas unggulan Sulawesi lainnya.
- Peluang investasi di Wilayah Sulawesi tidak hanya terbuka bagi ketujuh kegiatan ekonomi tersebut (Kakao, Padi, Jagung, Rotan, Aspal, Nikel, Bijih Besi, dan logistik). Peluang investasi di sektor pariwisata khususnya pariwisata bahari akan bernilai tambah tinggi dengan potensi Sulawesi yang memiliki beberapa kawasan wisata yang sudah menjadi tujuan wisata internasional dan nasional diantaranya taman laut Bunaken, Wakatobi, dan Kepulauan Togean. Hal ini didukung oleh karakteristik fauna dan flora yang unik, dimana hampir semua spesies utama dan endemik dari tanaman, mamalia, burung, reptil dan amfibi menghuni wilayah konservasi dengan luas 20 persen dari total pulau dan tutupan lahan hutan 53 persen dari luas pulau.

5.3. Tema Pengembangan Wilayah Sulawesi

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sulawesi, maka tema besar ***Pembangunan Wilayah Sulawesi adalah:***

- sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia;
- Pengembangan industri berbasis logistik;
- Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung;
- Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi;
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

5.4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sulawesi

Tujuan pengembangan Wilayah Sulawesi tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sulawesi dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan industri berbasis logistik, komoditas kakao, jagung, perikanan, padi, rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi, serta pengembangan pariwisata bahari, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun sasaran pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Sulawesi, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 5 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya .
2. Sementara itu, untuk mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah di Sulawesi, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 14 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 8,65 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,81 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,69.
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Sulawesi, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, peningkatan efisiensi pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada saat ini, mewujudkan optimalisasi peran 6 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (*buffer*) urbanisasi serta 2 kota baru publik yang mandiri dan terpadu.
4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya pengangguran dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri.
5. Untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 9 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
6. Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai

pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.

7. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sasaran untuk wilayah Sulawesi adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 30% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 27% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 6 provinsi dan 48 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi; (6) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 70% dan S2-S3 sebesar 10%; (7) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Sulawesi sebesar 90 angkatan; (9) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (10) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (11) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (13) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (14) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Sulawesi.
8. Untuk Penanggulangan Bencana di Wilayah Sulawesi adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 24 kabupaten/kota sasaran (Kota Manado, Kota Bitung, Kota Gorontalo, Kota Makassar, Kota Palu, Kota Kendari, Kabupaten Gorontalo, Mamuju, Polewali Mandar, Maros, Takalar, Gowa, Luwu Timur, Bantaeng, Sigi, Donggala, Poso, Parigi Moutong, Morowali, Kolaka, Konawe, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kepulauan Sangihe) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Sulawesi semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Sulawesi terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 4,8 persen (2013) menjadi 5,2 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Tabel 5.1 sampai dengan Tabel 5.3 sebagai berikut.

TABEL 5.1
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SULAWESI
PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Utara	7.1	7.2	7.8	7.8	8.3
Gorontalo	6.7	7.2	8.4	8.6	8.9
Sulawesi Tengah	7.6	7.7	8.1	8.3	8.9
Sulawesi Selatan	7.4	7.4	8.3	9.1	9.1
Sulawesi Barat	8.1	9.8	10.1	10.2	10.4
Sulawesi Tenggara	7.8	8.0	8.2	10.1	10.3

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 5.2
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH SULAWESI
PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Utara	7.1	6.6	6.1	5.6	5.1
Gorontalo	15.9	14.7	14.1	12.4	11.2
Sulawesi Tengah	13.7	12.7	11.7	10.7	9.7
Sulawesi Selatan	9.1	8.5	7.9	7.2	6.6
Sulawesi Barat	10.2	9.4	8.7	7.9	7.1
Sulawesi Tenggara	13.5	12.4	11.4	10.4	9.3

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 5.3
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH SULAWESI
PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Utara	7.2	7.0	6.7	6.5	6.3
Gorontalo	4.0	3.8	3.7	3.5	3.4
Sulawesi Tengah	3.6	3.5	3.4	3.2	3.1
Sulawesi Selatan	5.6	5.4	5.2	5.0	4.4
Sulawesi Barat	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8
Sulawesi Tenggara	3.7	3.5	3.4	3.2	3.0

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

5.5. Arah kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi

5.5.1. Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Sulawesi difokuskan sebagai pengembangan industri berbasis logistik, serta pengembangan industri berbasis komoditas kakao, rotan, perikanan, aspal, nikel, dan bijih besi, serta pengembangan pariwisata bahari yang memiliki daya saing nasional dan internasional. Fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di Pulau Sulawesi meliputi: Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Palu, Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Bitung, rencana pengembangan Kawasan Ekonomi khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah, dan Kawasan Industri Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah Sulawesi

Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis erat kaitanya dengan memberdayakan masyarakat berbasis potensi ekonomi wilayah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Menyiapkan kawasan industri KEK Palu sebagai sentra industri pengolahan komoditas unggulan pertambangan mineral nikel, biji besi dan emas; agroindustri kakao, karet, rumput laut, rotan; industry manufaktur alat berat, oto motif da nelektrik; serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- logisticserta KEK Bitung sebagai sentra pengolahan perikanan, agroindustri, dan logistik;
- b. Mengembangkan kluster-kluster industri pengolahan pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan yang berorientasi ekspor;
 - c. Meningkatkan produktivitas hasil olahan pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan di dalam dan sekitar kawasan industri;
 - d. Mengembangkan tempat penyimpanan/pembekuan ikan yang berteknologi tinggi;
 - e. Mengembangkan kawasan pengelolaan kluster-kluster komoditas unggulan kakao, rotan, peternakan dan perikanan secara terpadu;
 - f. Pembinaan dan pendampingan komoditas unggulan kakao, rotan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas.
 - g. Menyiapkan kawasan industri KEK Palu sebagai sentra industri pengolahan komoditas unggulan pertambangan mineral nikel, biji besi dan emas; agroindustri kakao, karet, rumput laut, rotan; dndustry manufaktur alat berat, oto motif da nelektrik; serta logistik serta KEK Bitung sebagai sentra pengolahan perikanan, agroindustri, dan logistik;
 - h. Mengembangkan kluster-kluster industri pengolahan pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan yang berorientasi ekspor;
 - i. Meningkatkan produktivitas hasil olahan pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan di dalam dan sekitar kawasan industri;
 - j. Mengembangkan tempat penyimpanan/pembekuan ikan yang berteknologi tinggi.
 - k. Mengembangkan kawasan pengelolaan kluster-kluster komoditas unggulan kakao, rotan, peternakan dan perikanan secara terpadu;
 - l. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan komoditas unggulan kakao, rotan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas.

2. Percepatan Penguatan Konektivitas

Peningkatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan-kawasan penyangga sekitarnya meliputi:

- a. Penerapan insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal disemua bidang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di KEK;
- b. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan Pantoloan dan pengembangan pelabuhan Bitung sebagai Hub Internasional;
 - c. Pembangunan jalan tol Manado-Bitung;
 - d. Pembangunan infrastruktur penunjang ekspor hasil perkebunan dan perikanan;
 - e. Pelebaran dan peningkatan jalan penghubung kawasan strategis dan ruas dari Bandara ke lokasi Kawasan Industri;
 - f. Pembangunan Pelabuhan penunjang Kawasan;
 - g. Pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri sebagai bandara internasional dan perpanjangan landasan pacu Bandara Internasional Sam Ratulangi;
 - h. Pengembangan pelabuhan penyeberangan Garongkong Barru, pengembangan pelabuhan Kendari, Bitung, pelabuhan Pare-pare, Pembangunan ASEAN Ferry Roro Network;
 - i. Mempercepat pembangunan dan pengembangan jaringan jalan menuju kawasan, antara lain pembangunan jalan lintas Palu – Parigi *bypass*, Lingkar Luar Kota Palu, ruas jalan TOL Manado-Bitung;
 - j. Pembangunan bendungan Kuwil;
 - k. Pembangunan Pembangkit Listrik antara lain: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kendari, PLTU Sulsel Barru 2, PLTU Kendari 3, PLTU Palu 3,.

3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat maupun di daerah, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dilakukan dengan strategi:

- a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola dan Perusahaan di bidang perencanaan, penganggaran, pengelolaan kawasan dan investasi;
- b) Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang perkebunan, perikanan, dan logistik;
- c) Penyiapan tenaga kerja berkualitas di sekitar kawasan dalam bidang industri pengolahan berteknologi tinggi;
- d) Peningkatan koordinasi antara Badan Pengelola/ Perusahaan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;
- e) Memberikan pembinaan kelembagaan yang mendukung perubahan pola pikir bisnis berorientasi daya saing secara komparatif dan kompetitif;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga terampil untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola komoditas unggulan kakao, karet, rotan, peternakan, perikanan, distribusi dan pemasaran;
- g) Pembangunan Politeknik Pertambangan dan Industri Logam di Kawasan Industri Morowali;
- h) Pembangunan *Science Park* berteknologi tinggi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan;
- i) Pembangunan *Techno Park* bidang komoditas kelapa, kakao, rotan, sapi dan rumput untuk meningkatkan inovasi teknologi.

4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

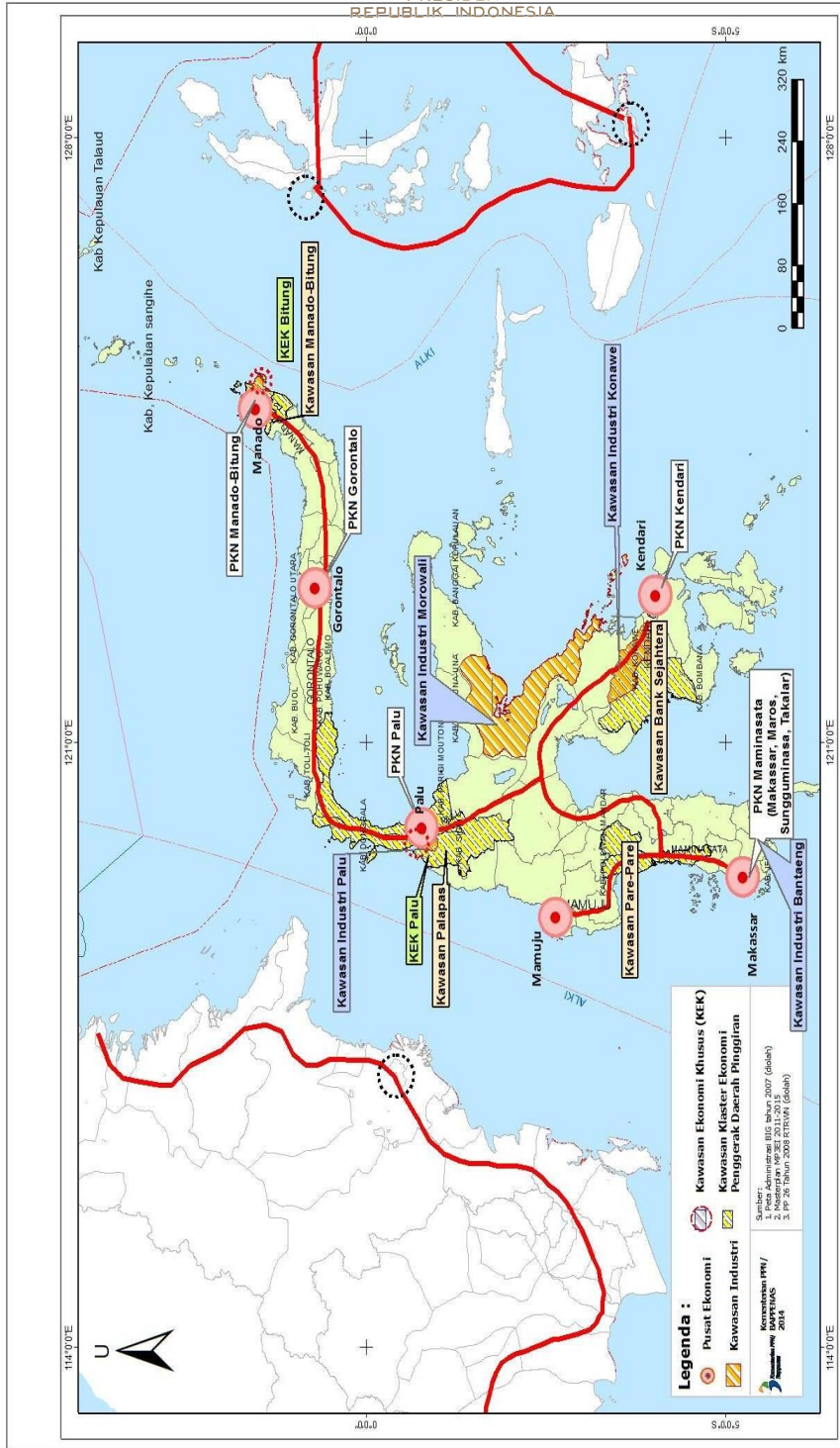
Dalam upaya pengembangan kawasan strategis di Wilayah Sulawesi diperlukan sinergisasi dan sinkronisasi regulasi melalui strategi berikut:

- a. Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di KEK;
- b. Membuat regulasi terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kepada administrator kawasan-kawasan pertumbuhan;
- c. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal.
- d. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Kabupaten/Kota di pusat-pusat pertumbuhan;
- e. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 5.1.
PETA LOKASI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH SULAWESI RPIMN 2015-2019





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

5.5.2.1. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Arah kebijakan pengembangan perkotaan di Wilayah Sulawesi diprioritaskan pada pemerataan pembangunan dan percepatan keterkaitan manfaat antarkotaserta desa dengan kota, melalui penguatan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) Berbasis Kewilayahan di KSN Perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu di KSN Perkotaan Mamminasatadan usulanpembentukan 1 KSN Perkotaan baru yaitu KSN Bimindo (Bitung, Minahasa Utara, Manado); melakukan optimalisasi di 4 kota sedang sebagai *buffer* urbanisasi, serta pembangunan 2 kota baru publik dan mandiri sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kawasan perkotaan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Untuk itu, strategi pembangunan perkotaan Wilayah Sulawesi tahun 2015-2019 adalah:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

- 1) Membentuk Kawasan Perkotaan Metropolitan baru ntuk membangun pusat pertumbuhan nasional di Sulawesi Utara serta meningkatkan konektivitas antar wilayah khususnya kemaritiman skala nasional dan internasional dengan mengembangkan pelabuhan Bitung;
- 2) Meningkatkan aksesibilitas berbasis kepulauan antar PKN (Kawasan Perkotaan Maminasata, Palu, Kawasan Perkotaan Manado Bitung, Kendari), PKW, dan PKL disekitarnya melalui penyediaan simpul transportasi terutama laut dan udara;
- 3) Mengembangkan kegiatan industri pengolahan pada kota sedang dalam ini pada sektor perikanan dan perkebunan serta pengembangan sektor pariwisata untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan keterkaitan dengan desa-kota sekitar.

2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman pada Kawasan Metropolitan, Kota Sedang, dan Kota Baru Publik di Wilayah Sulawesi

- a. Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman;
- b. Meningkatkan aksesibilitas antar kota melalui penyediaan sarana transportasi antarmoda terutama transportasi udara dan laut untuk menghubungkan antar pusat kegiatan di Pulau Sulawesi serta mengembangkan transportasi terintegrasi dengan kawasan perbatasan dan penerapan konsep TOD (*Transit Oriented Development*) untuk kota besar dan Kawasan Perkotaan Metropolitan Maminasata dan Bimindo;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Menyediakan sarana prasarana ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata yang mampu mengakomodasi kegiatan koperasi, UMKM, industri pengolahan kecil dan menengah;
- d. Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya melalui pengembangan sarana prasarana dan tenaga terampil di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial;
- e. Mengembangkan konsep insentif dan disinsentif dalam pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); dan
- f. Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik, serta meningkatkan modal sosial masyarakat kota.

3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana (*urban resilience*) khususnya bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor dan letusan gunung berapi;
- b. Membangun infrastruktur kota terkait dengan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana;
- c. Pengembangan dan menerapkan konsep kota hijau melalui: *green transportation*, *green openspace* (ruang terbuka hijau), *green waste* (pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R), *green water* (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan *green energy* (pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan) untuk pengurangan tingkat pencemaran di darat, laut, dan udara, pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan daur ulang, serta pengembangan kegiatan perekonomian kota (*green Economy*) khususnya pada kota besar dan kota metropolitan Sulawesi.

4. Perwujudan Kota Cerdas dan Berdaya Saing

- a. Mengembangkan sektor ekonomi kota dengan membangun pencitraan kota (*city branding*) yang berbasis pada produk unggulan, dan berdasarkan karakter sosial budaya lokal;
- b. Mengembangkan sektor pariwisata laut seperti Taman Laut Bunaken;
- c. Menyediakan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada sektor pendidikan, kesehatan, permukiman, transportasi dan kegiatan pemerintahan (*e-government*);
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membangun daya saing kota dengan menggunakan potensi lokal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Meningkatkan jumlah tenaga kerja ahli dan terampil melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan tinggi dan pelatihan kejuruan (*higher education and vocational training*); dan
- f. Meningkatkan efisiensi pasar melalui pengaturan jalur distribusi logistik dan mengembangkan kerjasama ekonomi skala nasional dan internasional.

5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan

- a. Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi pemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota;
- b. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola kota berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara bersikembungan;
- c. Menyederhanakan proses perijinan dan usaha bagi para pelaku ekonomi termasuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
- d. Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota Sedang dan kawasan perkotaan metropolitan (Maminasata dan Bimindo) di wilayah Sulawesi, untuk mewujudkan kota berkelanjutan;
- e. Mengembangkan dan menyediakan pusat data informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses;
- f. Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialog perencanaan dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan, maupun dalam pembangunan kota berkelanjutan, seperti: pembangunan infrastruktur perkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruang kota.

5.5.2.2. Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, arah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan di Wilayah Sulawesi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan diarahkan pula untuk membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi kawasan perdesaan mandiri pada 9 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.6. Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal,

kawasan transmigrasi, serta pulau-pulau kecil terluar di Wilayah Sulawesi akan dilakukan:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografisnya

- a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar bidang pendidikan, khususnya sekolah dasar dan sekolah menengah;
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan melalui penyediaan puskesmas yang pelayanannya mencakup kawasan desa tertinggal dan berkembang;
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan, sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan) dan air minum di kawasan desa tertinggal dan berkembang;
- d. Meningkatkan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan khususnya di desa-desa terpencil;
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan transportasi, baik darat, laut, maupun udara;
- f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan listrik (tenaga surya, tenaga air, dll) dan jaringan telekomunikasi khususnya di desa-desa terpencil.

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi

- a. Meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan berbasis karakteristik desa;
- b. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis lokal melalui fasilitasi, pelatihan, pendampingan;
- c. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, dan jaminan sosial bagi masyarakat desa;
- d. Meningkatkan kapasitas petani/nelayan dalam memanfaatkan teknologi tepat guna;
- e. Memberikan jaminan terhadap pasokan energi bagi kegiatan ekonomi nelayan;
- f. Mendukung terwujudnya desa mandiri benih dengan menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi (benih, pupuk, jaringan irigasi, revitalisasi bendungan, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasi nelayan), pasca panen, pengolahan, dan pasar desa.



3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi

- a. Memperkuat lembaga adat dan Desa Adat, perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku, termasuk pada tapal batas Desa Adat melalui pendampingan;
- b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan, khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal (bidan desa, dukun beranak);
- c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat (termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh lokal) dan kelompok masyarakat (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI) dalam membangun desa melalui penguatan sosial budaya masyarakat;
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kebijakan *shareholding* pemerintah, desa, dan pihak ketiga
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, baik pendidikan formal, maupun pendidikan dan pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan.

4. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan

- a. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa
- b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kader pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, (ii) Pengelolaan aset dan keuangan desa, (iii) Pelayanan publik dan administrasi pemerintahan desa, (iv) Penyiapan peta dan penetapan batas desa secara digital; serta (v) penataan desa;
- c. Memperkuat pemerintah desa, masyarakat, dan kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik, terutama di kawasan perbatasan;
- d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan kerjasama pemerintah Desa dengan komunitas adat/Karaeng dalam membangun Desa; dan
- f. Mengembangkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.



5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi

- a. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan melalui redistribusi lahan kepada petani, buruh tani, dan nelayan (*land reform*), serta menekan laju alih fungsi lahan pertanian, hutan, dan kawasan pesisir secara berkelanjutan;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana;
- c. membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan
- d. Memberikan dukungan kepada masyarakat pesisir dalam gerakan konservasi dan rehabilitasi laut;
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga lokal dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui pengembangan budidaya pangan lokal unggulan; dan
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal.

6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota

- a. Mendorong terwujudnya sentra industri berbasis komoditas pertanian unggulan (padi, jagung, cengkeh, kakao, kedelai) di kawasan Mootilango, Tolangohula, Mattiro Sompe, Lanrisang, Duampanua, Kentu Kowuna, Kabangka, Maginti, dan komoditas perikanan (rumput laut, ikan kerapu, udang, lobster) di kawasan Anggrek, Kwandang, Bungku Selatan, Mamuju, Suppa, Kabangka, Palipi, dan Samudra Bitung dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan kecil dan pengadaan *cold storage*;
- b. Rehabilitasi dan revitalisasi waduk (Danau Limboto, Dumbaya Bulan) dan jaringan irigasi (Boya) sehingga mendukung terwujudnya swasembadaya pangan;
- c. Mendorong terwujudnya kawasan wisata bahari di kawasan Wakatobi dan Kepulauan Togean dengan memberdayakan masyarakat dalam membuka usaha;
- d. Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar, khususnya pada mekanisme perdagangan pasca menangkap ikan;
- e. Meningkatkan peran lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi/KUD, BUMDesa, lembaga perkreditan desa dan lembaga ekonomi mikro lainnya; dan

- f. Mengembangkan kerjasama antar desa dan antar daerah dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa.

5.5.2.3. Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Sulawesi

Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Sulawesi diarahkan dengan memperkuat sedikitnya 9 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu Kwandang dan sekitarnya (Kab. Prov. Gorontalo), Buol dan sekitarnya (Prov. Sulteng), Poso dan sekitarnya (Prov. Sulteng), Kolonedale dan sekitarnya (Prov. Sulteng dan Prov. Sulsel), Mamuju dan sekitarnya (Prov. Sulbar), Pinrang dan sekitarnya (Prov. Sulsel), Barru dan sekitarnya (Prov. Sulsel), Raha dan sekitarnya (Prov. Sultra), serta Wangi-Wangi dan sekitarnya (Prov. Sultra). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata (lihat tabel 5.7). Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau

- a. Mempercepat pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal;
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Sulawesi, pelabuhan pelabuhan Garongkong (Kab. Barru), Raha, dan Matohara (Kab. Wakatobi), bandar udara Jalaludin (Kab. Gorontalo) dan Morowali, serta angkutan penyeberangan yang melayani Kawasan Poso, Mamuju, Barru, Raha, dan Wakatobi;
- c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah; dan
- d. Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri, meliputi pengembangan PLTG/PLTMG dan PLTA.

2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi

- a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di Kawasan Kwandang, Buol, Poso, Kolonedale, Mamuju, Pinrang, Barru, dan Raha, serta sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan dan/atau kelautan di Kawasan Kwandang, Kolonedale, Mamuju, Pinrang, dan Raha;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan (lihat tabel 5.7) dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasarana produksi
- c. Mengembangkan daya tarik wisata bahari di Kawasan Pariwisata Wakatobi, Kepulauan Togean, dan sekitarnya melalui peningkatan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas penerbangan menuju ke Kendari-Wakatobi, peningkatan kualitas jalan menuju tempat wisata, pembangunan dermaga kapal pesiar, pengembangan “*Green Resort*” di kawasan Tanjung Kelayang, serta peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, dan energi ramah lingkungan;
- d. Membangun bank pertanian dan perikanan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan; dan
- e. Mengembangkan *Techno Park* berbasis pertanian dan perikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa.

3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan desa-kota

- a. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien;
- b. Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah;
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalam tata kelola ekonomi lokal;
- d. Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama;
- e. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektor pertanian dan perikanan;
- f. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus dan kawasan ekonomi terpadu, serta kerjasama di wilayah-wilayah perbatasan; dan
- g. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian laut dan pesisir serta mitigasi bencana, terutama di Kawasan Pawonsari, Kwandang, Kolonedale, Mamuju, Suppa, Pinrang, Barru, Raha, Muna Wakatobi, dan Togean.

Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 5.2 dan Tabel 5.4 – Tabel 5.7.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 5.4
LOKASI PRIORITAS KAWASAN STRATEGIS NASIONAL PERKOTAAN SEBAGAI
PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH
DI SULAWESI

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
K1	Kawasan Perkotaan Metropolitan Bimindo: Manado, Bitung, Minahasa Utara	Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi pada meningkatkan spesialisasi fungsi pariwisata, industri pengolahan dengan tetap mempertahankan budaya lokal.
K2	Kawasan Perkotaan Metropolitan Maminasata: Kota Makassar, Kab. Maros, Sungguminasa (Ibukota Kab. gowa), Kab. Takalar	Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang mendorong pertumbuhan kota-kota disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi Kawasan Timur Indonesia;

Sumber : Bappenas, 2014

TABEL 5.5
LOKASI PRIORITAS KOTA SEDANG YANG BERFOKUS PADA UPAYA
PEMERATAAN WILAYAH DI SULAWESI

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
P1	Kotamobagu	Diarahkan sebagai kota agropolitan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah Provinsi yang mendukung pertumbuhan produksi pertanian wilayah di Provinsi Sulawesi Utara
P2	Gorontalo	Diarahkan sebagai kota agropolitan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) yang berorientasi pada upaya mendorong pertumbuhan produksi pertanian, pusat pengolahan ikan tangkap, dan wisata bahari yang memanfaatkan potensi Teluk Tomini
P3	Palopo	Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) yang berorientasi pada kegiatan pelayanan sentra pengolahan hasil pertanian (sentra pangan nasional) dan perkebunan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
P4	Pare-Pare	Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dengan fokus sebagai pusat industri pengolahan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan agroindustri di kawasan sekitarnya
P5	Kendari	Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dan berorientasi pada kegiatan pariwisata, pengolahan hasil perkebunan, tangkapan ikan dan perdagangan yang melayani kebutuhan pengembangan sentra-sentra produksi wilayah Sulawesi Tenggara
P6	Bau-bau	Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah yang berorientasi pada aktivitas pariwisata bahari-ekowisata yang memanfaatkan kawasan Taman Laut Nasional Wakatobi yang memiliki nilai global heritage di bidang keanekaragaman flora dan fauna laut dan pengolahan ikan tangkap.

Sumber : Bappenas, 2014

TABEL 5.6
LOKASI PEMBANGUNAN KOTA BARU PUBLIK YANG MANDIRI DAN TERPADU DI WILAYAH SULAWESI

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
B2	Manado	Sebagai pusat permukiman baru yang layak huni yang didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (urban sprawl) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya
B1	Makassar	Sebagai pusat permukiman baru yang layak huni yang didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (urban sprawl) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya

Sumber : Bappenas, 2014; Lokasi Prioritas: Data Sementara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 5.7
LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KETERKAITAN DESA-KOTA UNTUK
MEMPERKUAT PUSAT PERTUMBUHAN DI SULAWESI

Kode	Lokasi Kawasan	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
D1	Kwandang dan sekitarnya (Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo)	<ul style="list-style-type: none"> • PKW Kwandang • Kawasan Minapolitan Budidaya: Anggrek • Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap: Anggrek, Kwandang • Kawasan Agropolitan (Padi): Mootilango, Tolangohula • KPB Pawonsari • Kawasan Transmigrasi: Dino Liyohu • Kota Otonom Terdekat : Gorontalo 	<ul style="list-style-type: none"> • Udang • Lobster • Kerapu • Padi • Jagung
D2	Buol/Tolitoli dan sekitarnya (Kab. Buol, Prov. Sulteng)	<ul style="list-style-type: none"> • PKW Buol • KPB Air Tenang • Kawasan Transmigrasi: Momunu • Kota Otonom Terdekat : Gorontalo dan Palu 	<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Pakawuja • Cengkeh • Kelapa Dalam
D3	Poso dan sekitarnya (Kab. Poso, Kab. Tojo Unauna, Kab. Parigi Moutong dan Kab. Donggala Prov. Sulteng)	<ul style="list-style-type: none"> • PKW Poso • KPB Tamporole • Kawasan Transmigrasi: Ambarona 	<ul style="list-style-type: none"> • Jagung • Cengkeh • Padi • Kakao • Kelapa Dalam • Rumput Laut • Udang • Wisata Bahari • Perikanan Tangkap
D4	Kolonedale dan sekitarnya (Kab. Morowali, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulteng dan Kab. Luwu Timur, Prov Sulse)	<ul style="list-style-type: none"> • PKW Kolonedale • Kawasan Minapolitan: Bungku Selatan • KPB Mahalona • KPB Bungku • Kawasan Transmigrasi: Kolonedale, Lembo 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumput Laut • Padi • Kakao • Perikanan Tangkap

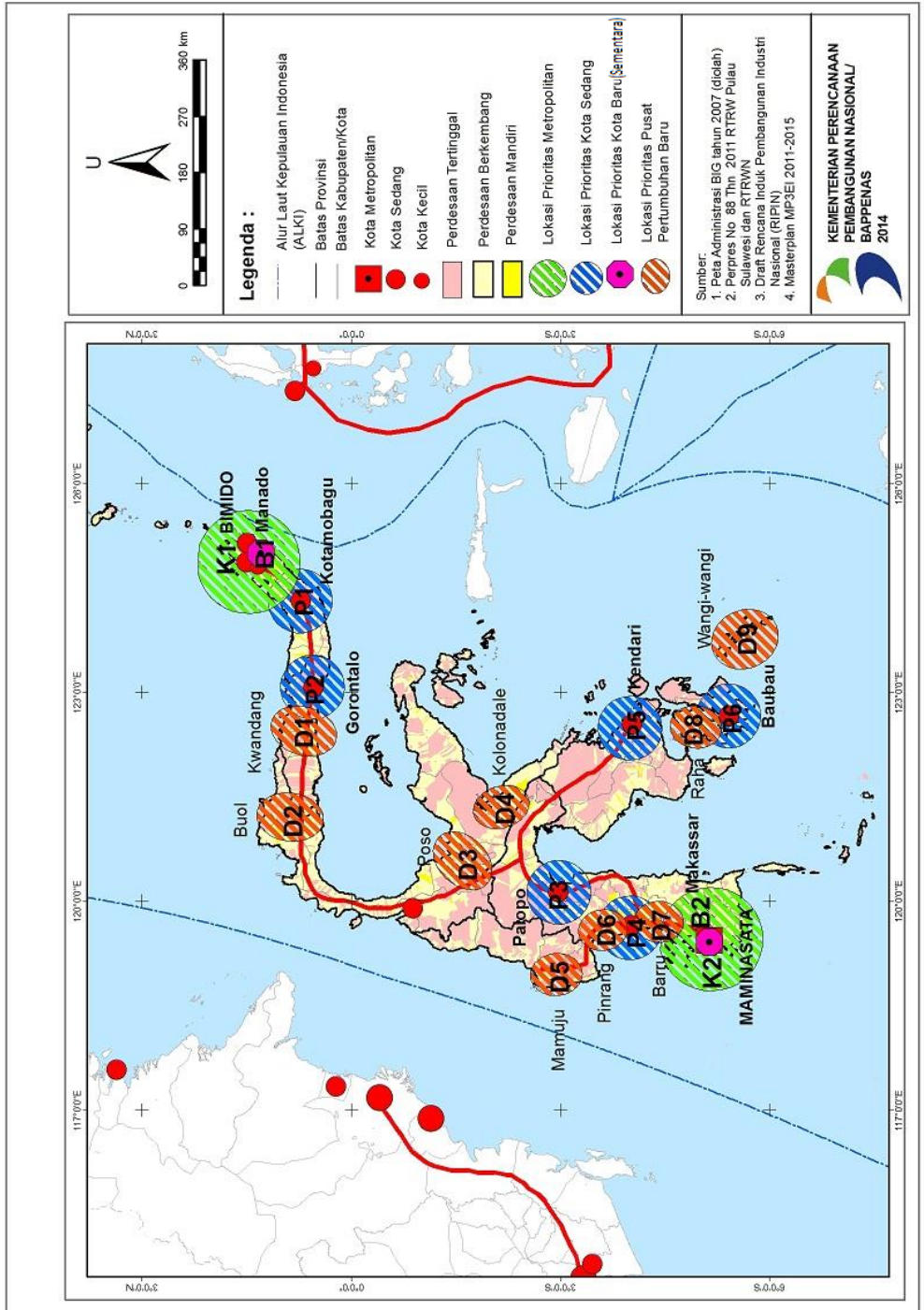


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kode	Lokasi Kawasan	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
D5	Mamuju dan sekitarnya (Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulbar)	<ul style="list-style-type: none"> • PKN Mamuju • Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya: Mamuju • KPB Tobadak • Kawasan Transmigrasi: Salopangkang, Tomo 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumput Laut • Padi • Kakao
D6	Pinrang dan sekitarnya (Kab. Pinrang, Prov. Sulsel)	<ul style="list-style-type: none"> • Perkotaan Pinrang • Kawasan Minapolitan Budidaya: Suppa • Kawasan Agropolitan (Padi): Mattiro Sompe, Lanrisang, Duampanua • Kota Otonom Terdekat : Pare-Pare 	<ul style="list-style-type: none"> • Udang • Padi
D7	Barru dan sekitarnya (Kab. Barru, Kab. Sidenreng Rappang, Prov. Sulsel)	<ul style="list-style-type: none"> • PKW Barru • Kawasan Agropolitan (Kedelai): Barru • Kawasan Transmigrasi: Maritengae (Sindereng Rappang) • Kota Otonom Terdekat : Pare-Pare dan Makassar 	<ul style="list-style-type: none"> • Kedelai • Padi
D8	Raha dan sekitarnya (Kab. Muna, Prov. Sultra)	<ul style="list-style-type: none"> • PKW Raha • Kawasan Minapolitan Budidaya: Kabangka • Kawasan Agropolitan (Jagung): Kentu Kowuna, Kabangka, Maginti • Kota Otonom Terdekat : Bau-Bau 	<ul style="list-style-type: none"> • Udang • Jagung
D9	Wangi-wangi dan sekitarnya (Kab. Wakatobi, Prov. Sultra)	<ul style="list-style-type: none"> • Perkotaan Wangi-Wangi • Kawasan Pariwisata: KSPN Wakatobi • Kota Otonom Terdekat : Bau-Bau 	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan Tangkap • Wisata bahari

Sumber : Bappenas, 2014

GAMBAR 5.2
PETA LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
WILAYAH SULAWESI



5.5.3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan

5.5.3.1. Pengembangan Daerah Tertinggal

Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang **berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional** yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan. Pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik

Mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

- 1) Pemerataan distribusi tenaga pendidik di bagian tengah, bagian barat, sebagian bagian selatan wilayah Sulawesi;
- 2) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik di bagian tengah, bagian barat, sebagian bagian selatan wilayah Sulawesi;
- 3) Pemberian tunjangan guru dan tenaga kependidikan di bagian tengah, bagian barat, sebagian bagian selatan wilayah Sulawesi;
- 4) Penyediaan rumah dinas guru dan tenaga kependidikan di di kawasan terisolir, perairan, dan kepulauan.
- 5) Penyelenggaraan guru kunjung di bagian tengah, bagian barat, sebagian bagian selatan wilayah Sulawesi;
- 6) Pengembangan sekolah kecil di bagian tengah dan bagian barat Sulawesi;
- 7) Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama (SD, SMP, SMA/SMK);
- 8) Pembangunan asrama sekolah di di bagian tengah dan bagian barat Sulawesi;
- 9) Penyediaan bus sekolah;
- 10) Pengembangan pendidikan jarak jauh;
- 11) Pengembangan pendidikan kesetaraan (paket A,B,C);

- 12) Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untuk daerah tertinggal.

b. Bidang Kesehatan

- 1) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan di bagian tengah dan tenggara wilayah Sulawesi;
- 2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bagian tengah dan tenggara wilayah Sulawesi;
- 3) Pemberian tunjangan tenaga kesehatan di bagian tengah dan tenggara wilayah Sulawesi;
- 4) Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di bagian tengah dan tenggara wilayah Sulawesi;
- 5) Pengadaan sarana kesehatan keliling diutamakan di bagian Tengah dan Selatan Sulawesi;
- 6) Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulau kecil terluar;
- 7) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di daerah tertinggal;
- 8) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di bagian tengah dan tenggara wilayah Sulawesi;
- 9) Pengembangan telemedis di daerah tertinggal.

c. Bidang Energi

- 1) Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU, PLTA, PLTMG khususnya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo;
- 2) Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian 30-60 kWh;
- 3) Penyediaan energi biogas yang ramah lingkungan khususnya di kawasan terisolir dan kepulauan;
- 4) Penyediaan bahan bakar minyak ke wilayah terpencil khususnya di kawasan terisolir dan kepulauan.

d. Bidang Informasi dan Telekomunikasi

- 1) Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi khususnya di desa-desa terisolir dan kepulauan di wilayah Sulawesi;
- 2) Pembangunan menara penguat sinyal dan penguat siaran RRI dan TVRI, khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan, Mamuju Utara, Toju Una-Una, dan Bombana;
- 3) Pengembangan jaringan internet;
- 4) Pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat di wilayah Sulawesi Selatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

e. Bidang Permukiman dan Perumahan

- 1) Pembangunan perumahan layak huni di wilayah terisolir;
- 2) Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di wilayah terisolir;
- 3) Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di kawasan perhutanan, perairan, dan pesisir.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah tertinggal secara terpadu dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas sarana pelabuhan khususnya untuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional;
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Sulawesi seperti penyediaan tenaga pendamping khususnya sub-sektor tanaman pangan, perkebunan, dan kawasan pesisir;
- c. Memperkuat pengembangan agroindustri berbasis kakao sehingga terjadi peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi kakao serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/pekebun kakao.
- d. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan *Cold Storage* disetiap sentra perikanan;
- e. Peningkatan produktivitas budidaya ikan melalui penerapan teknologi tepat guna;
- f. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi khususnya dalam bidang perkebunan dan perikanan;
- g. Pengembangan minapolitan dan penganekaragaman produk hasil laut serta pengembangan mata pencaharian alternatif bagi nelayan;
- h. Fasilitasi bantuan peralatan penangkapan ikan;
- i. Pengembangan sarana pengolahan produk hasil laut diutamakan di bagian selatan, utara, dan tenggara wilayah Sulawesi;
- j. Peningkatan kapasitas fasilitas penyimpanan hasil pangan, perkebunan dan hasil laut di pusat-pusat perdagangan dan pelabuhan;
- k. Pengembangan sentra produksi rumput laut;
- l. Pengembangan sentra kuliner pengolahan hasil laut di wilayah pesisir;
- m. Pemberian bantuan bibit pertanian dan perkebunan;
- n. Pengembangan jaringan irigasi;

- o. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan infrastruktur, sarana, promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Wakatobi, Tojo Una-Una, dan Banggai Kepulauan;
- p. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian, museum;
- q. Pengembangan pasar rakyat.

3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas

Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Membuat sistem konektivitas laut untuk mendistribusikan hasil bumi menuju lokasi di luar Kepulauan Sulawesi;
- b. Pengembangan pelabuhan penyeberangan di pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah kepulauan Sulawesi;
- c. Peningkatan kapasitas pelabuhan kapal penumpang dan *ferry*;
- d. Pengadaan unit armada *ferry* baru di wilayah Sulawesi;
- e. Pengembangan dermaga penyebrangan di pulau-pulau kecil;
- f. Pengembangan bandara perintis, khususnya di wilayah Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah;
- g. Pengembangan jalur kereta api antarkota khususnya di wilayah Gorontalo;
- h. Peningkatan status jalan dan pembangunan jalan penghubung, khususnya di wilayah Gorontalo.

4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan pemangku kepentingan pembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerah yang terintegrasi untuk menunjang pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Strategi ini meliputi aspek peraturan perundangan, tata kelola, SDM, rumusan dokumen kebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana induk dan rencana aksi pengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri perkebunan, pangan-hortikultura, dan perikanan laut (minapolitan);
- b. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pemenuhan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan, listrik, informasi, dan telekomunikasi di daerah tertinggal dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Pengembangan sekolah-sekolah kejuruan dan politeknik untuk menyiapkan SDM dalam rangka menunjang pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional;
- d. Pengembangan pusat teknologi informasi pemasaran, pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM pelaku usaha untuk menunjang pengembangan usaha khususnya sub-sektor perkebunan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan perikanan laut;
- e. Pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi pemuda;
- f. Pelatihan pengolahan hasil produksi perikanan kepada masyarakat di kawasan pesisir wilayah Sulawesi.
- g. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan;
- h. Pelatihan tenaga pendamping kelompok pertanian.

5. Penguatan Regulasi dan Insentif

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, bentuk afirmasi yang lebih nyata dan konkrit dilakukan dengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pengelolaan hasil bumi dan energi melalui pelaksanaan prioritas program sebagai berikut:

- a. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- b. Penyusunan Strategi Daerah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antar-SKPD dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah;
- d. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal;
- e. Tunjangan khusus penyuluh pertanian.

6. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan

Pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM.

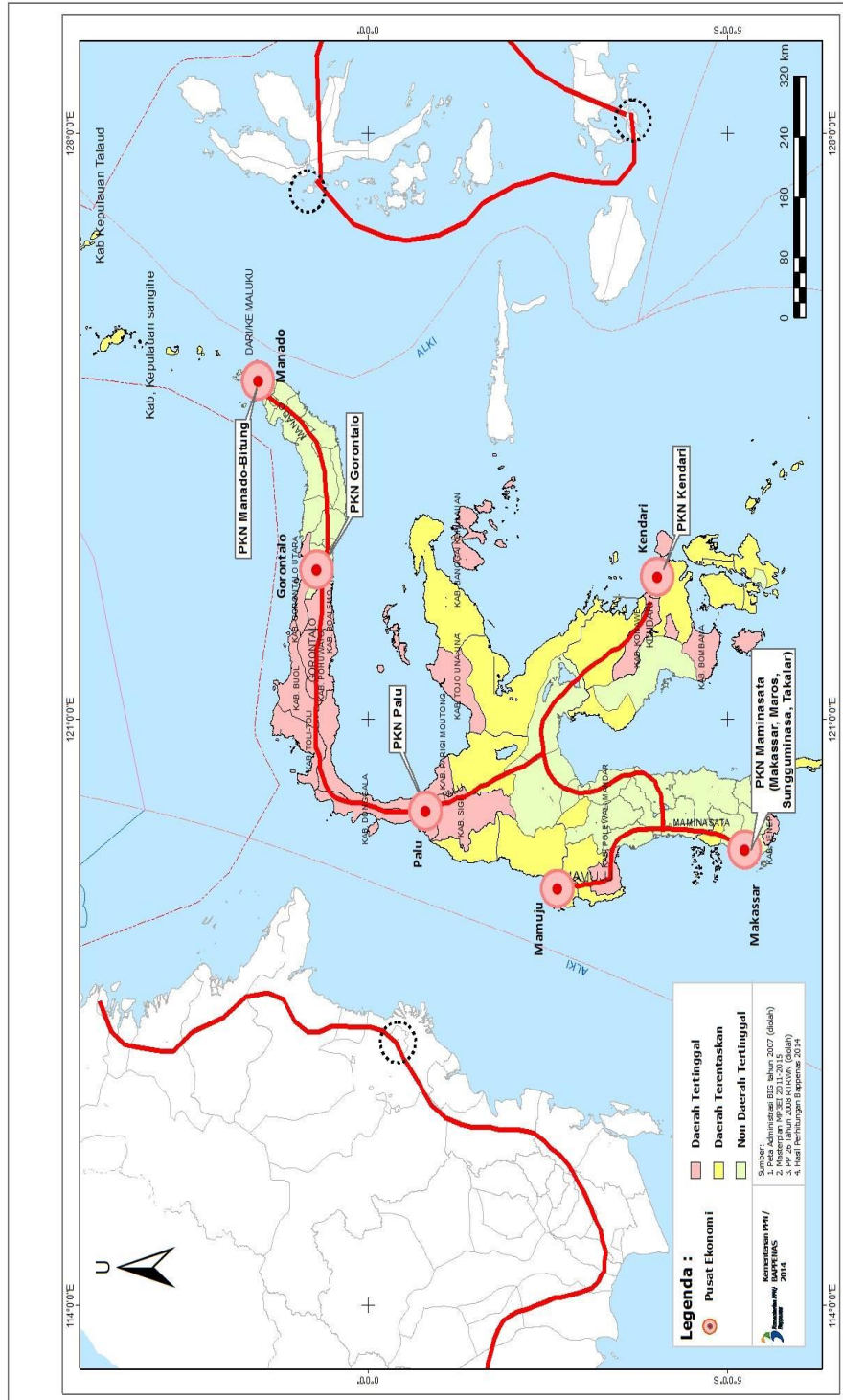
7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 5.3.
PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SULAWESI 2015-2019





TABEL 5.8.
PROFIL DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SULAWESI

NO.	KABUPATEN	PENGANGGURAN (%)	PRASARANA JALAN TIDAK MANTAP (%)	ELEKTRIKASIS (%)	DESA PENGGUNA AIR BERSIH UNTUK DESA MINUM/MEMASAK (%)	DESA TIDAK TERMINIMALISASI	KETERSEDIAAN SARANA DAN INFORMASIKAN	DESA TIDAK TERMINIMALISASI	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	KETERSEDIAAN DAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN		RATA-RATA JARAK PUSKESMAS (km)	RATA-RATA JARAK PUSKESMAS (km)	KETERSEDIAAN KESEHATAN TENAGA KESEHATAN		AKSESIBILITAS KESEHATAN (km)	RATA-RATA JARAK KE KANTOR KABUPATEN (km)	RATA-RATA JARAK KE KANTOR KABUPATEN (km)	RATA-RATA JARAK KE KANTOR KABUPATEN (km)	AKSESIBILITAS SARANA PEMERINTAHAN	RATA-RATA JARAK KE KANTOR KABUPATEN (km)	RATA-RATA JARAK KE KANTOR KABUPATEN (km)	RATA-RATA JARAK KE KANTOR KABUPATEN (km)	AKSESIBILITAS SARANA EKONOMI			
										SD (km)	RATA-RATA JARAK SPP (km)			KETERSEDIAAN KEKAWATAN / PARAMEDIS / DOKTOR / BIDAN / DESA	KETERSEDIAAN KEKAWATAN / PARAMEDIS / DOKTOR / BIDAN / DESA										RATA-RATA JARAK PRAKTER DOKTOR (km)	RATA-RATA JARAK PRAKTER BIDAN (km)	RATA-RATA JARAK KE KANTOR KABUPATEN (km)
A	SULAWESI UTARA	7.24	74.34	92.91	56.19	53.21	79.08	8.41	0.84	2.88	5.44	5.82	20.59	32.67	91.66	2.99	5.13	0.21	5.03	39.36	29.62	23.05					
1	KEPULAUAN SANGHE*	7.91	59.61	87.83	56.81	44.31	92.81	7.76	1.32	3.93	7.10	3.51	20.44	34.34	92.35	2.19	5.76	0.20	6.29	33.09	18.77	27.82					
2	KEPULAUAN TALAUD*	9.89	92.51	97.66	54.07	58.17	90.85	8.82	0.64	2.44	5.81	6.85	11.58	29.38	44.18	89.69	3.80	6.27	0.24	4.90	49.24	36.69	29.73				
3	KEPULAUAN SITARO*	3.91	70.89	93.22	57.69	57.14	53.57	8.65	0.56	2.28	3.40	7.08	11.96	19.49	92.94	2.99	3.86	0.21	3.90	33.83	33.41	11.58					
B	SULAWESI TENGAH	4.21	59.24	85.13	61.73	50.04	89.18	8.05	1.69	5.30	9.90	5.00	35.43	42.88	91.19	2.23	6.31	0.27	10.70	86.71	20.81	32.71					
4	BANGGAI KEPULAUAN	3.57	18.25	75.29	79.45	79.52	100.00	7.96	9.14	4.84	11.92	6.27	1.47	0.45	12.00	38.43	35.65	89.78	2.35	7.08	0.79	9.75	60.40	21.09	37.36		
5	BANGGAI*	5.62	28.74	94.52	59.55	45.72	99.12	8.05	1.68	6.06	9.07	8.36	2.78	0.76	14.94	33.49	33.27	91.64	1.78	6.43	0.15	10.88	88.93	26.87	42.64		
6	MOROWALI *	5.19	26.93	87.27	54.46	52.50	100.00	8.28	1.83	5.94	11.12	4.02	2.50	0.90	19.86	39.89	42.30	90.08	2.99	6.93	0.00	13.95	117.69	11.53	41.26		
7	POSO *	5.78	76.59	92.81	50.22	33.97	94.23	8.82	1.00	4.04	7.90	4.70	2.42	1.72	22.00	33.23	27.49	89.57	2.76	7.45	0.23	7.89	75.52	51.81	22.98		
8	DONGGALA	2.94	75.67	79.98	53.48	50.67	60.00	7.67	0.00	6.25	12.12	4.24	0.81	1.08	8.31	48.89	30.67	95.75	1.30	2.62	0.32	10.46	105.64	12.59	43.80		
9	TOLI-TOLI	3.89	88.71	89.65	71.19	54.95	95.60	8.09	0.00	8.35	11.59	2.66	2.30	1.33	20.50	32.27	34.56	87.60	2.54	9.34	0.52	12.13	71.58	15.60	31.02		
10	BUOL	3.17	62.02	81.89	58.49	53.70	100.00	8.38	0.50	3.28	6.69	3.91	2.00	0.82	19.82	22.53	82.04	89.36	2.41	8.15	0.07	6.96	36.36	5.09	21.17		
11	PARIGI MOUTONG	4.15	80.02	84.77	61.79	21.50	92.50	7.19	1.00	3.31	6.27	2.42	1.95	1.48	14.45	22.98	20.68	92.47	2.23	4.92	0.38	8.31	140.51	16.74	11.57		
12	TOUJUA-UNA	3.97	75.48	82.82	66.70	59.50	100.00	7.94	0.70	4.71	14.10	6.30	2.78	0.64	26.56	48.34	91.51	93.85	2.05	4.10	0.00	17.69	77.62	16.08	51.89		
13	SIGI	3.77	40.00	82.34	62.02	48.41	50.32	8.09	1.08	6.25	8.23	7.14	1.33	1.07	6.80	34.24	30.59	91.75	1.94	6.10	0.21	9.00	44.68	30.67	23.44		
C	SULAWESI SELATAN	7.76	64.35	93.63	58.99	35.28	64.29	7.16	1.12	7.63	8.58	3.45	17.63	26.10	23.63	89.00	2.87	7.64	0.50	10.88	35.13	15.14	30.72				
14	SELAYAR*	5.19	37.79	89.79	80.66	37.04	97.53	7.26	1.00	4.55	11.87	1.32	1.82	0.93	18.09	50.94	47.77	85.71	4.33	8.80	1.15	13.19	67.55	18.37	59.81		
15	JENEPONTO	8.34	104.12	99.40	56.14	21.24	15.93	6.27	0.00	2.96	4.53	1.73	2.02	1.51	21.55	10.51	9.06	91.30	2.35	6.38	0.18	5.57	58.10	6.94	12.55		
16	PANGKAENE KEPULAUAN*	5.72	46.71	95.82	58.10	39.81	19.42	7.22	0.00	18.38	12.83	4.57	3.92	2.27	24.77	27.82	70.30	1.99	7.44	0.27	20.46	54.52	24.01	35.45			
17	TORAJA UTARA*	11.80	82.79	89.52	41.06	43.05	74.17	7.88	3.47	4.63	5.10	6.16	2.52	1.25	6.10	15.12	12.98	88.89	2.79	7.92	0.40	4.29	17.26	11.24	15.07		
D	SULAWESI TENGGARA	3.00	57.02	86.86	61.25	50.39	79.11	7.92	1.37	3.54	6.33	14.94	1.61	0.80	13.60	35.48	48.52	89.23	2.72	7.83	0.22	6.04	55.34	9.31	33.04		
18	BITUNG*	2.15	16.54	91.38	70.53	53.62	93.24	7.13	0.46	2.90	5.97	4.52	1.52	0.81	8.38	41.33	46.14	90.36	2.40	7.25	0.00	7.93	74.97	12.33	42.74		
19	MUNA *	2.08	39.44	88.96	60.11	55.23	98.74	7.55	0.55	2.63	4.43	3.20	1.12	0.93	10.61	27.98	31.69	88.88	3.14	7.42	0.57	4.55	39.24	3.21	14.58		

Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Sulawesi terdiri dari 6 provinsi dengan total 78 kabupaten/kota, dimana 25,64 persen atau 20 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini sebesar 71.10, berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,94 persen, melampaui target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal wilayah Sulawesi masih sebesar 14,76 persen, jauh dari target Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen.

Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Sulawesi telah ditetapkan 34 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 20 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Akan tetapi, terdapat 4 kabupaten dengan status Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran yang masuk kategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Banggai Laut, Mamuju Tengah, Morowali Utara, dan Konawe Kepulauan. Dengan demikian pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di Sulawesi sebanyak 18 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 14 kabupaten tertinggal dapat terentaskan.

5.5.3.2. Pengembangan Kawasan Perbatasan

Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sulawesi difokuskan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara tetangga Filipina di perbatasan laut. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sulawesi diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Sulawesi, yaitu PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane, serta Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) penanganan kawasan perbatasan tahun 2015-2019.

Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berinteraksi dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat. Strategi tersebut yaitu:

1. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, pengamanan kawasan perbatasan Sulawesi

Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, pengamanan, dan aktivitas lintas batas Wilayah Negara secara terpadu di Wilayah Sulawesi, dilakukan dengan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Pengembangan pusat pelayanan kepabeanaan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu di PKS N Tahuna dan PKS N Melonguane (termasuk di Pulau Marore dan/atau Pulau Miangas);
- b. Pembenahan aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan Sulawesi;
- c. Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara di Kabupaten Talaud dan Kabupaten Sangihe;
- d. Peningkatan upaya perundingan dalam penetapan dan penegasan batas wilayah negara RI- Philipina;
- e. Peningkatan kapasitas tim perunding dari tingkat teknis, strategi, hingga kebijakan (pengambilan keputusan);
- f. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawaluso, Pulau Marampit dan Pulau Kakarotan dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan;
- g. Penyelesaian status kewarganegaraan masyarakat Philipina-Sangir (Phisang);
- h. Penguatan fungsi pengamanan perbatasan wilayah laut, baik penyediaan alutsista, non alutsista dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kedaulatan, khususnya perbatasan wilayah laut RI- Philipina;
- i. Pembentukan kerjasama patroli pertahanan dan keamanan batas wilayah Negara RI- Philipina;
- j. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Kawaluso, Pulau Kawio, Pulau Kakarotan, dan Pulau Marampit dengan pendekatan ekonomi, keamanan dan lingkungan;
- k. Sosialisasi batas wilayah laut negara RI- Philipina kepada masyarakat perbatasan Wilayah Sulawesi;
- l. Pengembangan standar operasional prosedur (SOP) pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparaturnya pengamanan perbatasan.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasan perbatasan negara di Wilayah Sulawesi, dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan dan kelautan untuk ekspor melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran di PKS N Tahuna, PKS N Melonguane, dan gugus pulau perbatasan di Sangihe dan Talaud (termasuk Miangas dan Marore) yang berorientasi pasar kepada negara Filipina, termasuk yang mendesak yaitu penyediaan Kapal Tangkap 30 GT ;
- b. Peningkatankjasama investasi lintas batas negara produk unggulan kawasan perbatasan, khususnya dengan negara Filipina;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan untuk mencukupi kebutuhan lokal maupun lintas negara;
- d. Pengembangan program transmigrasi di kawasan perbatasan dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri di kawasan perbatasan Sangihe dan Talaud;
- e. Peningkatan nilai potensi pariwisata bahari dan budaya melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi dalam dan lintas negara dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata) di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- f. Mengembangkan pusat perdagangan skala internasional, nasional, dan regional berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara Filipina serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisional dititik lintas batas di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane;
- g. Pengembangan balai-balai latihan kerja berbasis komoditas lokal yang berorientasi pasar ke negara tetangga di kawasan perbatasan Sangihe dan Talaud.

3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas

Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan negara di Wilayah Sulawesi, dilakukan dengan:

- a. Peningkatan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan negara, di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk, serta konektivitasnya dengan sistem transportasi laut nasional dan internasional;
- b. Pengembangan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di gugus pulau perbatasan Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe;
- c. Mengembangkan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan pengembangan industri perikanan;
- d. Penjaminan ketersediaan logistic termasuk BBM, khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, khususnya perhatian terhadap Pulau Miangas dan Pulau Marore;
- e. Pengembangan pusat aktifitas perdagangan dan gudang logistik untuk meningkatkan distribusi hulu-hilir perdagangan antar negara, khususnya di Lokasi Prioritas yang memiliki aktifitas perdagangan tinggi;
- f. Pengembangan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, khususnya di PKSN Sangihe dan PKSN Talaud;

- g. Penyediaan infrastruktur dasar kewilayahan terutama jalan, listrik terbarukan memanfaatkan sumber daya setempat, air bersih, dan telekomunikasi di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri);
- h. Pembangunan jalan non status pembuka akses menuju kampung, desa-desa di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri);

4. Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pulau Sulawesi diarahkan untuk meningkatkan basis IPTEK dan produk unggulan berdaya saing diikuti peningkatan aktivitas perdagangan dengan negara tetangga. Strategi yang dilakukan antara lain:

- a. Pengembangan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumber daya lokal (kelautan, perkebunan, maupun pertambangan) di kawasan perbatasan Sangihe dan Talaud;
- b. Pengembangan sekolah kejuruan (SMK, politeknik) berbasis kelautan berasrama, di PKS N Sangihe atau PKS N Melonguane;
- c. Pengembangan akses pelayanan sosial dasar (pendidikan dasar-menengah dan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, khususnya di pulau-pulau kecil terluar dengan penyediaan sarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah (sekolah berasrama, transportasi laut antar jemput);
- d. Penyediaan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handal serta penyediaan insentif, serta sarana prasarana penunjang yang memadai, khususnya di pulau-pulau terdepan dan terisolir terdepan dan terutama rumah guru, fasilitas informasi dan telekomunikasi guru;
- e. Peningkatan kapasitas aparatur wilayah perbatasan melalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar dan pelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuan merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan;
- f. Pengembangan teknologi tepat guna dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam/potensi lokal di kawasan perbatasan.

5. Penguatan Regulasi dan Insentif

Dalam upaya mendukung pengembangan kawasan perbatasan negara, diperlukan harmonisasi regulasi sebagai berikut:

- a. Akses masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung;

- b. Regulasi pengelolaan lintas batas;
- c. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI-Filipina dalam pengembangan kawasan perbatasan negara;
- d. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir (kecamatan lokpri);
- e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan;
- f. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan;
- g. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;
- h. Pemberian kewenangan khusus bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik;
- i. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud.
- j. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara.

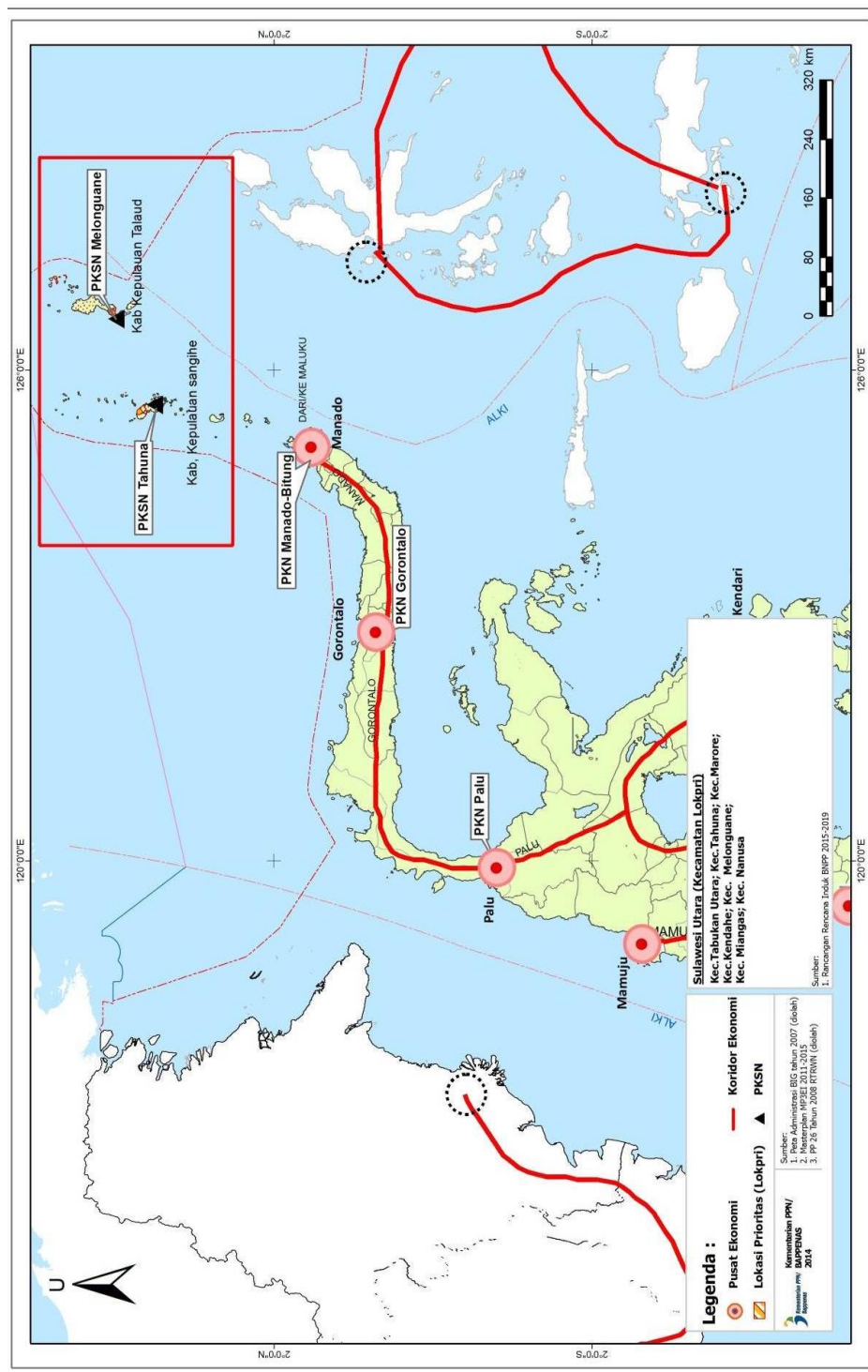
Adapun sebaran lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan dapat dilihat pada Tabel 5.9 dan Gambar 5.4

TABEL 5.9
DAFTAR LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
WILAYAH SULAWESI

No.	Kabupaten	Kecamatan Lokasi Prioritas
1	Kep. Sangihe	Tabukan Utara, Tahuna, Marore, Kendahe
2	Kep. Talaud	Melonguane, Miangas, Nanusa

Sumber : Bappenas, 2014

Gambar 5.4.
Peta Sebaran Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan
Wilayah Sulawesi 2015-2019



5.5.4. Penanggulangan Bencana

Wilayah Sulawesi terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Secara geografis, pulau Sulawesi terdapat banyak gunung dan sungai sehingga potensi bencana alam di Wilayah Sulawesi terdiri dari banjir, longsor, gempa bumi, letusan gunung api dan kekeringan. Risiko bencana alam yang tinggi di wilayah Sulawesi dapat disebabkan tingkat ancaman yang tinggi, potensi jumlah penduduk terpapar dan kerugian harta benda yang tinggi dan kapasitas penanggulangan bencana di bidang kelembagaan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan yang belum memadai. Berdasarkan DIBI yang merekam kejadian bencana tahun 1815-2014, berbagai kejadian bencana di Pulau Sulawesi telah mengakibatkan 6.944 orang meninggal dunia, 17.140 orang luka-luka, 983 orang hilang dan 545.653 orang mengungsi dan 52.212 rumah hancur/rusak.

Untuk mendukung pengembangan Wilayah Sulawesi, maka arahan kebijakan penanggulangan bencana diarahkan untuk mengurangi risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di Wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, melalui:

- a. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana, melalui penyusunan kajian dan peta risiko bencana skala 1:50.000 di kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 di kota sasaran.
- b. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko untuk penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) di 24 kabupaten/kota.
- d. Penyusunan rencana kontinjensi pada 24 kabupaten/kota sasaran sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat bencana banjir, longsor, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana melalui:

- a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan di 24 kabupaten/kota sasaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi pada 24 kabupaten/kota risiko tinggi bencana.
- c. Bekerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di 24 kabupaten/kota risiko tinggi bencana.
- d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana banjir bandang di Manado dan daerah pasca bencana alam lainnya.
- e. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Mamasa, Tondano, Limboto, Tempe maupun daerah rawan bencana alam lainnya.
- f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir, longsor, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.

3. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan, melalui penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di kabupaten/kota risiko tinggi di Pulau Sulawesi.
- b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.
- c. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Wilayah Sulawesi
- d. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.
- e. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, melalui pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana di 24 kabupaten/kota sasaran di Wilayah Sulawesi.
- f. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan serta pembangunan 2 (dua) unit depo logistik di Wilayah Sulawesi yang dapat menjangkau wilayah bencana secara cepat.
- g. Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana.
- h. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, longsor, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.

Adapun sebaran risiko bencana dan profil kerawanan dan risiko PKN, PKW dan PKS di Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 5.5 dan Tabel 5.10.

TABEL 5.10.
PROFIL KERAWANAN DAN RISIKO PKN, PKW DAN PKS
DI WILAYAH SULAWESI

Lokasi	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Kelas Multi Risiko (IRBI 2013)
Kawasan pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya di Sulawesi Tengah	Tinggi untuk ancaman: banjir dan longsor, gempabumi, cuaca ekstrim, kekeringan	Kota Palu: tinggi Kab. Sigi: sedang Kab. Donggala: tinggi Kab. Parigi Moutong: tinggi
Kawasan pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya di Sulawesi Utara	Tinggi untuk banjir dan longsor, letusan gunung api, gempabumi, cuaca ekstrim dan abrasi	Kota Manado: sedang Kab. Bitung: tinggi
Kawasan pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya di Sulawesi Tenggara	Tinggi untuk banjir, gempabumi, cuaca ekstrim	Kota Kendari: tinggi Kab. Kolaka: tinggi Kab. Konawe: tinggi
KEK Palu/ Kawasan Industri Palu - Sulawesi Tengah	Tinggi untuk banjir dan longsor, gempabumi, cuaca ekstrim dan abrasi	Tinggi
KEK Bitung/ Kawasan Industri Bitung - Sulawesi Utara	Tinggi untuk banjir, gelombang ekstrim dan abrasi	Tinggi
Kawasan Industri Morowali- Sulawesi Tengah	Tinggi untuk bencana abrasi, gempa bumi, longsor dan banjir	Tinggi
Kawasan Industri Bantaeng- Sulawesi Selatan	Tinggi untuk bencana abrasi, cuaca ekstrim, longsor dan tsunami.	Tinggi
Kawasan Industri Konawe- Sulawesi Tenggara		
KSN Perkotaan Maminasata: Kota Makassar, Kab. Maros, Sungguminasa (Ibukota Kab. gowa), Kab. Takalar	Kab. Maros: tinggi untuk banjir dan cuaca ekstrim Kab. Takalar : banjir, cuaca ekstrim	Kab. Maros: tinggi Kab. Takalar: tinggi
KSN Perkotaan Manado Bimindo (Bitung-Minahasa-Manado)	Kab. Minahasa Utara: tinggi untuk banjir, longsor, cuaca ekstrim, letusan gunung api,	Kab. Minahasa Utara: tinggi Kab. Minahasa Selatan: tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Kelas Multi Risiko (IRBI 2013)
	abrasi Kab. Minahasa Selatan: tinggi untuk banjir, longsor, letusan gunung api, abrasi	
Bau-bau (usulan PKW) mendukung pariwisata bahari-ekowisata Taman Laut Nasional Wakatobi	Tinggi untuk: cuaca ekstrim	Tinggi
Pawonsari dan sekitarnya (perkotaan Limboto, kawasan minapolitan, agropolitan,	Kab. Boalemo tinggi untuk banjir dan longsor, gempabumi Kab. Gorontalo tinggi untuk banjir dan tanah longsor, kekeringan Kab. Gorontalo Utara tinggi untuk banjir, gempabumi	Kab. Boalemo: sedang Kab. Gorontalo: tinggi Kab. Gorontalo Utara: sedang
Poso dan sekitarnya (KPB Tamporoale, kawasan agropolitan)	Kab. Poso tinggi untuk banjir, cuaca ekstrim, longsor, abrasi Kab. Donggala tinggi untuk banjir, cuaca ekstrim, gempa, longsor, abrasi	Kab. Poso: tinggi Kab. Donggala: tinggi
Kolonedale dan sekitarnya (Kawasan Minapolitan Bungku Selatan, KPB Mahalona, KPB Bungku, Kawasan Transmigrasi)	Kab. Morowali: tinggi untuk banjir dan longsor Kab. Morowali Utara: data belum tersedia Kab. Luwu Timur: tinggi untuk banjir, longsor, kekeringan	Kab. Morowali: tinggi Kab. Morowali Utara: data belum tersedia Kab. Luwu Timur: tinggi
Mamuju dan sekitarnya (Kawasan Minapolitan Perikanan, KPB Tobadak, Kawasan Transmigrasi)	Kab. Mamuju: tinggi untuk gempabumi, banjir Kab. Mamuju Tengah: tinggi untuk banjir dan longsor	Kab. Mamuju: tinggi Kab. Mamuju Tengah: data tidak tersedia
Pinrang dan sekitarnya (Kawasan Minapolitan Perikanan, KPB Tobadak, Kawasan Transmigrasi)	Kab. Pinrang: tinggi untuk banjir dan longsor, cuaca ekstrim, abrasi	Kab. Pinrang: tinggi
Barru dan sekitarnya (Perkotaan Lalabata, Kawasan Agropolitan,	Kab. Barru: tinggi untuk cuaca ekstrim Kab. Sidenreng	Kab. Barru: tinggi Kab. Sidenreng Rappang: sedang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Kelas Multi Risiko (IRBI 2013)
Kawasan Transmigrasi)	Rappang: tinggi cuaca ekstrim	
Muna dan sekitarnya (Kawasan Minapolitan, Kawasan Agropolitan, dekat Bau-bau)	Kab. Muna: tinggi untuk cuaca ekstrim	Kab. Muna: tinggi
Wakatobi dan sekitarnya (Perkotaan Wangi-Wangi, kawasan Pariwisata: KSPN Wakatobi, dekat Bau-bau)	Kab. Wakatobi: tinggi untuk banjir, abrasi	Kab. Wakatobi: sedang
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sulawesi		
Gorontalo	Tinggi untuk ancaman: Gempabumi, banjir dan tanah longsor	Tinggi
Palu	Tinggi untuk ancaman: banjir, tanah longsor, abrasi,	Tinggi
Makassar	Tinggi untuk ancaman: banjir, kebakaran permukiman, angin topan	Tinggi
Sungguminasa	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, angin topan	Tinggi untuk Kab. Gowa
Mamuju	Tinggi untuk ancaman gempabumi, banjir	Tinggi
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sulawesi		
Isimu – Kab. Gorontalo	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, kekeringan	Tinggi
Tilamuta – Kab. Boalemo	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor	Sedang
Luwuk – Kab. Banggai	Tinggi untuk ancaman: banjir, abrasi, angin topan, konflik sosial	Tinggi
Donggala	Tinggi untuk ancaman: gempabumi, banjir, tanah longsor, abrasi, angin topan	Tinggi
Mamuju	Tinggi untuk ancaman: gempabumi, banjir	Tinggi
Pasangkayu –Kab. Mamuju Utara	Tinggi untuk ancaman: gempabumi, tanah longsor, abrasi, angin topan	Tinggi
Tomohon	Tinggi untuk ancaman:	Sedang

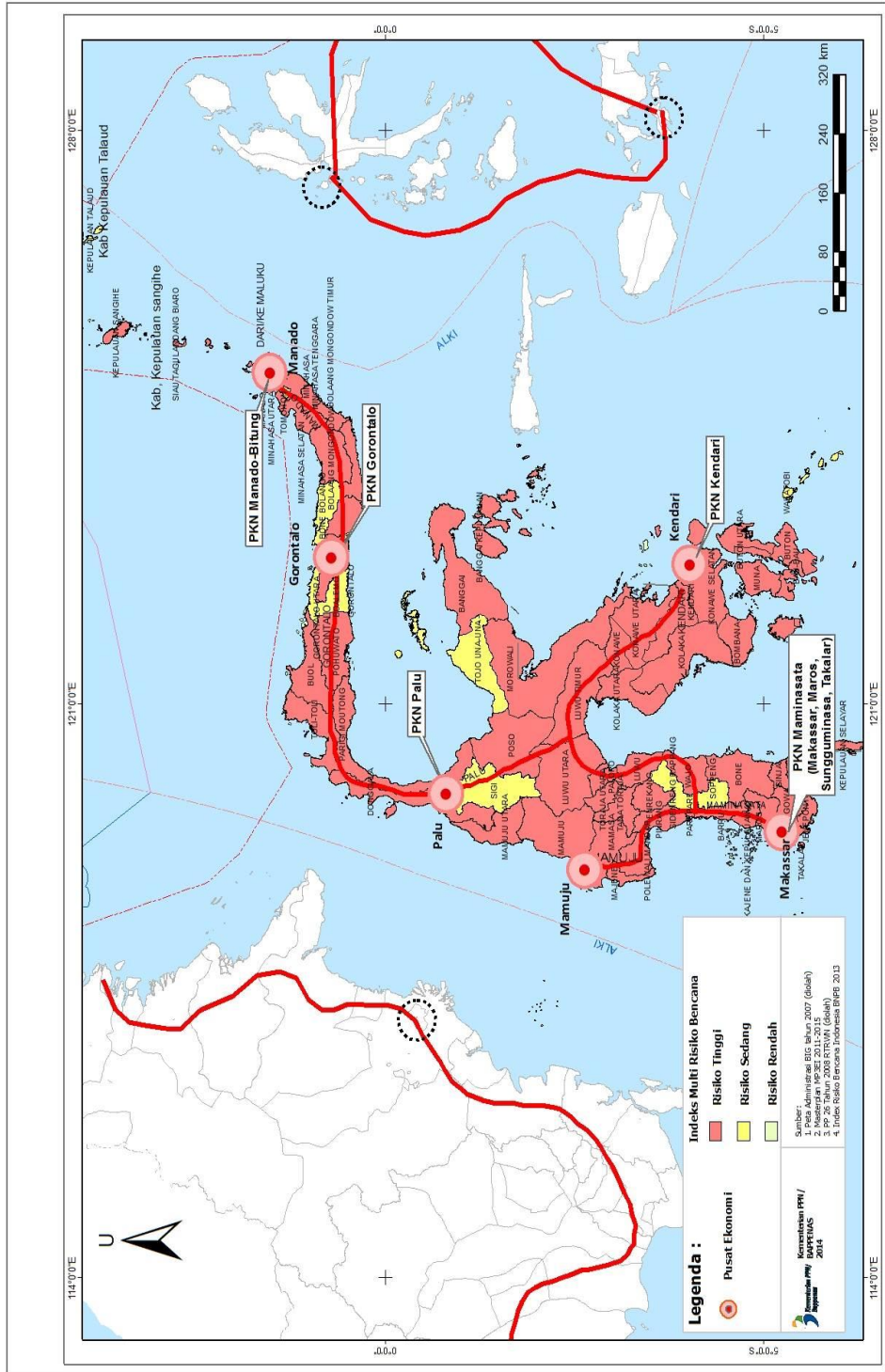


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Kelas Multi Risiko (IRBI 2013)
	banjir dan tanah longsor	
Leneponto	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, kekeringan, angin topan	Tinggi
Pangkajene Kepulauan	Tinggi untuk ancaman: angin topan	Tinggi
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sulawesi		
Melonguane – Kab. Kepulauan Talaud	Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, banjir dan tanah longsor, letusan gunung api, abrasi,	Sedang
Tahuna – Kab. Kepulauan Sangihe	Tinggi untuk ancaman: gempa bumi, banjir dan tanah longsor, letusan gunung api, abrasi,	Tinggi

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.

GAMBAR 5.5.
PETA INDEKS RISIKO BENCANA WILAYAH SULAWESI



5.5.5. Penataan Ruang Wilayah Sulawesi

5.5.5.1. Arah Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sulawesi

1. Kebijakan mewujudkan pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut meliputi pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan perikanan berbasis mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global.
2. Kebijakan mewujudkan lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi meliputi:
 - a. Pengembangan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; dan
 - b. Pemertahanan kawasan peruntukkan pertanian pangan berkelanjutan.
3. Kebijakan mewujudkan pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi melalui pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.
4. Kebijakan mewujudkan pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi di Pulau Sulawesi meliputi:
 - a. Pembangunan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan; dan
 - b. Pengembangan kawasan peruntukkan pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. Kebijakan mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah; dan
 - b. Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
6. Kebijakan mewujudkan kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen)



- dari luas Pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi ekosistemnya meliputi:
- a. Pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan
 - b. Pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi.
 - c. Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.
 - d. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS;
 - e. Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan DAS dengan mempertimbangkan morfologi tanah, curah hujan, kondisi geologi, dan jenis tanamannya.
7. Kebijakan mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi:
- a. Pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan hidup; dan
 - b. Pemertahanan eksistensi 14 (empat belas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia.
8. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN), meliputi:
- a. Pengembangan KSN di Kawasan Sorowako secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Pengembangan KSN Perbatasan dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. Pengembangan KSN untuk meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional.

5.5.5.2. Strategi Pengembangan Penataan Ruang Wilayah Sulawesi

I. Struktur Ruang Wilayah

1. Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan perikanan berbasis mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global, dengan meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan sentra

perikanan. Struktur perkotaan nasional yang akan dikembangkan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 5.10.

2. Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah, meliputi:
 - a. Mengembangkan akses prasarana dan sarana transportasi darat, laut dan udara yang menghubungkan antarkawasan perkotaan nasional dan memantapkan koridor ekonomi Pulau Sulawesi;
 - b. Mengembangkan dan memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat meliputi jalan nasional, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi penyeberangan yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan sentra produksi, pelabuhan dan bandar udara;
 - c. Mengembangkan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul di sepanjang jalur ALKI II dan ALKI III; dan
 - d. Memantapkan fungsi bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer, bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, dan bandara pengumpul dengan skala pelayanan tersier.
3. Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil, meliputi:
 - a. Mengembangkan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
 - b. Mengembangkan sistem transportasi antarmoda menuju kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.

Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 5.11.

TABEL 5.11
PRIORITAS LOKASI PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN PULAU SULAWESI
PERIODE 2015-2019

Provinsi	Pusat Kegiatan dalam RTRWN		
	PKN	PKW	PKSN
Gorontalo	Gorontalo (I/C/1)	Isimu (II/C/2)	Kwandang
		Kwandang (II/C/2)	
		Tilamuta (II/C/2)	
Sulawesi Utara	Kawasan Perkotaan Manado-Bitung (I/C/1)	Tomohon (I/C/1)	Melonguane (I/A/2)
		Tondano (II/C/1)	Tahuna (I/A/2)
		Kotamobagu (II/C/1)	
Sulawesi Tengah	Palu (I/C/1)	Poso (II/C/3)	Tolitoli
		Luwuk (II/C/1)	
		Buol (II/C/1)	
		Kolonedale (II/C/1)	
		Tolitoli (II/C/1)	
		Donggala (II/C/1)	
Sulawesi Selatan	Kawasan Perkotaan Makassar- Sungguminasa- Takalar-Maros (Mamminasata) (I/C/3)	Pangkajene (II/C/1)	
		Jeneponto (I/C/1)	
		Palopo (I/C/1)	
		Watampone (II/C/1)	
		Bulukumba (I/C/1)	
		Barru (II/C/1)	
		Parepare (II/C/1)	
Sulawesi Barat	Mamuju		
Sulawesi Tenggara	Kendari (I/C/1)	Unaaha (II/C/1)	
		Lasolo (II/C/1)	
		Bau-bau (I/C/1)	
		Raha (II/C/1)	

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.

II. Pengembangan Kawasan Lindung

1. Strategi untuk pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi, meliputi menetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS.
2. Strategi untuk pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi, meliputi penetapan koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam dan pengembangan prasarana yang ramah lingkungan pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi.

III. Pengembangan Kawasan Budidaya

1. Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, meliputi mendorong pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan pusat industri jasa hasil pertanian tanaman pangan padi dan jagung.
2. Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan, melalui pengembangan kawasan industri pengolahan hasil perkebunan kakao dan peningkatan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dengan sentra perkebunan kakao.
3. Strategi untuk pembangunan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pertambangan mineral berupa nikel serta minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan, melalui pengembangan kawasan industri pengolahan beserta prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil produksi dari kawasan peruntukan pertambangan ke pasar nasional dan internasional.
4. Strategi untuk pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia;
 - b. Mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara.
5. Strategi untuk pemertahanan eksistensi 14 (empat belas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia dengan mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT.

IV. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional

Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dikembangkan 5 (lima) KSN yang mendukung pengembangan wilayah di Pulau Sulawesi. Strategi pengembangan KSN di Pulau Sulawesi dapat dilihat pada Tabel 5.12.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 5.12
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
DI PULAU SULAWESI

No	KSN	Tipe	Strategi	K/L
1	Kawasan Sorowako	Pendayagunaan Sumberdaya alam	Pengembangan dan peningkatan kegiatan budidaya pertanian dan perikanan yang berkelanjutan sebagai alternatif kegiatan perekonomian masyarakat yang mampu bersaing dalam perekonomian nasional Kawasan Sorowako	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Agraria dan Tata Ruang- Kementerian Pertanian- Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Perbatasan Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi Tengah	Pertahanan dan Keamanan	Pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perbatasan Negara secara sinergis di Provinsi Sulawesi Utara – Gorontalo – Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Agraria dan Tata Ruang- BNPP- Kementerian Perhubungan- Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
3	Perkotaan Mamminasata	Kepentingan Ekonomi	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai Pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi KTI Pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Agraria dan Tata Ruang- Bappenas
4	Perkotaan Bimindo (Bitung-Minahasa-	Kepentingan Ekonomi	Pengembangan Kawasan Perkotaan Bimindo sebagai Pusat orientasi	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Agraria dan Tata Ruang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	KSN	Tipe	Strategi	K/L
	Manado)		pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi KTI Pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya	- Bappenas
5	Kawasan Gorontalo-Paguyaman-Kwandang (Gopandang)	Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan Kawasan Gopandang sebagai Pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi KTI	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang - Bappenas - Kementerian Koordinator Perekonomian

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.

5.5.6. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Arah kebijakan pengembangan Wilayah Sulawesi yakni peningkatan kapasitas pemerintahan daerah yang mendorong pembangunan ekonomi secara merata berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan strategi:

1. Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat;
2. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada tiap pemerintah daerah yang terintegrasi dengan manajemen kinerja;
3. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
4. penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah.
5. Peningkatan proporsi belanja modal;
6. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line;
7. Penguatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah.

5.6. Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Sulawesi

5.6.1. Prioritas Program Pembangunan

5.6.1.1. Provinsi Sulawesi Utara

TABEL 5.13
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan jalur KA antara Manado - Bitung *
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Manado
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Samratulangi
2. Pembangunan Bandara Sitaro
3. Pembangunan Bandara Miangas*
4. Pengembangan Bandar Udara Melonguane
5. Pengembangan Bandar Udara Naha Tahuna
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan (UPP) Tahuna
2. Pengembangan Pelabuhan Lirung
3. Pengembangan Pelabuhan Bitung (Pelabuhan hub Internasional Bitung)*
4. Pembangunan infrastruktur penunjang ekspor hasil perikanan Bitung
6. Pengembangan Pelabuhan Manado
7. Pengembangan Pelabuhan Multipurpose Tahuna
8. Pengembangan Pelabuhan Petta
9. Pengembangan Pelabuhan Multipurpose Melangoane
10. Pengembangan Pelabuhan Miangas
11. Pengembangan Pelabuhan Buhias
12. Pengembangan Pelabuhan Pehe
13. Pengembangan Pelabuhan Ruang
14. Pengembangan Pelabuhan Amurang
15. Pengembangan Pelabuhan Bangka
16. Pengembangan Pelabuhan Montehage
17. Pengembangan Pelabuhan Gangga
18. Pengembangan Pelabuhan Multipurpose Labuan Uki
19. Pengembangan Pelabuhan Kawio
20. Pengembangan Pelabuhan Marore
21. Pengembangan Pelabuhan Matutuang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
22. Pengembangan Pelabuhan Kawaluso
23. Pengembangan Pelabuhan Tamako
24. Pengembangan Pelabuhan Lipang
25. Pengembangan Pelabuhan Bukide
26. Pengembangan Pelabuhan Kahakitang
27. Pengembangan Pelabuhan Kalama
28. Pengembangan Pelabuhan Ngalipaeng
29. Pengembangan Pelabuhan Mangarang
30. Pengembangan Pelabuhan Karatung
JALAN
1. Pembangunan Jalan Bypass Manado II (Maumbi-Kairagi)
2. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Karakelong (Esang-Rainis)
3. Pembangunan Jalan Lintas Penghubung (Pinogaluman-Duloduo-Molibagu)
4. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Sangihe (Enemawira-Tomako)
5. Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung
6. Pembangunan Jalan Tomohon - Manado
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Melonguane
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Marampit
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Miangas*
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Likupang*
5. Kapal Penyeberangan Danau Tondano
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawakuso
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Talise
8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Manado Tua*
9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Siladen
10. Pemb. Terminal/Shelter Bis Air Pesisir Pantai Manado dan Sungai Tondano
11. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Miangas
12. Penyeberangan RoRo ASEAN Bitung-General Santos
13. Pembangunan kapal penyeberangan 1000GT
14. Pembangunan kapal penyeberangan 750GT
15. Pembangunan kapal penyeberangan 200GT
16. Pembangunan Kapal Pembersih Alur Pelayaran
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTG/MG Minahasa Peaker 150 MW
2. PLTG/MG Mobile PP Sulbagut (Amurang) 100 MW
3. PLTU Sulut 1 50 MW
4. PLTU Sulut 3 50 MW
5. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. perkuatan Tebing dan Tanggul Banjir Sungai Tondano (Paket 1) Manado
2. perkuatan Tebing dan Tanggul Banjir Sungai Tondano (Paket 2) Manado



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
3. Pembangunan Sabo Dam Sungai Milangodaa Kab. Bolsel
4. Pengamanan Pantai Amurang (Lanjutan) Kab. Minahasa Selatan
5. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Miangas (Lanjutan) Kab. Kepulauan Talaud
6. Pembangunan Bendungan Lolak Kab. Bolaang Mongondow
7. Pembangunan Bendungan Kuwil Kab. Minahasa Utara
8. Revitalisasi Danau Tondano Kab. Minahasa Utara
PENDIDIKAN
1. Pengembangan STAKN Manado, STAIN Manado
2. Fasilitasi pembangunan rumah ibadah semua agama
3. Fasilitasi Sekber dan Operasional FKUB di provinsi dan kab/kota
4. Fasilitasi Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG)
5. Fasilitasi sarana keagamaan
6. Pengembangan Pusat Pembinaan Agama (Bukit Doa)
7. Pengembangan wisata religi Bukit Kasih di Kab. Minahasa
KESEHATAN
1. Pengembangan RS Rujukan Regional (RS Noongan di Minahasa, RS Popundayan Bolaang Mongondow, RS Liung Kendage Sangihe, RS Walanda Maramis di Minahasa Utara)

5.6.1.2. Provinsi Gorontalo

TABEL 5.14
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI GORONTALO

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan jalur KA antara Isimu-Kota Gorontalo-Taludaa-Molibagu-Tutuyan-Belang-Kema-Bitung
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Gorontalo*
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Jalaludin
2. Pembangunan Bandara Puhwato*
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Anggrek
2. Pengembangan Pelabuhan Kwandang
3. Pengembangan Pelabuhan Tilamuta
4. Pengembangan Pelabuhan Gorontalo
5. Pengembangan Pelabuhan Bumbulan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
JALAN
1. Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR)
2. Pembangunan Jalan Lintas Timur (Pentadu - Bilato - Biluhu Barat - Gorontalo)
3. Pembangunan Jalan Penghubung Gorontalo - ke Manado
4. Pembangunan Jalan Lintas Penghubung (Tolinggula - Marisa)
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Marisa
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wakai
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTG/MG Gorontalo Peaker 100 MW
2. PLTU Sulbagut 1 50 MW
3. PLTU Sulbagut 3 50 MW
4. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
5. Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Panas Bumi
Telekomunikasi dan Infomatika
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Bendung Randangan (Multi Year) Pohuwato
2. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Randangan Kiri (Lanjutan) Pohuwato
3. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Randangan Kanan Pohuwato
4. Pembangunan / Peningkatan Bendung Pilohayanga (Multi Year) Gorontalo
5. Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Imbodu Pohuwato
6. Pengendalian Banjir Sungai Tilamuta Boalemo
7. Pengendalian Banjir Sungai Molosipat Pohuwato
8. Pengendalian Banjir Sungai Lemito Pohuwato
9. Pengendalian Banjir Sungai Bone Bone Bolago
10. Pengendalian Banjir Sungai Tolinggula Prov. Gorontalo
11. Pengendalian Banjir Sungai Pontolo Gorontalo Utara
12. Pembangunan Long Storage Bulia Boalemo
13. Pembangunan Pengendali Sedimen Wil. Kab Boalemo Boalemo
14. Pembangunan Pengendali Sedimen Wil. Kab Pohuwato Pohuwato
15. Pembangunan Pengendali Sedimen Wil. Kab Gorontalo Utara Gorontalo Utara
16. Pengamanan Pantai Sumalata Gorontalo Utara
17. Pengamanan Pantai Tolinggula Gorontalo Utara
18. Pengamanan Pantai Atinggola Gorontalo Utara
19. Pengamanan Pantai Leato Kota Gorontalo
20. Pengamanan Pantai Biluhu Barat Kab. Gorontalo
21. Pengamanan Pantai Biluhu Timur Kab. Gorontalo
22. Pembangunan Waduk Dumbaya Bulan
23. Pembangunan Waduk Toheti Dehuwa Bone Bolango
24. Pembangunan Waduk Kayu Merah (multi years) Gorontalo
25. Revitalisasi Danau Limboto Gorontalo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
26. Revitalisasi Danau Perintis
PENDIDIKAN
1. Usulan pembangunan 18 RPS
2. Pembangunan SMK Pertanian dan SMK Perikanan di Gorontalo Utara dan Pohuwato (masing-masing 1 USB)
3. Pembangunan 26 RKB SMK dan 56 RKB SMA di 5 Kabupaten
4. Pembangunan 2 USB SMK dan 8 USB SMA di 5 Kabupaten.
KESEHATAN
1. Pengembangan RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie (fisik dan alat kesehatan)
2. Peningkatan kapasitas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah (pembangunan gedung, alat kesehatan, dan pengadaan mobil operasional)
3. Pengadaan PNET dan PNET Set
4. Pusing perairan (wilayah kepulauan di Kab. Gorontalo Utara) sebanyak tiga unit

5.6.1.3. Provinsi Sulawesi Barat

TABEL 5.15
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Tampa Padang
2. Pengembangan Bandara Sumarorong
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut Belang-belang, Sulawesi Barat
2. Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut Tanjung Silopo Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat
3. Pengembangan Pelabuhan Majene
4. Pengembangan Pelabuhan Pooongan
5. Pengembangan Pelabuhan Ambo
6. Pengembangan Pelabuhan Tutu Kembang
JALAN
1. Pembangunan Jalan Akses Bandara Tampa Padang
2. Pembangunan Jalan Salubatu - Mambi - Malabo - Mamasa - Tandung
3. Pembangunan Jalan Salubatu - Tibo - Kalumpang - Bts Sulsel (Tanah Toraja)
4. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Belang-Belang
5. Pembangunan Jalan Polewali - Tabone - Malabo
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan II Pel. Penyeber. Mamuju
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Batu Parigi
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Salulebo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
KETENAGALISTRIKAN
4. PLTA Poko 2x117 MW
5. PLTU Mamuju (FTP2) 2x25 MW
6. PLTA Karama (unsolicited) 450 MW
TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
1. Pembangunan backbone Palapa Ring, Telekomunikasi Informatika
2. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
3. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Lanjutan Pembuatan Tanggul Pengendalian Banjir, Sungai Pasang Kayu Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara
2. Pembangunan Pengendalian Banjir, Sungai Lariang, Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara
3. Lanjutan Pembangunan Pengendalian Banjir, Sungai Benggaulu, Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara
4. Pembuatan Pengendalian Banjir, Sungai Kuma, Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara
5. Pembuatan Pengendalian Banjir S.Rondo Mayang, Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara
6. Pembuatan Pengendalian Banjir S.Pedongga, Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara
7. Pembuatan Pengendalian Banjir S. Lumu Lanjutan, Kab. Mamuju Mamuju
8. Pembuatan Pengendalian Banjir S. KaroSul-Sela, Mamuju Tengah Mamuju Tengah
9. Pembangunan Pengendalian Banjir S. Tobadak Mamuju Tengah
10. Pembangunan Pengendalian Banjir S. Salubiro Mamuju Tengah
11. Pemabangunan Pengendalian Banjir S. Salulebbo Mamuju Tengah
12. Pembuatan Pengendalian Banjir S. Kalukku, Kab. Mamuju Mamuju
13. Pembuatan Pengendalian Banjir Sungai Papalang, Kab. Mamuju Mamuju
14. Pembuatan Pengendali Banjir Sungai Deking Kab. Majene Majene
15. Lanjutan Pembuatan Tanggul Pengendali Banjir dan Perkuatan Tebing Sungai Mapilli Kab. Polman Polman
16. Lanjutan Pembuatan Tanggul Pengendali Banjir Sungai Mandar Kab. Polman Polman
17. Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Mamasa Kab. Mamasa Mamasa
18. Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Palattoang Kab. Majene Majene
19. Pembangunan Pengendali Banjir Sungai MoSul-Selo Kab. Majene Majene
20. Pengendalian Banjir Sungai Benggaulu Mamuju Utara
21. Lanjutan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Tapalang Kab. Majene Mamuju
22. Lanjutan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Pasang Kayu Kab. Mamuju utara Mamuju Utara
23. Lanjutan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Kalukku Kab. Mamuju Mamuju
24. Lanjutan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Budong-budong Kab. Mamuju Mamuju



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
25. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Pangiang Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara
26. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Karya Bersama Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara
27. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Mamuju Kab. Mamuju Mamuju
28. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Bambaira Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara
29. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Kasoloang Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara
30. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Tampaure Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara
31. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Bambapore Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara
32. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Sarasa Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara
33. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Sarudu Kab. Mamuju Utara Mamuju Utara
34. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Tarailu kab. Mamuju Mamuju
35. Lanjutan Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Buku kab. Polman Polman
36. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Baurung Kab. Majene Majene
37. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Mampie kab. Polman Polman
38. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Tanga-Tanga kab. Polman Polman
39. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai karama kab. Polman Polman
40. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Onang Kab. Majene Majene
41. Pemb. Tanggul dan Pemecah Ombak Pantai Pasangkayu Mamuju Utara
PENDIDIKAN
1. Pembangunan Infrastruktur Universitas Sulawesi Barat
2. Pembangunan Techno Park (UPTD Benih Pertanian dan Science Park (UPTD Agrobisnis di kabupaten Mamuju)
KESEHATAN
1. Pengembangan RS Tipe B
2. Pemenuhan obat dan vaksin
3. Pemenuhan tenaga PTT
4. Pembangunan Puskesmas baru

5.6.1.4. Provinsi Sulawesi Tengah

TABEL 5.16
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Ampana di Kabupaten Tojo Una-una*
2. Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir-Luwuk
3. Pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu
4. Pembangunan Bandara Morowali*
Perhubungan Laut
1. Pengembangan Pelabuhan Pantoloan
2. Pengembangan Pelabuhan Poso
3. Pengembangan Pelabuhan Toli - toli
4. Pengembangan Pelabuhan Moutong Parigi
5. Pengembangan Pelabuhan Kolonadale
6. Pengembangan Pelabuhan Teluk Malala
7. Pengembangan Pelabuhan Ogoamas
8. Pengembangan Pelabuhan Leok
9. Pengembangan Pelabuhan Matagisi
JALAN
1. Pembangunan Jalan Luwuk - Batul - Moilong-Rata-Baturube
2. Pembangunan Jalan Pepe - Tomata
3. Pembangunan Jalan Palu-Parigi (Bypass)
4. Pembangunan Jalan Poros Soroako – Bahodopi (Industri Morowali)
5. Pembangunan Jalan Salakan-Sambut
6. Pembangunan Jalan Akses Pendukung Kawasan Industri Konawe
7. Pembangunan Flyover Pantoloan
8. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Palu
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Dongkala
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bambaesa
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Amalengo
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Labuan
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kolonedale
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baturube
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ampana
8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kabonga*
9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pasokan
10. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Banggai*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTU Palu 3 100 MW
2. PLTMG Luwuk 40 MW
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan D.I. Sibeia (3.321 Ha) Kab. Parigi Moutong
2. Pembangunan D.I. Binsil (1.510 Ha) Kab. Parigi Moutong
3. Pembangunan D.I. Meko (2.800 Ha) Kab. Poso Kab. Poso
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lambunu (Saluran, Jalan Inspeksi) Kab. Parigi Moutong
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gumbasa (tahap I) (Saluran Induk, Saluran Sekunder) Kab. Sigi
6. Pembangunan Tanggul Sungai Puna Kab. Poso
7. Pembangunan Revetment Pantai Kab. Donggala Kab. Donggala
8. Pembuatan Tanggul Penahan Tebing Danau Poso Danau poso, Kab. Poso
9. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Transmisi Air Baku Sungai Saluki Gumbasa SPAM Regional PASIGALA (Tahap V) Kab. Sigi
10. Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air baku Sungai Tandayo Donggala
11. Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air baku Sungai Tunu Donggala
12. Pembuatan Tanggul Penahan Tebing Danau Poso Danau poso, Kab. Poso
PENDIDIKAN
1. Pembangunan SMK Pertanian
2. Pembangunan SMK Perikanan dan Kelautan
3. Peningkatan kapasitas guru produktif SMK Pertambangan
4. Pembangunan lembaga PAUD (TK,TPA)
5. Penyediaan BOP dan APE PAUD
KESEHATAN
1. Pelayanan Kesehatan Rujukan (5 wilayah dan 1 provinsi).
2. Penyediaan RS bergerak di Pulau Banggai Laut dan Banggai Kepulauan
3. Pembangunan baru RS Pratama di Banggai Kepulauan dan Morowali
4. Peningkatan SDM kesehatan (dokter, bidan, perawat, tenaga gizi dan analis kesehatan)
5. Peningkatan ketersediaan dokter spesialis terutama dokter spesialis jantung di fasilitas kesehatan
6. Peningkatan jumlah Puskesmas
7. Penanganan kasus HIV pada kelompok Ibu RT
8. Penguatan laboratorium kesehatan (peralatan dan bangunan) di tingkat Provinsi
9. Penanganan penyakit schistosomiasis
10. Pengadaan layanan mobile untuk layanan kesehatan reproduksi
PERUMAHAN
1. Rusunawa KEK Palu 2TB, Muruwali 2TB, Morowali Utara 2TB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
2. IKK Tangkuran (Kab. Poso)
3. SPAM Khusus (Pulau Terluar) Pulau Lingayan (Kab. Toli-Toli),
4. TPA Regional Kota Palu-Kab Sigi
5. Rusunawa KEK Palu 2TB, Muruwali 2TB, Morowali Utara 2TB

5.6.1.5. Provinsi Sulawesi Selatan

TABEL 5.17
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan jalur KA antara Makassar - Pare-Pare
2. Pembangunan jalur KA Pare-Pare – Mamuju- Isimu
3. Pembangunan KA Perkotaan Mamminasata (tahap 1)*
4. Pembangunan Jalur KA Makassar-Bulukumba-Watampone
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Makassar*
2. Pembangunan kampus Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) di Makassar
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin -Pembangunan Terminal II di Kawasan Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar*
2. Pembangunan kampus Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) di Makassar
3. Bandara Buntu Kunik (Pindahan dari SULBAR)
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pembangunan Pelabuhan Pare-pare
2. Perluasan Pelabuhan Makassar (Makassar New Port)*
3. Pengembangan Pelabuhan Garongkong
4. Pengembangan Pelabuhan Munte
5. Pengembangan Pelabuhan Jeneponto
6. Pengembangan Pelabuhan Sabutung
7. Pengembangan Pelabuhan Sapuka
8. Pengembangan Pelabuhan Sailus
9. Pengembangan Pelabuhan Kalukalukuang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
10. Pengembangan Pelabuhan Benteng
11. Pengembangan Pelabuhan Bajoe
12. Pengembangan Pelabuhan Pattirobajo
13. Pengembangan Pelabuhan Sinjai
14. Pengembangan Pelabuhan Paotere
15. Pembangunan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran di Makassar
JALAN
1. Pembangunan Fly Over - Akses Bandara Internasional Sultan Hasanuddin
2. Pembangunan Jalan baypass Maminasata
3. Pembangunan Jalan Seseng - Bts.Sulbar
4. Pembangunan Jalan Trans Sulawesi Mamminasata (Middle Ring Road)
5. Pembangunan Under Pass A.P. Pettarani
6. Pembangunan Jalan Kaluku - Sae - Talang - Sabang
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Garongkong
2. Pengembangan Pel. Penyeberangan Sinjai Lintas Konawe
3. Pembangunan Fisik Fasilitas Penyeberangan Pada Lintasan Bajoe
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Gangga*
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Jampea*
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Maros*
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pare-Pare*
8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ujung Lero*
9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bangsalae Siwa*
10. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bira*
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTGU Makassar Peaker 300 MW
2. PLTGU Sulsel Peaker 300 MW
3. PLTU Sulsel 2 200 MW
4. PLTGU Makassar Peaker 150 MW
5. PLTGU Sulsel Peaker 150 MW
6. PLTU Jenepono 2 250 MW
7. PLTG/MG Mobile PP Sulsel (Tallo Lama) 100 MW
8. PLTU Sulsel Barru - 2 100 MW
9. PLTG/MG Mobile PP Sulsel (Tello) 50 MW
10. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional

SUMBER DAYA AIR

1. Pembangunan Bendungan Karalloe Gowa
2. Pembangunan DI Pamukulu Takalar
3. Pembangunan Waduk Paselloreng Gowa
4. Pembangunan Waduk Nipa-Nipa Maros
5. Pembangunan Jaringan Irigasi Bayang-Bayang Bulukumba
6. Pembangunan Bendungan Cinemabella Selayar
7. Pembangunan Bendungan Posi Selayar
8. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irgasi D.I. Baliase Luwu Utara
9. Pembangunan Bendung D.I. Baliase Luwu Utara
10. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Baliase Luwu Utara
11. Rehabilitasi Konstruksi dan Pintu Bendung Benteng Pinrang
12. Pembangunan Perkuatan Tebing Bagian Hulu Bendung Gerak Tempe Wajo
13. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Taroang dan Muara Sungai Tamanroya Jeneponto
14. Pemataan Sungai Tallo dengan Foto Udara Kt. MakaSul-Selar
15. Pengendalian Banjir dan Perbaikan Alur Sungai Kalaena dan Sungai Angkona Luwu Timur
16. Pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai Rongkong Luwu Utara
17. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Baliase Luwu
18. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Kanjiro Luwu
19. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Bone-Bone Luwu
20. Pengendalian Banjir Sungai Cenranae Wajo-Bone
21. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Walanae Soppeng
22. *Construction of Giant Sand Trap Gowa*
23. *Construction of Water Selected Intake Gowa*
24. *Construction of three Sabo Dam No 8-1, 8-2, & 8-3 Gowa*
25. *Construction of Two Sabo Dam No 8-4 & 8-5 Gowa*
26. Rehabilitasi Bangunan Pengendali Sedimen Bagian Hulu Gowa
27. Penggalan Hulu Waduk Bili-Bili Gowa
28. Pembangunan Konsolidasi Dam Gowa
29. Pembangunan Sand Pocket Gowa
30. Pembangunan Bendungan Jenelata Gowa
31. Pembangunan DPS Rongkong Kab. Luwu Utara Luwu Utara
32. Pemb. Pengaman Abrasi Pantai Tanaberu Bulukumba
33. Pemb. Pengaman Abrasi Pantai Lengnga Pinrang
34. Pembangunan Embung Air Baku di Kab. Luwu Utara (7 buah) Luwu Utara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PENDIDIKAN
1. Pembangunan USB (Boarding School) universal Provinsi Sulawesi Selatan Usulan sebesar Rp 90 Miliar
2. Meningkatkan angka melek aksara minimal menjadi 95% melalui PKBM
3. Pengembangan pendidikan vokasional (penerbangan, pramugari, pertanian, perkebunan, perikanan)
4. Pembinaan SMK yang dikembangkan menjadi sekolah model
5. Pengembangan PAUD
6. Pengembangan politeknik lingkungan hidup
KESEHATAN
1. Pengembangan RS Provinsi Labuang Baji
PERUMAHAN
1. Pembangunan wisma negara

5.6.1.6. Provinsi Sulawesi Tenggara

TABEL 5.18
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Matahora
2. Pengembangan Bandara Haluoleo
3. Pengembangan Bandara Sangia Nibandera
4. Pengembangan Bandara Sugi Manaru
5. Pengembangan dan Peningkatan Bandara Beto ambari
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Lawele
2. Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut Bungkutoko
3. Pengembangan Pelabuhan Bau - Bau
4. Pengembangan Pelabuhan Raha
5. Pengembangan Pelabuhan Kendari
6. Pengembangan Pelabuhan Kolaka
7. Pengembangan Pelabuhan Watunohu
8. Pengembangan Pelabuhan Wanci
9. Pengembangan Pelabuhan Banabungi
10. Pengembangan Pelabuhan Ereke
11. Pengembangan Pelabuhan Pomalaa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
12. Pengembangan Pelabuhan Rante
13. Pengembangan Pelabuhan Olo-oloho
14. Pengembangan Pelabuhan Lapuko
15. Pengembangan Pelabuhan Kaledupa
16. Pengembangan Faspel Bungkutoko
17. Pengembangan Pelabuhan Malingano
18. Pengembangan Pelabuhan Banabungi-Pasar Wajo
19. Pengembangan Pelabuhan Dawi-Dawi
20. Pengembangan Pelabuhan Molawe
21. Pengembangan Pelabuhan Langara
22. Pengembangan Pelabuhan Boepinang
JALAN
1. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari
2. Pembangunan Jalan Tampo-Raha
3. Pembangunan Jalan Tinanggea-Alangga-Punggaluku-Ambesia
4. Pembangunan Jembatan Teluk Kendari
5. Pembangunan Jalan Raha - Wakuru - Wara
ASDP
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Dongkala
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bambiae
8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kolonedale
9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baturube
10. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ampana
11. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kabonga
12. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Lero pada Lintas Lero - Kambonga
13. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pasokan
14. Pembangunan Fisik Fasilitas Penyeberangan Pada Lintasan Kolaka
15. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Binongko*
16. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kaledupa*
17. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Raha*
18. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sikeli (Tanjung Phising)*
19. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bombana*
20. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wanci*
21. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Amolengu*
22. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Labuhan*
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTU Kendari 3 50
2. PLTG/MG Mobile PP Sultra (Kendari) 50 MW
3. PLTU Bau-Bau 50 MW
4. PLTMG Bau-Bau 30 MW
5. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
1. Pembangunan backbone Palapa Ring, Telekomunikasi Informatika
2. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
3. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Tanggul Sungai Konaweha Konawe
2. Pembangunan Pengaman Pantai Bahari Buton
3. Pembangunan Bendungan Pelosika di Kabupaten Konawe
4. Pembangunan Bendungan Ladongi di Kab. Kolaka
KESEHATAN
1. Peningkatan puskesmas
2. Peningkatan peralatan rumah sakit
3. Peningkatan kesling

5.6.2. Kerangka Regulasi

Pelaksanaan pembangunan Wilayah Sulawesi tidak terlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Kabupaten/Kota di kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi;
2. Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Perpajakan Kepabeanan, dan Cukai di Kawasan Ekonomi Khusus serta aturan turunannya;
3. Penyelesaian Peraturan tentang Ketenagakerjaan di Kawasan Ekonomi Khusus;
4. Penyelesaian Peraturan tentang Pelimpahan Kewenangan perdagangan, keimigrasian, perindustrian, pertanahan, tenaga kerja dari kementerian/lembaga terkait kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;
5. Regulasi pengelolaan lintas batas;
6. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI-Filipina dalam pengembangan kawasan perbatasan negara;
7. Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan *Dryport*;
8. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir (kecamatan lokpri);
9. Penetapan Perpres RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi Tengah termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)-nya, Perpres RTR KSN Kawasan Sorowako, Perpres RTR Kawasan Perkotaan Bitung-Minahasa-Manado (Bimindo); Perpres RTR Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo-Paguyaman-Kwandang (Gopandang); penyelesaian Peninjauan Kembali Perpres No. 55/2011 tentang RTR KSN Makassar Sungguminasa Takalar Maros (Mamminasata), dan Penyelesaian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

peninjauan kembali Perpres No. 88/2011 tentang RTR Pulau Sulawesi.

10. Regulasi di daerah yang mendukung implementasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan.

5.6.3. Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan pembangunan Wilayah Sulawesi tidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a. Peningkatan koordinasi antara Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi di Wilayah Sulawesi dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau.
- b. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan;
- c. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan;
- d. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;
- e. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- g. Penyusunan Strategi Daerah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- h. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antar-SKPD dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah;
- i. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal;
- j. Tunjangan khusus bagi pegawai pelayanan dasar publik di daerah tertinggal (bidan, dokter, guru, penyuluh pertanian).

BAB 6

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN

6.1 Capaian Kinerja Saat ini

- Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan selama kurun waktu 2009 – 2013 sebesar 4,4 persen atau masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Peranan Pulau Kalimantan dalam pembentukan PDB nasional mengalami penurunan dari 9,2 persen (2009) menjadi 8,3 persen (Triwulan II 2014).
- Pemerintah Provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret) dan sudah berada di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen (2009) dan 11,25 persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT), Pemerintah Provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan juga telah berhasil menurunkan TPT dan sudah di bawah TPT nasional sebesar 7,87 persen (2009) dan 5,70 persen (Feb, 2014), kecuali di Provinsi Kalimantan Timur yang masih berada di atas TPT Nasional.
- Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka di Wilayah Pulau Kalimantan ini telah dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan selalu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi di Pulau Kalimantan. Namun demikian, pencapaian IPM di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan masih perlu ditingkatkan karena masih di bawah IPM nasional sebesar 71,76 (2009) dan 73,81 (2013).
- Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, seluruh provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini diindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan yang cenderung meningkat pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2009. Namun, rasio gini Wilayah Pulau Kalimantan sudah berada dibawah rasio gini nasional yaitu 0,413 (2013). Kedepan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-

hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

6.2 Potensi dan Keunggulan Wilayah

Perekonomian Wilayah Pulau Kalimantan ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu pertambangan dan penggalian, pertanian terutama perkebunan, dan industri pengolahan; serta sektor perikanan dan kehutanan.

- Komoditas sektor pertambangan dan penggalian yang paling dominan adalah minyak, gas, dan batu bara. Untuk seluruh Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2013, sektor pertambangan dan penggalian sudah berkontribusi sebesar 31,8 persen. Kontribusi sektor ini sedikitnya telah menyumbang keuangan negara hingga USD 100 juta pada tahun 2010. Potensi dari komoditas utama sektor ini adalah gas bumi sebesar 17,0 persen dari potensi cadangan gas bumi nasional, minyak bumi sebesar 9,0 persen dari cadangan minyak bumi nasional.
- Pada tahun 2002 produksi minyak dan gas nasional tidak mampu menopang kebutuhan dalam negeri yang mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi tantangan bagi pengembangan ekonomi di Kalimantan dan ketahanan energi nasional. Revitalisasi kilang tua dan pencarian cadangan minyak dan gas yang baru memberikan peluang investasi bagi investor. Selain menjamin ketahanan energi nasional, upaya tersebut mampu menggerakkan perekonomian di Kalimantan, maka sinkronisasi kebijakan untuk sektor migas menjadi hal utama ditengah meningkatnya permintaan migas nasional.
- Batu bara yang merupakan komoditas tambang utama Kalimantan, mempunyai cadangan 49,6 persen dari cadangan batu bara nasional, dengan naiknya permintaan terhadap batu bara dalam negeri, dan penurunan permintaan dari luar negeri terutama dari Tiongkok, hal ini sebenarnya memberikan peluang untuk pembangunan ekonomi Kalimantan selanjutnya dengan mengalihkan peningkatan permintaan dalam negeri. Terlebih lagi keunggulan yang dimiliki sektor batubara di Kalimantan ialah tingkat kalorinya yang tinggi (mencapai 7000 kalori/kg).
- Bahan tambang dan galian yang menjanjikan potensinya adalah pasir zirkon, bijih besi dan bauksit. Saat ini, produksi pasir zirkon Indonesia mencapai sekitar 20.000 ton sebulan dan menempati urutan keempat di dunia. Cadangan bauksit di Indonesia diperkirakan mencapai 24 juta ton, saat ini produksi bauksit nasional baru mencapai 5,5 juta ton. Cadangan bijih besi primer di



Kalimantan mencapai 84 persen dan cadangan bijih besi laterit mencapai 29 persen dari total cadangan bauksit nasional. Potensi pengembangan produk turunan bijih besi dan bauksit sangat besar. Pembangunan smelter yang menjadi hal wajib untuk meningkatkan nilai tambah bijih besi dan bauksit menunjukkan potensi investasi di ketiga komoditas tersebut sangat terbuka lebar. Ditambah lagi berdasarkan hasil identifikasi (pohon industri Kemenperin), pengembangan klaster industri pengolahan SDA mineral tersebut akan mampu mendukung industri manufaktur yang memproduksi barang elektronik, peralatan listrik, kendaraan bermotor, mesin dan komponennya, serta barang konstruksi.

- Dari sektor pertanian, pengembangan sumber daya terbarukan, seperti kelapa sawit dan perkebunan juga perlu dipertimbangkan, kedua komoditas ini telah memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar. Pada tahun 2010 luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan mencapai 83 persen dari luas kelapa sawit nasional. Sedangkan, potensi perkebunan di kawasan hutan produksi Kalimantan mencapai 29,8 juta Ha, dari sejumlah itu baru 52 persen (15,7 juta Ha) yang dapat dimanfaatkan. Artinya, potensi pengembangan komoditas kelapa sawit dan perkebunan masih dapat ditingkatkan. Hal ini menggambarkan potensi ekonomi dari kedua sektor ini masih mungkin terus dikembangkan dan tingkatkan nilai tambahnya. Selain itu, sektor kehutanan dan perikanan perlu juga di kembangkan karena memiliki potensi besar.
- Sektor industri di Wilayah Pulau Kalimantan berpotensi untuk berperan besar menjadi bagian dari rantai industri strategis di wilayah Jawa terutama industri barang kompleks. Sektor industri pengolahan saat ini terkonsentrasi di Provinsi Kalimantan Timur yakni mencapai 23,5 persen yang didominasi oleh sektor industri berbasis migas. Dalam konteks pengembangan rantai industri strategis, hilirisasi potensi sumber daya alam akan dapat memperkuat basis ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Adapun komoditas seperti pasir zirkon, bijih besi, dan bauksit berpotensi untuk diprioritaskan pengembangan dan integrasinya dengan mata rantai industri barang kompleks di wilayah Jawa.
- Peluang investasi di Wilayah Pulau Kalimantan tidak hanya terbuka bagi ketujuh kegiatan ekonomi tersebut (minyak bumi, gas bumi, batubara, besi baja, bauksit, kelapa sawit, dan perkebunan). Peluang investasi di sektor pertanian pangan sangat terbuka lebar. Pengembangan food estate di Kalimantan pun membuka kesempatan bagi investor untuk terlibat dalam membangun

ketahanan pangan nasional. Pengembangan kawasan food estate direncanakan di Kalimantan Barat (Pontianak) dan Kalimantan Utara (Bulungan). Kedua provinsi tersebut menjadi wilayah yang potensial untuk meningkatkan produksi pangan nasional di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa potensi Kalimantan membuka peluang investasi diberbagai bidang dan sektor ekonomi.

Berbagai aktivitas ekonomi di Wilayah Pulau Kalimantan tentunya perlu memperhatikan fungsinya sebagai paru-paru dunia. Hutan Kalimantan saat ini adalah 54 persen dari luas WilayahPulau Kalimantan.Proporsi penggunaan kawasan hutan terluas adalah Hutan Produksi Terbatas sekitar 10.585.610 hektar atau 47,20 persen dan Hutan Produksi seluas 14.217.676 hektar (38,69 persen) dari total luas Kawasan hutan dan perairan Kalimantan. Dengan demikian, kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung menjadi perhatian pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan kedepan.

6.3 Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kalimantan, maka tema besar ***Pembangunan Wilayah Kalimantan:***

- Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan.
- Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi
- Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.
- Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

6.4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan

Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.
2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kalimantan, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,85 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,06 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,75.
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Kalimantan, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, serta mewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (*buffer*) urbanisasi, serta membangun 4 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan.
4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri.
5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan 12 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
7. Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1) Meningkatkan proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatkan proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatkan jumlah daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4) Terlaksananya penggunaan *block grant* (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 10%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (9) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Timur

8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki berfungsi sebagai PKN, PKS, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8.7 persen (2013) menjadi 9.6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Pulau Kalimantan. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Pulau Kalimantan dapat dilihat pada Tabel 6.1 sampai dengan Tabel 6.3 sebagai berikut.

TABEL 6.1.
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER
PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	5.9	6.0	6.2	7.2	7.9
Kalimantan Tengah	6.1	7.0	7.5	8.2	8.7
Kalimantan Selatan	5.0	6.2	6.8	7.6	8.6
Kalimantan Timur	4.5	5.6	5.6	6.4	7.0
Kalimantan Utara	5.0	5.0	6.0	6.4	6.9

Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 6.2.
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER
PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	8.7	8.0	7.4	6.8	6.1
Kalimantan Tengah	6.0	5.8	5.3	4.8	4.3
Kalimantan Selatan	4.5	4.2	3.8	3.5	3.2
Kalimantan Timur	5.1	4.7	4.3	3.9	3.5
Kalimantan Utara	6.7	6.2	5.7	5.1	4.6

Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 6.3.
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER
PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
Kalimantan Tengah	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
Kalimantan Selatan	4.0	3.9	3.7	3.6	3.4
Kalimantan Timur	8.4	8.0	7.6	7.2	6.9
Kalimantan Utara	7.9	7.6	7.2	6.6	6.3

Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014

6.5. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan

6.5.1. Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Pulau Kalimantan difokuskan untuk pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan, tambang, dan lumbung energi nasional yang berdaya saing.

Fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di Wilayah Pulau Kalimantan meliputi: Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan; rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat; rencana pengembangan Kawasan Industri Ketapang dan Kawasan Industri Landak di Provinsi Kalimantan Barat, Kawasan Industri Batulicin dan Kawasan Industri Jorong di Kalimantan Selatan, dan rencana pengembangan kawasan industri di Kalimantan Tengah serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Percepatan pembangunan kawasan strategis dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Pulau Kalimantan

Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis erat kaitannya dengan memberdayakan masyarakat berbasis potensi ekonomi wilayah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan. Strategi yang dilakukan adalah:

1. Menyiapkan kawasan pengembangan komoditas mineral, pertanian pangan, kelapa sawit, karet, dan rotan;
2. Mengembangkan kluster-kluster industri pengolahan mineral dan kelapa sawit berorientasi ekspor;
3. Meningkatkan produktivitas hasil olahan mineral dan kelapa sawit di dalam dan sekitar pusat industri; serta
4. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan pengelolaan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, dan rotan.

2. Percepatan Penguatan Konektivitas

Peningkatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan-kawasan penyangga sekitarnya meliputi:

1. Menyiapkan sarana prasarana pengembangan kawasan pertumbuhan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), dan kawasan pertumbuhan lainnya di Kalimantan dengan kawasan pendukung di sekitarnya (*hinterland*);
2. Peningkatan akses jalan industri Ketapang menuju pelabuhan;
3. Jalan tembus dari kawasan industri menuju ke pelabuhan Pontianak;
4. Pelabuhan dermaga Batulicin dengan kedalaman 22 m;
5. Mempercepat pembangunan dan pengembangan jaringan jalan yang meliputi pembangunan ruas jalan akses kawasan industri Batulicin ke pelabuhan Batulicin, pelebaran jalan Samarinda–Tenggarong, dan tol Samarinda–Balikpapan;
6. Pembangunan Jalan Akses Maloy;
7. Mempercepat pembangunan Jembatan Kembar Mahakam dan Jembatan Loa Kulu;
8. Pembangunan Jalan Askes dan Jembatan di kawasan Pulau Balang;
9. Mempercepat pembangunan dan pengembangan pelabuhan Kuala Samboja, pelabuhan Seibuku, terminal peti kemas Palaran, pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Internasional Maloy, fasilitas pelabuhan Kariangau serta bandara Samarinda Baru untuk meningkatkan distribusi logistik;

10. Pengembangan Distribusi Air Baku;
11. Pembangunan waduk/bendung, jaringan irigasi, dan sumber air baku penunjang kawasan strategis.

3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kapasitas kelembagaan di tingkat pusat maupun di daerah, serta pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dilakukan dengan strategi:

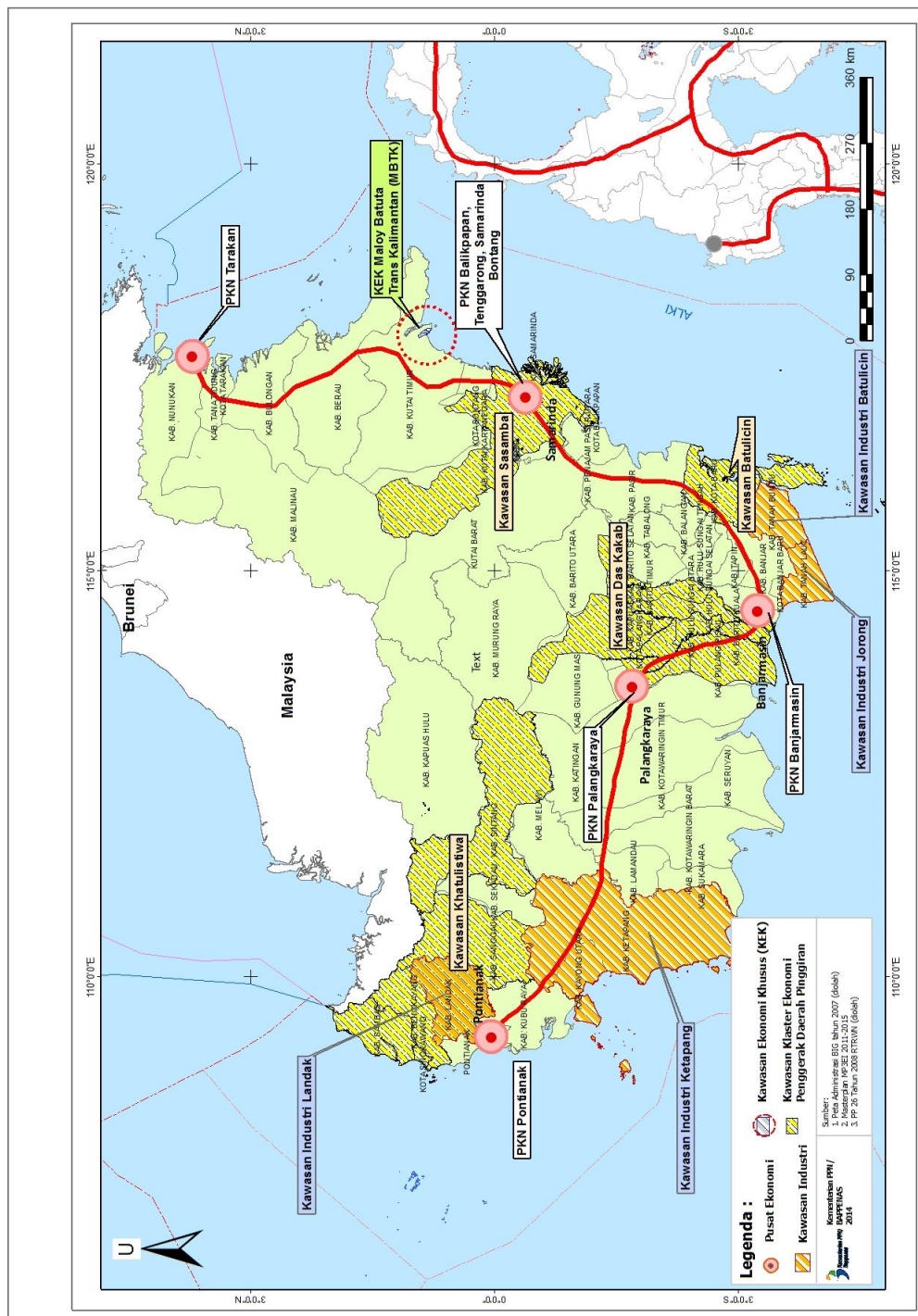
1. Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang energi pertambangan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
2. Memberikan pembinaan kelembagaan badan usaha pengelola kawasan yang mendukung perubahan pola pikir bisnis berorientasi daya saing internasional;
3. Pembangunan *Science Park* berteknologi tinggi di bidang perkebunan dan pertambangan sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan; serta
4. Pembangunan *Technology Park* komoditas mineral, kelapa sawit, karet, dan rotan untuk meningkatkan inovasi teknologi.

4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Dalam upaya pengembangan kawasan strategis di Wilayah Pulau Kalimantan diperlukan sinergisasi dan sinkronisasi regulasi melalui strategi berikut:

1. Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di Kawasan Ekonomi Khusus;
2. Membuat regulasi terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kepada administrator kawasan-kawasan pertumbuhan;
3. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal;
4. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Kabupaten/Kota di pusat-pusat pertumbuhan; serta
5. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi.

GAMBAR 6.1.
PETA LOKASI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN RPJMN 2015-2019



6.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

6.5.2.1. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Pulau Kalimantan diprioritaskan pada percepatan keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa dengan kota, Penguatan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) Berbasis Kewilayahan melalui pembentukan 1 Kawasan perkotaan metropolitan baru; optimalisasi 3 kota sedang sebagai buffer urbanisasi; dan membangun 3 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan.

Untuk itu, pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Kalimantan juga diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang diprioritaskan pada bidang jasa pemerintahan, industri manufaktur dan pengolahan, pariwisata, dan perdagangan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan konektivitas antara kawasan strategis dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Percepatan pembangunan kawasan perkotaan di Wilayah Kalimantan dilakukan melalui berbagai strategi, sebagai berikut:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

- a. Mengusulkan pembentukan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula dalam rangka membangun koridor wilayah yang kuat untuk mempercepat pembangunan di Wilayah Kalimantan bagian selatan, mengurangi urbanisasi dari luar Jawa ke Pulau Jawa, serta memperkuat orientasi kedalam (*backward linkage*) dari pulau-pulau terluar di kawasan perbatasan;
- b. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan non kayu untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan keterkaitan dengan desa-kota sekitar (Sambas, Sukadana, Rasau Jaya, Marabahan, Sangata, Tanjung Redep, Pangkalan Bun);
- c. Meningkatkan aksesibilitas antarPKN, PKW, dan PKL disekitarnya melalui penyediaan simpul transportasi khususnya simpul transportasi sungai dan transportasi Udara.



2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman pada Kawasan Metropolitan Baru, Kota Sedang, dan Kota Baru Publik di Wilayah Kalimantan

- a. Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman sesuai dengan peran dan tipologi kota;
- b. Menyediakan sarana prasarana pemerintahan dan ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang mampu mengakomodasi kegiatan koperasi, UMKM, industri pengolahan kecil dan menengah;
- c. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi massal perkotaan antar moda terutama transportasi sungai, angkutan laut dan angkutan udara;
- d. Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta RS kab/kota terutama di kota yang berbatasan langsung dengan kawasan perbatasan;
- e. Meningkatkan pendidikan, sosial budaya, dan keamanan kota yang mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota guna meningkatkan modal sosial masyarakat serta memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat kota.

3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

- a. Mewujudkan penyelenggaraan ruang yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan;
- b. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana (*urban resilience*) serta konservasi hutan;
- c. Membangun infrastruktur kota dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana melalui konversi bahan bakar fosil menuju gas;
- d. Mengembangkan konsep *greentransportation*, *green openspace* (ruang terbuka hijau), *green waste* (pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R¹), *green water* (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan *green energy*.

4. Perwujudan Kota Cerdas dan Berdaya Saing

- a. Mengembangkan perekonomian dengan membangun pencitraan kota (*city branding*) memanfaatkan produk dan sumber daya manusia unggulan;
- b. Meningkatkan jumlah tenaga kerja ahli dan terampil melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan tinggi dan pelatihan

¹3R: pengurangan (*Reduce*), pemanfaatan kembali (*Re-use*), dan Daur Ulang (*re-cycle*)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kejuruan (*higher education and vocational training*) berbasis kehutanan, perkebunan, dan pertambangan;

- c. Menyediakan layanan publik serta perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana kota melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bentuk *e-government, e-commerce dan e-infrastructures*;
- d. Meningkatkan efisiensi pasar melalui pengaturan jalur distribusi logistik dari dan keluar kota.

5. Kebijakan untuk Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

- a. Menyediakan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi pemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota berkelanjutan;
- b. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola kota berkelanjutan, baik melalui kota layak dan nyaman, kota hijau, maupun kota cerdas, melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara bersikembungan;
- c. Menyediakan dan melakukan pemutakhiran data, peta dan informasi perkotaan;
- d. Meningkatkan kapasitas supremasi hukum baik perangkat maupun kelembagaan;
- e. Menyediakan proses perizinan melalui peningkatan kualitas layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- f. Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antarkota dan kawasan perkotaan metropolitan, untuk mewujudkan kota berkelanjutan;
- g. Meningkatkan peran swasta dan organisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialog dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan, maupun dalam pembangunan kota berkelanjutan seperti: pembangunan infrastruktur perkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruang kota.

6.5.2.2 Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, arah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan di Wilayah Kalimantan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan diarahkan pula untuk membangun keterkaitan ekonomi lokal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

antara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi kawasan perdesaan mandiri pada 7 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.6. Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, serta pulau-pulau kecil terluar di Wilayah Kalimantan akan dilakukan:

1. **Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografisnya**
 - a. Membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar bidang transportasi, terutama jalan;
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan sarana pendidikan khususnya sekolah dasar dan sekolah menengah, terutama di desa-desa perbatasan;
 - c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan (Poskesdes, Pustu, puskesmas keliling) terutama di desa-desa perbatasan;
 - d. Meningkatkan distribusi dan kualitas tenaga pendidikan dan kesehatan di desa-desa terpencil dan desa-desa perbatasan;
 - e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan di kawasan desa tertinggal dan berkembang khususnya dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. Meningkatkan kapasitas maupun kualitas jaringan listrik dan telekomunikasi.
2. **Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi**
 - a. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, pemasaran, informasi pasar dan kewirausahaan, dana bergulir bagi masyarakat miskin;
 - b. Meningkatkan keberdayaan petani dan nelayan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna (*bio-energi, biofloc*) untuk mewujudkan kemandirian pangan;
 - c. Memberikan akses dan kemudahan permodalan bagi masyarakat miskin dan rentan kepada lembaga keuangan mikro;
 - d. Mendukung terwujudnya desa mandiri benih dengan menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi (benih, pupuk, jaringan irigasi, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasi nelayan, pasar), pasca panen (sistem logistik), pengolahan, dan pasar desa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. **Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi**
 - a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, melalui fasilitasi dan pendampingan berkelanjutan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan desa berbasis kearifan lokal;
 - b. Meningkatkan keberdayaan masyarakat adat, melalui penguatan lembaga adat dan Desa Adat,
 - c. Memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku termasuk hak atas tanah adat/ulayat dan hak tradisional adat;
 - d. Meningkatkan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), memberikan penguatan peran perempuan (Kelompok Usaha Bersama Perempuan), pemuda, dan kaum marginal dalam bidang ketrampilan dan kewirausahaan berbasis komoditas lokal melalui pelatihan dan pendampingan;
 - e. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber energi terbarukan.
4. **Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan**
 - a. Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa;
 - b. Fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam: (i) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa; (ii) Pengelolaan aset dan keuangan desa; (iii) Pelayanan publik dan administrasi pemerintahan desa; (iv) Penyiapan peta desadan penetapan batas desa secara digital; (v) penataan desa;
 - c. Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;
 - d. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - e. Fasilitasi penyiapan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa;
5. **Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi**
 - a. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan, serta menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan

pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;

- b. Menjamin hak desa-desa dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana;
- c. Membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
- d. Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan dan pengembangan varietas lokal;
- e. Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam kemandirian energidengan mendorong penggunaan sumber energi di desa (kotoran ayam, kotoran sapi, kayu sersah, briket batu bara, gas, aliran air) dan teknologi tepat guna yang memanfaatkan inovasi lokal (*micro-hydro*, bio-gas, tenaga surya).

6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota

- a. Mendukung terwujudnya sentra produksi perikanan tangkap dan budidaya (udang, ikan patin, ikan haruan) di kawasan Jawa Selatan, Jawa, Pemangkat, Cindai Alus, sentra produksi pertanian dan perkebunan (karet, padi, kelapa, jagung, jeruk, kelapa sawit) di kawasan Kumai, Pangkala Lada, Pangkalan Banteng, Arut Selatan, Berau;
- b. Mengembangkan kerjasama antar daerah, antar desa dan antar pemerintah-swasta;
- c. Mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi (KUD), Lembaga Perkreditan Desa, bank khusus pertanian, BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha yang mendukung wisata agro di kawasan Sambas, wisata bahari di kawasan Tanjung Puting dan kawasan Kepulauan Derawan.

6.5.2.3 Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Pulau Kalimantan

Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Kalimantan diarahkan dengan memperkuat pusat pertumbuhan, yaitu kawasan Sambas dan sekitarnya (Prov. Kalbar), Rasau Jaya dan sekitarnya (Prov. Kalbar), Gerbang Kayong dan sekitarnya (Prov. Kalbar), Pangkalan Bun dan sekitarnya (Prov. Kalteng), Marabahan dan sekitarnya (Prov. Kalsel), Sangata dan sekitarnya (Prov. Kaltim), serta Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya (Prov. Kaltim). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan



pariwisata (lihat tabel 6.7). Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau

- a. Mempercepat pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Kalimantan, pelabuhan Sintete Lintas (Sambas), Kumai, dan Pangkalan Bun, Pelabuhan Internasional Maloy, bandar udara yang melayani Tanjung Redeb, serta angkutan penyeberangan yang melayani Tanjung Redeb;
- c. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah;
- d. Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri, dengan prioritas pada pengembangan PLTU Kalimantan Barat.

2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya

- a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di Kawasan Sambas, Rasau Jaya, Sukadana, Pangkalan Bun, Marabahan, Sangata, dan Tanjung Redeb, serta sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan dan/atau kelautan di Kawasan Sambas, Sukadana, Pangkalan Bun, dan Marabahan.
- b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan (lihat tabel 6.7) dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasarana produksi;
- c. Mengembangkan daya tarik wisata Taman Nasional dan bahari di Kawasan Pariwisata Tanjung Puting dan sekitarnya, melalui peningkatan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas penerbangan menuju ke Palangka Raya-Tanjung Puting, peningkatan akses jalur laut dan perbaikan jalur darat menuju destinasi wisata, serta pengembangan resort di sekitar kawasan.
- d. Mengembangkan daya tarik wisata bahari di Kawasan Pariwisata Derawan dan sekitarnya melalui peningkatan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas penerbangan menuju ke Derawan-Kayan Mentarang, pengembangan fasilitas wisata kapal yacht, hotel, resort dan rumah makan, serta pengembangan produk kerajinan lokal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Membangun bank pertanian dan perikanan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan.
- f. Mengembangkan *Techno Park* berbasis pertanian dan perikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa.

3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan desa-kota

- a. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien;
- b. Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah;
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalam tata kelola ekonomi lokal;
- d. Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama;
- e. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektor pertanian dan perikanan;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian sungai, laut dan pesisir, tanah dan hutan, serta mitigasi bencana, terutama di Kawasan Perdesaan Pesisir Sambas, Rasau Jaya, Sukadana, Pangkalan Bun, Marabahan, Sangatta, dan Tanjung Redeb.

Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 6.2 dan Tabel 6.4 – 6.7.

TABEL 6.4
LOKASI PRIORITAS KAWASAN STRATEGIS NASIONAL PERKOTAAN SEBAGAI
PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI KALIMANTAN

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
K1	Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula Kota Banjarmasin, Kab. Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Baritokuala, Kab. Tanah Laut	Meningkatkan fungsi Banjarmasin dan Banjar Baru sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang mendukung pertumbuhan wilayah nasional dan memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan di Wilayah Pulau Kalimantan Bagian Selatan.

Sumber : Bappenas, 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 6.5
LOKASI PRIORITAS KOTA SEDANG YANG BERFOKUS PADA UPAYA
PEMERATAAN WILAYAH DI KALIMANTAN

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
P1	Singawang	Diarahkan sebagai kota agropolitan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang mendorong pertumbuhan produksi pertanian dan perkebunan (kelapa sawit) di Wilayah Prov. Kalimantan Barat.
P2	Palangka Raya	Diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perdagangan, pertanian, dan pertambangan galian logam.
P3	Bontang	Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional dan mendorong perkembangan sektor industri.
P4	Tarakan	Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang kedua pulau kalimantan dan pusat transit perdagangan dengan sektor produksi wilayah seperti: Perkebunan, Perikanan, dan pertambangan.

Sumber : Bappenas, 2014

TABEL 6.6
LOKASI PEMBANGUNAN KOTA BARU PUBLIK YANG MANDIRI DAN
TERPADU DI WILAYAH KALIMANTAN

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
B1	Pontianak	Sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (<i>urban sprawl</i>) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya
B2	Banjarbaru	Sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (<i>urban sprawl</i>) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya
B3	Tanjung Selor	Sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (<i>urban sprawl</i>) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya

Sumber : Bappenas, 2014; Lokasi Prioritas: Data Sementara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 6.7
LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KETERKAITAN DESA-KOTA UNTUK
MEMPERKUAT PUSAT PERTUMBUHAN DI KALIMANTAN

Kode	Lokasi Kawasan	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
D1	Sambas dan sekitarnya (Kab. Sambas, dan Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar)	<ul style="list-style-type: none">• PKW Sambas• Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya: Jawai Selatan• Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap: Pemangkat• KPB Subah• Kawasan Transmigrasi: Sambas, Jawai, Ledo,	<ul style="list-style-type: none">• Udang• Karet
D2	Rasau Jaya dan sekitarnya (Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar)	<ul style="list-style-type: none">• Perkotaan Rasau Jaya• KPB Rasau Jaya• Kawasan Transmigrasi: Ambawang, dan Kubu• Kota Otonom Terdekat: Pontianak	<ul style="list-style-type: none">• Padi• Kelapa
D3	Sukadana dan sekitarnya (Kab. Kayong Utara, Prov. Kalbar)	<ul style="list-style-type: none">• Perkotaan Sukadana• KPB Gerbang Kayong• Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap: Teluk Batang• Kawasan Transmigrasi; Teluk Batang, Pkl Suka	<ul style="list-style-type: none">• Padi• Perikanan Tangkap
D4	Pangkalan Bun dan sekitarnya (Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalteng)	<ul style="list-style-type: none">• PKW Pangkalan Bun• Kawasan Agropolitan (Jagung): Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, Arut Selatan.• Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap: Kumai• Kawasan Pariwisata:	<ul style="list-style-type: none">• Jagung• Perikanan Tangkap• Wisata Taman Nasional• Wisata Pantai/Bahari,• Wisata Situs Sejarah

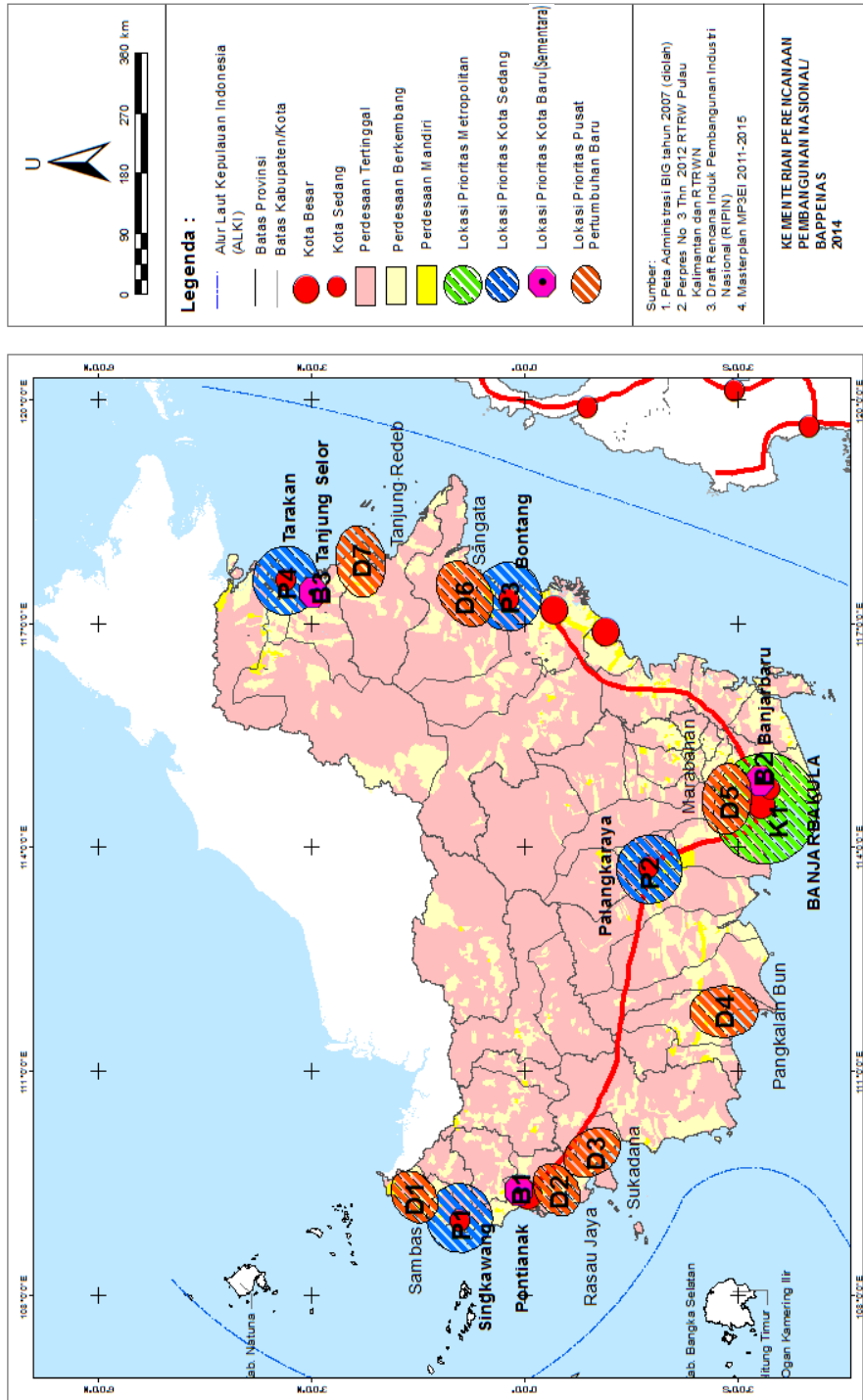


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kode	Lokasi Kawasan	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
		KSPN Tanjung Puting	
D5	Marabahan dan sekitarnya (Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalsel)	<ul style="list-style-type: none">• PKW Marabahan• Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya: Cindai Alus• KPB Cahaya Baru• Kawasan Transmigrasi: Anjir Pasar, Marabahan,• Kota Otonom Terdekat : Banjarbaru dan Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none">• Ikan Patin• Ikan Haruan• Padi• Jeruk
D6	Sangata dan sekitarnya (Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim)	<ul style="list-style-type: none">• PKW Sanggata• KPB Maloy• Kawasan Transmigrasi: Sangkulirang, Rantau Pulung• Kota Otonom Terdekat : Bontang	<ul style="list-style-type: none">• Kelapa sawit
D7	Tanjung Redeb dan sekitarnya (Kab. Berau, Prov. Kaltim)	<ul style="list-style-type: none">• PKW Tanjung Redeb• Kawasan Agropolitan (Jagung): Berau (Kec. Talisayan)• Kawasan Pariwisata: KSPN Kepulauan Derawan	<ul style="list-style-type: none">• Jagung• Wisata Bahari/ Flora-Fauna

Sumber : Bappenas, 2014

GAMBAR 6.2.
PETA LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
WILAYAH PULAU KALIMANTAN



6.5.3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan

6.5.3.1. Pengembangan Daerah Tertinggal

Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Kalimantan difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis energi dan pertambangan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan. Pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik

Mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

- 1) Pemerataan distribusi guru, khususnya di Bengkayang, Sangau, Kayong Utara, dan Mahakam Ulu;
- 2) Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, khususnya di Bengkayang, Sangau, Kayong Utara, dan Mahakam Ulu;
- 3) Pemberian tunjangan khusus guru di kawasan perbatasan;
- 4) Penyelenggaraan guru kunjung di wilayah-wilayah terisolir dan perbatasan;
- 5) Penyediaan rumah dinas guru dan tenaga kependidikan di wilayah-wilayah terisolir dan perbatasan;
- 6) Pembangunan dan Rehabilitasi sarana pendidikan dasar khususnya di Seruyan, Sintang, dan Mahakam Ulu;
- 7) Pengembangan sekolah kecil di perbatasan;
- 8) Penyelenggaraan sekolah satu atap di daerah tertinggal dan perbatasan (SD, SMP, SMA/SMK);
- 9) Pembangunan sekolah berasrama di daerah tertinggal dan perbatasan;
- 10) Pengembangan asrama sekolah;
- 11) Penyediaan bus sekolah di daerah yang memiliki karakteristik khusus;
- 12) Pengembangan pendidikan kesetaraan (paket A,B,C);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13) Pengembangan pendidikan jarak jauh;
- 14) Mengoptimalkan kemitraan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan;
- 15) Pemberian beasiswa miskin bagi anak-anak di kawasan perbatasan.

b. Bidang Kesehatan

- 1) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan, khususnya di Kalimantan Barat dan kawasan perbatasan;
- 2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya di Kalimantan Barat dan kawasan perbatasan;
- 3) Pemberian tunjangan tenaga kesehatan, khususnya di Kalimantan Barat dan kawasan perbatasan;
- 4) Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan, khususnya di Kalimantan Barat dan kawasan perbatasan;
- 5) Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana kesehatan khususnya di Sangau dan Mahakam Ulu;
- 6) Pengadaan sarana kesehatan keliling di wilayah terisolir dan perbatasan;
- 7) Pengadaan puskesmas terapung untuk kawasan perairan dan pulau-pulau kecil terutama wilayah Kab. Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu;
- 8) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di wilayah terisolir dan perbatasan;
- 9) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di wilayah terisolir dan perbatasan;
- 10) Mengoptimalkan kemitraan dengan *PKBL* atau CSR dalam pemenuhan SPM bidang kesehatan
- 11) Pengembangan telemedis di daerah tertinggal

c. Bidang Energi

- 1) Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU, PLTMG khususnya di Kabupaten Melawi dan kawasan perbatasan;
- 2) Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian 30-60 kWh;
- 3) Pengembangan energi biogas ramah lingkungan;
- 4) Penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencil dan perbatasan.

d. Bidang Informasi dan Telekomunikasi

- 1) Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi di kawasan perbatasan;

- 2) Pengembangan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI di Sintang, Nunukan, Kapuas Hulu, Bengkayang, Seruyan, dan Sekadau;
 - 3) Pengembangan jaringan internet;
 - 4) Pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat di wilayah Kalimantan Barat.
- e. Bidang Permukiman dan Perumahan
- 1) Pembangunan perumahan layak huni di wilayah terisolir dan perbatasan;
 - 2) Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di wilayah terisolir dan perbatasan;
 - 3) Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di kawasan hutan, perairan, dan pesisir.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah tertinggal secara terpadu dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritas program sebagai berikut:

- a) Pengembangan pusat teknologi informasi pemasaran, pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM pelaku usaha khususnya sub-sektor perkebunan, penganeka-ragaman pengolahan hasil hutan, dan perikanan darat-sungai;
- b) Pengadaan instalasi pengolahan dan pemanfaatan limbah industri usaha agroindustri kelapa sawit;
- c) Pengembangan kawasan industri hasil kerjasama dengan pihak swasta;
- d) Pemberian imbal jasa lingkungan bagi masyarakat yang berada di wilayah konservasi;
- e) Pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti penyediaan tenaga pendamping bidang perkebunan, energi, dan pertambangan;
- f) Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya sub-sektor perkebunan rakyat, hasil hutan, perikanan darat, dan pertambangan rakyat;
- g) Pengembangan kelembagaan mikro;
- h) Pengembangan koperasi simpan pinjam;
- i) Pemberian skema kredit yang afirmatif bagi petani hutan;
- j) Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi di kawasan timur Kalimantan;
- k) Perluasan areal pertanian di kawasan timur dan tengah wilayah Kalimantan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- l) Pemberian bantuan bibit pertanian dan perkebunan;
- m) Pengembangan integrasi tanaman perkebunan (kelapa sawit dan karet dengan ternak sapi potong) untuk meningkatkan pendapatan petani/pekebun;
- n) Pengembangan jaringan irigasi;
- o) Pembangunan embung untuk mendukung jaringan irigasi;
- p) Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen;
- q) Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan infrastruktur, sarana, promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Sintang dan Sambas;
- r) Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian, museum;
- s) Pembangunan pasar kecamatan.

3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas

Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a) Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi di desa-desa terisolir dan kawasan perbatasan;
- b) Pengembangan jaringan jalur kereta api lintas selatan antarkota khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan;
- c) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi air;
- d) Pengembangan pelabuhan pedalaman di Kalimantan;
- e) Pengembangan dermaga penyebrangan;
- f) Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana bandara perintis;
- g) Pengembangan bandara perintis dan jalur keperintisan udara;
- h) Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan penghubung nasional di kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan, yakni di Sambas, Sanggau, Sintang, Kayong Utara, Melawi, Nunukan, dan Malinau;
- i) Peningkatan kapasitas jalan pendukung kawasan industri, khususnya di Kabupaten Ketapang.

4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan pemangku kepentingan pembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerah yang terintegrasi untuk menunjang pengelolaan pertambangan dan energi. Strategi ini meliputi aspek peraturan perundangan, tata kelola, SDM, rumusan dokumen kebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a) Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pendidikan, jaringan listrik, informasi, dan telekomunikasi dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;
- b) Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pengembangan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat pada perhutanan, perkebunan, dan tanaman hortikultura;
- c) Pengembangan sekolah kejuruan dan politeknik dalam menunjang pengelolaan pertambangan dan energi;
- d) Pemberdayaan masyarakat di kawasan pertambangan menengah sampai dengan besar dan perkebunan menengah sampai dengan besar;
- e) Pengembangan teknologi pengolahan limbah industri;
- f) Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan;
- g) Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat.

5. Penguatan Regulasi dan Insentif

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, bentuk afirmasi yang lebih nyata dan konkrit dilakukan dengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pengelolaan pertambangan dan energi melalui pelaksanaan prioritas program sebagai berikut:

- a) Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- b) Penyusunan Strategi Daerah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- c) Penegakan regulasi bagi reklamasi lahan-lahan di kawasan pertambangan;
- d) Penyusunan rencana induk dan rencana aksi pengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri perhutanan, perkebunan, seperti kelapa dan kelapa sawit, serta tanaman hortikultura;
- e) Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antar-SKPD dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah;
- f) Penyusunan rencana induk dan rencana aksi pengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri peternakan dan perikanan laut, serta pengembangan pariwisata baik wisata bahari dan sosial budaya;
- g) Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal;
- h) Tunjangan khusus penyuluh pertanian.

6. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan

Pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM.

7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan.

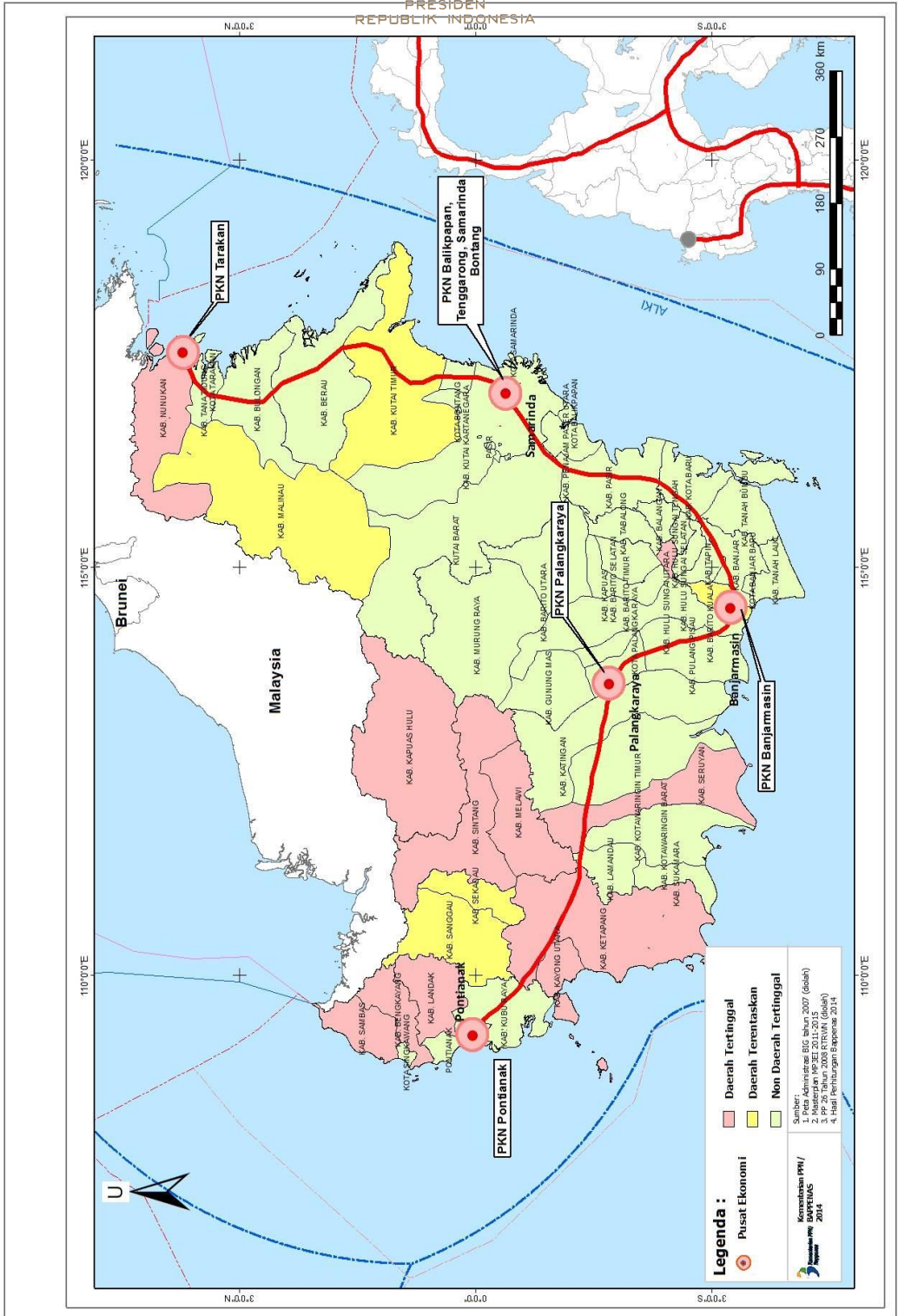
Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Kalimantan terdiri dari 4 provinsi dengan total 56 kabupaten/kota, dimana 28,57 persen atau 16 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini sebesar 70,76, berada di atas target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,38 persen, jauh dari target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal wilayah Kalimantan masih sebesar 8,73 persen, melampaui target Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen.

Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Kalimantan telah ditetapkan 16 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 terdapat 5 kabupaten tertinggal terentaskan. Akan tetapi, terdapat 1 kabupaten dengan status Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran yang masuk kategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan demikian, pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di Kalimantan sebanyak 12 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 9 kabupaten tertinggal dapat terentaskan di wilayah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 6.3.
PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH PULAU KALIMANTAN 2015-2019



6.5.3.2. Pengembangan Kawasan Perbatasan

Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Pulau Kalimantan difokuskan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia di perbatasan darat dan laut. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Pulau Kalimantan diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Pulau Kalimantan, yaitu PKSN Jagoi Babang, PKSN Nanga Badau, PKSN Paloh-Aruk, PKSN Entikong, PKSN Jasa, PKSN Long Pahangai, PKSN Long Nawan, PKSN Simanggaris, PKSN Long Midang, PKSN Nunukan, PKSN Tanlumbis dan PKSN Tarakan; serta mempercepat pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun 2015-2019.

Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat. Strategi tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, pengamanan kawasan perbatasan Kalimantan

Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan kawasan perbatasan, secara terpadu di Wilayah Pulau Kalimantan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu (satu atap) di PKSN Jagoi Babang, PKSN Nanga Badau, PKSN Paloh-Aruk, PKSN Entikong, PKSN Jasa, PKSN Long Pahangai, PKSN Long Nawan, PKSN Simanggaris, PKSN Long Midang dan PKSN Nunukan;
- b. Merevitalisasi membenahi aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
- c. Penegasan, pemeliharaan, dan pengawasan batas wilayah negara di darat dan laut;
- d. Mengembangkan pusatkegiatan pertahanan dan keamanan negara di beberapa wilayah yang memiliki *Outstanding Boundary Problem* (OBP) dan PKSN di wilayah perbatasan Kalimantan;
- e. Meningkatkan upaya perundingan dalam penetapan dan penegasan batas wilayah negara RI-Malaysia dalam penyelesaian 9 (sembilan) *Outstanding Boundary Problem* (OBP);
- f. Meningkatkan kapasitas tim perunding dari tingkat teknis, strategi, hingga kebijakan (pengambilan keputusan) dan didukung dengan data dan arsip;

- g. Memperkuat pertahanan dan pengamanan perbatasan wilayah laut baik dengan penambahan sarana dan prasarana alutsista maupun non alutsista;
- h. Pembentukan kerjasama patroli pertahanan dan keamanan batas wilayah Negara RI-Malaysia;
- i. Mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparaturnya pengamanan perbatasan.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasan perbatasan negara di Wilayah Pulau Kalimantan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan nilai tambah produk hasil perkebunan dan pertanian melalui pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan PKSN Nanga Badau, PKSN Long Pahangai, PKSN Sei Simanggaris, PKSN Long Midang, dan PKSN di Perbatasan Kalimantan;
- b. Mengembangkan program transmigrasi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri;
- c. Mengembangkan kegiatan ekowisata hutan, melalui kegiatan konservasi dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di PKSN Paloh, Long Nawang, PKSN Long Pahangai, dan PKSN Long Midang melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata);
- d. Mengembangkan pusat perdagangan skala internasional, nasional, dan regional berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara Malaysia serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisional dititik lintas batas;
- e. Mengembangkan balai-balai latihan kerja untuk meningkatkan mengelola komoditas unggulan lokal yang berorientasi pasar ke negara Malaysia.

3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas

Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan negara di Wilayah Pulau Kalimantan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Mempercepat penyelesaian Jalan Strategis Perbatasan menuju perbatasan dan jalan paralel penghubung perbatasan negara di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Khususnya di Provinsi Kalimantan Utara didorong percepatan pembangunan jalan strategis ruas Malinau – Binuang - Long Bawan, Tabur Lestari dan Wasan di kecamatan Sei Manggaris, ruas Malinau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Binuang - Long Bawan, ruas Long Umung - Long Bawan - Long Midang (Kabupaten Nunukan), serta ruas jalan Long Bagun (Mahulu) - Mahak Baru - Long Ampung - Long Nawang - Batas, ruas jalan Malinau Kota - Paking - Semamu - Binuang - Long Bawan - Long Midang (Kabupaten Malinau);
- b. Pembangunan jalan non status pembuka akses menuju kampung, desa-desa di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri);
- c. Meningkatkan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi;
- d. Mengembangkan pusat aktifitas perdagangan dan gudang logistik untuk meningkatkan distribusi hulu-hilir perdagangan antar negara, khususnya di Lokasi Prioritas yang memiliki aktifitas perdagangan tinggi;
- e. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan keperintisan (Angkutan Sungai dan Penyeberang) yang menghubungkan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan negara dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) maupun pusat pertumbuhan/aktivitas ekonomi;
- f. Menjamin ketersediaan logistik, khususnya untuk kecamatan-kecamatan Lokpri terisolir, di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat;
- g. Mengembangkan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional di PKSN Perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
- h. Menyediakan infrastruktur dasar kewilayahan terutama jalan, dan air bersih
- i. Penyediaan listrik yang bersumber bahan baku dari dalam negeri untuk menegakan kedaulatan energi;
- j. Menyediakan dan menata telekomunikasi dan informasi yang masif untuk menegakan kedaulatan telekomunikasi dan informasi yang selama ini dipengaruhi dari negara tetangga.

4. Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pulau Kalimantan diarahkan agar mampu mengelola sumber daya alam di kawasan perbatasan darat dan laut, mampu melakukan aktivitas perdagangan dengan negara tetangga, dan turut mendukung upaya peningkatan kedaulatan negara dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berkualitas. Maka penjabaran strategi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumber daya lokal (perkebunan, pariwisata, maupun pertambangan) di PKSN Nanga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Badau, Entikong, PKSN Long Pahangai, PKSN Sei Simanggaris, PKSN Long Midang dan PKSN lain di Perbatasan Kalimantan;
- b. Mengembangkan sekolah kejuruan (SMK, politeknik) berbasis sumber daya lokal berasrama di PKSN Paloh, Badau, Entikong, Jagoi Babang, Nunukan, dan PKSN lain di Perbatasan Kalimantan;
 - c. Meningkatkan akses pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir dengan penyediaan sarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah (sekolah berasrama, poskesdes, *mobile clinic*);
 - d. Pembangunan Rumah Sakit Pratama di perbatasan, khususnya Provinsi Kalimantan Utara di Lokpri Kayan Selatan, Krayan, dan Lumbis Ogong;
 - e. Menyediakan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handal serta penyediaan insentif, serta sarana prasarana penunjang yang memadai, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir dalam kecamatan Lokpri terutama rumah guru, fasilitas telekomunikasi dan informasi bagi guru;
 - f. Meningkatkan kapasitas aparatur wilayah perbatasan melalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar dan pelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuan dan merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan;
 - g. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam/potensi lokal di kawasan perbatasan.

5. Penguatan Regulasi dan Insentif

Dalam upaya mendukung pengembangan kawasan perbatasan negara, harmonisasi regulasi agar afirmasi terhadap pengembangan kawasan perbatasan. Beberapa regulasi yang kurang harmonis dalam mendukung afirmasi terhadap pengembangan kawasan perbatasan sebagai berikut:

- a. Kemudahan masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk memanfaatkan sumber daya alam bukan kayu yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung;
- b. Regulasi pengelolaan lintas batas;
- c. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI-Malaysia dalam pengembangan kawasan perbatasan negara;
- d. Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan *Dryport*;
- e. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan

- dan kesehatan di kawasan perbatasan, khususnya di desa-desa terdepan dan terisolir (kecamatan lokpri);
- f. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan;
 - g. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan;
 - h. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;
 - i. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - j. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
 - k. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara.

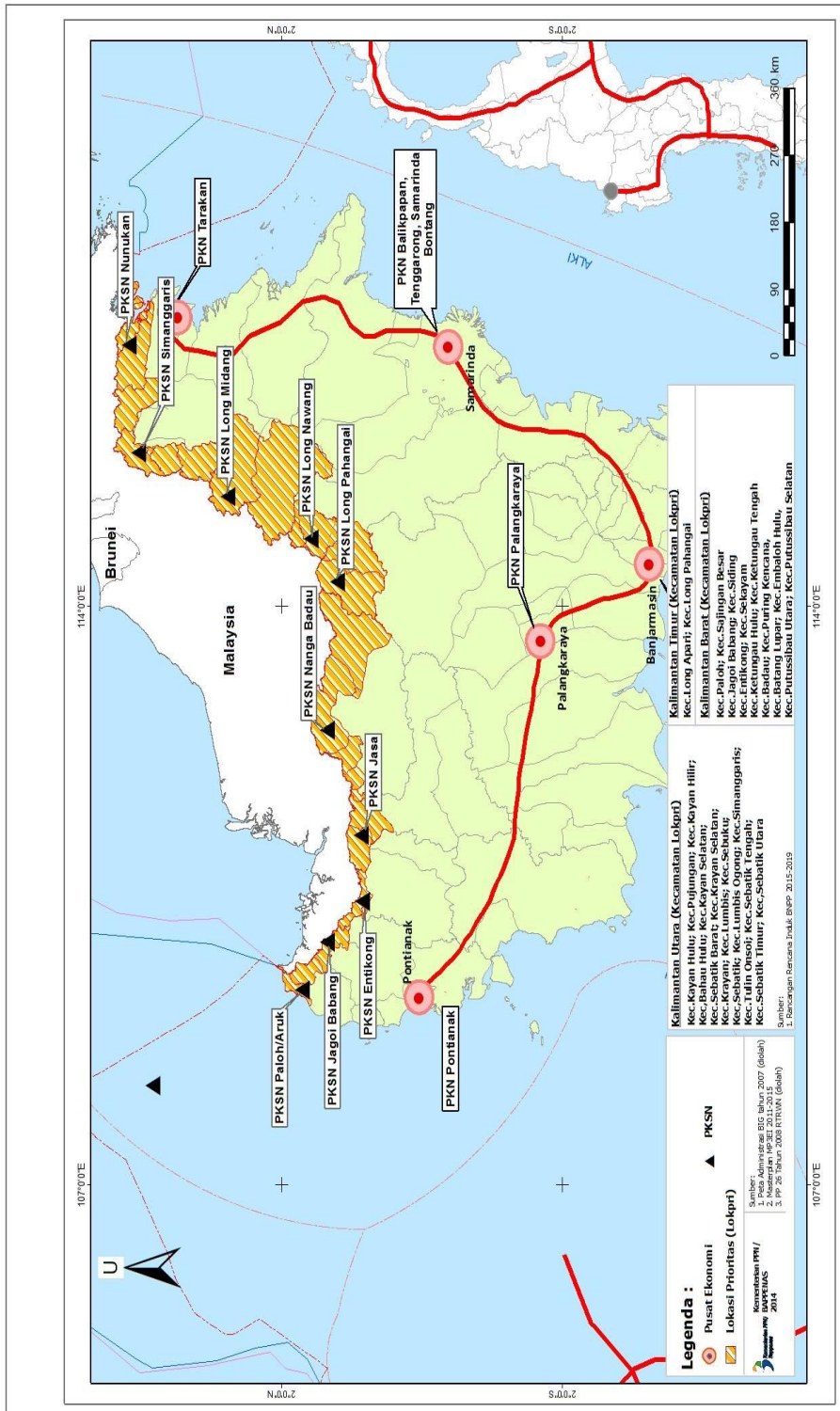
Adapun sebaran lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan dapat dilihat pada Tabel 6.9 dan Gambar 6.4.

TABEL 6.9.
DAFTAR LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
WILAYAH PULAU KALIMANTAN

No.	Kabupaten	Kecamatan Lokasi Prioritas
1	Sambas	Paloh; Sajingan Besar
2	Bengkayang	Jagoi Babang; Siding
3	Sanggau	Entikong; Sekayam
4	Sintang	Ketungau Hulu; Ketungau Tengah
5	Kapuas Hulu	Badau; Puring Kencana; Batang Lupar; Embaloh Hulu; Putussibau Utara; Putussibau Selatan
6	Mahakam Ulu	Long Apari; Long Pahangai
7	Malinau	Kayan Hulu; Pujungan; Kayan Hilir; Bahau Hulu; Kayan Selatan
8	Nunukan	Sebatik Barat; Krayan Selatan; Krayan; Lumbis; Sebuku; Sebatik, Lumbis Ogong, Simanggaris, Tulin Onsoi, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik Utara

Sumber : Bappenas, 2014

GAMBAR 6.4.
PETA SEBARAN LOKASI PRIORITAS (LOKPRI) KAWASAN PERBATASAN
WILAYAH PULAU KALIMANTAN 2015-2019



6.5.4 Penanggulangan Bencana

Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pulau Kalimantan terjadi hampir setiap tahun dengan intensitas yang cukup tinggi seiring dengan datangnya musim kemarau dan secara nyata telah menimbulkan berbagai dampak negatif pada semua tingkatan, baik lokal, nasional, maupun regional. Luas lahan kritis di wilayah Pulau Kalimantan tahun 2010 mencapai sekitar 34,09 % dari total luas lahan kritis di Indonesia. Berdasarkan data dari BNPB, bencana alam yang paling dominan berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan adalah bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan kekeringan. Berdasarkan rekam data kejadian berbagai bencana DIBI BNPB tahun 1815-2014, telah mengakibatkan 720 orang meninggal, 17.140 orang luka-luka, 555 orang hilang, 1.058.973 orang mengungsi dan 43.102 rumah hancur/rusak.

Untuk mendukung pengembangan wilayah Pulau Kalimantan, arah kebijakan penanggulangan bencana diarahkan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap bencana. Strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan, melalui :

- a. Pengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah;
- b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 untuk kota sasaran.
- c. Integrasi kajian dan peta risiko dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. Penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) di 18 Kabupaten/kota dan menjadi masukan untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota.

2. Penurunan Kerentanan Terhadap Bencana

- a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.;
- b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi di 18 Kabupaten/Kota;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan rawan bencana dan pasca bencana;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam di wilayah Pulau Kalimantan;
- e. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Kapuas, Mahakam dan Barito maupun daerah rawan bencana alam lainnya;
- f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, melalui:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah, diantaranya penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di 18 kabupaten/kota;
- b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- c. Meningkatkan monitoring *hot spot* di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara;
- d. Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- e. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan;
- f. Membangun dan memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana;
- g. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana di 18 Kabupaten/Kota;
- h. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 1 (satu) unit pusat logistik kebencanaan di wilayah pulau Kalimantan yang dapat menjangkau wilayah terpencil;
- i. Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana di daerah di 18 kabupaten/kota

Adapun sebaran risiko bencana dan profil kerawanan dan risiko PKN, PKW, PKSN, Kawasan Industri dan kawasan pusat pertumbuhan lainnya di Wilayah Pulau Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 6.5 dan Tabel 6.10.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 6.10.
PROFIL KERAWANAN DAN RISIKO PKN, PKW DAN PKS
DI WILAYAH PULAU KALIMANTAN

Wilayah	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013)
KEK Maloy	Kabupaten Kutai Timur: tinggi untuk bencana banjir, sedang untuk gempa bumi, tinggi untuk gelombang ekstrim dan abrasi, tinggi untuk kebakaran hutan dan lahan, sedang untuk cuaca ekstrim,	Kabupaten Kutai Timur: tinggi
Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi daerah pinggiran lainnya di Kalimantan Barat	Kota Singkawang: tinggi untuk bencana banjir Kabupaten Bengkayang: sedang untuk bencana banjir Kabupaten Sambas: tinggi untuk banjir dan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Sanggau: tinggi untuk bencana dan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Sintang: sedang untuk bencana Kabupaten Landak: tinggi untuk bencana banjir dan kebakaran hutan Kabupaten Kapuas Hulu: sedang tinggi untuk bencana banjir dan kebakaran hutan	Kota Singkawang: tinggi Kabupaten Bengkayang: tinggi Kabupaten Sambas: tinggi Kabupaten Sanggau: sedang Kabupaten Sintang: tinggi Kabupaten Landak: sedang Kabupaten Kapuas Hulu: tinggi
Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi daerah pinggiran lainnya di Kalimantan Selatan	Kota Palangka Raya: tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Barito Utara: tinggi Kabupaten Barito Selatan: tinggi Kabupaten Kapuas: tinggi	Kota Palangka Raya: tinggi Kabupaten Barito Utara: sedang Kabupaten Barito Selatan: sedang Kabupaten Kapuas: tinggi
Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi daerah pinggiran lainnya di Kalimantan Timur	Kota Samarinda: tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan Kota Balikpapan: tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kutai Kertanegara: tinggi	Kota Samarinda: sedang Kota Balikpapan: tinggi Kabupaten Kutai Kertanegara: tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Wilayah	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013)
Kawasan Industri Batulicin	Kabupaten Kotabaru: Tinggi untuk bencana banjir	Kabupaten Kotabaru: tinggi
Kawasan Industri Jorong	Kabupaten Tanah Laut: Tinggi untuk bencana banjir	Kabupaten Tanah Laut: tinggi
Kawasan Industri Ketapang	Kabupaten Ketapang: tinggi untuk bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan	Kabupaten Ketapang: tinggi
Kawasan Industri Landak	Kabupaten Landak: tinggi untuk bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan	Kabupaten Landak: sedang
KSN Banjarbakula	Kota Banjarmasin: tinggi untuk ancaman banjir Kabupaten Banjar Baru: sedang untuk bencana banjir Kabupaten Barito Kuala: sedang untuk bencana kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Tanah Laut: tinggi untuk bencana banjir	Kota Banjarmasin: sedang Kabupaten Banjar Baru: sedang Kabupaten Barito Kuala: tinggi Kabupaten Tanah Laut: tinggi
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kalimantan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kalimantan		
Pontianak	Tinggi untuk ancaman: kebakaran hutan dan lahan	Kota Pontianak: Sedang
Palangka Raya	Tinggi untuk ancaman: kebakaran hutan dan lahan,	Kota Palangka Raya: Tinggi
Banjarmasin	Tinggi untuk ancaman: banjir	Kota Banjarmasin: Tinggi
Kawasan Perkotaan Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, Bontang	Balikpapan, Tenggarong, Samarinda ancaman tinggi untuk: banjir, kebakaran hutan dan lahan	Kota Balikpapan: Tinggi; Kota Samarinda: Tinggi; Kota Bontang: Tinggi
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kalimantan		
Mempawah – Kab. Pontianak	Tinggi untuk ancaman: banjir, kebakaran hutan dan lahan,	Kab. Pontianak: Tinggi
Sambas	Tinggi untuk ancaman: banjir, kekeringan, tanah longsor,	Sambas: Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

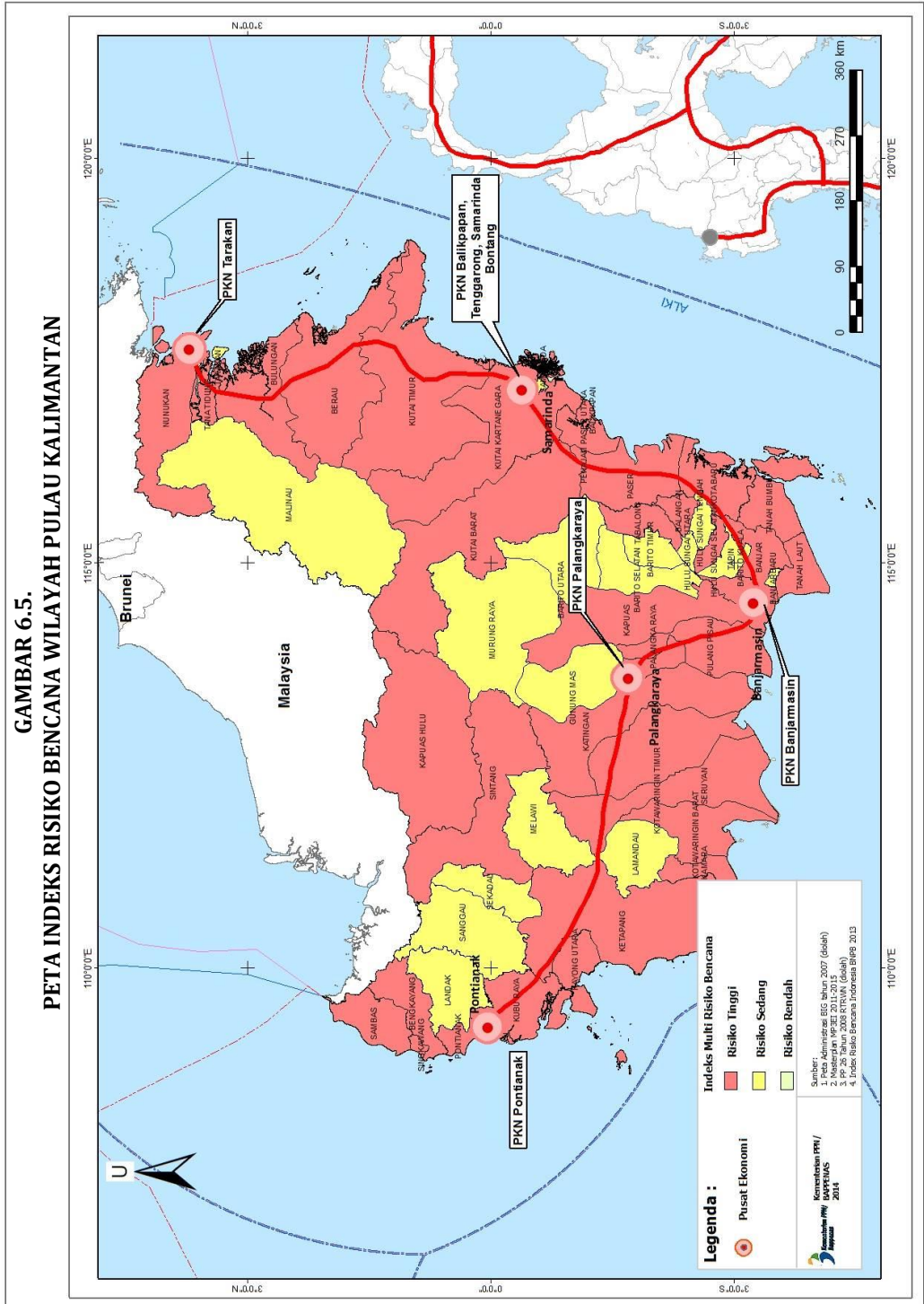
Wilayah	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013)
Ketapang	Tinggi untuk ancaman: banjir	Ketapang: Tinggi
Putussibau – Kab. Kapuas Hulu	Tinggi untuk ancaman: Banjir, kekeringan	Kapuas Hulu: Tinggi
Sanggau	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor	Sanggau: Tinggi
Sintang	Tinggi untuk ancaman: banjir	Sintang: Tinggi
Muara Teweh – Kab. Barito Utara	Tinggi untuk ancaman: banjir	Barito Utara: Tinggi
Paloh – Kab. Sambas	Tinggi untuk ancaman: banjir, kekeringan	Sambas: Tinggi
Jagoi Babang – Kab. Bengkayang	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor	Bengkayang: Tinggi
Entikong – Kab. Sanggau	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor	Sanggau: Tinggi
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Perbatasan		
Kab. Nunukan	Tinggi untuk ancaman bencana: banjir	Tinggi

Sumber : Diolah, Bappenas 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 6.5.
PETA INDEKS RISIKO BENCANA WILAYAH PULAU KALIMANTAN



6.5.5 Penataan Ruang Wilayah Kalimantan

A. Arah Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pulau Kalimantan

1. Kebijakan mewujudkan pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional:
 - a. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kepala sawit, karet, dan hasil hutan;
 - b. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi;
 - c. Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai kota tepi air (waterfront city); dan
 - d. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan berbasis mitigasi bencana banjir.
2. Kebijakan mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah dilakukan melalui pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah.
3. Kebijakan mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia meliputi:
 - a. Pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan;
 - b. Pengembangan koridor ekosistem antarkawasan konservasi;
 - c. Pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan
 - d. Pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung;
 - e. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS;
 - f. Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan DAS dengan mempertimbangkan morfologi tanah, curah hujan, kondisi geologi, dan jenis tanamannya.
 - g. Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Kebijakan mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
5. Kebijakan mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup meliputi:
 - a. Percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan negara dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - b. Pemertahanan eksistensi 4 (empat) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Sebatik, Pulau Gosong Makassar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia.
6. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) meliputi:
 - a. Pengembangan KSN Perbatasan dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. Pengembangan KSN untuk meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional.

B. Strategi Penataan Ruang Wilayah Pulau Kalimantan

I. Struktur Ruang Pulau Kalimantan

1. Strategi untuk arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kepala sawit, karet, dan hasil hutan meliputi:
 - a. Mengembangkan industri pengolahan lanjut kelapa sawit, karet, dan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan
 - b. Mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil perkebunan kepala sawit, karet dan/atau hasil hutan.
2. Strategi pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;

- b. Mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi.
3. Strategi pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai kota tepi air (*waterfront city*) meliputi:
 - a. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan yang berdekatan/ menghadap badan air; dan
 - b. Mengembangkan jaringan transportasi sungai yang didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai.
4. Strategi pengembangan prasarana dan sarana perkotaan berbasis mitigasi bencana banjir dilakukan dengan menata kawasan perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir.
5. Strategi untuk arah kebijakan pengembangan jaringan transportasi antaroda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah meliputi:
 - a. Mengembangkan jaringan jalan dan/atau jalur kereta api secara terpadu untuk menghubungkan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan sentra produksi komoditas unggulan dan pelabuhan dan/atau bandar udara;
 - b. Mengembangkan pelabuhan dan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan, transportasi sungai dan penyeberangan;
 - c. Mengembangkan alur-alur pelayaran untuk menjangkau pusat pertumbuhan dan pusat permukiman di wilayah pedalaman; dan
 - d. Meningkatkan fungsi terusan yang menghubungkan antaralur pelayaran sungai.

Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 6.11.

TABEL 6.11
PRIORITAS LOKASI PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN PULAU
KALIMANTAN PERIODE 2015-2019

Provinsi	Pusat Kegiatan dalam RTRWN		
	PKN	PKW	PKSN
Kalimantan Barat	Pontianak (I/C/1)	Mempawah (II/B)	Entikong (II/A/2)
		Singkawang (I/C/1)	Paloh – Aruk (II/A/2)
		Sambas (I/A/1)	Jagoibabang (I/A/2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Provinsi	Pusat Kegiatan dalam RTRWN		
	PKN	PKW	PKSN
		Ketapang (I/B)	Nangabadau (I/A/2)
		Putussibau (I/A/2)	Jasa (II/A/2)
		Entikong (I/A/1)	
		Sanggau (I/C/1)	
		Sintang (II/C/1)	
Kalimantan Tengah	Palangka Raya (I/C/1)	Kuala Kapuas (II/C/1)	
		Pangkalan Bun (I/C/1)	
		Buntok (II/C/1)	
		Muara Teweh (II/C/1)	
		Sampit (II/C/1)	
Kalimantan Selatan	Banjarmasin (I/C/1)	Amuntai (II/B)	
		Martapura (II/B)	
		Marahaban (II/B)	
		Kotabaru (II/C/1)	
Kalimantan Timur	Kawasan Perkotaan Samarinda-Balikpapan-Bontang (I/C/1)	Tanjung Redeb (I/C/1)	Long Midang (I/A/2)
		Sangata (I/B)	Long Pahangai (II/A/2) Long Nawan (II/A/2) Tanlumbis
		Tanlumbis (II/B)	
		Sungai Nyamuk (II/C/2)	
		Sanga-sanga (II/C/2)	
		Tanah Grogot (II/C/1)	
		Sendawar (II/C/2)	
Kalimantan Utara	Tarakan (I/C/1)	Tenggarong (I/B)	
		Tanjung Selor (II/C/1)	Nunukan (I/A/2)
		Nunukan (I/B) Malinau (II/C/1)	Simanggaris (I/A/2) Tarakan

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.

II. Pengembangan Kawasan Lindung

1. Strategi penataan ruang pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan dengan mempertahankan dan merehabilitasi luasan kawasan

- konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan.
2. Strategi penataan ruang untuk pengembangan koridor ekosistem antarkawasan konservasi meliputi:
 - a. Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budi daya yang berfungsi sebagai koridor ekosistem; dan
 - b. Membatasi perkembangan kawasan permukiman pada wilayah yang berfungsi sebagai koridor ekosistem.
 3. Strategi penataan ruang untuk pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dengan mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan.
 4. Strategi penataan ruang untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung meliputi:
 - a. Mempertahankan permukiman masyarakat adat dan menyediakan akses bagi masyarakat adat yang tidak mengganggu kawasan berfungsi lindung; dan
 - b. Mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu wilayah sungai (WS), kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi.

III. Pengembangan Kawasan Budidaya

1. Strategi penataan ruang pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional meliputi:
 - a. Mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan di kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian untuk ketahanan pangan;
 - b. Mengembangkan sentra produksi perikanan dengan memperhatikan potensi lestari; dan
 - c. Mendorong pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dan perikanan.
2. Strategi percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan negara dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup meliputi:
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat kegiatan pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi,

- pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia; dan
- b. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan-
3. Strategi pemertahanan eksistensi 4 (empat) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Sebatik, Pulau Gosong Makassar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia meliputi:
- a. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan untuk meningkatkan akses dari dan ke Pulau Sebatik, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit; dan
 - b. Mengembangkan prasarana sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku di Pulau Sebatik, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.

IV. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional

Dalam rangka pengembangan KSN, dikembangkan 5 (lima) KSN yang mendukung pengembangan wilayah di Pulau Kalimantan. Strategi pengembangan KSN di Pulau Kalimantan dapat dilihat pada Tabel 6.12.

TABEL 6.12
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
DI PULAU KALIMANTAN

No	KSN	Tipe	Strategi	K/L
1	Kawasan Perbatasan Kalimantan	Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	Mengembangkan prasarana dan sarana Kawasan Perbatasan Negara secara sinergis di Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Agraria dan Tata Ruang • BNPP • Kementerian PU dan Perumahan Rakyat • Kementerian Perhubungan
2	Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Banjar-Barito Kuala Tanah Laut (Banjar	Kepentingan Ekonomi	Pengembangan Kawasan Perkotaan Banjar Bakula sebagai Pusat orientasi pelayanan berskala internasional Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Agraria dan Tata Ruang • Bappenas • Kementerian Koordinator Perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	KSN	Tipe	Strategi	K/L
	Bakula)		pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya	

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014.

6.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Arah kebijakan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan yakni peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam mendorong pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kelestarian alam dan konektivitas wilayah, dengan strategi:

1. Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan;
2. Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat;
3. Penguatan regulasi sinergi perencanaan dan penganggaran;
4. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada tiap pemerintah daerah yang terintegrasi dengan manajemen kinerja;
5. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
6. Penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah.
7. Peningkatan proporsi belanja modal;
8. Pengembangan variasi pendanaan untuk belanja infrastruktur di daerah, antara lain melalui skema hibah, pinjaman, dan skema obligasi;
9. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line;
10. Penguatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah.

6.6. Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Kalimantan

6.6.1. Prioritas Program Pembangunan

6.6.1.1. Provinsi Kalimantan Barat

TABEL 6.13
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Pontianak
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Supadio
2. Pembangunan Bandara Singkawang
3. Pengembangan Bandara Perintis di Provinsi Kalbar (Sintang)
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Teluk Melano (Teluk Batang)
2. Pengembangan Pelabuhan Pontianak, Pantai Kijing*
3. Pengembangan Pelabuhan Padang Tikar
JALAN
1. Pembangunan Jalan Siduk - Sei Keli - Nangatayap
2. Pembangunan Jalan Ketapang - Siduk - Sukadana - Teluk Batang
3. Pembangunan Jalan Tebas-Sentebang-Tn.Hitam-Jeruju-Liku - Merbau - Temajok
4. Pembangunan Jalan Tn.Hitam - Sp.Bantan - Galing - Aruk
5. Pembangunan Jembatan Tayan
6. Pembangunan Jalan Nanga Pinoh - Batas Kalteng
7. Pembangunan Jembatan Kapuas II
8. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pontianak
9. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Temajuk - Gunung Kukud - Simpang Tanjung
10. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Teberau - Bts.Kec.Siding - Bts. Kab. Sanggau - Bts Kec Sekayam - Bts. Kab. Sintang
11. Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Putussibau - Nanga Era - Bts Kaltim
12. Pembangunan Jalan RASAU - SEPULAU
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kemboja*
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sintete*
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sekadau
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Durian*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional	
KETENAGALISTIKAN	
1.	PLTU Kalbar-1 200 MW
2.	PLTG/MG Mobile PP Kalbar 100 MW
3.	PLTG/MG Pontianak Peaker-1 100 MW
4.	Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
5.	Pembangunan PLTS Komunal dan PLTMH
Telekomunikasi dan Informatika	
1.	Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2.	Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR	
1.	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sanggau Ledo Bengkayang
2.	Pembangunan Outer Ring Canal Kota Metropolitan Pontianak Kota Pontianak
3.	Perkuatan Tebing Sungai Kapuas Sei Nipah Kuning Kota Pontianak Kota Pontianak
4.	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir Kota Sintang Kab Sintang
5.	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir Kab. Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu
6.	Pembangunan Bendungan Segedong Kab Pontianak
7.	Pembangunan Bendungan Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu
8.	Peningkatan kapasitas Waduk Panepat (10 Ha) Kota Pontianak
9.	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Kota Ketapang Kab Ketapang
10.	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Sungai Potan Kab Kapuas Hulu
PENDIDIKAN	
1.	Peningkatan pelayanan pendidikan daerah perbatasan dan pulau (dalam bentuk sekolah berasrama).
2.	Pembangunan Politeknik di Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu dan Sanggau.
KESEHATAN	
1.	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (difokuskan untuk 10 kabupaten tertinggal dan daerah perbatasan)
2.	Pemenuhan tenaga medis
3.	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dasar
4.	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan rujukan (Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang)
5.	Pengendalian penyakit HIV dan AIDS
6.	Penanggulangan gizi buruk

6.6.1.2 Provinsi Kalimantan Tengah

TABEL 6.14
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional	
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG	
1.	Pembangunan Jalur KA : Kudangan – Nanga Bulik – Kumai
2.	Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Tumbang Samba – Sampit- Kuala Pemuang – Teluk Segitung
3.	Pembangunan Jalur KA Tumbang Samba – Rantau Pulut -Nanga
4.	Pembangunan Jalur KA Kuala Kurun – Rambambang – palangkaraya – Pulang Pisau – Batanjung (Kuala Kapuas)
5.	Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Bangkuang / Mangkatip - Batanjung
6.	Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya
PERHUBUNGAN UDARA	
1.	Pengembangan Bandara Tjilik Riwut
2.	Pengembangan Bandara Muara Teweh
PERHUBUNGAN LAUT	
1.	Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung, Teluk Segitung dan Pelabuhan Kumai
2.	Pengembangan Pangkalan Bun
3.	Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang
4.	Pengembangan Pelabuhan Bagendang*
5.	Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di Kab.Pulang Pisau
6.	Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan
7.	Relokasi Pelabuhan Pangkalan Bun ke Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat
JALAN	
1.	Pembangunan Jalan Palangkaraya-Bukittliti-Bkt.Batu-Buntok-Ampah
2.	Pembangunan Jalan Sampit-Samuda-Ujung Pandaran
3.	Pembangunan Jalan Tumbang Samba-Tbg Senawang-Bts Kalbar
4.	Pembangunan Jembatan Tumbang Samba
ASDP	
1.	Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baik
2.	Pemb. Dermaga Sungai di Kasongan Baru di Kec. Katingan Hilir
3.	Pengadaan Bus Air
4.	Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai RPM
5.	Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kasongan Baru*
6.	Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Petanak*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTMG Bangkanai (FTP2) 140 MW
2. PLTU Kalselteng 1 100 MW
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
4. Persiapan Jaringan Kabel Listrik bawah Laut KalimantanTengah ke Jawa tengah
5. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
Telekomunikasi dan Infomatika
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Prasarana Air Baku Kotawaringin Barat Kab Kotawaringin Barat
2. Revitalisasi lahan rawa ex PLG
PENDIDIKAN
1. Program PAUD : a. BOP PAUD; b. Rintisan PAUD; dan c. Gugus PAUD
2. Program Pendidikan Dasar a. Peningkatan mutu SD; b. Peningkatan mutu PK-PLK; c. Peningkatan mutu SMP; dan d. P2TK Dikdas (tunjangan guru kualifikasi, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS)
3. Program Pendidikan Menengah dan Luar Biasa : a. Layanan Peningkatan mutu Pendidikan SMA; b. Layanan Peningkatan mutu SMK; dan c. P2TK Dikmen (tunjangan kualifikasi guru, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS)
4. Program Pendidikan Non-formal dan Informal : Peningkatan mutu Layanan kursus dan keterampilan
KESEHATAN
1. Pelayanan Kesehatan Dasar : Diperlukan akreditasi dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar
2. Pelayanan Kesehatan Perorangan : a. Membangun sistem penanggulangan kegawat daruratan terpadu; b. Peningkatan pemenuhan layanan spesialistik; dan c. Peningkatan kepastian tenaga kesehatan strategis untuk mendukung target MDGs
3. Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana : Peningkatan/pengembangan rumah sakit jiwa kalawa atei
4. Program Jaminan Kesehatan dan Kefarmasian : a. Jaminan kesehatan, diperlukan untuk pembayaran premi (Jamkesda Kalteng Barigas) agar masyarakat miskin yang belum menerima (JKN-PBI) dapat masuk dalam kartu Kalteng Barigas; b. Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; dan c. Peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian
5. Penanggulangan Masalah Kesehatan : a. Penanganan krisis kesehatan; b. Penanganan rabies; c. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); d. Sistem Surveillance terpadu; e. Universal Child Immunization (UCI); f. Eliminasi Malaria; g. Pemberantasan Tb paru; h. Penemuan kasus HIV/AIDS; dan i. Penanggulangan filariasis

6.6.1.3. Provinsi Kalimantan Selatan

TABEL 6.15
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan KA Tanjung-Paringin- Rantau- Martapura-Bandara Syamsoedin Noor - Banjarmasin
2. Pembangunan jalur kereta api : Banjarmasin Pelabuhan Batu Licin Sengayam Tanah Grogot
3. Pembangunan Jalur KA Tanjung-Balikpapan
4. Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Banjarmasin*
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam
2. Pengembangan Bandara Syamsudian Noor Banjarmasin
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Laut Batulicin
2. Pembangunan Pelabuhan Seibuku (sebuku)
3. Pengembangan Pelabuhan Pelabuhan/ Swarangan
4. Pengembangan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin*
5. Pengembangan Pelabuhan Marabatuan
JALAN
1. Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin
2. Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelabuhan di Kabupaten Tanah Laut
3. Pembangunan Jalan Benua Anyar - Margasari-Ma. Muning-Kandangan
4. Pembangunan Jalan Kandangan - Hampang- Batu Licin
5. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Batulicin Ruas Batulicin-Lumpangi, Batulicin-Mentewe, Batulicin-Pagatan, Batulicin-S.Kupang, dan Simp. Kodeco-Mentewe
6. Pembangunan Jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Trisakti - Pasir Mas - Jembatan Barito)
7. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Pelabuhan
8. Peningkatan Jalan Ambungan - Tajau Pecah
9. Pembangunan Jalan Lingkar (Sei Ulin dan Batu Licin)
10. Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Laut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Sebuku*
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTGU/MGU Kalsel Peaker 1 200 MW
2. PLTG/MG Mobile PP Kalselteng (Seberang Barito) 100 MW
3. PLTG/MG Mobile PP Kalselteng (Trisakti dan Kayutangi) 100 MW
4. PLTU Kalsel (FTP2) 2x100 MW
5. PLTU Kalselteng 2 100 MW
6. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
7. Pembangunan PLTS Komunal
8. Program Listrik Gratis
TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Batang Alai
2. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Barito di Marabahan, Kab Batola
3. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Martapura, Kota Banjarmasin
4. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi Sungai Martapura, Kab Banjar
5. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Tabalong (3 Lokasi)
6. Pengendalian Banjir Santui, Kintap dan Batu Licin
7. Pengendalian Banjir, Jorong, Asam - Asam & Kintap
8. Pengendalian Banjir Kandang Jaya
9. Normalisasi Sungai Martapura
10. Pembangunan Pengaman Pantai Aluh Aluh
11. Pembangunan Waduk Tapin
12. Tanah Bendungan Tapin
13. Pembangunan Embung Tala
14. Pembangunan Embung Tanbu
15. Pembangunan Air Baku Banjar Bakula
PENDIDIKAN
1. Pembangunan sekolah baru SD, SMP, SMA/SMK
2. Pembangunan ruang kelas baru SD, SMP, SMA/SMK.
3. Rehabilitasi ruang kelas SD, SMP, SMA/SMK.
4. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru (S1)
5. Pendidikan keaksaraan dan pendidikan paket A, paket B, dan paket C
KESEHATAN
1. Pembangunan Puskesmas yang terakreditasi (1 kecamatan = 1 puskesmas)
2. Peningkatan sarana prasarana kesehatan
3. Bina gizi kesehatan ibu dan anak
4. Penyehatan lingkungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional	
5.	BOK
PERUMAHAN	
1.	SPAM Regional Banjarbakula
2.	Rusunawa Kab Banjar 4TB, Kab Kotabaru 1TB, Banjarmasin 2TB, Hulu Sungai Utara 1 TB
3.	Penanganan Kawasan kumuh di Banjarmasin, Kab Barito Kuala, Kotabaru, dan Kab Banjar

6.6.1.4 Provinsi Kalimantan Timur

TABEL 6.16
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional	
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG	
1.	Pembangunan jalur KA antara Balikpapan - Samarinda
2.	Pembangunan jalur KA antara Muara Wahau - Muara Bengalon (swasta)
3.	Pembangunan jalur KA antara Murung Raya – Kutai Barat – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan (swasta)
4.	Pembangunan Jalur KA Tanjung-Balikpapan
PERHUBUNGAN DARAT	
1.	Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Samarinda*
2.	Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Balikpapan*
PERHUBUNGAN UDARA	
1.	Pembangunan Bandara Tana Paser
2.	Pengembangan Bandara Bontang
3.	Pengembangan Bandara Samarinda Baru
4.	Pengembangan Bandara Datah Dawai
5.	Pembangunan Bandara Perintis Long Apari
PERHUBUNGAN LAUT	
1.	Pengembangan Terminal Peti Kemas Palaran
2.	Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy/Sangkulirang*
3.	Pelabuhan Kuala Samboja
4.	Pengembangan Pelabuhan Internasional Balikpapan (Terminal Peti Kemas Kariangau)
5.	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penajam Paser
6.	Pengembangan Pelabuhan Tanah Grogot
7.	Pengembangan Pelabuhan Samarinda
8.	Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagai pendukung Integrated Mining Development MEC Coal Project
JALAN	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
1. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang
2. Pembangunan Jalan Sangkulirang-Taliyasan-Guntur-Tanjung Redep
3. Pembangunan Jalan Tol Samarinda - Balikpapan
4. Pembangunan Jalan Akses Maloy
5. Pembangunan Jembatan Loa Kulu
6. Pembangunan Jembatan Pulau Balang
7. Pembangunan Jembatan Tullur Aji Jejangkat
8. Pembangunan Jalan Singkuang – Bandara Kalimantan
9. Pembangunan Jembatan Kelay (Kab. Berau)
10. Pembangunan Jalan Perbatasan Bts Kalbar - Tiang Ohang - Long Pahangai
11. Pembangunan Jalan Lingkar Samarinda
12. Pembangunan Jalan Perbatasan Bts Kalbar - Tiang Ohang - Long Pahangai-Batas Kaltara
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Batu Dinding Kab. Kutai Barat
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTG/MG Kaltim Peaker 2 100 MW
2. PLTU Kaltim (FTP2) 2x100 MW
3. PLTU Kaltim 4 100 MW
4. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
5. PLT Biomass sawit dan limbah sawit (Energi Baru Terbarukan)
6. PLTS Komunal
INFRASTRUKTUR ENERGI
1. Pembangunan Jaringan gas kota di Samarinda
Telekomunikasi dan Infomatika
1. Pembangunan Tower Telekomunikasi di daerah pedalaman dan perbatasan
2. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
3. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Waduk Teritip Kab. Balikpapan
2. Pembangunan Bendung Tepian Buah (1.500 Ha) Kab. Berau
3. Pembangunan Bendung Sidomukti Kab. Kukar
4. Pembangunan Bendung Sukabumi Kab. Kukar
5. Pembangunan Bendung Ritan Lama Kab. Kukar
6. Pembangunan Bendung Mejang Kab. Kutim
7. Peningkatkan DR. Sebakung Kab. PPU
8. Pembangunan Bendali V Banjir Papan Lestari Sepinggian Kota Balikpapan Kota Balikpapan
9. Lanjutan Penanganan Banjir dan Pengaman Tebing Sungai Karang Mumus Kota Samarinda Kota Samarinda
10. Pembangunan Pintu Air dan Pompa Banjir Muara Sungai Karang Mumus Kota Samarinda Kota Samarinda
11. Lanjutan Pembangunan Bendungan Teritip Kota Balikpapan Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
Balikpapan
12. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Kab. PPU
13. Pembangunan Bendungan Lambakan Kab. PPU
14. Pengerukan dan Konservasi DAS Danau Semayang Kab. Kukar
15. Pengerukan dan Konservasi DAS Danau Melintang Kab. Kukar
16. Pembangunan Embung Aji Raden Kota Balikpapan
17. Pembangunan Intake Keledang Kapasitas 900 Lt/dt Kota Samarinda
18. Pengadaan & Pemasangan Jaringan Transmisi Air Baku Dia 800 mm Intake Loa Kulu -IPA Lok Bahu L = 8.4 KM Kota Samarinda
PENDIDIKAN
1. Pengembangan Politeknik Negeri Samarinda (penguatan Program Studi Nautika)
2. Pengembangan Institut Teknologi Kalimantan serta Institut Seni dan Budaya (ISBI)
3. Penyediaan layanan pendidikan di daerah perbatasan (Kab. Mahakam Ulu)
4. Pembangunan asrama untuk SMA unggulan, terutama untuk daerah perbatasan (Kab. Mahakam Ulu)
KESEHATAN
1. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar : 1. Pembangunan puskesmas baru: Long Apari, Long Bagun dan Long Pahangai (Kab. Mahakam Ulu, Kaltim); 2. Rehabilitasi puskesmas; 3. Alat Kesehatan; dan 4. Pusling perairan (Kab. Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu)
2. Pengembangan puskesmas 24 jam menjadi RS Pratama (Diusulkan untuk Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda (lokasi perbatasan))
3. Pemenuhan peralatan kesehatan RS Pratama (Lokasi di 5 kabupaten: Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau)
PERUMAHAN
1. Pembangunan TPA Sanitary Landfil dan IPAL (Samarinda, Balikpapan, Bontang)
2. Pengurangan Kawasan Kumuh (Samarinda, Balikpapan dan Bontang)

6.6.1.5. Provinsi Kalimantan Utara

TABEL 6.17
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan
2. Pengembangan Bandara Juwata-Tarakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
3. Pembangunan Bandara Maratua
4. Peningkatan Bandara Perintis Binuang Kec. Krayan Selatan
5. Pembangunan Bandar Udara Sebatik
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Nunukan
2. Pengembangan Pelabuhan Tarakan
3. Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Barang di Pesawan Tg. Selor
4. Pengembangan Pelabuhan Tunon Taka
5. Pengembangan Pelabuhan Malundung
6. Pengembangan Pelabuhan Sebatik
7. Pembangunan Pelabuhan Internasional di Tanah Kuning
8. Pembangunan Pelabuhan Bebatu (Kabupaten Tanah Tidung)
JALAN
1. Pembangunan Jalan Perbatasan Long Nawang - Long Bujungan - Long Kemuat - Langap - Malinau
2. Pembangunan Jalan Mesalong-Sasipu--Tou Lumbis
3. Pembangunan Jalan Perbatasan Malinau - Punan - Long Bawan - Long Midang
4. Pembangunan Jalan Long Nawang - Metulang - Long boh - Bts Kaltim
5. Pembangunan Jalan Penghubung Kab. Bulungan - Tarakan
6. Pembangunan Jembatan Pendukung Pengembangan Kota Baru Tarakan
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Nunukan
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sebatik
3. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan/Ferry Tarakan
4. Peningkatan Pelabuhan Ferry Ancam
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTMG Tanjung Selor 15 MW
2. PLTMG Nunukan 2 10 MW
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
4. PLTA Besahan (Kayan 3) dan PLTA Long Sempanjang Total kapasitas 1000 MW
TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
1. Pembangunan Tower Telekomunikasi di daerah pedalaman dan perbatasan
2. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
3. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan DR. Sepunggur Kab. Bulungan
2. Pembangunan DR. Salim batu Kab. Bulungan
3. Pembangunan DR. Teras Baru Kab. Bulungan
4. Pembangunan Pengendalian Banjir Tanjung Belimbing (Kanal, Retarding Basin dan Drainase) Kota Malinau Kab. Malinau
5. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Tanjung Buka
6. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Sepunggur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
7. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Salim Batu
8. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Teras Baru
9. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Selang Ketok
10. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.T. Tanah Kuning
11. Persiapan Pembangunan 5 Bendungan di Sungai Kayan (Kab Bulungan) dan 3 bendungan di Sungai Mentarang (Kab Malinau)
12. Pembangunan embung di Kota Tarakan
13. Pembangunan Waduk PLTA Besahan (Kayan -K3) dan Pembangunan Waduk PLTA Long Sempajang (Mentarang 3) (1000 MW)
PENDIDIKAN
1. Pembangunan sekolah baru TK, SD, SMP, SMA, SMK
2. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan
3. Pembangunan asrama sekolah
KESEHATAN
1. Pembangunan untuk RS Pratama di Kab. Tana Tidung (Tana lia, bebatu), Kab. Nunukan (sebayu dan krayan), Kab. Malinau (long ampung, RS Langap).
2. Penyediaan alkes, jaringan, untuk RS Pratama di Pratama di Kab. Tana Tidung (Tana lia, bebatu), Kab. Nunukan (sebayu dan krayan), Kab. Malinau (long ampung), RSUD Tarakan beserta pembangunan gedung radioterapi,
3. Pembangunan RS type D di Kota Tana Tidung (pengembangan dari Puskesmas menjadi RS)
4. Pengadaan tenaga kesehatan di Kab. Malinau (dokter spesialis, bidan, perawat, ahli gizi)
5. Pembangunan baru RS Provinsi tipe A di Tanjung Selor, Kaltara
PERUMAHAN
1. Pembangunan rumah khusus daerah perbatasan 230 KK di Kec Krayan Selatan dan 845 KK di Kec Lumbis Ogong
2. Pembangunan infrastruktur kawasan permukiman untuk rumah khusus di daerah perbatasan
3. Pembangunan konsep persampahan ramah lingkungan untuk Ibu Kota Kaltara

6.6.2. Kerangka Regulasi

Pelaksanaan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan tidak terlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Perpajakan Kepabeanan, dan Cukai di Kawasan Ekonomi Khusus serta aturan turunannya;
2. Penyelesaian Peraturan tentang Ketenagakerjaan di Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Penyelesaian Peraturan tentang Pelimpahan Kewenangan perdagangan, keimigrasian, perindustrian, pertanahan, tenaga kerja dari kementerian/lembaga terkait kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;
4. Penetapan regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Kabupaten/Kota di pusat-pusat pertumbuhan;
5. Pembentukan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal;
6. Penetapan regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI-Malaysia dalam pengembangan kawasan perbatasan negara;
7. Penetapan Perpres RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)-nya, Perpres RTR KSN Banjarmasin – Banjarbaru – Banjar - Barito Kuala - Tanah Laut (Banjarbakula); dan penyelesaian Peninjauan Kembali Perpres No. 3/2012 tentang RTR Pulau Kalimantan, dan Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 3/2012 tentang RTR Pulau Kalimantan;
8. Regulasi di daerah yang mendukung implementasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan.

6.6.3. Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan tidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi di kawasan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Pemberian berbagai kemudahan perizinan perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya;
3. Pengembangan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;
4. Pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengembangan daerah tertinggal kawasan perbatasan;
6. Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk menyusun program/kegiatan dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya;
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.;
8. Penciptaan iklim investasi yang menarik bagi investor dengan memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang berimbang;
9. Peningkatan koordinasi antara Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi di Wilayah Kalimantan dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau.

BAB 7

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI

7.1 Capaian Kinerja Saat ini

- Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Jawa-Bali cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa-Bali selama kurun waktu 2009 – 2013 sebesar 6,1 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Peranan Wilayah Jawa-Bali dalam pembentukan PDB nasional mengalami penurunan dari 60,0 persen (2009) menjadi 59,9 persen (Triwulan II 2014).
- Pemerintah Provinsi di Wilayah Jawa-Bali telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret) dan sudah berada di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen (2009) dan 11,25 persen (Maret 2014), kecuali di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur yang masih berada di atas angka kemiskinan nasional. Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pemerintah Provinsi di Wilayah Jawa-Bali juga telah berhasil menurunkan TPT dan sudah berada di bawah TPT nasional sebesar 7,87 persen (2009) dan 5,70 persen (Feb, 2014), kecuali di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang masih berada di atas TPT Nasional.
- Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka di Wilayah Jawa-Bali ini telah dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan selalu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi di Wilayah Jawa-Bali. Namun demikian, pencapaian IPM di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Banten masih perlu ditingkatkan karena masih di bawah IPM nasional sebesar 71,76 (2009) dan 73,81 (2013).
- Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, seluruh provinsi di Wilayah Jawa-Bali mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini diindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi di Wilayah Jawa-Bali yang cenderung meningkat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, namun telah berada di bawah angka Rasio Gini nasional sebesar 0,413 (2013), kecuali Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Ke depan, hal ini

perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

7.2 Potensi dan Keunggulan Wilayah

Perekonomian Wilayah Jawa-Bali ditopang oleh 3 sektor unggulan, yaitu industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian.

- Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 26,6 persen terhadap perekonomian Wilayah Jawa-Bali. Komoditas industri pengolahan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan antara lain makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi (otomotif, perkapalan dan alutsista), telematika, kimia dasar, serta logam dasar (alumina dan besi baja).
- Industri makanan-minuman menyerap banyak tenaga kerja dan merupakan kontributor terbesar dari industri pengolahan non migas terhadap PDB nasional, yaitu sebesar 7,4 persen pada tahun 2011. Penjualan domestik industri makanan-minuman diperkirakan tumbuh sebesar 6 persen pada tahun 2014 (GAPMMI, 2014). Sementara itu, ekspor industri makanan-minuman cenderung meningkat dalam periode 2005-2010 dan mencapai US\$ 2.146,85 juta pada tahun 2010. Susu adalah salah satu produk industri makanan-minuman yang mempunyai potensi untuk dikembangkan karena konsumsi produk susu per kapita di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan Cina, Malaysia dan India. Penjualan produk susu di Indonesia diproyeksikan akan tumbuh sebesar 17 persen setiap tahunnya.
- Industri tekstil juga merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Kontribusi produk tekstil terhadap PDB nasional cukup signifikan, yaitu sebesar 1,9 persen pada tahun 2011, dengan laju pertumbuhan sebesar 7,5 persen dan diperkirakan dapat terus meningkat di masa yang akan datang. Sebagian besar produksi tekstil Indonesia terpusat di Wilayah Jawa (94 persen), dimana Bandung dan Sukoharjo merupakan hub produksi utama, selain industri-industri hulu pembuat serat di Purwakarta, Subang dan Tangerang. Ekspor tekstil dan produk tekstil cenderung meningkat pada periode 2005-2010 dan mencapai sebesar US\$ 11.224.04 juta pada tahun 2010.
- Industri otomotif Indonesia yang berpusat di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat (Cikarang dan Karawang) menunjukkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2011, total penjualan kendaraan penumpang mengalami pertumbuhan tertinggi sekitar 23 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, peningkatan produksi kendaraan penumpang juga cukup signifikan khususnya di tahun 2011 dan 2012, yaitu tumbuh mencapai lebih dari 30 persen (y-o-y). Sementara itu, pertumbuhan untuk kendaraan komersial mencapai puncaknya di 2011 yaitu sebesar 35,2 persen (y-o-y). Industri ini berpeluang besar untuk terus tumbuh karena kepemilikan kendaraan di Indonesia saat ini masih rendah dan diperkirakan akan semakin naik seiring dengan meningkatnya PDB. Selain itu, pasar ekspor juga masih terbuka lebar.

- Sebagai negara maritim dengan wilayah perairan yang cukup luas, industri perkapalan berpotensi untuk terus berkembang. Dalam lima tahun terakhir, industri perkapalan di Indonesia menunjukkan perkembangan cukup baik. Pada Maret 2010, Indonesia telah memiliki armada sebanyak 9.309 unit kapal atau meningkat 54,1 persen dari Maret 2005 (IPERINDO, 2011). Industri peralatan transportasi lainnya yaitu alutsista yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan almatius POLRI.
- Industri lainnya yang berpotensi dalam mendukung perekonomian Wilayah Jawa-Bali yaitu industri telematika, dengan sentra produksi di area Jabodetabek. Kapasitas *Broadband* yang terpasang ditargetkan bergeser dari 1-4 Mbps menjadi 20 Mbps pada tahun 2015. Pasar produk telematika semakin membesar setiap tahunnya seiring dengan semakin cepatnya perubahan teknologi telekomunikasi, serta ekspansi jaringan telekomunikasi ke berbagai wilayah terutama KTI.
- Industri pengolahan lainnya yang menjadi prioritas antara lain industri berbasis kayu (mebel dan kayu olahan) yang merupakan industri kreatif dan menyerap banyak tenaga kerja. Prioritas lain adalah industri kimia dasar, termasuk petrokimia, serta industri logam dasar (alumina dan besi baja). Perkembangan industri besi baja sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir sejalan dengan naiknya kebutuhan terhadap pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kontribusi industri logam dasar besi dan baja terhadap PDB nasional yaitu sebesar 0,4 persen pada tahun 2011, dengan laju pertumbuhan sebesar 13,1 persen. *Indonesia Iron and Steel Industry Association* (IISIA) memprakirakan produksi besi dan baja nasional sekitar 7,2 juta ton pada 2012, sementara kebutuhan domestik mencapai hampir 10 juta ton. Produksi besi dan baja Indonesia diharapkan dapat meningkat

hingga mencapai 12 juta ton pada 2014 dan 15 juta ton pada 2015. Di Wilayah Jawa, industri besi baja terutama terlokalisir di daerah Jawa Barat (Cilegon) dan Jawa Timur.

- Sebagai lumbung pangan nasional, sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Wilayah Jawa-Bali. Produksi padi di Wilayah Jawa-Bali dari tahun 2009-2013 cenderung meningkat dengan sentra produksi terbesar di Provinsi Jawa Timur (12,1 juta ton), Jawa Barat (12,0 juta ton) dan Jawa Tengah (10,3 juta ton).
- Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga merupakan sektor unggulan di Wilayah Jawa-Bali. Di Wilayah Jawa-Bali terdapat 12 dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Berdasarkan perspektif nasional, Provinsi Bali merupakan pintu gerbang pariwisata di Indonesia. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 3.241.889 orang, atau sebesar 36,8 persen, melalui Provinsi Bali, dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang sebesar 59,2 persen. Sementara itu, di Wilayah Jawa terdapat satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu KEK Tanjung Lesung, di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Fokus dari KEK tersebut adalah pengembangan pariwisata termasuk hotel, resort, dan industri kreatif lain. Untuk wilayah Jawa khususnya Jawa Tengah juga mengembangkan wisata religi bagi penganut agama Budha (Candi Borobudur Magelang), Hindu (Candi Cetho Karanganyar) dan Islam (makam Wali Songo Demak) serta Wisata Pra Sejarah (Museum). Lebih lanjut, Wilayah Jawa-Bali juga memiliki potensi industri kreatif di berbagai kota, antara lain Bandung (desain, fashion, arsitektur, film, video, radio, perangkat lunak), Yogyakarta (barang antik, seni pertunjukan), Semarang (Arsitektur, Kerajinan, Penerbitan dan Percetakan), Surakarta (Fashion, Pasar dan Barang Seni, Kerajinan, Seni Pertunjukan), Pekalongan (Desain, Fashion, Kerajinan), Surabaya (perangkat lunak hiburan interaktif), Denpasar (barang antik, seni pertunjukan), dan Jakarta (periklanan, film dan video, televisi dan radio, musik, percetakan).

7.3 Tema Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Jawa-Bali, maka tema besar ***Pembangunan Wilayah Jawa-Bali sebagai***

- Lumbung pangan nasional
- Pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja;

- Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif;
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.

7.4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Tujuan pengembangan Wilayah Jawa-Bali tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Jawa-Bali dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan produksi sektor pertanian pangan, khususnya padi, pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, kimia, alumina dan besi baja, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif; (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun sasaran pengembangan Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Jawa-Bali, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 1 Kawasan Ekonomi Khusus dan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.
2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Pulau Jawa-Bali, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 6 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi 6,23 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,92 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi 70,10.
3. Untuk mendukung pemerataan pembangunan kawasan perkotaan di Jawa - Bali, maka akan dipercepat peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 5 kawasan perkotaan metropolitan yang sudah ada saat ini serta pembangunan 1 Kota Baru publik yang terpadu dan mandiri.
4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal serta mendorong kewirausahaan dan perekonomian desa berbasis

komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi menuju desa mandiri.

5. Khusus untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, diharapkan dapat diwujudkan 4 pusat pertumbuhan baru perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
6. Sasaran bidang otonomi daerah untuk Wilayah Jawa-Bali adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 55% untuk propinsi dan 20% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 25% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 7 provinsi dan 90 kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali; (4) Terlaksananya *e-budgeting* di wilayah Jawa-Bali (dengan proyek awal Provinsi Jawa Barat); (5) Terlaksananya penggunaan *block grant* (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Jawa Tengah dan Bali (6) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 70% dan S2-S3 sebesar 10%; (7) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Jawa-Bali sebesar 100 angkatan (dengan proyek awal Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah); (8) Terlaksananya pengaturan kewenangan secara bertahap di wilayah Jawa-Bali (dengan proyek awal Provinsi Banten dan Jawa Barat); (9) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (10) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (11) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 75%; (12) Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Jawa-Bali (dengan proyek awal Provinsi Banten); (13) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (14) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Jawa-Bali (dengan proyek awal Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur).
7. Sasaran Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Jawa-Bali adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 36 kabupaten/kota sasaran (Kota Denpasar, Badung, Tabanan, Buleleng, Tangerang, Cilegon, Kota Yogyakarta, Sleman, DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Bekasi, Cianjur, Kota Bandung, Bandung Barat, Cirebon, Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Kota Semarang, Kendal, Demak, Cilacap, Kebumen, Magelang, Malang, Gresik, Bangkalan, Kota

Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Bojonegoro, Pacitan, Banyuwangi, dan Jember) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKS, PKW, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Jawa-Bali semakin meningkat, dan juga semakin meratanya pembangunan antarwilayah. Hal ini dicerminkan dengan makin menurunnya kontribusi PDRB Wilayah Jawa-Bali terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 58,0 persen (2013) menjadi 55,1 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa-Bali. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Jawa-Bali dapat dilihat pada Tabel 7.1 sampai dengan Tabel 7.3 sebagai berikut.

TABEL 7.1.
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH JAWA-BALI PER PROVINSI
TAHUN 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	5.4	6.5	7.2	7.3	7.9
Jawa Barat	5.5	6.6	7.1	7.8	7.7
Banten	4.9	5.6	6.4	6.8	7.7
Jawa Tengah	5.7	6.7	7.1	7.5	7.7
D.I Yogyakarta	5.3	5.9	6.1	6.4	6.5
Jawa Timur	6.2	6.6	7.1	7.3	7.9
Bali	7.5	7.3	7.8	8.3	8.6

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 7.2.
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH JAWA-BALI PER PROVINSI
TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	3.4	3.2	3.0	2.7	2.5
Jawa Barat	8.9	8.2	7.6	6.9	6.3
Banten	5.3	4.9	4.5	4.1	3.7
Jawa Tengah	13.1	12.2	11.3	10.4	9.5
D.I Yogyakarta	13.8	12.8	11.8	10.9	9.9
Jawa Timur	12.0	11.2	10.4	9.6	8.7
Bali	4.0	3.7	3.5	3.2	2.9

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 7.3.
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH JAWA-BALI PER PROVINSI
TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	9.3	9.1	8.8	8.5	8.3
Jawa Barat	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4
Banten	9.6	9.2	8.8	8.4	8.0
Jawa Tengah	5.4	5.2	5.1	4.9	4.7
D.I Yogyakarta	3.8	3.7	3.6	3.4	3.3
Jawa Timur	4.0	3.9	3.7	3.6	3.5
Bali	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

7.5 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

7.5.1 Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pembangunan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional dan internasional berbasis sektor industri dan jasa nasional, pusat pengembangan ekonomi kreatif, serta sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia, diarahkan untuk pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, kimia, alumina dan besi baja.

Fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di Wilayah Jawa-Bali adalah Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang terletak di Kabupaten Pandeglang dan pengembangan Wilayah Suramadu sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran. Percepatan pembangunan kawasan strategis dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Pulau Jawa-Bali

Pengembangan potensi ekonomi wilayah erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat berbasis komoditas unggulan wilayah. Pengembangan potensi berbasis komoditas unggulan wilayah ini diupayakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui:

- a. Penyiapan kawasan industri jasa pariwisata berorientasi internasional di KEK Tanjung Lesung, Provinsi Banten;
- b. Pengembangan pusat-pusat industri jasa pariwisata berdaya saing internasional;

- c. Pengembangan industri kreatif penopang kawasan wisata Tanjung Lesung;
- d. Stabilitas dan konsistensi pengembangan pariwisata Bali dan industri kreatif, serta jasa penunjang pariwisatanya; serta
- e. Pengembangan potensi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya, dan Kawasan Khusus di Pulau Madura.

2. Percepatan Penguatan Konektivitas

Peningkatan konektivitas antara pusat kegiatan ekonomi KEK Tanjung Lesung dengan kawasan industri dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa dan Bali ditujukan untuk meningkatkan kelancaran arus orang dan barang dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan yang dilakukan melalui:

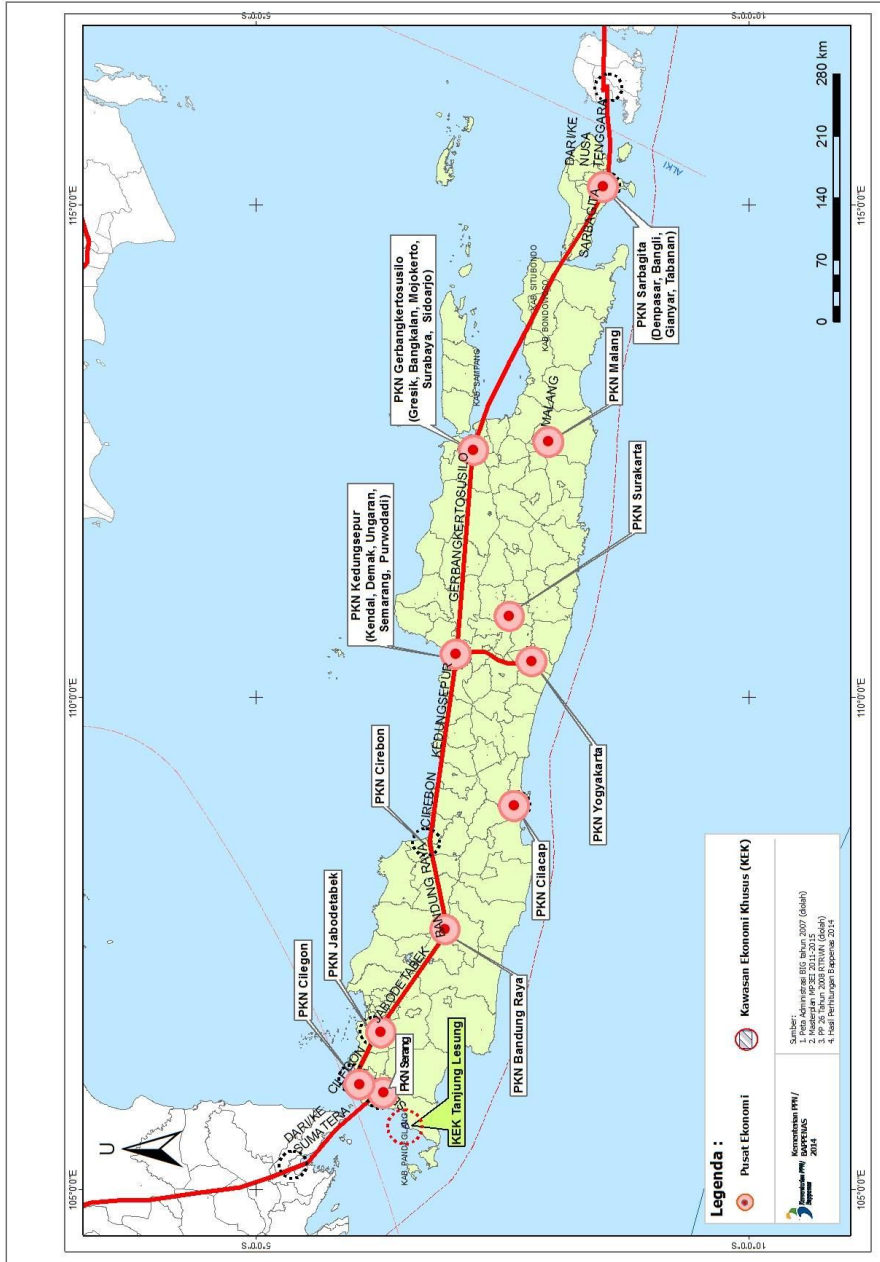
- a) Pembangunan jalan penghubung kawasan strategis;
- b) Pembangunan jaringan transmisi air baku suplai kawasan strategis; serta
- c) Pembangunan jalan akses kawasan industri di Madura menuju pelabuhan petikemas.

3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kapasitas kelembagaan di tingkat pusat maupun di daerah, serta pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dilakukan dengan strategi:

- a) Peningkatan kualitas SDM Badan Pengelola kawasan dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kawasan;
- b) Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang pariwisata dan jasa penunjang pariwisata;
- c) Peningkatan koordinasi antara Badan Pengelola kawasan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;
- d) Pembangunan *Science Park* berteknologi tinggi bidang jasa pariwisata dan logistik sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan; serta
- e) Pembangunan *Techno Park* bidang pariwisata dan logistik untuk meningkatkan inovasi teknologi.

GAMBAR 7.1
PETA LOKASI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH JAWA-BALI RPJMN 2015-2019



4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Dalam upaya pengembangan kawasan strategis di Wilayah Pulau Jawa-Bali diperlukan sinergisasi dan sinkronisasi regulasi melalui strategi berikut:

- a. Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. Membuat regulasi terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kepada administrator kawasan-kawasan pertumbuhan;
- c. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, penanaman modal.

7.5.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

7.5.2.1 Pengembangan Kawasan Perkotaan

Arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Jawa-Bali diprioritaskan pada percepatan keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa dengan kota, melalui Penguatan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) melalui peningkatan efisiensi pengelolaan 5 Kawasan perkotaan metropolitan yaitu: kawasan perkotaan Jabodetabek, Bandung Raya, Kedungsepur, Gerbangkertasusila, dan Sarbagita (lihat tabel 7.4) sebagai pusat kegiatan skala global dan pusat kegiatan nasional (PKN) dan pembangunan 1 Kota Baru publik yang terpadu dan mandiri (lihat tabel 7.5). Kebijakan pembangunan kawasan perkotaan di Wilayah Jawa-Bali dilakukan melalui berbagai strategi, sebagai berikut:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

- a. Meningkatkan efisiensi pengelolaan kawasan perkotaan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang), Kedungsepur (Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Kota Ungaran (Ibukota Kab. Semarang), Kab. Demak, Purwodadi), Gerbangkertasusila (Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Mojekerto, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kota Mojekerto), dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Sarbagita (Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan) dalam rangka mempercepat perannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan keberlangsungan lingkungan;
- b. Mengoptimalkan simpul transportasi logistik khususnya transportasi darat (kereta api) untuk Jawa bagian selatan untuk meningkatkan konektivitas antar PKN, PKW, dan PKL di sekitarnya serta mengurangi beban Jawa bagian utara;
 - c. Meningkatkan kapasitas simpul transportasi dan mengembangkan jaringan Pelabuhan pada kota-kota pelabuhan, untuk mengefisienkan jalur logistik antarkeulauan;
 - d. Mengembangkan industri pengolahan yang terintegrasi dengan keberadaan pusat pendidikan serta mendukung koridor ekonomi Jawa Bali;
- 2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman pada kawasan metropolitan dan kota sedang di luar Jawa termasuk kawasan perbatasan, kepulauan, dan pesisir**
- a. Menyediakan hunian vertikal serta menerapkan konsep *compact city* dalam rangka efisiensi lahan di kota besar dan metropolitan;
 - b. Mengembangkan jaringan sanitasi (pengolahan sampah dan air limbah) melalui sistem pengumpulan secara komunal di kota sedang dan mengarahkan pengolahan terpusat untuk kota besar dan metropolitan;
 - c. Menyediakan saluran air minum perpipaan yang terintegrasi dengan kawasan permukiman, dan mengembangkan infrastruktur yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air kota;
 - d. Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan ROD (Rail Oriented Development) di kota metropolitan untuk optimalisasi dan efisiensi kegiatan transportasi masyarakat serta lahan perkotaan;
 - e. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi massal perkotaan yang berada diatas (*upperground*) atau dibawah tanah (*underground*) secara terintegrasi dan multimoda sesuai dengan tipologi dan kondisi geografisnya;
 - f. Menyediakan ruang publik dan fasilitas umum yang nyaman sesuai dengan kebutuhan pejalan kaki dan pengendara sepeda serta menyediakan ruang parkir terintegrasi multimoda dan antar moda (park and ride) untuk mengurangi kemacetan;
 - g. Mengembangkan sarana prasarana transportasi pengangkutan baik darat, laut, maupun udara untuk mendukung arus perpindahan logistik Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan industri manufaktur dan pengolahan yang mampu mengakomodasi pasar rakyat termasuk kegiatan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta bertaraf internasional;

- h. Meningkatkan pelayanan kesehatan bertaraf internasional serta mengembangkan upaya preventif dan kuratif dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan perkotaan;
- i. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan laboratorium riset yang menunjang pembangunan kota serta terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja serta melalui pembangunan techno park;
- j. Meningkatkan keamanan lingkungan permukiman di perkotaan dengan memperkuat modal sosial masyarakat perkotaan untuk pencegahan kejadian kriminalitas dan konflik sosial antar kelompok masyarakat; dan
- k. Menyediakan peraturan yang memuat insentif dan disinsentif dalam pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)

3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

- a. Mengembangkan jalur hijau yang membatasi fisik kota inti dan kota satelit disekitarnya untuk mengimbangi pertumbuhan kota secara ekspansif yang tidak terkendali (*Urban sprawl*) dan pertumbuhan menerus (*konurbasi*);
- b. Menetapkan aturan dan prosedur pemanfaatan ruang kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui *land use planning* dan *building regulation* sebagai dasar perijinan dan pemanfaatan lahan;
- c. Memberikan insentif dan disinsentif bagi perencanaan dan pembangunan kota, sesuai dengan aturan perundangan mengenai tata ruang dan pemanfaatan tanah perkotaan yang berlaku;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana (*urban resilience*);
- e. Mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijau melalui: *green transportation*, *green openspace* (ruang terbuka hijau), *green waste* (pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R), *green water* (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan *green energy* (pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan) untuk pengurangan tingkat pencemaran di darat, laut, dan udara, pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan daur ulang, serta pengembangan kegiatan perekonomian kota yang berwawasan lingkungan (*green economy*).



4. Perwujudan Kota Cerdas dan Daya Saing Kota

- a. Mengembangkan perekonomian dengan membangun pencitraan kota (*city branding*) memanfaatkan produk dan sumber daya manusia unggulan, serta arsitektur perkotaan (*urban design*), berdasarkan karakter sosial budaya lokal;
- b. Meningkatkan Peningkatan kapasitas dan kemampuan inovasi Sumber Daya Manusia dalam kewirausahaan;
- c. Mengembangkan peran layanan sistem informasi industri, produk dan pasar dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian kota (*e-commerce*) serta mengembangkan pasar keuangan dalam bentuk penyediaan kredit lunak kepada industri kecil, koperasi dan UMKM;
- d. Meningkatkan penggunaan TIK dalam seluruh sektor (*e-governance, e-commerce, e-budgeting, e-procurement*, dan lain-lain); dan
- e. Optimalisasi pasar melalui pengaturan jalur distribusi logistik dari dan keluar kota dan kerjasama dengan daerah lain.

5. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

- a. Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam pembangunan perkotaan dan birokrasi pemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota berkelanjutan;
- b. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola kota berkelanjutan, baik melalui kota layak dan nyaman, kota hijau, maupun kota cerdas, melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara bersikembungan;
- c. Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha bagi para pelaku ekonomi termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- d. Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota dan kawasan perkotaan metropolitan, untuk mewujudkan kota berkelanjutan;
- e. Mengembangkan dan menyediakan pusat data dan informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses;
- f. Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialog perencanaan dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan, maupun dalam pembangunan kota berkelanjutan, seperti: pembangunan infrastruktur perkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruang kota; dan
- g. Mengembangkan lembaga bantuan teknis dan pembiayaan infrastruktur perkotaan.

7.5.2.2 Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, arah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan di Wilayah Jawa-Bali adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan diarahkan pula untuk membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi perdesaan mandiri pada 4 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.4. Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, serta pulau-pulau kecil terluar di Wilayah Jawa-Bali akan dilakukan:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografisnya

- a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan dan permukiman di desa tertinggal dan berkembang;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bendungan dan jaringan irigasi sesuai karakteristik lokal dengan memperhatikan konservasi air di daerah hulu (*water catchment area*);
- c. Meningkatkan jaringan sanitasi dengan pengembangan instalasi pengolahan air limbah;
- d. Mengembangkan terminal dan moda transportasi yang memperlancar akses dari maupun menuju desa;
- e. Menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana telekomunikasi (*Internet dan Base Transceiver Station*).

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi

- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha dengan memperhatikan karakteristik dan potensi desa;
- b. Mengembangkan dan menata pasar-pasar desa;
- c. Memfasilitasi pengelolaan BUMDesa;
- d. Mendukung terwujudnya desa mandiri benih dengan meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana produksi (benih, pupuk, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasi nelayan), pasca panen (sistem logistik), pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, dan jaminan sosial;
 - f. Meningkatkan keberdayaan petani dan nelayan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (bio-energi, biofloc);
 - g. Memberikan jaminan terhadap pasokan energi bagi kegiatan ekonomi nelayan;
- 3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi**
- a. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;
 - b. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, melalui fasilitasi dan pendampingan berkelanjutan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan desa;
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;
 - d. Memperkuat kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan;
 - e. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI);
 - f. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bidang kewirausahaan berbasis potensi lokal
- 4. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan**
- a. Mensosialisasikan peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa;
 - b. Menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana pemerintahan desa;
 - c. Meningkatkan kapasitas pemerintah desakapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa; (iii) Pelayanan publik dan administrasi pemerintahan desa; (iv) Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital; (v) penataan desa;
 - d. Mengembangkan sistem pelayanan desa berbasis internet;

- e. Memfasilitasi dan mengembangkan data dan sistem informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa;
- f. Memfasilitasi kerjasama antar desa.

5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi

- a. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan, serta menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
- b. Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam gerakan penghijauan dan menjaga kelestarian kawasan resapan air;
- c. Mengembangkan lahan sawah baru untuk meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di wilayah Jawa Barat Selatan.
- d. Menjamin hak desa-desa dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi sosial budaya desa-desa;
- e. Memfasilitasi masyarakat desa dalam penyediaan listrik secara mandiri dengan sumber energi terbarukan (tenaga surya, tenaga air, mikro hidro, dll);
- f. Memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan limbah organik maupun non-organik;
- g. Merehabilitasi dan konservasi daerah pesisir utara Pulau Jawa.

6. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan termasuk kawasan transmigrasi Untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota

- a. Mendukung perwujudan sentra industri peternakan modern, sentra industri pertanian organik maupun non-organik (padi, jagung, kedelai) di kawasan Cianjur, Pandeglang, Pamekasan, Sampang, Salamandeg Barat, Salamandeg Timur, Kerambitan, sentra industri perikanan tangkap di kawasan Muncar;
- b. Fasilitasi masyarakat dalam mengembangkan usaha jasa dan perdagangan yang mendukung sektor pariwisata;
- c. Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran informasi pasar;
- d. Peningkatan peran lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, bank khusus pertanian, BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya dalam pengembangan ekonomi perdesaan;
- e. Fasilitasi peningkatan kesadaran

7.5.2.3 Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Jawa-Bali

Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Jawa-Bali diarahkan dengan memperkuat sedikitnya 4 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu kawasan Cibaliung dan Sekitarnya (Prov. Banten), Pamekasan dan sekitarnya (Prov. Jawa Timur), Banyuwangi dan sekitarnya (Prov. Jawa Timur), serta Tabanan dan sekitarnya (Prov. Bali). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata. Arah kebijakan dan strategi peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Jawa-Bali adalah sebagai berikut:

- 1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau**
 - a. Mempercepat pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal;
 - b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jalan Lintas Pulau Madura, Jalan Lintas Pulau Bali, jalan bebas hambatan dan jaringan kereta api di Pulau Jawa, Pelabuhan Regional Banyuwangi, Bandara Banten Selatan dan Banyuwangi, serta angkutan penyebrangan yang melayani Pulau Madura dan Pulau Bali;
 - c. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah.

- 2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, dan pariwisata.**
 - a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di Kawasan Cibaliung, Pamekasan, dan Tabanan-Bali, serta sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan di Kawasan Banyuwangi;
 - b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasarana produksi;
 - c. Mengembangkan Pengembangan daya tarik wisata bahari dan sejarah di Kawasan Pariwisata Kuta-Sanur-Nusa Dua melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur penunjang;
 - d. Membangun bank pertanian dan perikanan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan.
 - e. Mengembangkan *Techno Park* berbasis pertanian dan perikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk

meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa.

3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan desa-kota

- a. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien;
- b. Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah;
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalam tata kelola ekonomi lokal;
- d. Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama;
- e. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektor pertanian dan perikanan;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian daerah resapan serta mitigasi bencana, terutama di Kawasan Perdesaan Cibaliung, Pamekasan, Banyuwangi, dan Tabanan;

Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 7.2 dan Tabel 7.4 - Tabel 7.5.

TABEL 7.4.
LOKASI PRIORITAS KAWASAN STRATEGIS NASIONAL PERKOTAAN
SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI JAWA-BALI

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
K1	Kawasan perkotaan metropolitan Bandung Raya	Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang mendukung pertumbuhan wilayah nasional dan memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan atau kota-kota ditingkat internasional.
K2	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang	Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang berorientasi pada meningkatkan spesialisasi fungsi jasa pendidikan, teknologi sistem informasi, industri, dan dan pariwisata perkotaan (<i>urban tourism</i>)
K3	Kawasan Perkotaan Metropolitan Kedungsepur:	Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
	Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Unggaran (Ibukota Kab. Semarang), Kab. Demak, Purwodadi (Ibukota Kab. Grobogan)	yang berfungsi mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata, dan industri wilayah Jawa Tengah
K4	Kawasan Perkotaan Metropolitan Gerbang Kertosusila: Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Mojekerto, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kota Mojekerto	Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah Indonesia bagian Timur
K5	Kawasan Perkotaan Metropolitan Sarbagita: Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan	Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang mendorong pertumbuhan wilayah disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional

Sumber : Bappenas, 2014

TABEL 7.5.
LOKASI PEMBANGUNAN KOTA BARU DI JAWA-BALI

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
B1	Kota Maja (Banten)	Sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (<i>urban sprawl</i>) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya.

Sumber : Bappenas, 2014; Lokasi Prioritas: Data Sementara

TABEL 7.6.
LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KETERKAITAN DESA-KOTA UNTUK MEMPERKUAT PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA-BALI

Kode	Lokasi Kawasan	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
D1	Cibaliung dan sekitarnya (Kab. Pandeglang, Prov. Banten)	<ul style="list-style-type: none"> • Perkotaan Cibaliung • Kawasan Agropolitan (Kedelai): Pandeglang 	• Kedelai
D2	Pamekasan dan	• PKW Pamekasan	• Jagung

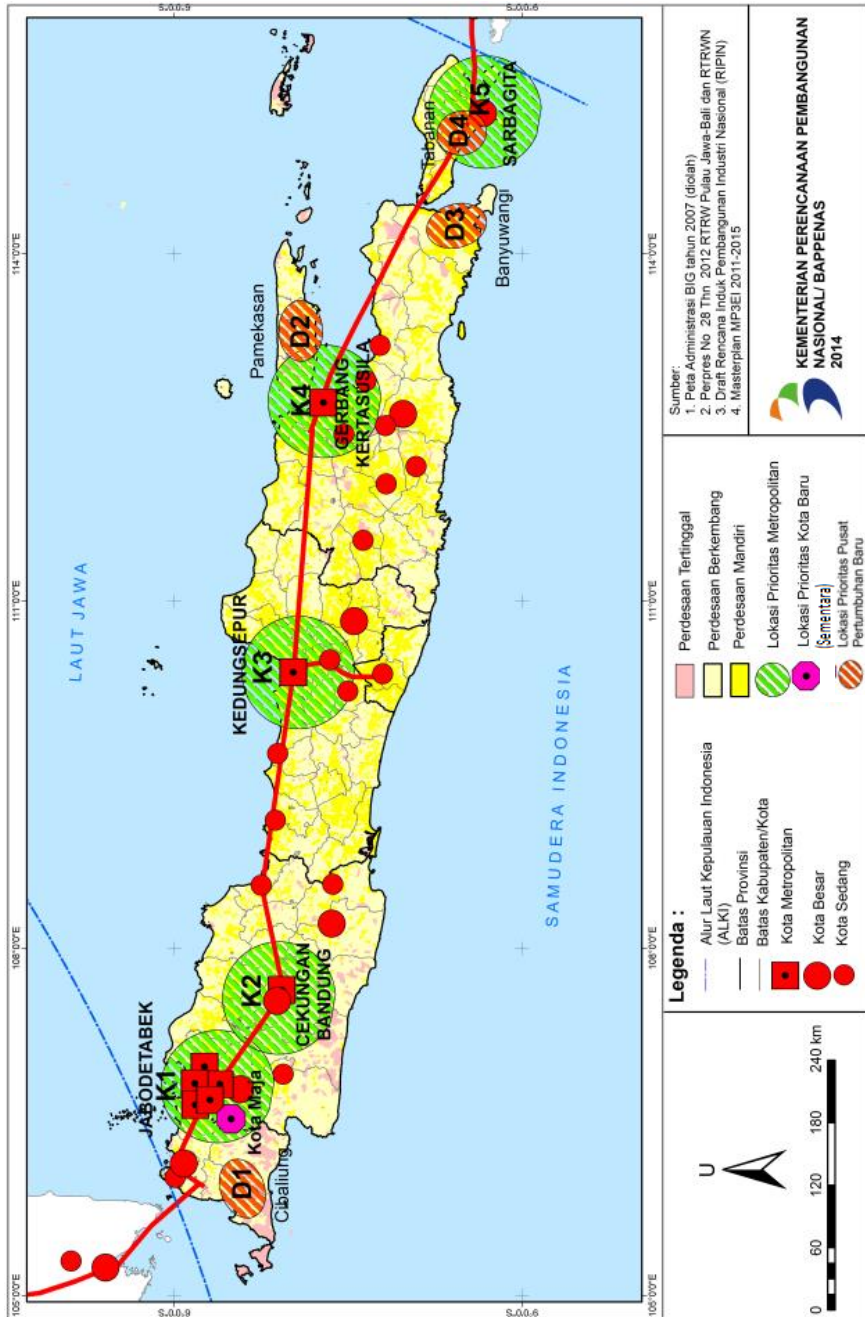


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kode	Lokasi Kawasan	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
	sekitarnya (Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Prov. Jatim)	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan Agropolitan (Jagung): Pamekasan, Sampang• Kota Otonom Terdekat : Surabaya	<ul style="list-style-type: none">• Sapi
D3	Banyuwangi dan sekitarnya (Kab. Banyuwangi, Prov. Jatim)	<ul style="list-style-type: none">• PKW Banyuwangi• Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap: Muncar• Kawasan Tertinggal: Pujer	<ul style="list-style-type: none">• Perikanan Tangkap
D4	Tabanan dan sekitarnya (Kab. Tabanan, Prov. Bali)	<ul style="list-style-type: none">• Perkotaan Tabanan• Kawasan Agropolitan: Salamandeg Barat, Salamandeg Timur, Kerambitan• Kawasan Pariwisata: KSPN Kuta-Sanur-Nusa Dua• Kota Otonom Terdekat : Denpasar	<ul style="list-style-type: none">• Padi• Sapi• Wisata Bahari• Wisata Sejarah

Sumber : Bappenas, 2014

GAMBAR 7.2
PETA LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
WILAYAH JAWA-BALI



7.5.3 Pengembangan Daerah Tertinggal

Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Jawa-Bali difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang **berbasis industri dan jasa** yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelayanan Publik Dasar

Mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan publik di daerah tertinggal Wilayah Jawa-Bali dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

- 1) Pemerataan distribusi tenaga pendidik diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa;
- 2) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa;
- 3) Penyelenggaraan sekolah satu atap di daerah tertinggal (SD, SMP, SMA/SMK);
- 4) Pembangunan sekolah berasrama di daerah tertinggal;
- 5) Pengembangan asrama sekolah;
- 6) Pengembangan pendidikan kesetaraan (paket A,B,C);
- 7) Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untuk daerah tertinggal.

b. Bidang Kesehatan

- 1) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa;
- 2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan diutamakan di Pulau Madura, bagian barat dan timur Pulau Jawa;
- 3) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di daerah tertinggal;
- 4) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerah tertinggal;
- 5) Pengembangan telemedis di daerah tertinggal.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah tertinggal secara terpadu dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritas program sebagai berikut:

- a. Pengembangan kegiatan perekonomian sub-sektor perikanan laut, garam, dan produk olahan laut diutamakan di Pulau Madura;
- b. Pengembangan perekonomian masyarakat pada sub-sektor perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura diutamakan di barat dan timur Pulau Jawa;
- c. Menyusun rencana induk dan rencana aksi pengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri perkebunan, tanaman hortikultura, dan kelautan;
- d. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya sub-sektor pangan, perkebunan, dan kawasan pesisir;
- e. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan *Cold Storage* di setiap sentra perikanan;
- f. Pengembangan sentra kuliner pengolahan hasil laut di wilayah pesisir;
- g. Pengembangan kelembagaan mikro;
- h. Pengembangan koperasi simpan pinjam;
- i. Pemberian skema kredit yang afirmatif bagi petani, nelayan, peternak;
- j. Pemberian bantuan bibit pertanian dan perkebunan;
- k. Pengembangan jaringan irigasi;
- l. Pembangunan embung untuk mendukung jaringan irigasi;
- m. Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen;
- n. Pengembangan pasar kecamatan.

3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas

Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pada peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah, dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi di desa-desa terisolir khususnya di Pulau Madura, bagian timur, dan bagian barat Pulau Jawa;
- b. Penyediaan dan pembangunan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api, khususnya di Kabupaten Pandeglang dan Lebak;
- c. Pengembangan pelabuhan penyebrangan antarpulau;

- d. Pembangunan sarana transportasi air di desa-desa terisolir bagian utara Pulau Jawa;
- e. Pengembangan bandara perintis di Pulau Madura.

4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan pemangku kepentingan pembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerah yang terintegrasi untuk menunjang pengelolaan industri dan jasa. Strategi ini meliputi aspek peraturan perundangan, tata kelola, SDM, rumusan dokumen kebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pemenuhan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan, listrik, dan telekomunikasi di daerah tertinggal dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;
- b. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pengembangan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat pada perkebunan, pangan-hortikultura, dan perikanan laut (pesisir) dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;
- c. Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda;
- d. Peningkatan teknologi pengolahan limbah hasil industri;
- e. Pengembangan pusat informasi pemasaran serta teknologi, pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM pelaku usaha khususnya sub-sektor perkebunan dan perikanan laut.
- f. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan.

5. Penguatan Regulasi dan Insentif

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, perlu adanya evaluasi terhadap harmonisasi dan regulasi agar afirmasi terhadap daerah tertinggal secepatnya dapat direalisasikan melalui prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- b. Penyusunan Strategi Daerah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antar-SKPD dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah;
- d. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal;
- e. Tunjangan khusus penyuluh pertanian.

6. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan

Pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM.

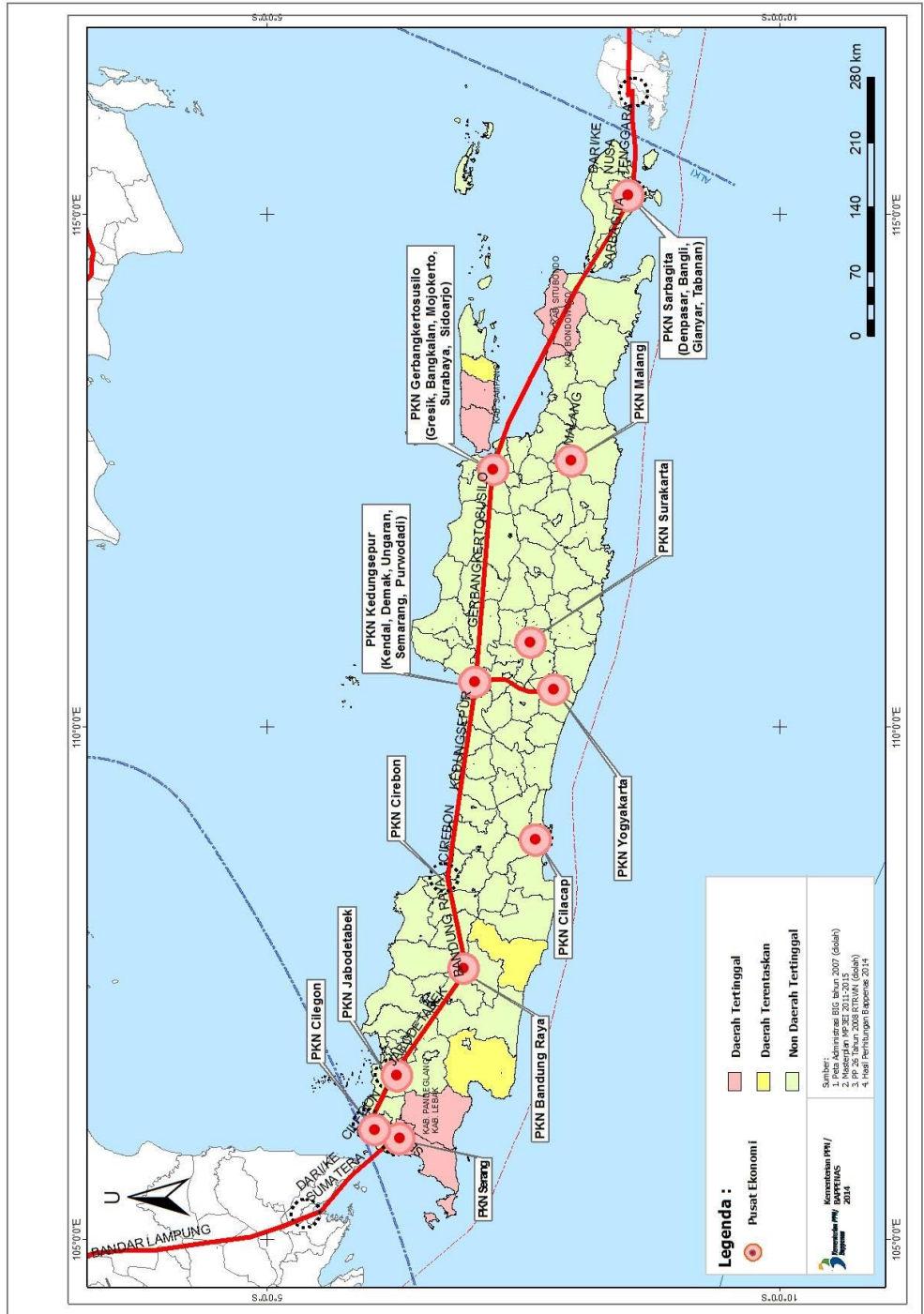
7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

Mendukung pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Jawa-Bali terdiri dari 7 provinsi dengan total 128 kabupaten/kota, dimana 7,03 persen atau 9 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tertinggal di wilayah ini sebesar 67,51, berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78 persen, jauh dari target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal Wilayah Jawa-Bali masih sebesar 15,82 persen, jauh dari target Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen.

Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Jawa-Bali telah ditetapkan 9 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 diindikasikan terdapat 3 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di Jawa-Bali diperkirakan sebanyak 6 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 6 kabupaten tertinggal dapat terentaskan.

GAMBAR 7.3
PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH PULAU JAWA - BALI 2015-2019



TABEL 7.7
PROFIL DAERAH TEETINGGAL WILAYAH JAWA-BALI

NO.	KABUPATEN	PENGANGGURAN (%)	PRASARANA JALAN TIDAK MANTAP (%)	ELEKTRIFIKASI (%)	DESA PENGGUNA AIR BERSIH UNTUK MINUM/MEMASAK (%)	KETERSEDIAAN SARANA INFORMASI DAN KOMUNIKASI		RATA-RATA LAMA SEKOLAH (Th)	SARANA RISIK		RATA RATA JARAK PUSKESMAS (km)	RATA RATA JARAK PUSKESMAS (km)	KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN			AKSESIBILITAS KE TENAGA KESEHATAN (km)	Jumlah APARATUR DAERAH BERBASISRUKUN PENDIRIKAN	RATA-RATA JARAK KE SARANA PEMERINTAHAN	AKSESIBILITAS SARANA RISIK KEGIATAN EKONOMI						
						DESA TIDAK TERJANGKAU SINYAL SELULER (%)	DESA TIDAK TERJANGKASARAN TVRI (%)		RATA-RATA JARAK SD (km)	RATA-RATA JARAK SMP (km)			RATA-RATA JARAK DOKTER/KECAMATAN	RATA-RATA KETERSEDIAAN BIDAN/DISA	RATA-RATA KETERSEDIAAN PARAMEDIS/KECA MATAN				RATA-RATA JARAK PRAKTER DOKTER	RATA-RATA JARAK PRAKTER BIDAN	RATA-RATA JARAK KE KANTOR KECAMATAN (km)	RATA-RATA JARAK KANTOR PEMERINTAHAN	RATA-RATA JARAK KANTOR PEMERINTAHAN	RATA-RATA JARAK PASAR (km)	RATA-RATA JARAK LEMBAGA KEUANGAN (BANK UMUM) (km)
A	JAWA BARAT	9,40	49,42	99,46	51,09	16,56	35,31	7,18	0	3,52	4,62	3,35	4,71	1,51	15,59	5,89	1,11	96,15	1,05	2,67	0,12	5,54	47,05	9,17	8,01
1	SUKABUMI*	10,10	70,32	99,42	47,30	18,50	36,75	6,97	0	3,81	4,74	3,01	3,7	1,5	11,9	5,12	1,08	96,53	1,01	2,26	0,20	5,64	56,77	11,69	8,19
2	GARUT*	8,69	28,51	99,50	54,87	14,62	33,87	7,39	0	3,24	4,50	3,69	5,8	1,5	19,3	6,67	1,14	95,78	1,09	3,08	0,04	5,44	38,04	6,65	7,82
B	JAWA TIMUR	4,62	28,88	99,67	65,39	23,61	17,18	5,76	0,48	3,57	4,50	3,41	3,15	1,57	20,14	6,63	2,00	93,32	1,15	5,14	0,39	6,23	22,66	4,70	8,71
3	BONDOWOSO	4,01	17,79	99,93	64,98	36,99	32,42	5,94	1	3,30	3,56	2,37	2,7	1,3	23,5	4,62	1,44	94,05	0,75	4,97	0,23	3,79	16,71	4,22	5,63
4	SITUBONDO	4,43	53,75	99,75	43,94	23,53	36,03	6,28	0	4,13	4,92	2,61	2,7	1,8	14,0	6,36	0,51	93,47	0,98	5,26	0,28	5,75	27,28	7,92	6,21
5	BANGKALAN	4,41	26,55	99,28	70,96	25,98	8,90	5,75	0,92	4,21	4,79	3,03	4,1	1,4	16,8	5,29	0,99	94,14	0,85	4,68	0,33	9,64	27,57	4,09	12,40
6	SAMPANG	4,84	30,86	99,38	61,97	22,58	6,45	4,39	0	3,24	5,08	3,46	2,1	1,6	16,6	7,49	1,10	93,43	1,24	4,79	0,54	6,00	25,21	3,43	11,05
7	PAMEKASAN*	5,43	15,47	100,00	85,09	8,99	2,12	6,42	0,5	2,98	4,17	5,60	4,2	1,7	29,7	9,37	5,97	91,51	1,95	5,97	0,57	5,97	16,43	3,87	8,25
C	BANTEN	17,19	49,44	97,89	41,29	25,74	27,00	6,67	0,67	3,39	5,56	8,43	1,75	1,36	10,28	11,14	2,67	94,76	1,13	3,92	0,19	6,55	51,86	7,43	14,10
8	PANDEGLANG	14,08	51,67	98,89	36,22	24,48	23,28	7,04	0	2,92	4,74	7,50	1,6	1,5	9,6	9,39	1,94	94,06	1,27	4,47	0,21	4,99	42,65	5,50	10,35
9	LEBAK	20,29	35,21	96,89	46,37	26,96	30,72	6,29	1,33	3,85	6,39	9,36	1,9	1,2	10,9	12,88	3,39	95,46	0,98	3,38	0,17	8,10	60,80	9,35	17,86
	RATA RATA WILAYAH	10,40	40,6	99,30	57,67	21,97	23,39	6,24	0,38	3,49	4,90	5,06	3,20	1,48	15,34	7,88	1,93	94,75	1,11	3,91	0,23	6,11	40,52	7,10	10,27
	RATA RATA DATANG	5,41	55,41	69,27	52,29	47,97	78,18	7,31	1,35	1,34	14,2	12,96	8,77	1,06	39,58	34,00	34,36	92,28	2,48	5,02	0,22	12,61	53,97	25,02	45,02
	RATA RATA NASIONAL	7,24	48,78	83,18	66,55	32,11	48,63	7,9	8,73	7,97	8,91	7,6	11,2	1,12	37,46	18,51	16,69	89,85	3,03	6,70	0,42	10,32	48,25	14,83	24,92

Sumber: BPS 2012, Pokes 2011
Keterangan: *) Kabupaten terestikasi (memerit Kepmen PDT No. 141 Tahun 2014 tentang Peneleapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terestikasi Tahun 2014

7.5.4 Penanggulangan Bencana

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia setelah Amerika Serikat; dan lebih dari 50 persen jumlah penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Jumlah penduduk miskin di Indonesia diwakili Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga potensi kerentanan sosial terhadap kejadian bencana sangat tinggi di Pulau Jawa, dibandingkan pulau-pulau lainnya. Berdasarkan data dari BNPB, bencana alam yang paling dominan berpotensi terjadi di Wilayah Jawa-Bali adalah banjir, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung api, tsunami. Tingginya risiko bencana alam di wilayah Jawa-Bali dapat disebabkan tingkat ancaman yang tinggi, potensi jumlah penduduk terpapar tinggi dan potensi kerugian ekonomi tinggi, mengingat karakteristik demografi dan pertumbuhan di Jawa-Bali yang lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya. Disamping itu, kapasitas penanggulangan bencana yang belum merata, baik kelembagaan, peringatan dini, mitigasi maupun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Berdasarkan DIBI yang merekam kejadian bencana tahun 1815-2014 untuk berbagai kejadian bencana di Pulau Jawa-Bali telah mengakibatkan 93.482 orang meninggal dunia, 207.969 orang luka-luka, 2.841 orang hilang, 4.966.943 orang mengungsi dan 506.643 rumah hancur/rusak.

Untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan meminimalisir dampak bencana di masa mendatang, maka arah kebijakan penanggulangan bencana di wilayah Jawa-Bali adalah mengurangi risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap bencana. Strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah sebagai berikut:

1. **Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan**, melalui:
 - a. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 untuk kota sasaran;
 - b. Pemanfaatan kajian dan peta risiko dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) berdasarkan kajian dan peta risiko bencana dan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD Kab/Kota;
 - d. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota sasaran sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana banjir, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api;
- f. Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.

2. Penurunan kerentanan terhadap bencana, melalui:

- a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
- b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi kepada masyarakat di kabupaten/kota risiko tinggi;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat;
- d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam;
- e. Pemeliharaan dan penataan lingkungan disekitar daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, Citarum, Bengawan Solo, Cisadane dan daerah rawan bencana alam lainnya;
- f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, melalui:

- a. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami di kabupaten/kota di pesisir selatan Pulau Jawa Bali yang rawan bencana tsunami dan memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- b. Penyediaan sistem pemantauan gunung api di Cilegon, Tasikmalaya, Wonosobo, Magelang, Kediri, Blitar, Klaten, Sleman, Bangli, Karangasem dan memastikan dapat berfungsi dengan baik;
- c. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- d. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan banjir;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana yang difokuskan pada daerah yang berisiko tinggi bencana di Pulau Jawa-Bali;
- f. Penguatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, di Wilayah Jawa-Bali yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil;
- g. Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana di kabupaten/kota risiko tinggi bencana;
- h. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan banjir.

TABEL 7.8.
PROFIL KERAWANAN DAN RISIKO PKN, PKW DAN PKSN
DI WILAYAH JAWA-BALI

Wilayah	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Kelas Multi Risiko tingkat Kabupaten/Kota
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jawa-Bali		
Kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)	DKI Jakarta: tinggi untuk banjir Kota Bogor : tinggi untuk banjir dan Longsor Kota Depok: tinggi untuk banjir, cuaca ekstrem Kota Tangerang: tinggi untuk banjir, cuaca ekstrem Kab. Tangerang: tinggi untuk banjir, cuaca ekstrem Kota Bekasi; tinggi untuk banjir, cuaca ekstrem Kab. Bekasi tinggi untuk banjir, cuaca ekstrem	DKI Jakarta: sedang Kota Bogor : tinggi Kota Depok: sedang Kota Tangerang: sedang Kab. Tangerang: tinggi Kota Bekasi: sedang Kab. Bekasi : tinggi
Bandung Raya	Kota Bandung: tinggi untuk banjir dan tanah longsor. Bandung Barat: tinggi untuk gempabumi.	Kota Bandung: Tinggi Kab. Bandung Barat : Tinggi
Kawasan Perkotaan Kedungsepur (Kendal, Demak, Semarang, Ungaran, Purwodadi)	Kota Semarang: tinggi untuk banjir dan tanah longsor. Kab. Kendal: tinggi untuk banjir dan cuaca ekstrem Kab. Demak: tinggi untuk banjir, cuaca ekstrem, abrasi	Kota Semarang: Tinggi Kab. Kendal: tinggi Kab. Demak: tinggi Kab. Ungaran: data belum tersedia Kab. Purwodadi: data belum tersedia



Wilayah	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Kelas Multi Risiko tingkat Kabupaten/Kota
	Kab. Ungaran: data belum tersedia Kab. Purwodadi: data belum tersedia	
Malang	Tinggi untuk ancaman : banjir, gempabumi	Kab.Malang: Tinggi
Cilegon	Kota Cilegon : tinggi untuk letusan gunung api	Kota Cilegon: Tinggi
Cirebon	Kab. Cirebon : tinggi banjir, tanah longsor.	Kota/Kab Cirebon: Tinggi
Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik,Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan)	Gresik : tinggi untuk banjir, tanah longsor, angin topan. Bangkalan : tinggi untuk banjir Mojokerto : tinggi untuk banjir dan tanah longsor Kota Surabaya : tinggi untuk cuaca ekstrim Sidoarjo : tinggi untuk banjir Lamongan : tinggi untuk banjir.	<ul style="list-style-type: none"> • Gresik: Tinggi • Bangkalan: Tinggi • Kota/Kab Mojokerto: Tinggi • Kota Surabaya: Tinggi • Sidoarjo: Tinggi • Lamongan: Tinggi
Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan)	Denpasar : tinggi untuk banjir, cuaca ekstrim Badung : tinggi untuk cuaca ekstrim, abrasi. Gianyar : tinggi untuk tanah longsor, banjir.	<ul style="list-style-type: none"> • Denpasar: Tinggi • Badung: Tinggi • Gianyar: Sedang • Tabanan: Tinggi
Serang	Tinggi untuk ancaman : banjir,	Tinggi
Cilacap	Tinggi untuk ancaman: banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kebakaran.	Cilacap: Tinggi
Yogyakarta	Tinggi untuk ancaman: gempabumi	Yogyakarta: Tinggi
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Jawa-Bali		
Sukabumi	Tinggi untuk ancaman : banjir, gempa, kebakaran.	Tinggi
Tasikmalaya	Tinggi untuk ancaman : banjir, gempa, letusan gunung api.	Tinggi
Pekalongan	Kab. Pekalongan : banjir, abrasi, tanah longsor, cuaca ekstrim, kebakaran	Kota/Kab Pekalongan: Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Wilayah	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Kelas Multi Risiko tingkat Kabupaten/Kota
	Kota Pekalongan : tanah longsor, kebakaran, banjir.	
Wonosobo	Tinggi untuk ancaman: banjir, tanah longsor, gempabumi, letusan gunung api.	Sedang
Kebumen	Tinggi untuk ancaman : banjir dan tanah longsor, tsunami.	Kebumen: Tinggi
Magelang	Tinggi untuk ancaman : tanah longsor, letusan gunung api, gempa bumi, banjir.	Magelang: Sedang
Boyolali	Tinggi untuk ancaman: banjir, gempa bumi.	Boyolali: Tinggi
Tuban	Tinggi untuk ancaman: Banjir	Tuban: Tinggi
Bojonegoro	Tinggi untuk ancaman: Banjir	Bojonegoro: Tinggi
Pacitan	Tinggi untuk ancaman: Banjir dan tanah longsor	Pacitan: Tinggi
Kediri	Tinggi untuk ancaman: letusan gunung api	Kota/Kab Kediri: Tinggi
Jember	Tinggi untuk ancaman: Banjir dan tanah longsor, angin topan	Jember: Tinggi
Banyuwangi	Tinggi untuk ancaman: gempabumi, tsunami, angin topan, kekeringan	Banyuwangi: Tinggi
Blitar	Tinggi untuk ancaman: letusan gunung api, gempa bumi	Kota/Kab Blitar: Tinggi
Madiun	Tinggi untuk ancaman: angin topan, kekeringan	Kota/Kab Madiun: Tinggi
Probolinggo	Tinggi untuk ancaman: Banjir	Kota/Kab Probolinggo: Tinggi
Singaraja	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor	Kab Buleleng: Tinggi
Indramayu	Tinggi untuk ancaman: banjir,	Indramayu: Tinggi
Tegal	Tinggi untuk ancaman: angin topan, kekeringan	Kota/Kab Tegal: Tinggi
Pandeglang	Tinggi untuk ancaman:	Pandeglang: Tinggi

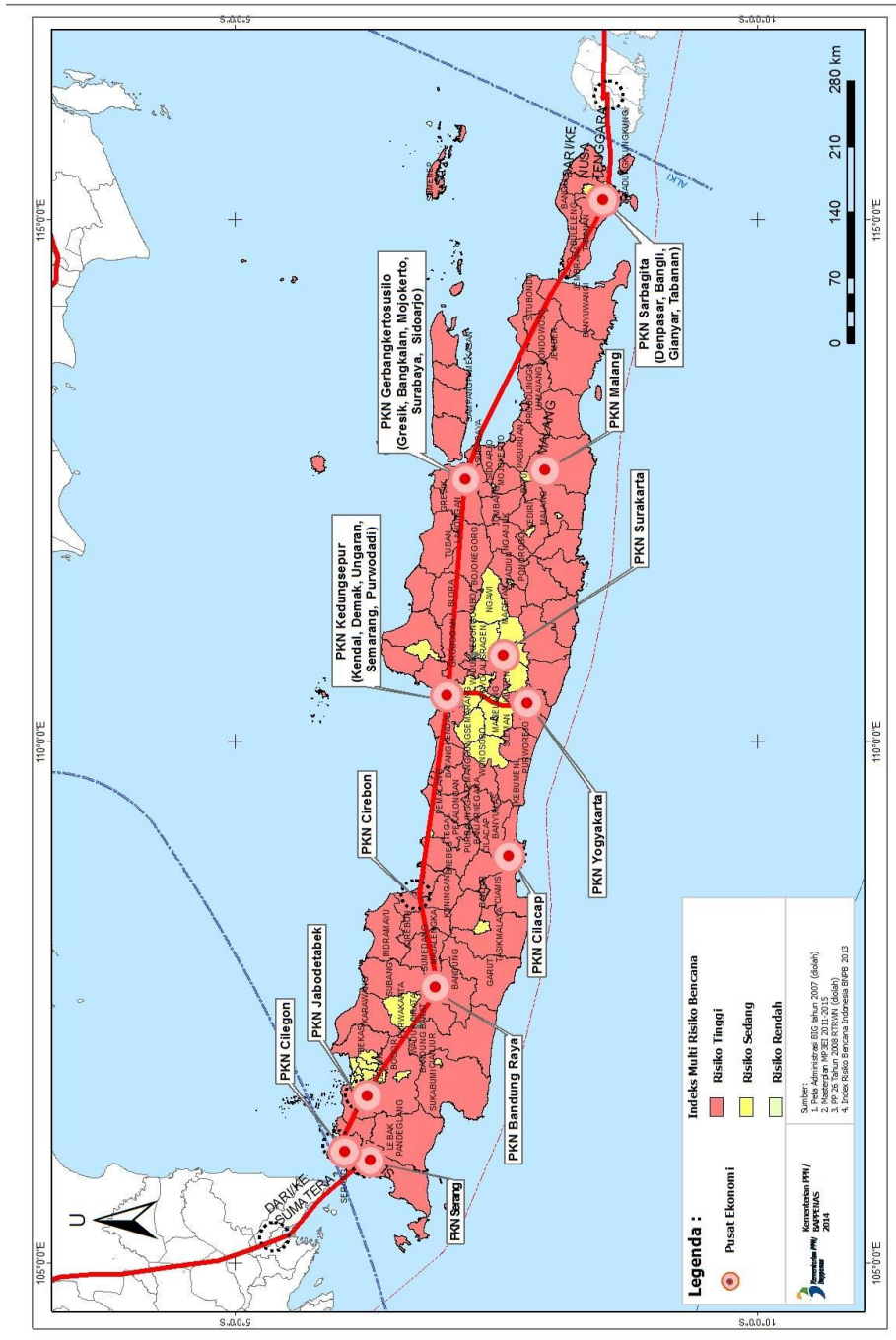


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Wilayah	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Kelas Multi Risiko tingkat Kabupaten/Kota
	banjir dan tanah longsor.	
Kudus	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor.	Kudus: Tinggi
Bantul	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, gempabumi.	Bantul: Tinggi
Klaten	Tinggi untuk ancaman: banjir, tanah longsor, gempabumi, letusan gunung api,	Klaten: Tinggi
Sleman	Tinggi untuk ancaman: gempabumi, letusan gunung api,	Sleman: Tinggi
Mojokerto	Tinggi untuk ancaman: banjir	Kota/Kab Mojokerto: Tinggi
Semarang	Tinggi untuk ancaman: gempabumi, tsunami	Kab Klungkung: Sedang
Negara	Tinggi untuk ancaman: banjir, tanah longsor,	Kab. Jembrana: Tinggi
Pelabuhan Ratu	Tinggi untuk ancaman: banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan	Kab. Sukabumi: Tinggi
Pangandaran	Tinggi untuk ancaman: banjir, tsunami	Kab. Ciamis: Tinggi
Pamekasan	Tinggi untuk ancaman: Banjir	Pamekasan: Tinggi

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014

GAMBAR 7.4
PETA INDEKS RISIKO BENCANA WILAYAHPULAU JAWA - BALI 2015-2019



7.5.5 Penataan Ruang Wilayah Jawa-Bali

A. Arah Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Jawa-Bali

- 1) Kebijakan mewujudkan kawasan perkotaan nasional yang kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana meliputi:
 - a. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar (*urban sprawl*); dan
 - b. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional di kawasan rawan bencana.
- 2) Kebijakan mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan daya saing melalui pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi yang terpadu yang meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan efisiensi ekonomi; dan
- 3) Kebijakan mewujudkan lumbung pangan nasional yang berkelanjutan, meliputi:
 - a. Pemertahanan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai upaya ketahanan pangan nasional dan menekan laju alih fungsi lahan pertanian;
 - b. Pengembangan dan pemertahanan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian untuk tanaman pangan;
 - c. Pengendalian alih fungsi peruntukan lahan pertanian untuk tanaman pangan; dan
 - d. Pengamanan lahan sawah beririgasi teknis agar tidak beralih fungsi ke pemanfaatan lainnya.
 - e. Pengendalian perkembangan fisik kawasan perkotaan nasional untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan.
- 4) Kebijakan mewujudkan peningkatan keterkaitan ekonomi antarpusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan.
- 5) Kebijakan mewujudkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan, meliputi:
 - a. peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30 persen dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
 - b. pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 - c. Implementasi pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas di Pulau Jawa-Bali;
 - d. Perlindungan mata air di Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas di Pulau Jawa-Bali;
 - e. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS;

- f. Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.
- 6) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam rangka menjaga momentum fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
- 7) Kebijakan pengembangan jaringan prasarana wilayah energi, telekomunikasi dan informatika serta prasarana pengelolaan lingkungan.

B. Strategi Penataan Ruang Wilayah Jawa-Bali

I. Struktur Ruang Pulau Jawa-Bali

1. Strategi pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar (*urban sprawl*) meliputi:
 - a. mengendalikan perkembangan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan/atau industri di kawasan perkotaan nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional yang berdekatan dengan kawasan lindung.
2. Strategi pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan efisiensi meliputi:
 - a. mengembangkan dan/atau memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan/atau udara yang menghubungkan antarkawasan perkotaan nasional dan memantapkan koridor ekonomi Pulau Jawa-Bali; dan
 - b. memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat yang meliputi jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi penyeberangan yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan sentra produksi, pelabuhan, dan/atau bandar udara

Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan di Pulau Jawa-Bali pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 7.8



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 7.9
PRIORITAS LOKASI PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN
PULAU JAWA-BALI PERIODE 2015-2019

Provinsi	Pusat Kegiatan dalam RTRWN			
	PKN	PKW	PKSN	
DKI Jakarta	Kawasan Perkotaan Jabodetabek (I/C/3)	Pandeglang (II/B)		
Banten	Serang (I/C/1)	Rangkas Bitung (II/B)		
	Cilegon (I/C/1)			
Jawa Barat	Kawasan Perkotaan Bandung Raya (I/C/3) Cirebon(I/C/1)	Sukabumi (I/C/1)		
		Cikampek – Cikopo (I/C/1)		
		Pelabuhanratu (II/C/2)		
		Indramayu (II/C/1)		
		Kadipaten (II/C/2)		
		Tasikmalaya (I/C/1)		
		Pangandaran (II/C/2)		
Jawa Tengah	Surakarta (I/C/1)	Boyolali (II/B)		
	Kawasan Perkotaan Semarang-Kendal-Demak-Ungaran-Purwodadi (Kedungsepur) (I/C/3)	Klaten (II/C/1)		
		Cilacap (I/C/1)	Salatiga (II/C/1)	
			Tegal (II/C/1)	
	Pekalongan (I/C/1)			
	Kudus (I/C/1)			
	Cepu (II/C/1)			
	Magelang (I/C/1)			
	Wonosobo (II/C/1)			
	Kebumen (II/C/1)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Provinsi	Pusat Kegiatan dalam RTRWN		
	PKN	PKW	PKSN
		Purwokerto (II/C/1)	
DIY	Yogyakarta (I/C/3)		
		Bantul (I/D/1), (II/C/1)	
		Sleman (II/C/1)	
Jawa Timur	Kawasan Perkotaan (Gerbangkertosusila) (I/C/3)	Probolinggo (II/C/1)	
		Malang (I/C/1)	
		Tuban (I/C/1)	
		Kediri (I/C/1)	
		Madiun (II/C/1)	
		Banyuwangi (I /C/1)	
		Jember (II/C/2)	
		Blitar (II/C/2)	
		Pamekasan (II/C/2)	
		Bojonegoro (II/C/2)	
		Pacitan (II/C/2)	
Bali	Kawasan Perkotaan Denpasar-Bangli- Gianyar- Tabanan (Sarbagita) (I/C/1)	Singaraja (I/C/1)	
		Semarapura (II/B)	
		Negara (II/B)	

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014

II. Pengembangan Kawasan Lindung

Strategi terkait Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30 persen dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan kondisi ekosistemnya meliputi:
 - a. Pemertahanan luasan kawasan berfungsi lindung dan merehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Pengendalian dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) kritis;
 - c. Implementasi pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas;
 - d. Perlindungan mata air di Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas;
 - e. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS;
 - f. Pengendalian dan rehabilitasi kawasan lindung di bagian hulu Wilayah Sungai (WS), kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi
2. Pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi: pengembangan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya melalui kerja sama antardaerah untuk kelestarian pemanfaatan sumberdaya alam.
 3. Strategi pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional di kawasan rawan bencana meliputi:
 - a. menetapkan zona-zona rawan bencana beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana di kawasan perkotaan nasional; dan
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan perkotaan nasional yang berpotensi terjadinya bencana.

III. Pengembangan Kawasan Budidaya

1. Strategi pemertahanan lahan pertanian untuk tanaman pangan, termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:
 - a. Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi kegiatan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan.
2. Strategi pengembangan dan pemertahanan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan meliputi:
 - a. Pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan mengendalikan kegiatan budi daya lainnya;
 - b. Pengendalian alih fungsi peruntukan lahan pertanian untuk tanaman pangan; dan
 - c. Pengendalian perkembangan fisik kawasan perkotaan nasional untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Strategi peningkatan keterkaitan ekonomi antarpusat industri industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan meliputi:
 - a. Peningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri; dan
 - b. Peningkatkan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan.

IV. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional

Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dikembangkan 5 (lima) KSN yang mendukung pengembangan wilayah di Pulau Jawa-Bali. Strategi pengembangan KSN di Pulau Jawa-Bali dapat dilihat pada Tabel 7.10.

TABEL 7.10
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DI PULAU
JAWA-BALI

No	KSN	Tipe	Strategi	K/L
1	Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kepentingan Ekonomi	Pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi kawasan berbagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional di Kawasan Perkotaan Sarbagita	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang - Bappenas - Kementerian LH dan Kehutanan - Kemenko Perekonomian
2	Kawasan Perkotaan Kedungsepur		Pemantapan sistem kota-kota secara hierarki dan terintegrasi dalam bentuk perkotaan inti dan perkotaan disekitarnya sesuai dengan fungsinya dan perannya di Kawasan Perkotaan Kedungsepur	
3	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosu sila		Pengembangan kawasan industri di pesisir kawasan perkotaan Gerbangkertosusila	
4	Kawasan Perkotaan Cekungan		Peningkatan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	KSN	Tipe	Strategi	K/L
5	Bandung Kawasan Perkotaan Jabodetabek punjur	Hidup	dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur	

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014

7.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Arah kebijakan pengembangan Wilayah Jawa-Bali yakni peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang mendorong daya saing nasional berbasis industri, lumbung pangan nasional, serta perdagangan dan jasa berskala internasional, dengan strategi:

1. Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan;
2. Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat;
3. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada tiap pemerintah daerah yang terintegrasi dengan manajemen kinerja;
4. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
5. penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah.
6. Peningkatan proporsi belanja modal;
7. Pengembangan variasi pendanaan untuk belanja infrastruktur di daerah, antara lain melalui skema hibah, pinjaman, dan skema obligasi;
8. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penganggaran, salah satunya melalui penciptaan informasi anggaran pemerintah daerah melalui e-government.
9. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line;
10. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah.

7.6 Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

7.6.1 Prioritas Program Pembangunan

7.6.1.1 Provinsi DKI Jakarta

TABEL 7.11
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
PROVINSI DKI JAKARTA

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan jalur lingkaran KA layang (<i>elevated loopleveline</i>) Jabodetabek
2. Pembangunan MRT North-South antara Kampung Bandan – Lebak Bulus
3. Pembangunan MRT East-West
4. Pembangunan jalur KA dari Stasiun Pasoso menuju Dermaga Peti Kemas JICT/KOJA
5. Monorail Jakarta koridor green line (circular & extension line) oleh Pemda DKI Jakarta
6. Pembangunan jalur KA antara Batu Ceper - Bandara Soetta
7. Pembangunan Jalur KA Bandara Soekarno Hatta -Halim
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan BRT Transjakarta*
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pembangunan dermaga Kali Baru Utara (Tahap 1) - New Priok*
2. Pengembangan Terminal Multipurpose di area Reklamasi Ancol Timur
JALAN
1. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Akses Tanjung Priok (E2, E2 A, dan NS) dan Akses Dry Port Cikarang
2. Pembangunan Flyover Dalam Kota (Semanggi, RE Martadinata, Pinang Baris, Pancoran, Kuningan, Sudirman)
3. Pembangunan FO/Underpass Perlintasan KA
4. Pembangunan 6 (enam) Ruas Jalan Tol DKI Jakarta (Semanan – Sunter, Sunter – Pulo Gebang, Duri Pulo-Kampung Melayu, Kemayoran- Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, Pasar Minggu –Cassablanca)
ENERGI
1. Penambahan SPBG dan Jaringan Gas kota
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke KBT Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
2. Normalisasi Kali Ciliwung Paket 1 Jakarta
3. Normalisasi Kali Ciliwung Paket 2 Jakarta
4. Normalisasi Kali Ciliwung Paket 3 Jakarta
5. Normalisasi Kali Ciliwung Paket 4 Jakarta
6. Perbaikan dan Pengaturan Kali Krukut Jakarta
7. Perbaikan dan Pengaturan Kali Cipinang Jakarta
8. Perbaikan dan Pengaturan Kali Cisadane Jakarta
9. Perbaikan dan Pengaturan Kali Buaran, Jatikramat, Cakung Jakarta
10. Perbaikan dan Pengaturan Cikarang Bekasi Laut Jakarta
11. Perbaikan dan Pengaturan Kali Cilemah Abang Jakarta
12. Perbaikan dan Pengaturan Kali Cimanceuri Jakarta
13. Pembangunan Cengkareng Drain 2 Jakarta
14. JUFMP/JEDI Paket 2A Cengkareng Floodway Jakarta
15. JUFMP/JEDI Paket 2B Lower Sunter Jakarta
16. JUFMP/JEDI Paket 6 Upper Sunter dan West Canal Flood Jakarta
17. National Capital Integrated Coastal Defence (Tanggul Laut) Jakarta
18. O&P Banjir Kanal Barat Jakarta
19. O&P Banjir Kanal Timur Jakarta
SANITASI
1. Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta
PENDIDIKAN
1. Penyediaan/pelatihan Pendidik Layanan Khusus (Guru Pembimbing Khusus pada sekolah inklusi)
2. Penyediaan Layanan PAUD
KESEHATAN
1. Pengendalian Penyakit Menular: Pengendalian HIV dan AIDS, Pengendalian wabah antardaerah (Jabodetabek) seperti flu burung
2. Jaminan Kesehatan Nasional
3. Kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD Kep. Seribu (dokter spesialis anak dan spesialis kandungan)
4. Kebutuhan tenaga spesialis untuk mengoperasikan hiperbarik (terapi oksigen)
PERUMAHAN
1. Pembangunan Rusunaswa di Pasar Minggu dan Pasar Rumput

7.6.1.2 Provinsi Jawa Barat

TABEL 7.12
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan Jalur KA Bandung-Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten-Cirebon
2. Pembangunan Jalur KA Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang
3. Pembangunan jalur ganda KA antara Padalarang - Bandung - Cicalengka (KA Perkotaan Bandung termasuk elektrifikasi)
4. Pembangunan jalur KA baru lingkaran luar Jabodetabek antara Parungpanjang - Citayam
5. Pembangunan double-double track (DDT) antara Manggarai -Jatinegara - Bekasi - Cikarang
6. Lanjutan pembangunan shortcut antara Cibungur - Tanjung Rasa
7. Pembangunan jalur KA antara Cangkring - Pelabuhan Cirebon
8. Elektrifikasi rei ganda KA Cikarang-Cikampek
9. Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek - Tanjung. Sari
10. Pembangunan jalur KA baru antara Tanjung Sari - Kertajati
11. Reaktivasi jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan jalur KA baru antara Kadipaten - Bandara Kertajati
12. Reaktivasi jalur KA antara Banjar -Kroya
13. Reaktivasi jalur KA antara Banjar - Pangandaran - Cijulang
14. Pembangunan monorail Bandung Raya (Pemprov Jabar, KPS)
15. Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Jalur KA Cisomang-Cikadongdong
16. Pembangunan Jalur KA ganda Jalur Cikadongdong-Padalarang
17. Pembangunan Jalur KA ganda KA Parungpanjang-Tenjo
18. Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Purwakarta-Ciganea
19. Pembangunan Jalur KAElektrifikasi Citayam-Nambo
20. Pembangunan Jalur KA Shortcut Jalur KA Cibungur-Tanjungrasa
21. Pembangunan Jalur KA Stasiun Kejaksan-Pelabuhan Cirebon
22. Pembangunan Jalur KA Bandung-Tanjungsari
23. Terminal Terpadu (Kereta Api) Gedebage
24. Light Rail Transit (LRT) Kota Bandung
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bandung*
2. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bogor*
3. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bekasi*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
4. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Depok*
5. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Cimahi*
6. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tasikmalaya*
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pembangunan Bandara Kertajati*
2. Pengembangan Bandar Udara Nusawiru di Kab. Pangandaran
3. Pengembangan Bandar Udara Cakrabhuwana Kab. Cirebon
4. Pembangunan Airstrip Pangandaran
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Pemanukan
2. Pembangunan Pelabuhan Laut Regional di Jawa Barat Selatan
3. Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon di Kota Cirebon
4. Pembangunan Pelabuhan Laut di Indramayu untuk mendukung pariwisata ke Pulau Biawak
5. Pembangunan Pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya di Kab. Bekasi
6. Pengembangan Pelabuhan Pangandaran
JALAN
1. Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi
2. Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing
3. Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan
4. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan
5. Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung
6. Pembangunan Jalan tol Pasir Koja- Soreang
7. Pembangunan Jalan Tol Kota Bandung (BIUTR)
8. Pembangunan Flyover Kopo (Bandung) dan Bulak Kapal (Bekasi)
9. Pembangunan Flyover Kopo (Bandung) - Keracondong
10. Pembangunan Flyover Bulak Kapal (Bekasi)
ENERGI
1. Pipa Cirebon-Bekasi 220 km
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTGU Jawa-1 1600 MW
2. PS Upper Cisokan Pump Storage (FTP2) 1040 MW
3. PLTU Jawa-1 (FTP2) 1000 MW
4. PLTGU Muara Tawar Add-on 2,3,4 650 MW
5. PLTGU Peaker Jawa Bali -1 400 MW
6. PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 4 300 MW
7. PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 4 150 MW
8. PLTA Jatigede (FTP2) 110 MW
9. PLTP Patuha (FTP2) 110 MW
10. PLTP Tangkuban Perahu I (FTP2) 55 MW
11. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
Telekomunikasi dan Informatika
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional

SUMBER DAYA AIR

1. Pembangunan Waduk Ciawi (2015-2018) Bogor
2. Revitalisasi Situ - Jawa Barat (25 Situ)
3. Pembangunan SPAM Air Baku Kali Baru Barat dan Kali Baru Timur Bogor
4. Pembangunan DI Sadawarna Subang, Indramayu
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi SS Sukamandi Cs, SS Jengkol Cs, SS Gadung Cs, SS Rancabango Cs, dan SS Beres - Kab Subang (Loan World Bank - WISMP2) Bekasi
6. Pembebasan Tanah untuk Floodway Cisangkuy Bandung
7. Pembangunan Floodway Cisangkuy Bandung
8. Pembangunan Retensi Cieunteung Bandung
9. Pembangunan relokasi tanggul s. Citarum Hilir, desa Teluk Buyung Kab. Karawang
10. Pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul s. Citarum Hilir, desa Pantai Sederhana Kab. Bekasi
11. Pembangunan tanggul s. Citarum Hilir, desa Pantai Sederhana Kab. Bekasi
12. Sodetan Sungai Cilamatan Ds. Wanasari Kec Cipunagara Subang
13. Pembebasan Lahan untuk rehabilitasi 4 anak sungai - Loan JICA IP-559 Bandung
14. Upper Citarum Basin Flood Management (Loan JICA IP-559) Bandung
15. Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hulu Rancamanyar s/d Nanjung Bandung
16. Pembebasan Lahan untuk peningkatan kapasitas s. Citarum Hilir
17. Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hilir dari s. Cikao s/d Muara Gembong Bandung
18. Pembangunan Check Dam di Sungai Cipamingkis Bogor
19. Pembangunan Waduk Tegal Luar Bandung
20. Pembangunan Waduk Santosa Bandung
21. Pembangunan Waduk Sadawarna Bandung
22. Pembangunan Waduk Cimeta Bandung
23. Pembangunan Waduk Sukawana Bandung
24. Pembangunan Waduk Cikapundung Bandung
25. Pembangunan Waduk Citarik Bandung
26. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Curug - Cibeet (Loan ADB - ICWRMIP) Karawang
27. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Cibeet - Bekasi (Loan ADB - ICWRMIP) Bekasi
28. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Bekasi-Cawang Bekasi
29. Operasi dan Pemeliharaan Sungai Citarum Hulu Sapan-Nanjung dan Anak-anak Sungai Citarum Hulu Bandung
30. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19A Garut
31. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19B Garut
32. Perbaikan Irigasi Kecil 78 Desa Provinsi Jawa Barat
33. Pengerukan Lembah Putri di Muara Sungai Ciputrapinggan Kab. Pangandaran
34. Perbaikan dan Pengaturan Sungai Cikidang di Ds. Babakan Kec. Pangandaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
Kab. Pangandaran Kab. Pangandaran
35. Pembangunan Acces Road Matenggeng Ciamis/Cilacap
36. Pembangunan Perkantoran Waduk Matenggeng Ciamis/Cilacap
37. Pembangunan Waduk Matenggeng Ciamis/Cilacap
38. Pembebasan Tanah Bendungan Matenggeng Kab. Ciamis/ Kab. Cilacap
39. Pembangunan Pipa Transmisi Air Baku Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Banyumas
40. Pembangunan Saluran pembawa Air Baku dari Waduk Jatiluhur
41. Rehabilitasi Daerah Irigasi Rentang.
AIR MINUM
1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Pondok Gede Bekasi
SANITASI
1. Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (PLTSa Gedebage)
2. Pembangunan Pengelolaan dan Pengolahan Akhir Persampahan Wilayah Bogor dan Depok (TPPAS Regional Nambo)
3. Pembangunan TPA Legok Nangka
PENDIDIKAN
1. Pendidikan gratis Sd, SLTP, SLTA diseluruh jawa barat, beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit
2. Pembangunan dan pengembangan SMK kelautan
3. BOS untuk SMA, SMK
4. Pendirian akademi komunitas
5. Pengerian Politeknik Negeri Subang
KESEHATAN
1. Pembangunan RS Pratama di Rancabuaya-Kab. Garut, Cidaun-Kab. Cianjur, Cipatujah-Kab. Tasikmalaya.
2. Pengembangan RS Daerah RSUD Garut, RSUD Cililin-Kab. Bandung, RSUD Sukabumi.
PERUMAHAN
1. Pembangunan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (masyarakat berpenghasilan rendah / MBR)
2. Pembangunan perumahan dan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba)
3. Pembangunan Rusunawa (Urban Renewal) di Metropolitan Bandung Raya dan Metropolitan Bodebek Karpur

7.6.1.3 Provinsi Jawa Tengah

TABEL 7.13
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto - Kroya
2. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Kroya - Kutoarjo
3. Reaktivasi jalur KA antara Kedungjati - Tuntang
4. Reaktivasi jalur KA antara Yogyakarta - Magelang
5. Pembangunan jalur KA layang antara Jerakah - Semarang Poncol - Semarang Tawang - Alastua (perkotaan Semarang) termasuk flyover Kaligawe
6. Reaktivasi jalur KA antara Semarang Gudang - Pelabuhan Tanjung Mas
7. Pembangunan jalur ganda KA antara Solo - Semarang
8. Reaktivasi jalur KA antara Purwokerto - Wonosobo
9. Pembangunan LRT dalam Kota Semarang termasuk akses ke bandara
10. Pembangunan jalur ganda KA antara Solo - Paron
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Semarang*
2. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Surakarta*
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pembangunan Pelabuhan Wonogiri di Kecamatan Paranggupito
2. Pengembangan Pelabuhan Kendal
3. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas
4. Pembangunan Pelabuhan Cilacap*
5. Pengembangan Pelabuhan Batang
6. Pengembangan Pelabuhan Jepara
JALAN
1. Pembangunan Fly Over Kali Banteng (Menuju Pelabuhan Tanjung Emas)
2. Pembangunan Jalan akses Pelabuhan Penyeberangan Kendal
3. Pembangunan Jalan Bypass Brebes-Tegal
4. Pembangunan Jalan Kb. Agung-Wanayasa-Dieng-Wonosobo
5. Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Tengan (Slarang - Jladri - Mawar - Congot)
6. Pembangunan Jalan Rembang - Blora-Batas Jatim
7. Pembangunan Jalan Tol Batang - Semarang
8. Pembangunan Jalan Tol Pejagan -Pemalang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
9. Pembangunan Jalan Tol Pemalang – Batang
10. Pembangunan Jalan Tol Semarang - Solo
11. Pembangunan Jalan Wonogiri-Ngadirejo-Biting
12. Pembangunan Jalan Lingkar (Sumpiuh, Brebes, Luar Semarang, Pekalongan)
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pulau Nyamuk - Karimunjawa Kab. Jepara
ENERGI
1. Pipa Cirebon-Semarang 230 KM
2. FSRU Jawa Tengah 550 mmcf/d
3. Pipa Kepodang-TambakLorok 250 KM
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTU Jawa-4 1000 MW
2. PLTU Jawa-8 1000 MW
3. PLTU Indramayu-4 1000 MW
4. PLTU Jawa-4 1000 MW
5. PLTU Jawa Tengah 2x950 MW
6. PLTU Jawa-10 660 MW
7. PLTP Dieng (FTP2) 55 MW
8. PLTU Batang, Jawa Tengah 2 x 1000 MW
9. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
Telekomunikasi dan Informatika
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Rehabilitasi DI Pemali (27.482 Ha) Kab Tegal - Brebes
2. Rehabilitasi DI Klambu (37.451 Ha) Kab Grobogan - Demak
3. Revitalisasi Irigasi Tambak WS pemali Juana
4. Pembangunan Bendung Karet Tondomulyo Kab Pati
5. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Jragung Kab Demak – Grobogan
6. Perkuatan Tebing Sungai Serang Kab Demak - Grobogan
7. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai BKT Kota Semarang - Kab. Demak
8. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Wulan Kab Kudus dan Demak
9. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Lusi Kab Blora
10. Perkuatan Tebing Sungai Comal Kab. Pemalang
11. Perkuatan Tebing Sungai Pemali Kab. Brebes
12. PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI KEDUNG SEMAT Kab Jepara, Ds Kedungmalang, Kalianyar, Surodadi, Panggung, Bulakbaru, Tanggultlare, Semat.
13. Pelaksanaan Konstruksi Bendungan Logung kab Kudus Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo
14. Pembangunan Embung Gondanglegi dan Embung Pelemputih Kab Boyolalai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
15. Pembangunan Embung Coyo dan Embung Tirto Kab Grobogan
16. Rekondisi Rawa Pening Kab Semarang
17. Pembangunan Jaringan Air Baku Petanglong (Tahap I dan Tahap II) Kab Pemalang, Pekalongan
18. Pembangunan Jaringan Air Baku Dadi Muria Kab Kudus, Purwodadi
19. Pembangunan Jaringan Air Baku Semarsalat Kab Semarang, Salatiga
20. Penyempurnaan SAB Klambu Kudu Kab Demak, Grobogan, Semarang
21. Pembangunan/peningkatan DI Slinga Purbalingga
22. Rehabilitasi DI Serayu Banyumas, Cilacap Kebumen
23. Rehabilitasi DI Wadaslintang Kebumen, Purworejo
24. Peningkatan kapasitas dan normalisasi Sungai Serayu dan anak Sungainya (Sungai Serayu, Sungai Merawu, Kali Sapi, Sungai Klawing, Sungai Pekacangan) Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas
25. Peningkatan kapasitas dan normalisasi Sungai Luk Ulo dan anak sungainya Wonosobo, Kebumen
26. Peningkatan kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klep Sungai Wawar dan anak sungainya Kebumen, Purworejo
27. Peningkatan kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klep Sungai Bogowonto dan anak sungainya Wonosobo, Purworejo
28. Peningkatan, perkuatan tebing dan Pintu Klep Sungai Progo dan anak sungainya Temanggung, Magelang, Sleman, Yogyakarta, Bantul
29. Rehabilitasi, peningkatan kapasitas dan perkuatan tebing Sungai Serayu dan anak Sungainya (Sungai Serayu, Sungai Merawu, Kali Sapi, Sungai Klawing, Sungai Pekacangan) Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas
30. Rehabilitasi, peningkatan kapasitas dan perkuatan tebing Sungai Tipar / Bengawan dan anak sungainya Cilacap, Banyumas, Kebumen
31. Rehabilitasi, peningkatan kapasitas dan perkuatan tebing Sungai Ijo dan anak sungainya Cilacap, Banyumas, Kebumen
32. Rehabilitasi, peningkatan kapasitas dan perkuatan tebing Sungai Telomoyo dan anak sungainya Kebumen
33. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Wawar dan anak sungainya Kebumen, Purworejo
34. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Cokroyasan dan anak sungainya Kebumen, Purworejo
35. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Bogowonto dan anak sungainya Wonosobo, Purworejo
36. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Progo dan anak sungainya Temanggung, Magelang, Sleman, Yogyakarta, Bantul
37. Pembangunan Sabo/DAM Pengendali Sedimen Boyolali, Magelang, Klaten
38. Pembangunan Diversion Channel Kali Putih Magelang
39. Rehabilitasi Sabo/DAM Pengendali Sedimen di Jateng Boyolali, Magelang, Klaten
40. Pembangunan Waduk Bener Purworejo dan Wonosobo
41. Pembangunan Waduk Gintung Banjarnegara
42. Pembangunan Waduk Wanadadi / Punggelan Banjarnegara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
43. Pembangunan Waduk Pasuruan Magelang
44. Pembangunan embung kecil / telaga Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Purworejo
45. Pembangunan SPAM Regional Keburejo Kebumen, Purworejo
46. Pembangunan SPAM Regional Purbamas Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara
47. Pembangunan SPAM Wononegara Wonosobo, Banjarnegara
48. Pemeliharaan Sungai WS Serayu Bogowonto
49. O & P Sabo/DAM Pengendali Sedimen di Jateng Boyolali, Magelang, Klaten
50. Normalisasi Alur Sungai Cibeureum Kab. Cilacap
51. Normalisasi Alur Sungai Cihaur Kab. Cilacap
Air Minum
2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Semarang Barat
Pendidikan
3. Penerapan SPM harap diperhatikan dalam setiap urusan pembangunan pendidikan
4. Terkait dengan bidang DiktiRistek, pengembangan kawasan IPTEK di science park (Solo Techno Park dan Sragen science park)
5. Pembangunan SMP-SMA SATAP sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014
6. Peningkatan pengetahuan mengenai pencegahan HIV & AIDS dan masalah sosial lainnya melalui sekolah
7. Pengembangan PKBM untuk pemberantasan buta aksara dengan sasaran 867.978 orang
8. Revitaliasi museum dan penataan taman budaya Jawa Tengah
Kesehatan
9. Peningkatan advokasi kepada Pemda Kab/Kota tentang Program KKB
10. Pembentukan dan penguatan kelembagaan SKPD KB di Kab/Kota
11. Sosialisasi UU No.23/2014 tentang Pemda, khususnya terkait status, tugas dan fungsi PLKB
12. Peningkatan jumlah kuota peserta PBI JKN pusat
13. Pemerataan tenaga dokter spesialis dasar di pelayanan kesehatan rujukan
14. Peningkatan sarana-prasarana di Puskesmas
Perumahan
15. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 15 Ha

7.6.1.4 Provinsi DI Yogyakarta

TABEL 7.14
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
PROVINSI DI YOGYAKARTA

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan jalur KA Perkotaan Yogyakarta (tahap 1) termasuk akses ke Bandara baru Yogyakarta
2. Elektrifikasi jalur KA Kutoarjo-Yogya-Solo
3. Jalur KA menuju Bandara Kulonprogo
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Yogyakarta
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pembangunan Bandara International Kulon Progo
JALAN
1. Pembangunan Jalan Lintas Pantasi Selatan Jawa (Temon-Bugel-Girijati-Baron-Jepitu-Jerukwudel)
2. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Yogyakarta
KETENAGALISTRIKAN
1. Program Listrik Gratis
Telekomunikasi dan Informatika
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Peningkatan kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klep Sungai Opak dan anak sungainya Gunung Kidul, Bantul
2. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Serang dan anak sungainya Kulon Progo
3. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Opak dan anak sungainya Gunung Kidul, Bantul
4. Pembangunan Sabo/DAM Pengendali Sedimen Sleman
5. Pembangunan Kantong Lahar Kali Gendol Sleman
6. Consulting Service Urgent Disaster Merapi
7. Rehabilitasi Sabo/DAM Pengendali Sedimen di DIY Sleman
8. Pembangunan Jetty Glagah Kulon Progo
9. Rehabilitasi Muara sungai dan Jetty di WS POS Kulon Progo, Bantul
10. Pembangunan Waduk Karang Talun Sleman
11. Pembangunan Long Storage Karang Talun dan Kali Bawang Sleman, Kulon



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
Progo
12. Pembangunan Waduk Gari Gunung Kidul
13. Pembangunan embung kecil / telaga Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, Temanggung, Magelang
KESEHATAN
1. Penurunan Angka Kematian ibu dan program PHBS lebih ditingkatkan.
2. Program kesehatan reproduksi pada remaja.
3. Pengintegrasian Jamkesda dan JKN (pusat menentukan by name by address, atau hal tersebut diserahkan kepada daerah diharapkan perubahan dari daerah)
4. Pengembangan rumah sakit rujukan nasional dan rujukan regional.

7.6.1.5 Provinsi Jawa Timur

TABEL 7.15
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa – Paron – Madiun – Mojokerto-Wonokromo
2. Pembangunan jalur KA antara Tulangan - Gununggangsir
3. Pembangunan Tram Surabaya
4. Pembangunan Monorail Surabaya
5. Pembangunan jalur ganda KA antara Surabaya - Kalimas/Tanjung Perak
6. Pembangunan jalur KA antara Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong
7. Reaktivasi jalur KA antara Jombang - Babat - Tuban
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Surabaya
2. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Malang
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Sumenep
2. Pengembangan Bandara Blimbingsari Banyuwangi
3. Pengembangan Bandara Noto Hadinegoro Jember
4. Pembangunan Bandara P. Bawean Gresik
5. Pengembangan terminal penumpang Bandara Djuanda
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak*
2. Pengembangan Pelabuhan Probolinggo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
3. Pengembangan Pelabuhan Branta
4. Pengembangan Pelabuhan Lamongan
5. Pembangunan Terminal Multi Purpose Teluk Lamong Tahap I
6. Pengembangan Pelabuhan Keramaian
7. Pengembangan Pelabuhan Taddan/Sampang
8. Pengembangan Pelabuhan Telaga Biru
JALAN
1. Pembangunan Jalan Lintas Utara Madura (Bangkalan - Tj Bumi-Ketapang-Sotobar-Sumenep)
2. Pembangunan Jalan Bonojegoro-Cepu
3. Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur (Jarit – Puger-Glenmore)
4. Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur (Talok – Wonorogo – Ngrejo – Prigi – Panggul)
5. Pembangunan Jalan Prigi-Durenen
6. Pembangunan Jalan Situbondo-Garduatak-Silapak-Ketapang-Banyuwangi
7. Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto
8. Pembangunan Jalan Tol Pandaan – Malang
9. Pembangunan Jalan Tol Solo – Kertosono
10. Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto
11. Pembangunan Jalan Trenggalek-Dengok-Ponorogo-Madiun
12. Pembangunan Jalan Lingar (Mohoagung, Banyuwangi, Lamongan)
13. Pembangunan Jalan Frontage Sisi Barat A. Yani
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ketapang 3
ENERGI
1. PLTGU Jawa-3 800 MW
2. PLTGU Peaker Jawa Bali -2 500 MW
3. PLTGU Grati 300 MW
4. PLTGU Grati 150 MW
5. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
6. Program Listrik Gratis
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Bendungan Wonodadi, Pacitan
2. Penyelesaian Pembangunan Bendungan Tugu Kab. Trenggalek
3. Pembangunan Bendungan Semantok II Kab. Nganjuk
4. Pembangunan Bendungan Lesti III Kab. Malang
5. Pembangunan Bendungan Bagong Kab. Trenggalek
6. Persiapan Pembangunan Bendungan Genteng I Kab. Malang
7. Persiapan Pembangunan Bendungan Kedung Warak Kab. Nganjuk
8. Persiapan Pembangunan Bendungan Kampak Kab. Trenggalek
9. Persiapan Pembangunan Bendungan Sumber Agung Kab. Kediri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
10. Persiapan Pembangunan Waduk Blega Kab. Bangkalan
11. Penyelesaian Pembangunan Waduk Gongseng Kab. Bojonegoro
12. Penyelesaian Pembangunan Waduk Tukul Kab. Pacitan
13. Penyelesaian Pembangunan Waduk Bendo Kab. Ponorogo
14. Lower Solo River Improvement Project Phase 2 Kab. Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik
15. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Mrican Kanan, D.I. Nipah, D.I. Kuncir, D.I. Kalibata, dan D.I. Tebanah
16. Rehabilitasi Pengendali Lahar/Sedimen Gunung Kelud
AIR MINUM
1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Lamongan
2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan
PENDIDIKAN
1. Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan
2. Penyediaan Layanan PAUD
3. Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
4. Dukungan Manajemen PAUDNI
5. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (SDLB/ /SMPLB)
6. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
7. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
8. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMA
9. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMK
10. Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten untuk Pendidikan Menengah
KESEHATAN
1. Peningkatan fasilitas kesehatan dasar (pembangunan puskesmas baru, peningkatan puskesmas rawat inap, rehabilitasi, alkes, pusling)
2. Bantuan operasional kesehatan puskesmas
3. Kegiatan penurunan prevalensi gizi
4. Kegiatan pengendalian HIV dan AIDS
5. Kegiatan pengendalian penyakit menular (TB dan Malaria)
6. Pemenuhan tenaga kesehatan
7. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
PERUMAHAN
1. Pengembangan dan pengelolaan Rusunawa
2. Pendampingan penyusunan laporan renovasi RTLH
3. Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota besar
4. Perbaikan jalan/saluran lingkungan permukiman
5. Perbaikan jalan/saluran lingkungan permukiman
6. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman kawasan khusus
7. Pengembangan dan revitalisasi kawasan argopolitan
8. Pembangunan sarpas pengolahan air limbah komunal
9. Pembangunan dan perbaikan saluran air/pengsangan/drainase

7.6.1.6 Provinsi Banten

TABEL 7.16
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
PROVINSI BANTEN

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Revitalisasi Jaringan KA Rangkasbitung-Saketi-Malimping-Bayah
2. Revitalisasi Jaringan KA Saketi-Labuhan
3. Pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi antara Maja - Rangkasbitung - Merak
4. Pembangunan jalur KA antara Tonjong - Pelabuhan Bojonegara
5. Reaktivasi jalur KA antara Rangkasbitung - Labuan
6. Reaktivasi jalur KA antara Cilegon - Anyer Kidul
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tangerang*
2. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tangerang Selatan*
3. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Serang*
PERHUBUNGAN LAUT
16. Pembangunan Pelabuhan Petikemas Bojonegara
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pembangunan Terminal 3 dan Pengembangan Bandara Soekarno-Hatta
2. Pembangunan Bandara Banten Selatan
JALAN
1. Pembangunan Jalan Cikande - Rangkasbitung
2. Pembangunan Jalan Cikande - Serang - Cilegon
3. Pembangunan Jalan Cipanas-Warung banten - Bayah
4. Pembangunan Jalan Tanjung Lesung - Sumur (24 Km)
5. Pembangunan Jalan Tol Serpong- Balaraja
6. Pembangunan Jalan Lintas Selatan Banten
ASDP
17. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Merak Dermaga 7
18. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Merak Dermaga 4
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTU Jawa-5 2000 MW
2. PLTU Jawa-7 2x1000 MW
3. PLTU Jawa-9 600 MW
4. PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 3 500 MW
5. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Waduk Sindang Heula Kab. Serang
2. Pembangunan Waduk Karian Kab. Lebak
3. Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air Bendung Pasar Baru Tangerang
4. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Cisadane
5. Pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Waduk Karian
6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teluk Lada
PENDIDIKAN
1. Pembangunan gedung untuk peningkatan akses pendidikan menengah SMA/SMK (lebak, pandeglang dan Kab.Serang)
2. Pembukaan akademi komunitas/politeknik jurusan industri logam, petrokimia, alas kaki, makanan, dan tekstil
3. Pengembangan pembangunan kampus baru Untirta
4. Pengembangan fakultas kedokteran Untirta
KESEHATAN
1. Pengembangan RS rujukan regional Banten
2. Pengembangan RS tipe D (RS Malimping)
3. Pembangunan RS Jiwa Banten
4. Pembangunan pusat rehabilitasi narkoba
5. Peningkatan screening dan pengobatan pasien HIV dan AIDS
6. Penguatan program KB
7. Peningkatan jumlah PLKB
8. Penguatan kelembagaan khusus yang menangani kependudukan dan KB
PERUMAHAN
1. SPAM wilayah Serang, dan wilayah Tangerang
2. Penanganan kawasan kumuh Kota Tangerang, Kabupaten tangerang, dan Kab Tangsel, Kota Cilegon, Kota Serang, Kab Serang
3. Penataan kawasan Banten Lama

7.6.1.7 Provinsi Bali

TABEL 7.17
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
PROVINSI BALI

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan KA Bandara Ngurah Rai- Denpasar - Mengwi
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Denpasar*
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pembangunan Bandara Bali Utara
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengerukan alur di Pelabuhan Benoa
2. Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang di Kab Buleleng
3. Pengembangan Pelabuhan pariwisata/cruise Tanah ampo
4. Pembangunan Pelabuhan Toya Pakeh Nusa Penida
JALAN
1. Pembangunan Jalan Antasari - Seririt
2. Pembangunan Jalan Mengwitani-Singaraja
3. Pembangunan Jalan P . Nusa Penida
4. Pembangunan Jalan Penulisan - Blandingan (4 Km)
5. Pembangunan Jalan Kintamani – Danau Batur
6. Pembangunan Flyover Ngurah Rai
7. Pembangunan Jalan Sp. Tohpati - Pantai Siut
8. Pembangunan Jalan Pantai -Siut – Kusamba
9. Pembangunan Jalan Denpasar – Tuban
10. Pembangunan Jalan Antosari - Bts. Kota Tabanan
11. Pembangunan Jalan Sp. Ngurah Rai
ASDP
19. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Singaraja
20. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Gilimanuk 3
21. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Padang Bai 4
22. Pembangunan Dermaga di Danau Beratan
23. Pembangunan tanggul pengamanan Dermaga Pelabuhan Gunaksa
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTU Bali Utara/Celukan Bawang 130 MW
2. PLTG Pesanggaran 50 MW



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Waduk Titab Kab. Buleleng
2. Bali Beach Conservation Program Phase II
PENDIDIKAN
1. Pengadaan Guru Agama Hindu di Sekolah
KESEHATAN
1. Pengembangan RS Indera (alkes)
2. Pengembangan RS Provinsi, Pengembangan RSUD sebanyak 9 RS, Pengembangan RS Pratama sebanyak 3 RS

7.6.2 Kerangka Regulasi

Pelaksanaan pembangunan Wilayah Jawa-Bali tidak terlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a. Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Perpajakan Kepabeanan, dan Cukai di Kawasan Ekonomi Khusus serta aturan turunannya;
- b. Penyelesaian Peraturan tentang Ketenagakerjaan di Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. Penyelesaian Peraturan tentang Pelimpahan Kewenangan perdagangan, keimigrasian, perindustrian, pertanahan, tenaga kerja dari kementerian/lembaga terkait kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; serta
- d. Penetapan Perpres RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur); dan Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila); dan penyelesaian Peninjauan Kembali Perpres No. 28/2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali dan Perpres No. 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).
- e. Regulasi di Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendukung percepatan implementasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7.6.3 Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan pembangunan Wilayah Jawa-Bali tidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a. Pelayanan terpadu satu pintu di bidang investasi;
- b. Meningkatkan kualitas hubungan industrial antara tenaga kerja, serikat pekerja, dan perusahaan; serta
- c. Peningkatan koordinasi antara Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi di Wilayah Jawa-Bali dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau.

BAB 8

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA

8.1. Capaian Kinerja Saat Ini

- Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun 2014, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Sumatera mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi Wilayah Sumatera selama kurun waktu 2009-2013 sebesar 6,74 persen atau sudah berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Peranan Wilayah Sumatera dalam pembantuan PDB nasional mengalami peningkatan dari 23,5 persen (2009) menjadi 23,74 persen (Triwulan II 2014).
- Pemerintah Provinsi di Wilayah Sumatera telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret) dan persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera sudah berada di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen (2009) dan 11,25 persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT), Pemerintah Provinsi di Wilayah Sumatera juga telah berhasil menurunkan TPT dan sudah di bawah TPT nasional sebesar 7,87 persen (2009), kecuali Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Selatan; dan 5,70 persen (Feb, 2014), kecuali di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang masih berada di atas TPT Nasional.
- Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka di Wilayah Sumatera ini telah dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan selalu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi di Wilayah Sumatera. Namun demikian, pencapaian IPM di Provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan karena masih di bawah IPM nasional yaitu sebesar 71,76 (2009) dan 73,81 (2013).
- Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, seluruh provinsi di Wilayah Sumatera mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Hal ini diindikasikan dari angka Rasio Gini provinsi-provinsi di Wilayah Sumatera yang cenderung meningkat pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2009. Namun, rasio gini Wilayah Sumatera sudah berada di bawah rasio gini nasional yaitu 0,413 (2013). Ke depan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan terus lebih melibatkan

masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

8.2. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Perekonomian Wilayah Sumatera ditopang oleh beberapa sektor utama yaitu pertanian terutama perkebunan, pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan.

- Pulau Sumatera mempunyai potensi yang tinggi sebagai lumbung pangan nasional, antara lain: produksi padi tahun 2013: 16,74 juta ton (23,49 persen produksi nasional), jagung 3.985.308 ton (21,53 persen produksi nasional), kopi 492.670 ton (71,28 persen produksi nasional), teh 22.550 ton (15,72 persen produksi nasional), ikan 1.728.565 ton (29,65 persen produksi nasional) dengan produksi ikan patin di Sumsel 220.577 ton, sawit 17.933.720 ton (68,93 persen produksi nasional) dengan 70 persen lahan kelapa sawit Indonesia berada di Sumatera sehingga di Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan memproduksi 43 persen CPO.
- Potensi perkebunan Wilayah Sumatera cukup melimpah terutama pada komoditas kelapa sawit. Sebesar 70 persen lahan penghasil kelapa sawit nasional berada di Wilayah Sumatera, dengan produksi kelapa sawit di tahun 2013 mencapai 18.895.449 ton per tahun atau 68,10 persen dari jumlah produksi kelapa sawit di Indonesia. Sementara itu, Wilayah Sumatera juga menjadi produsen karet di Indonesia dengan kontribusi sebesar 65 persen dari produksi karet nasional serta memiliki 14 persen luasan lahan perkebunan karet nasional. Dalam perkembangannya, karet yang diproduksi kemudian menjadi konsumsi bagi 15 persen industri hilir nasional.
- Sektor pertambangan dan penggalian yaitu batu bara, gas bumi dan minyak bumi cukup berlimpah. Perkembangan produksi batu bara nasional tahun 2004-2011 meningkat dengan produksi batubara hingga akhir tahun 2011 mencapai 290 juta ton. Total sumber daya batubara nasional tahun 2011 adalah sebanyak 105.187,44 juta ton, yang sebagian besar terdapat di Wilayah Sumatera sebanyak 52.483,2 juta ton atau sebesar 49,89 persen dari total cadangan batubara nasional.
- Potensi bahan tambang di Wilayah Sumatera lainnya yaitu bijih timah, bauksit (bijih alumunium), dan kaolin. Kandungan timah Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Indonesia memasok sekitar 30 persen dari kebutuhan timah dunia dengan 27 persen di antaranya berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Komoditas timah terdapat di Sungai Liat (Pulau Bangka), Manggara (Pulau

Belitung), Dabo (Pulau Singkep), Provinsi Kepulauan Riau, dan Bangkinan (Provinsi Riau). Sementara itu, penambangan bauksit atau bijih aluminium di Wilayah Sumatera terdapat di Kepulauan Riau, dan Provinsi Bangka Belitung. Potensi kaolin di Wilayah Sumatera juga cukup besar untuk dikembangkan dengan potensi 34,9 persen dari cadangan nasional. Indonesia merupakan penghasil kaolin terbesar ke-5 di dunia. Kandungan kaolin yang cukup besar di Wilayah Sumatera terdapat di Provinsi Bengkulu sebesar 162,5 miliar ton dan Sumatera Utara sebesar 91,8 miliar ton.

- Lebih jauh lagi, pohon industri Kemenperin mengindikasikan bahwa pengembangan kluster industri pengolahan timah dan aluminium akan mampu mendukung industri manufaktur yang memproduksi barang kompleks seperti elektronik, peralatan listrik, kendaraan bermotor, mesin dan komponennya. Sementara itu, industri kaolin dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan baku dalam produksi barang kompleks pada industri otomotif, industri elektronik, dan industri peralatan laboratorium.
- Dalam konteks nasional, Wilayah Sumatera merupakan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi. Sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian Wilayah Sumatera tahun 2012 sebesar 19,48 persen. Persebaran industri pengolahan yang berbasis komoditas unggulan di Wilayah Sumatera diantaranya: industri kelapa sawit, industri karet dan barang dari karet di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu; Industri pulp dan kertas di Provinsi Riau; Industri dasar besi dan baja dan industri logam dasar bukan besi di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Industri Pangan, Kopi, Kakao di Provinsi Lampung.
- Pulau Sumatera memiliki potensi kehutanan yang sangat besar, yaitu: Suaka Margasatwa 23 Lokasi, Cagar Alam (Darat dan Laut) 27 Lokasi, Taman Nasional (Darat dan Laut) 12 Lokasi, Tahura 7 Lokasi, Taman Wisata Alam (Darat dan Laut) 14 Lokasi dan Taman Buru 5 lokasi (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Bengkulu (2 lokasi). Dengan jenis potensi kawasan yaitu: Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam: $\pm 5,1$ juta ha (11,63 persen), Kawasan Hutan Lindung: ± 6 juta ha (13,65 persen) dan Kawasan Hutan Produksi (26,27 persen), diharapkan dengan fungsi lindung 80 persen yang diperkirakan ± 15 persen.

8.3. Tema Pengembangan Wilayah Sumatera

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, maka tema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai:

- Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional.
- Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas.
- Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara
- Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

8.4. Tujuan Dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sumatera

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; (b) penyediaan infrastruktur wilayah; (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun sasaran pengembangan Wilayah Sumatera pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Sumatera, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatera dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.
2. Sementara itu, untuk mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah di Wilayah Pulau Sumatera, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 11 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,30 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 10,66 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 69,31.
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Sumatera, maka akan dipercepat pembangunan 2 Kawasan Perkotaan Metropolitan baru, peningkatan efisiensi

pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada saat ini, serta mewujudkan optimalisasi peran 6 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi, serta membangun 2 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan.

4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran menurunnya kemiskinan di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri.
5. Khusus untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, maka akan diperkuat 8 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 8 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
7. Sasaran Otonomi Daerah adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 40 persen untuk propinsi dan 12 persen untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30 persen dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 30 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 10 provinsi dan 90 kabupaten/kota di wilayah Sumatera; (4) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 65 persen dan S2-S3 sebesar 10 persen; (5) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Sumatera sebesar 150 angkatan (dengan proyek awal Provinsi Lampung); (6) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (7) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100 persen; (8) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 90 persen; (9) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Sumatera (dengan proyek awal Provinsi Aceh dan Riau); (10) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; dan (11) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer

secara on-line di wilayah Sumatera (dengan proyek awal Provinsi Riau).

8. Sasaran Pengurangan Bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota sasaran (Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Kota Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, Kota Jambi, Sorolangun, Kerinci, Kota Bandar Lampung, Lampung Barat, Tanggamus, Kota Padang, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Banyuasin, Lahat, Kota Medan, Langkat, Deli Serdang, Karo, dan Simalungun) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, KSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun kawasan pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Sumatera semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Sumatera terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 23,8 persen (2013) menjadi 24,6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Sumatera dapat dilihat pada Tabel 8.1 sampai dengan Tabel 8.3 sebagai berikut.

TABEL 8.1.
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SUMATERA
PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	5.6	5.8	6.0	6.2	6.2
Sumatera Utara	6.1	6.7	7.2	7.6	8.1
Sumatera Barat	5.4	6.0	6.4	7.0	7.8
Riau	4.6	4.9	5.1	5.8	6.8
Kepulauan Riau	6.7	7.4	7.0	7.5	7.5
Jambi	6.5	7.0	7.4	8.1	8.9
Sumatera Selatan	5.8	6.1	6.2	6.7	7.5
Kep. Bangka Belitung	5.5	6.1	6.8	7.1	7.5
Bengkulu	5.9	6.7	7.3	7.7	8.4
Lampung	6.2	6.8	7.2	7.7	8.2

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 8.2.
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH SUMATERA
PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	16.2	14.9	13.7	12.5	11.3
Sumatera Utara	9.2	8.7	8.1	7.4	6.7
Sumatera Barat	6.7	6.2	5.8	5.3	4.8
Riau	7.0	6.4	5.8	5.3	4.7
Kepulauan Riau	5.1	4.6	4.3	3.8	3.4
Jambi	5.9	5.4	5.0	4.6	4.2
Sumatera Selatan	12.2	11.3	10.4	9.5	8.6
Kep. Bangka Belitung	3.9	3.6	3.3	3.0	2.7
Bengkulu	14.7	13.6	12.5	11.4	10.3
Lampung	14.1	13.6	12.6	11.5	10.5

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 8.3.
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH SUMATERA
PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	8.5	8.2	7.9	7.5	7.2
Sumatera Utara	6.0	5.8	5.6	5.3	5.2
Sumatera Barat	6.1	5.9	5.7	5.4	5.2
Riau	3.8	3.7	3.5	3.3	3.1
Kepulauan Riau	5.1	4.8	4.6	4.3	4.1
Jambi	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6
Sumatera Selatan	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7
Kep. Bangka Belitung	3.3	3.1	3.0	2.9	2.7
Bengkulu	3.4	3.3	3.1	3.0	2.9
Lampung	4.9	4.7	4.6	4.4	4.3

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

8.5 Arah Kebijakan Dan Pengembangan Wilayah Sumatera

8.5.1 Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pembangunan kawasan strategis bidang ekonomi di Wilayah Sumatera diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional dan

internasional berbasis produksi dan pengolahan hasil bumi serta menjadi lumbung energi nasional.

Persebaran kawasan strategis berada di beberapa provinsi, meliputi: Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Sei Mangkei, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Kawasan Industri Langsa, rencana pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Industri Tanggamus di Provinsi Lampung, pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Percepatan pembangunan kawasan strategis dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Pulau Sumatera

Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis erat kaitanya dengan memberdayakan masyarakat berbasis potensi ekonomi wilayah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan yang dilakukan melalui:

- a) Menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api sebagai sentra pengolahan komoditas unggulan kelapa sawit dan karet menjadi produk bernilai tambah tinggi, serta pusat logistik;
- b) Mengembangkan industri-industri pengolahan kelapa sawit, karet, serta perikanan dan sumberdaya laut menjadi produk bernilai tambah tinggi berorientasi ekspor;
- c) Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan kelapa sawit dan karet baik di dalam Kawasan Ekonomi Khusus maupun di sekitar wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (kebun rakyat);
- d) Mengembangkan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, serta industri pariwisata di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; serta
- e) Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

2. Percepatan Penguatan Konektivitas

Peningkatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan-kawasan penyangga sekitarnya meliputi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a) Pengembangan dan pembangunan pelabuhan Pelabuhan Tanjung Api-Api sebagai Pelabuhan Internasional, dan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai Hub Internasional;
- b) Pengembangan dan pembangunan terminal peti kemas di Tanjung Api-Api, Belawan, terminal peti kemas di Kuala Tanjung;
- c) Pengembangan dan pembangunan pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Tanjung Sauh di Batam;
- d) Pembangunan jalur kereta api ruas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, ruas Tanjung Enim-Tanjung Api-Api, ruas Spoor Simpang (Gunung Bayu)-Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;
- e) Pengembangan Pelabuhan Malahayati;
- f) Peningkatan Bandara Sultan Iskandar Muda;
- g) Peningkatan kapasitas jalan ruas Palembang-Tanjung Api-Api, Simpang Inalum-Kuala Tanjung; ruas Ujung Kubu-Kuala Tanjung, ruas Simpang Sei Balai-Ujung Kubu, ruas Tanjung Kubah-Kuala Indah, ruas Simpang Mayang-Sei Mangkei-Simpang Pasar Baru-Boluk, ruas Simpang Pasar Baru-Pasar Baru-Dusun Pengkolan-Tinjoan-Sei Mejangkar, ruas Bts Simalungun-Silimbat-Bts Taput, ruas Tanjung Morawa-Saribudolok-Tongging;
- h) Pembangunan akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik (pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat;
- i) Pembangunan jalan tol Batu Ampar-Muka Kuning-Hang Nadim;
- j) Pembangunan ruas jalan jalan penghubung kawasan-kawasan strategis;
- k) Pengembangan jaringan jalur kereta api di pesisir timur;
- l) Pembangunan dan peningkatan bendung dan jaringan irigasi;
- m) Pembangunan Bendungan Lausimeme; serta
- n) Pembangunan PLTU di Sumatera Selatan dengan kapasitas 300 MW.

3. Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kapasitas kelembagaan di tingkat pusat maupun di daerah, serta pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dilakukan dengan strategi:

- a) Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola kawasan di bidang perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kawasan;
- b) Peningkatan kemampuan pengelolaan investasi di tiap-tiap kawasan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c) Revitalisasi kelembagaan Badan Pengelola Kawasan dalam mendukung pengembangan bisnis yang berorientasi profit;
- d) Peningkatan koordinasi Badan Pengelola kawasan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;
- e) Penyiapan tenaga kerja berkualitas di bidang industri pengolahan berteknologi tinggi;
- f) Peningkatan kualitas kelembagaan serikat pekerja;
- g) Pengembangan *Science Park* untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam bidang industri pengolahan dan manufaktur; serta
- h) Pengembangan *Techno Park* di bidang agroindustri, bidang perikanan, bidang pariwisata, serta bidang distribusi dan pemasaran.

2. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Dalam upaya pengembangan kawasan strategis di Wilayah Pulau Sumatera diperlukan sinergisasi dan sinkronisasi regulasi melalui strategi berikut:

- a) Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal di semua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di dalam Kawasan;
- b) Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) bidang perijinan perindustrian, perdagangan, pertanian di dalam Kawasan;
- c) Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial antara tenaga kerja, serikat pekerja, dan perusahaan dalam Kawasan;
- d) Promosi produk unggulan Kawasan kepada investor luar dan dalam negeri untuk menarik minat para investor;

8.5.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

8.5.2.1. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan di Wilayah Sumatera difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal. Untuk itu strategi pembangunan perkotaan Wilayah Sumatera tahun 2015-2019 yaitu:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

- a. Mengusulkan pembentukan Kawasan Perkotaan Metropolitan Palapa yang berperan sebagai PKN dan Patungraya Agung dalam rangka membangun koridor wilayah yang kuat untuk mempercepat pembangunan di Wilayah Sumatera bagian barat, mengurangi urbanisasi dari luar Jawa ke Pulau Jawa;
- b. Mengembangkan simpul transportasi khususnya transportasi darat (kereta api) untuk Sumatera bagian timur dan mengembangkan jaringan transportasi laut untuk Sumatera bagian barat untuk meningkatkan konektivitas antar PKN, PKW, dan PKL disekitarnya;
- c. Mengembangkan sentra industri pengolahan pada kota sedang di Wilayah Sumatera khususnya pada bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan tangkap untuk meningkatkan konektivitas dengan desa-desa produksi sekitarnya;
- d. Mengembangkan pusat kegiatan skala nasional yang meliputi kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan perkotaan metropolitan.

2. Perwujudan Kota Layak Huni dan Layak Anak Yang Aman dan Nyaman

- a. Mengembangkan perumahan swadaya di kawasan perkotaan Palapa yang berperan sebagai PKN dan Patungraya Agung;
- b. Mempercepat pemenuhan dan meningkatkan pelayanan sarana prasarana permukiman sesuai dengan tipologi dan peran kotanya;
- c. Mengembangkan sistem pengolahan sanitasi terpusat untuk kota besar dan Kota Metropolitan;
- d. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi massal perkotaan secara terintegrasi dan multimoda sesuai dengan tipologi dan kondisi geografisnya;
- e. Mempercepat sistem dan sarana prasarana logistik untuk mendukung peran kota sebagai pusat pasar wilayah sekitarnya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. Mengembangkan konsep Transport Oriented Development (TOD) untuk optimalisasi dan efisiensi transportasi dan tata guna lahan perkotaan khususnya di kota besar dan KSN Perkotaan;
- g. Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang mampu mengakomodasi pasar tradisional, termasuk kegiatan koperasi dan Usaha mikro kecil Menengah (UMKM);
- h. Meningkatkan pelayanan sarana prasarana serta menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan profesional;
- i. Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik, serta meningkatkan modal sosial masyarakat kota;

3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap Bencana

- a. Perwujudan penyelenggaraan ruang yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan;
- b. Pengembangan infrastruktur mitigasi bencana (*urban resilience*) terutama pada kota yang memiliki indeks kerawanan bencana yang sangat tinggi;
- c. Memberikan insentif kepada masyarakat dan pemerintah yang melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan terutama pada yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan;
- d. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana (*urban resilience*).
- e. Mengembangkan dan menerapkankonsep kota hijau melalui: *greentransportation*, *green openspace* (ruang terbuka hijau), *green waste* (pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R¹), *green water* (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan *green energy* (pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan) untuk pengurangan tingkat pencemaran di darat, laut, dan udara, pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan daur ulang, serta pengembangan kegiatan perekonomian kota (*green Economy*) khususnya di kota besar dan kota metropolitan.

4. Perwujudan Kota Cerdas yang Berdaya Saing

- a. Mengembangkan perekonomian dengan membangun pencitraan kota (*city branding*) yang memanfaatkan produk dan Sumber Daya Manusia unggulan;

¹3R: pengurangan (*Reduce*), pemanfaatan kembali (*Re-use*), dan Daur Ulang (*re-cycle*)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Peningkatan jumlah tenaga kerja ahli dan terampil melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan tinggi dan pelatihan kejuruan (*higher education and vocational training*);
- c. Penyediaan layanan publik serta perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana kota melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bentuk *e-government, e-commerce* dan *e-infrastructures*;
- d. Peningkatan efisiensi pasar melalui pengaturan jalur distribusi logistik dari dan keluar kota; dan
- e. Pengembangan pasar keuangan dalam bentuk penyediaan kredit lunak kepada industri kecil, koperasi dan UMKM;

5. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

- a. Perwujudan sistem, peraturan dan prosedur dalam pembangunan perkotaan dan birokrasi pemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota berkelanjutan;
- b. Peningkatan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola kota berkelanjutan, melalui pendidikan, pelatihan dan penilaian kinerja secara bersikembungan;
- c. Penyederhanaan proses perijinan dan berusaha bagi para pelaku ekonomi termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- d. Pembangunan dan pengembangan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota dan antar tingkatan pemerintahan terutama dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur;
- e. Pengembangan dan penyediaan pusat data dan informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses;
- f. Peningkatan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialog perencanaan dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan, maupun dalam pembangunan kota berkelanjutan, seperti: pembangunan infrastruktur perkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruang kota.

8.5.2.2. Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, arah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan di Wilayah Sumatera adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dan kawasan

perdesaan diarahkan pula untuk membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan perdesaan melalui integrasi kawasan perdesaan pada 8 kawasan pertumbuhan, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 8.3. Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, serta pulau-pulau kecil terluar di Wilayah Sumatera akan dilakukan:

- 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografisnya**
 - a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar, baik perumahan, sanitasi, air minum, pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan desa tertinggal dan berkembang;
 - b. Meningkatkan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan khususnya di desa-desa terpencil;
 - c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat maupun air penghubung antar desa maupun penghubung desa dengan pusat produksi dan pemasaran;
 - d. Meningkatkan kualitas jaringan listrik (tenaga surya, tenaga air, mikro hidro, dll) dan jaringan telekomunikasi.
- 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi**
 - a. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis lokal;
 - b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, bantuan permodalan, dan penyediaan lembaga keuangan mikro;
 - c. Meningkatkan keberdayaan petani dan nelayan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna (*bio-energi, biofloc*) untuk mewujudkan kemandirian pangan;
 - d. Mendukung terwujudnya desa mandiri benih dengan meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana produksi (benih, pupuk, jaringan irigasi, bendungan, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasi nelayan), pasca panen (sistem logistik), dan pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa.
- 3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk permukiman transmigrasi**
 - a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kelompok/lembaga masyarakat (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI) melalui



- fasilitasi dan pendampingan berkelanjutan dalam perencanaan, pemetaan, pembangunan, dan pengelolaan desa;
- b. Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa desa pesisir secara berkelanjutan
 - c. Menguatkan lembaga adat dan Desa Adat, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat (termasuk suku adat terasing) disesuaikan dengan kearifan lokal;
 - d. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan, khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal (bidan desa, dukun beranak);
 - e. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bidang ketrampilan dan kewirausahaan berbasis potensi lokal;
 - f. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber energi terbarukan.
- 4. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan**
- a. Mensosialisasikan peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa
 - b. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa, (iii) pelayanan publik dan administrasi pemerintahan desa, (iv) Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital, (v) penataan desa;
 - c. Menguatkan pemerintah desa, masyarakat, dan kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;
 - d. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
 - e. Fasilitasi penyiapan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa;
 - f. Fasilitasi kerjasama antar desa termasuk penyusunan badan kerjasama antar desa.
- 5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi**
- a. Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan (*land reform*);
- c. Menjamin hak bagi desa-desa dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berskala lokal yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana;
- d. Fasilitasi peningkatan kemandirian pangan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan lumbung pangan dan pengenalan keanekaragaman pangan lokal;
- e. Fasilitasi peningkatan kemandirian energi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan penyediaan pembangkit listrik bertenaga energi alternatif (angin, ombak, surya, dan energi terbarukan lainnya) di kawasan terpencil dan kepulauan.
- f. Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana, termasuk daerah pesisir dan daerah aliran sungai.

6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota

- a. Mewujudkan sentra industri pertanian organik dan non organik (padi, jagung, kedelai) dan perkebunan (karet, kopi, kelapa sawit) di kawasan Peureulak, Peureulak Timur, Peureulak Barat, Ranto Peureulak, Peunaron, Argo Makmur, Amanjaya, Padang Jaya, Marta Pura, Bungamayang, Cempaka, Buay Pemuka Peliung, Mesuji, Banyuasin;
- b. Mewujudkan sentra industri perikanan tangkap dan budidaya (rumput laut, udang, ikan bandeng, ikan kerapu) di kawasan Peureulak dan Mandeh Kluet Raya, Lawe, Bireun, Bagan Siapi-api, Sinaboi, Desa Ranah, Koto Panjang, dan Lubuk Sakat;
- c. Pengembangan kawasan pariwisata di Pulau Rupa, Pantai Barat Lampung, Teluk Kiluan, Kelagian, Tanjung Putus, Way Kambas, dan Gunung Krakatau;
- d. Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha dan pemasaran dan informasi pasar;
- e. Mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi/KUD, bank khusus pertanian, BUMDesa, lembaga perkreditan desa dan lembaga ekonomi mikro lainnya;
- f. Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan lembaga keuangan dan perbankan.

8.5.2.3. Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Sumatera

Peningkatan keterkaitan desa-kota di Wilayah Sumatera diarahkan dengan memperkuat 8 pusat pertumbuhan, yaitu Kawasan Peureulak dan sekitarnya (Provinsi Aceh), Sidikalang dan sekitarnya (Provinsi Sumatera Utara), Tapan dan sekitarnya (Provinsi Sumatera Barat), Batik Nau dan sekitarnya (Provinsi Bengkulu), Baturaja dan sekitarnya (Provinsi Sumatera Selatan), Mesuji dan sekitarnya (Provinsi Lampung), Tanjung Siapi-api dan sekitarnya (Provinsi Sumatera Selatan), serta Toboali dan sekitarnya (Provinsi Bangka Belitung). Kawasan-kawasan ini mencakup kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata (lihat tabel 8.7).

Kebijakan untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan perdesaan menjadi pusat pertumbuhan baru terutama di desa-desa mandiri. Adapun prioritas strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:

- 1. Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota Kecil, dan antar Kota Kecil dan Desa.**
 - a. Mempercepat pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal;
 - b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Sumatera, Pelabuhan Tanjung Siapi-Api dan Tanjung Pandan, bandar udara Tanjung Pandan, serta angkutan penyebrangan yang melayani Kawasan Batik Nau dan Bangka Belitung;
 - c. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah;
 - d. Meningkatkan kualitas suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri, dengan prioritas pada pengembangan PLTU dan PLTG/MG di Bangka Belitung.
- 2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi**
 - a. Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian di di Kawasan Peureulak, Sidikalang, Tapan, Batik Nau, Baturaja, Mesuji, Tanjung Siapi-api, dan Batu Betumpang sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan di Kawasan Peureulak, Tapan, Tanjung Siapi-Api, dan Tanjung Pandan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan (lihat Tabel 8.6) dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasarana produksi;
- c. Mengembangkan daya tarik wisata alam dan sejarah di Kawasan Pariwisata Danau Toba melalui peningkatan promosi, perbaikan dermaga wisata, perbaikan jalur darat dan peningkatan signage menuju destinasi wisata, pengembangan wisata air dan wisata budaya suku batak, peningkatan kualitas penginapan, rumah makan, dan cafe outdoor;
- d. Membangun bank pertanian dan perikanan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan;
- e. Mengembangkan *Techno Park* berbasis pertanian dan perikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa.

3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan desa-kota

- a. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien;
- b. Mengembangkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah;
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalam tata kelola ekonomi lokal;
- d. Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama
- e. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektor pertanian dan perikanan;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian daerah resapan, pesisir, serta mitigasi bencana, terutama Kawasan Perdesaan Pesisir Peureulak, Tappan, Tanjung Siapi-Api, dan Toboali;

Secara diagramatis, lokasi prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 8.2. dan Tabel 8.4-8.6.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 8.4.
**LOKASI PRIORITAS KAWASAN STRATEGIS NASIONAL PERKOTAAN SEBAGAI
PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI WILAYAH SUMATERA**

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
K1	Kawasan Perkotaan Metropolitan Mebidangro: Kota Medan, Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo)	Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang diarahkan sebagai pusat administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Sumatera Utara bagian Timur dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional
K2	Kawasan Perkotaan Metropolitan Palapa Padang, Lubuk Alung, Pariaman	Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi pada mendorong perkembangan sektor produksi prioritas seperti: Industri; Perikanan laut; Pariwisata; dan Perdagangan dan jasa
K3	Kawasan Perkotaan Metropolitan Perkotaan Patungraya Agung: Palembang (Kota Palembang), Betung (Kab. Banyuasin), Inderalaya (Kab. Ogan Ilir), Kayu Agung (Kab. Ogan Komering Ilir)	Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Sumatera bagian Selatan dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Internasional sekaligus sebagai pusat pelaksanaan kegiatan berskala Internasional. Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Sumatera bagian Selatan dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Internasional sekaligus sebagai pusat pelaksanaan kegiatan berskala Internasional. untuk pusat perdagangan dan jasa, simpul produksi dan distribusi, dan perluasan kegiatan hilirisasi industri dan pertanian dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan menuju pusat kegiatan global

Sumber : Bappenas, 2014

TABEL 8.5.
**LOKASI PRIORITAS KOTA SEDANG YANG BERFOKUS PADA UPAYA
PEMERATAAN WILAYAH DI WILAYAH SUMATERA**

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
P1	Banda Aceh	Diarahkan sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) serta pusat pemerintahan Provinsi NAD sekaligus sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional untuk produksi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
		pertanian, pariwisata, perikanan laut
P2	Tebing Tinggi	Sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) yang berorientasi mendorong potensi produksi pertanian dengan cara meningkatkan spesialisasi fungsi sektor pertanian dan perdagangan
P3	Dumai	Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dengan fokus pusat administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet emasaran untuk wilayah Riau bagian timur serta berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perkebunan, industri, perdagangan, pertambangan dan perikanan
P4	Bukittinggi	Sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) yang berorientasi mendorong perkembangan sektor produksi prioritas seperti: Pariwisata; dan Pertanian
P5	Lubuklinggau	Diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan wilayah (PKW) yang berfungsi sebagai pemerataan pembangunan di wilayah sumatera bagian selatan
P6	Prabumulih	Sebagai pusat pertumbuhan Wilayah (PKW) untuk mendukung sebagai pusat koleksi dan distribusoi sektor produksi wilayah seperti: perkebunan dan pertambangan
P7	Liwa-Krui	Sebagai komoditi unggulan hasil-hasil perkebunan, perikanan dan pariwisata. Saat ini di kawasan tersebut yang mencakup 3 Kabupaten (Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus) telah dirintis pembangunan agropolitan yang memerlukan dukungan Pemerintah Pusat

Sumber : Bappenas, 2014

TABEL 8.6.
LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BARU PUBLIK YANG MANDIRI
DAN TERPADU DI WILAYAH SUMATERA

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
B1	Padang	Sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (<i>urban sprawl</i>) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya
B2	Palembang	Sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (<i>urban sprawl</i>) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya

Sumber : Bappenas, 2014; Lokasi Prioritas: Data Sementara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 8.7
LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KETERKAITAN DESA-KOTA UNTUK
MEMPERKUAT PUSAT PERTUMBUHAN DI SUMATERA

Kode	Lokasi Kawasan	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
D1	Peureulak dan sekitarnya (Kab. Aceh Timur, Prov. Aceh)	Kawasan Agropolitan (Padi): Peureulak, Peureulak Timur, Peureulak Barat, Ranto Peureulak, Peunaron Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya: Peureulak Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap: Idie Kawasan Transmigrasi: Peunaron, Aluemerah Kota Otonom Terdekat : Lhoksumawe	Padi Udang Bandeng Perikanan Tangkap
D2	Sidikalang dan sekitarnya (Kab. Pakpak Bharat, Prov. Sumut)	PKW Sidikalang Kawasan Transmigrasi: Majanggut Kawasan Pariwisata: KSPN Danau Toba Kota Otonom Terdekat : Subulusalam dan Pematang Siantar	Padi Karet Kopi Wisata Bentang Alam Wisata Budaya
D3	Tapan dan sekitarnya (Kab. Pesisir Selatan, Kab. Limapuluh Kota, Prov. Sumbar)	Perkotaan Tapan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya: Mandeh KPB Lunang Silaut Kawasan Transmigrasi: Painan PKW Terdekat: Muko-Muko (Bengkulu) Kota Otonom Terdekat : Kota Sungai Penuh	Ikan Kerapu Padi Karet Gambir
D4	Batik Nau dan sekitarnya (Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu)	Perkotaan Batik Nau Kawasan Agropolitan (Padi): Argo Makmur, Amanjaya, Padang Jaya KPB Lagita Kawasan Transmigrasi: Argo Makmur Kota Otonom Terdekat : Kota Bengkulu	Padi Karet Kelapa Sawit
D5	Baturaja dan sekitarnya (Kab Ogan Komering	PKW Baturaja Kawasan Agropolitan (Jagung): Marta Pura, Bungamayang,	Jagung

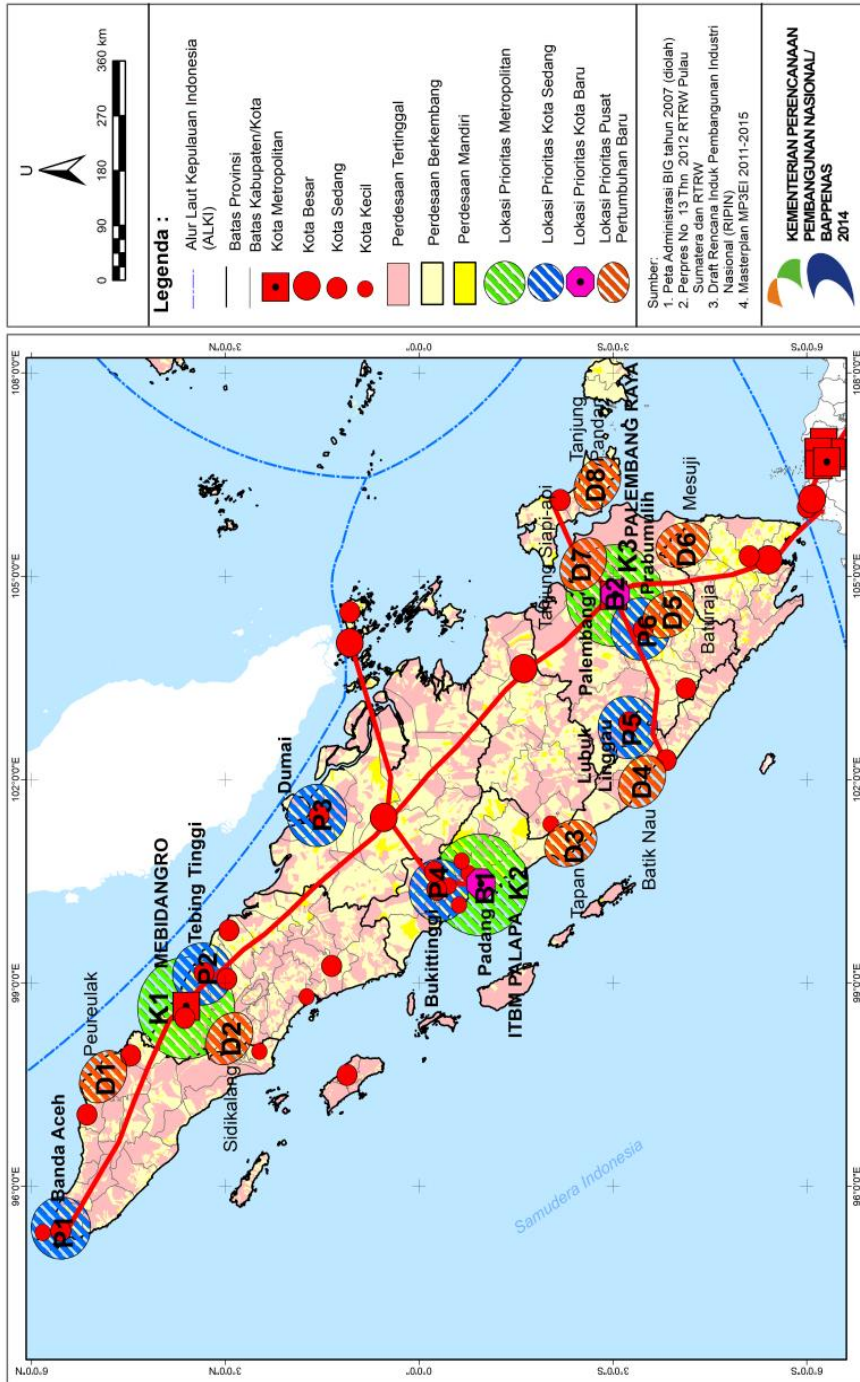


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kode	Lokasi Kawasan	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
	Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Prov. Sumsel)	Cempaka, Buay Pemuka Peliung KPB Belitang Kawasan Transmigrasi: Air Komering, PKW Terdekat: Baturaja Kota Otonom Terdekat: Metro	
D6	Mesuji dan sekitarnya (Kab. Mesuji dan Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung)	Perkotaan Mesuji Kawasan Agropolitan (Kedelai): Mesuji KPB Mesuji KPB Rawa Pitu Kawasan Transmigrasi: Rawa Jitu PKW Terdekat: Menggala Kota Otonom Terdekat : Kota Metro dan Kota Palembang	Kedelai
D7	Tanjung Siapi-api dan sekitarnya (Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan)	Perkotaan Tanjung Siapi-api Kawasan Agropolitan (Kedelai): Banyuasin KPB Telang Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap: Sei Sungsang Kawasan Transmigrasi: Air Saleh Kota Otonom Terdekat : Kota Jambi dan Kota Palembang	Kedelai Perikanan Tangkap
D8	Tanjung Pandan dan sekitarnya (Kab. Belitung, Kab. Bangka Selatan, Prov. Bangka Belitung)	KSPN Tanjung Kelayang Perkotaan Toboali KPB Batu Betumpang Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap: Tanjung Pandan dan Manggar Kawasan Transmigrasi: Bukit Anda Kota Otonom Terdekat : Kota Pangkal Pinang	Padi Karet Wisata Bahari Perikanan Tangkap

Sumber : Bappenas, 2014

GAMBAR 8.2.
PETA LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI WILAYAH SUMATERA
RPJMN 2015-2019



8.5.3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan

8.5.3.1. Pengembangan Daerah Tertinggal

Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis energi dan hasil bumi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan. Pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelayanan Publik Dasar

Mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

- 1) Pemerataan distribusi dan kapasitas guru dan tenaga kependidikan diutamakan di wilayah terisolir;
- 2) Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan diutamakan di wilayah terisolir;
- 3) Pemberian tunjangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan diutamakan di bagian utara, bagian selatan, dan kepulauan di wilayah Sumatera-
- 4) Penyediaan rumah dinas guru dan tenaga kependidikan di wilayah terisolir;
- 5) Penyelenggaraan guru kunjung di wilayah terisolir dan perbatasan;
- 6) Pengembangan sekolah kecil di wilayah terisolir dan perbatasan;
- 7) Penyelenggaraan sekolah satu atap di wilayah terisolir dan perbatasan (SD, SMP, SMA/SMK);
- 8) Pembangunan sekolah berasrama di bagian utara, bagian selatan, dan kepulauan di wilayah Sumatera;
- 9) Pengembangan asrama sekolah;
- 10) Pengembangan pendidikan jarak jauh;
- 11) Penyediaan bus sekolah;
- 12) Pengembangan pendidikan kesetaraan (paket A,B,C);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13) Pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untuk daerah tertinggal.

b. Bidang Kesehatan

- 1) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan, khususnya di Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kepulauan Mentawai, dan Lampung Barat;
- 2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya di Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kepulauan Mentawai, dan Lampung Barat;
- 3) Pemberian tunjangan tenaga kesehatan, khususnya di Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kepulauan Mentawai, dan Lampung Barat;
- 4) Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan, khususnya di Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kepulauan Mentawai, dan Lampung Barat;
- 5) Pengadaan sarana kesehatan keliling diutamakan di bagian barat, dan bagian selatan wilayah Sumatera;
- 6) Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulau kecil terluar;
- 7) Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama;
- 8) Pemerataan alat kesehatan dan obat-obatan;
- 9) Pengembangan telemedis di daerah tertinggal.

c. Bidang Energi

- 1) Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU, di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kepulauan Mentawai;
- 2) Pemberian bantuan subsidi listrik pada pemakaian 30-60 kWh;
- 3) Pengembangan energi biogas ramah lingkungan;
- 4) Penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencil.

d. Bidang Informasi dan Telekomunikasi

- 1) Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi khususnya di bagian terpencil dan terisolir wilayah Sumatera;
- 2) Pembangunan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI, khususnya di Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kepulauan Mentawai;
- 3) Pengembangan jaringan internet;
- 4) Pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat di Provinsi Lampung.

e. Bidang Permukiman dan Perumahan

- 1) Pembangunan perumahan layak huni;
- 2) Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di wilayah terisolir;
- 3) Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di kawasan perhutanan, perairan, dan pesisir.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan kinerja perekonomian masyarakat di daerah tertinggal secara terpadu dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan. Strategi ini meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas sarana pelabuhan khususnya untuk sektor agroindustri perkebunan penunjang pengembangan energi dan hasil bumi;
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera seperti penyediaan tenaga pendamping bidang pengelolaan energi dan hasil bumi;
- c. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa Daerah (BUMD) khususnya sub-sektor pangan, perkebunan, dan kawasan pesisir;
- d. Pengembangan sarana distribusi perdagangan melalui pembangunan pasar-pasar percontohan di wilayah Sumatera;
- e. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- f. Pengembangan hilirisasi produk pertanian berbasis kelapa sawit dan integrasi kelapa sawit dengan ternak sapi potong.
- g. Pemberian bantuan bibit pertanian dan perkebunan;
- h. Pengembangan jaringan irigasi;
- i. Pembangunan embung untuk mendukung jaringan irigasi;
- j. Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen;
- k. Pengembangan kelembagaan mikro
- l. Pengembangan koperasi simpan pinjam
- m. Pemberian skema kredit yang afirmatif bagi petani, nelayan, peternak;
- n. Pengembangan produk unggulan perikanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pesisir Barat
- o. Pengembangan sistem logistik ikan melalui penyediaan Cold Storage disetiap sentra perikanan;
- p. Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan infrastruktur, sarana, promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat, khususnya di bagian utara dan barat Wilayah Sumatera;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- q. Pengembangan rumah pusat kebudayaan dan kesenian, museum, khususnya di wilayah Lampung;
- r. Pengembangan pasar kecamatan.

3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas

Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Membuat sistem konektivitas laut untuk mendistribusikan hasil bumi menuju lokasi di luar Pulau Sumatera;
- b. Pengembangan pelabuhan di pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah Sumatera;
- c. Pengembangan jalur keperintisan laut di wilayah kepulauan Sumatera;
- d. Pengembangan dermaga penyebrangan di pulau-pulau kecil.
- e. Pengembangan jaringan logistik darat antara lokasi perkebunan, pengolahan, dan akses ke pelabuhan;
- f. Pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api di kawasan Sumatera bagian barat dan selatan;
- g. Pengembangan bandara perintis di wilayah Sumatera.

4. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan pemangku kepentingan pembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerah yang terintegrasi untuk menunjang pengelolaan hasil bumi dan energi. Strategi ini meliputi aspek peraturan perundangan, tata kelola, SDM, rumusan dokumen kebijakan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) melalui prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pendidikan, kesehatan, listrik, dan telekomunikasi di daerah tertinggal dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;
- b. Peningkatan kualitas aparatur daerah khususnya pada pengembangan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat pada perkebunan, pangan-hortikultura, dan perikanan laut (pesisir) dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;
- c. Pengembangan sekolah kejuruan dan politeknik dalam mendukung pengelolaan hasil bumi dan energi;
- d. Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda;
- e. Pengembangan Balai Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan;
- g. Pengembangan pusat informasi dan teknologi untuk menunjang pengembangan usaha khususnya sub-sektor perkebunan dan perikanan laut;
- h. Peningkatan teknologi pengolahan limbah hasil industri.

5. Penguatan Regulasi dan Insentif

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, bentuk afirmasi yang lebih nyata dan konkrit dilakukan dengan evaluasi terhadap harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pengelolaan hasil bumi dan energi melalui pelaksanaan prioritas kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Strategi Daerah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antar-SKPD dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah;
- d. Menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari hulu-hilir untuk memangkas ongkos produksi hingga 10 persen;
- e. Menata ulang kebijakan penetapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DPT);
- f. Menyusun rencana induk dan rencana aksi pengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri perkebunan, pangan-hortikultura, dan perikanan laut secara terpadu;
- g. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal;
- h. Tunjangan khusus penyuluh Pertanian.

6. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan

Pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM.

7. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

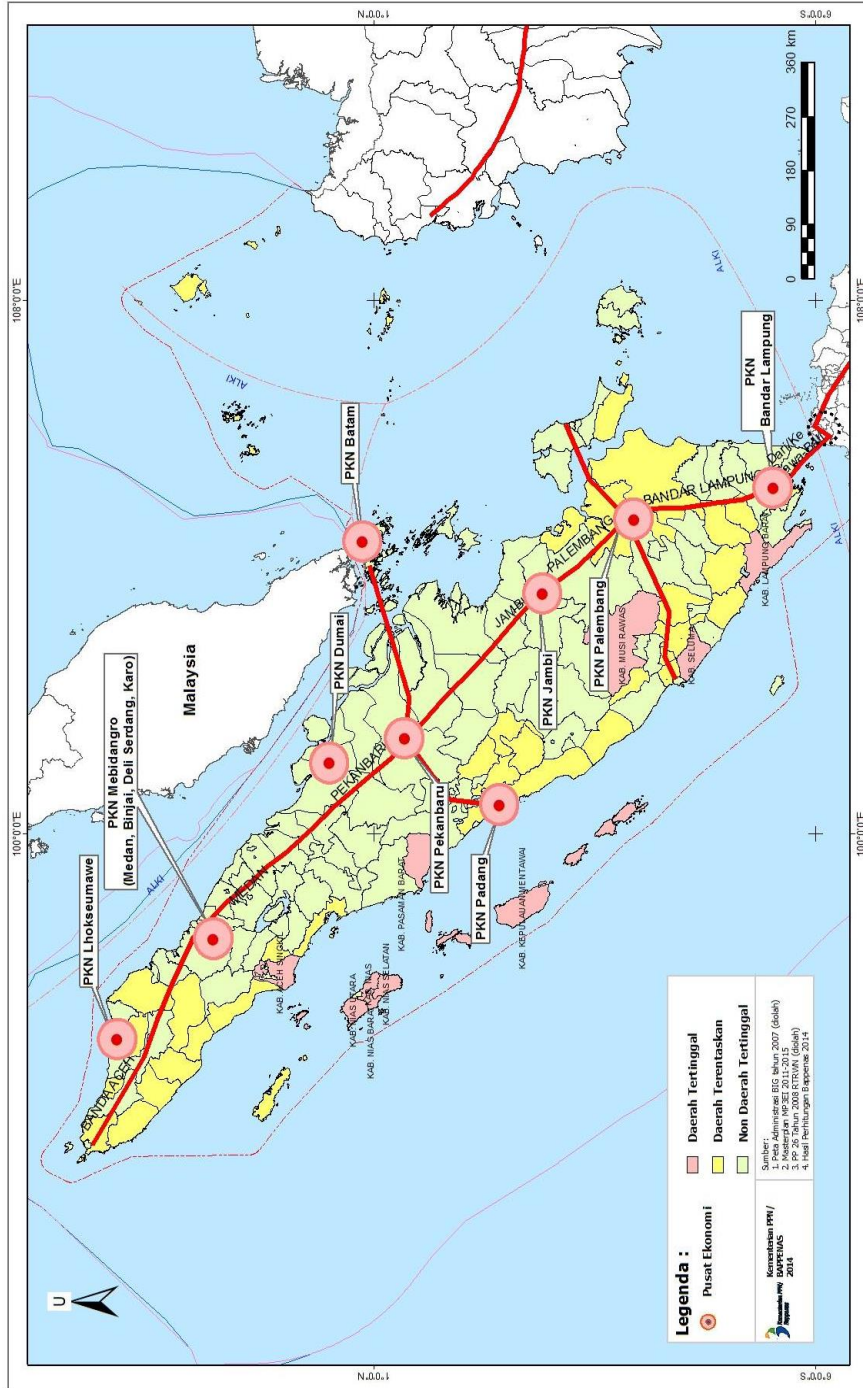
Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Sumatera terdiri dari 10 provinsi dengan total 154 kabupaten/kota, dimana 29,87 persen atau 46 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal. IPM daerah tertinggal di wilayah ini sebesar 71,10, berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,90 persen, jauh dari target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen. Angka kemiskinan di daerah tertinggal Wilayah Sumatera masih sebesar 15,40 persen, jauh dari target Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen. Gambaran umum kondisi daerah tertinggal di wilayah Sumatera secara lebih rinci disajikan dalam Tabel 8.8.

Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Sumatera telah ditetapkan 46 kabupaten tertinggal yang menjadi lokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 terdapat 35 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan. Akan tetapi, terdapat 2 kabupaten dengan status Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran yang masuk kategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Pesisir Barat dan Musi Rawas Utara. Dengan demikian pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di Sumatera sebanyak 13 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan sebanyak 11 kabupaten tertinggal dapat terentaskan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 8.3.
PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH PULAU SUMATERA 2015-2019



8.5.3.2 Pengembangan Kawasan Perbatasan

Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sumatera difokuskan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, India, Vietnam. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sumatera diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Sumatera, yaitu PKSN Sabang, PKSN Ranai, PKSN Batam, PKSN Dumai, PKSN Lhokseumawe, PKSN Medan, PKSN Terempa, dan PKSN Bengkalis serta mempercepat pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun 2015-2019.

Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat. Strategi tersebut diantaranya:

1. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan kawasan perbatasan Sumatera

Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan kawasan perbatasan, secara terpadu di Wilayah Sumatera, dilakukan dengan:

- a. Mengembangkan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu (satu atap) di PKSN Sabang, PKSN Ranai, PKSN Batam, PKSN Dumai, PKSN Lhokseumawe, PKSN Medan, PKSN Terempa, dan PKSN Bengkalis dan Anambas.
- b. Merevitalisasi aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan Riau dan Kepulauan Riau;
- c. Mengembangkan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Penegasan, pemeliharaan, dan pengawasan batas wilayah negara di darat dan laut
- e. Meningkatkan upaya perundingan dalam penetapan dan penegasan batas wilayah negara RI-Malaysia, RI-Singapura, RI-Thailand, RI-Vietnam dan RI-India;
- f. Meningkatkan kapasitas tim perunding dari tingkat teknis hingga kebijakan (pengambilan keputusan);
- g. Menjalin kerjasama pengamanan dan pertahanan kawasan perbatasan negara antara RI-Malaysia, RI-Singapura, RI-Thailand, RI-Vietnam;
- h. Mendayagunakan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Laut, Pulau Subi, Pulau Subi Kecil, Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa dan Pulau-Pulau Kecil Terluar lainnya dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- i. Memperkuat fungsi pengamanan perbatasan wilayah laut baik alutsista maupun non alutsista terutama di Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir (Gugusan Pulau Arwah/Batu Mandi), Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis (Pulau Rupat) dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- j. Sosialisasi batas laut wilayah negara RI-Malaysia, RI-Singapura, maupun RI-Vietnam kepada masyarakat perbatasan Wilayah Sumatera;
- k. Menangani *illegal, unregulated and unreported (IUU) Fishing*;
- l. Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) pertahanan dan keamanan yang profesional bagi aparaturnya pengamanan perbatasan.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasan perbatasan negara di Wilayah Sumatera, dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas supply produk perikanan tangkap terutama dengan penambahan Kapal Tangkap 30 GT dan sumberdaya kelautan ke negara tetangga melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian dan perkebunan untuk mencukupi kebutuhan lokal di Riau dan Kepulauan Riau;
- c. Meningkatkan nilai potensi pariwisata bahari dan budaya di Anambas dan Natuna melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata);
- d. Mengembangkan pusat perdagangan skala internasional berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara tetangga (Singapura dan Malaysia);
- e. Mengembangkan program transmigrasi di kawasan perbatasan dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri di Riau;
- f. Mengembangkan Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan mengelola komoditas unggulan lokal yang berorientasi pasar ke negara tetangga.

3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas

Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan baik ke pusat pertumbuhan maupun konektivitas dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk terutama di Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Bintan (Tambelan), Kepulauan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Meranti, penyebrangan Dumai - Tanjung Beruas (Malaka), dan Tanjung Medang - Tanjung Bruas (Malaka) serta konektivitasnya dengan sistem transportasi laut nasional dan internasional;
- b. Mengembangkan angkutan penyebrangan
 - c. Mengembangkan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di Kepulauan Anambas, Natuna, Tambelan, dan Pulau-Pulau kecil terluar lainnya (untuk Provinsi Aceh, agar dilakukan pengembangan pelabuhan Sabang dan Pengembangan di Pulau Laut, Pulau Sumbi, dan Pulau Serasak pada Provinsi Kepulauan Riau);
 - d. Menyediakan moda keperintisan laut di kawasan perbatasan (terutama di Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir (Gugusan Pulau Arwah/Batu Mandi), Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis (Pulau Rukat) dan Kabupaten Kepulauan Meranti);
 - e. Menjamin ketersediaan logistik, khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
 - f. Pembangunan jalan non status pembuka akses menuju kampung, desa-desa di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri);
 - g. Meningkatkan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi;
 - h. Mengembangkan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, khususnya di PKSN Ranai, PKSN Dumai, dan Anambas (khususnya di Provinsi Aceh agar dilakukan pengembangan Bandara Maimun Shaleh);
 - i. Menyediakan infrastruktur dasar kewilayahan terutama jalan, listrik, terbarukan maupun non terbarukan, air bersih, dan telekomunikasi yang berdaulat di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri).

4. Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing agar mampu mengelola sumber daya alam di kawasan perbatasan darat dan laut, mampu melakukan aktivitas perdagangan dengan negara tetangga dan turut mendukung upaya peningkatan kedaulatan negara dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang berkualitas, dilakukan dengan:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan keterampilan berbasis sumberdaya lokal (kelautan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan) di kawasan perbatasan Riau dan Kepulauan Riau;
- b. Meningkatkan akses pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) di kawasan perbatasan negara, termasuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk dengan penyediaan sarana dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah (sekolah berasrama, transportasi perairan antar jemput sekolah, poskesdes, *mobile clinic*);

- c. Menyediakan tenaga pendidikan dan kesehatan yang handal serta penyediaan insentif, serta sarana prasarana penunjang yang memadai, khususnya di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk terutama rumah guru, fasilitas telekomunikasi dan informasi bagi guru;
- d. Meningkatkan kapasitas aparatur wilayah perbatasan melalui penerapan kebijakan wajib tugas belajar dan pelatihan teknis, agar diperoleh sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuan dan merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan;
- e. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam/potensi energi baru dan terbarukan lokal di kawasan perbatasan.

5. Penguatan Regulasi dan Insentif

Dalam upaya mendukung pengembangan kawasan perbatasan negara, diperlukan harmonisasi regulasi sebagai berikut:

- a. Akses masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung;
- b. Regulasi pengelolaan lintas batas;
- c. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI-Malaysia, RI-Singapura, maupun RI-Vietnam dalam pengembangan kawasan perbatasan negara;
- d. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan;
- f. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan;
- g. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;
- h. Pemberian kewenangan khusus bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- i. Penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kepulauan Riau dan Riau.
- j. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara.

TABEL 8.9
DAFTAR LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
WILAYAH PULAU SUMATERA

No.	Kota/Kabupaten	Kecamatan Lokasi Prioritas
1	Sabang	Sukakarya
2	Serdang Berdagai	Tanjung Beringin
3	Rokan Hilir	Pasirlimau Kapuas; Sinaboi
4	Bengkalis	Bukit Batu, Bantan, Rupal Utara, Rupal, Bengkalis
5	Indragiri Hilir	Pulau Burung; Tanah Merang; Gaung Anak Serka; Kateman;
6	Kepulauan Meranti	Merbau, Rangsang, Pulau Merbau, Tasik Putri Uyu, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir
7	Dumai	Dumai, Dumai Timur, Dumai Barat, Sungai Sembilan, Medang Kampa
8	Pelalawan	Kuala Kampar
9	Natuna	Bunguran Timur, Serasan, Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, Subi, Serasan Timur, Bunguran Utara
10	Kep. Anambas	Jemaja, Jemaja Timur, Palmatak, Siantan
11	Kota Batam	Belakang Padang, Batam Kota, Bulang, Sekupang, Lubuk Raja, Nongsa, Batu Ampar, Batu Aji
12	Bintan	Bintan Utara, Tambelan, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Gunung Kijang
13	Karimun	Kundur, Meral, Moro, Unggar, Meral Barat, Tebing

Sumber : Bappenas, 2014

8.5.4. Penanggulangan Bencana

Pada umumnya PKN, PKW dan PKS di Wilayah Sumatera memiliki risiko tinggi terhadap bencana. Potensi ancaman bencana yang dominan terjadi di Wilayah Sumatera adalah banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api dan kebakaran hutan dan lahan.

Risiko bencana alam yang tinggi di wilayah Sumatera disebabkan oleh tingginya ancaman bencana, potensi jumlah penduduk terpapar tinggi dan kerugian ekonomi yang tinggi. Kemudian, kapasitas kelembagaan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana belum memadai. Berdasarkan DIBI yang merekam kejadian bencana tahun 1815-2014, berbagai kejadian bencana di Pulau Sumatera telah mengakibatkan 176.581 orang meninggal dunia, 63.041 orang luka-luka, 6.984 orang hilang, 2.129.726 orang mengungsi dan 460.531 rumah hancur/rusak.

Memperhatikan kondisi diatas, maka arah kebijakan penanggulangan bencana di wilayah Sumatera adalah mengurangi indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap bencana, yang dapat dilakukan melalui strategi:

- 1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, melalui:**
 - a. Mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah;
 - b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada 15 kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 di 6 kota sasaran;
 - c. Integrasi kajian dan peta risiko dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - d. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), di 21 Kabupaten/Kota dan menjadi masukan untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota.
 - e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah.

2. Penurunan kerentanan terhadap bencana, melalui:

- a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan
- b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi di 21 kabupaten/kota risiko tinggi.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat.
- d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana di Pulau Sumatera, yaitu: letusan gunung api Sinabung, Kabupaten Karo, Kepulauan Mentawai, Aceh Tengah, Bener Meriah, Sumatera Barat dan daerah pasca bencana alam lainnya.
- e. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) kritis dan daerah rawan bencana alam di Pulau Sumatera.
- f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, melalui:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah melalui pembangunan gedung kantor di 21 kabupaten/kota.
- b. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
- c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami pada kabupaten/kota di pesisir pantai barat Pulau Sumatera yang rawan dan risiko tinggi terhadap bencana tsunami serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.
- d. Pemantauan dan penyediaan sistem peringatan dini erupsi gunung api di Pulau Sumatera serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.
- e. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- f. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- g. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api.
- h. Meningkatkan monitoring *hot spot* kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung.
- i. Membangun dan memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana.
- j. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di 21 kabupaten/kota risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat.
- k. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 2 (dua) unit pusat logistik kebencanaan di wilayah Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Selatan yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.
- l. Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana di daerah.

TABEL 8.10.
PROFIL KERAWANAN DAN RISIKO PKN, PKW DAN PKS
DI WILAYAH SUMATERA

Lokasi	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013)
Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi lainnya di Aceh	Kota Banda Aceh: tinggi untuk gempa bumi, tsunami, abrasi, cuaca ekstrim	Kota Banda Aceh: Tinggi
KBPB Sabang	Kota Sabang: tinggi untuk bencana cuaca ekstrim, banjir dan tanah longsor,	Kota Sabang: sedang
KEK Sei Mangkei/ Kawasan Industri Sei Mangke	Kabupaten Simalungun: tingkat kerawanan sedang untuk bencana banjir, gempa bumi, cuaca ekstrim.	Kabupaten Simalungun: sedang
KBPB Batam di Kota Batam	Kota Batam: tingkat kerawanan tinggi untuk bencana banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan.	Kota Batam: sedang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013)
KPBPB Bintan di Kabupaten Bintan	Kabupaten Bintan: tingkat kerawanan sedang	Kabupaten Bintan: sedang
KPBPB Tanjung Pinang	Kota Tanjung Pinang: tingkat kerawanan sedang	Kota Tanjung Pinang: sedang
KPBPB Karimun di Kabupaten Karimun	Kabupaten Karimun: tingkat kerawanan sedang	Kabupaten Karimun: sedang
KEK Tanjung Api-Api	Kabupaten Banyuasin : tingkat kerawanan tinggi untuk cuaca ekstrim dan sedang untuk bencana banjir	Kabupaten Banyuasin: tinggi
KSN Perkotaan Mebidangro: Kota Medan, Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo)	Kota Medan: tinggi untuk bencana banjir, cuaca ekstrim, abrasi, Kota Binjai:tinggi untuk bencana banjir Kabupaten Langkat: tinggi untuk bencana banjir, cuaca ekstrim, kekeringan. Kabupaten Deli Serdang: tinggi untuk bencana banjir, cuaca ekstrim, kekeringan. Kabupaten Karo: letusan gunung api,	Kota Medan: tinggi Kota Binjai: sedang Kabupaten Langkat: tinggi Kabupaten Deli Serdang: tinggi Kabupaten Karo: tinggi
PKN ITBM Palapa Padang,Lubuk Alung, Pariaman, Indarung, Teluk Bayur, Bungus, Mandeh	Kota Padang: tinggi untuk bencana banjir, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim, abrasi dan kekeringan, Kabupaten Padang Pariaman: tinggi untuk bencana banjir, gempa, cuaca ekstrim, tanah longsor dan abrasi	Kota Padang: tinggi Kabupaten Padang Pariaman: tinggi
PKN-Patungraya Agung (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering	Kota Palembang: tinggi untuk banjir dan cuaca ekstrim Kabupaten Banyuasin: rawan tinggi untuk bencana banjir, dan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Ogan Komering	Kota Palembang: sedang Kabupaten Banyuasin: tinggi Kabupaten Ogan Komering Ilir: tinggi Kabupaten Ogan Ilir : Sedang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013)
Iilir)	Iilir rawan tinggi untuk bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Ogan Iilir: rawan tinggi untuk bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan.	
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sumatera		
Padang	Tinggi untuk ancaman: Gempabumi, banjir, longsor, cuaca ekstrim, abrasi.	Kota Padang: tinggi
Bandar Lampung	Tinggi untuk ancaman: Banjir, longsor, cuaca ekstrim, abrasi, kekeringan.	Bandar Lampung: tinggi
Jambi	Jambi: tinggi untuk bencana banjir dan tanah longsor	Jambi: tinggi
Bengkulu	Tinggi untuk ancaman: Gempabumi, banjir dan tanah longsor, kekeringan, kebakaran permukiman	Kota Bengkulu: Tinggi
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sumatera		
Kota Lhokseumawe	Tinggi untuk ancaman: Gempabumi, tsunami, cuaca ekstrim, abrasi.	Kota Lhokseumawe: tinggi
Padang Sidempuan	Tinggi untuk ancaman: banjir	Kota Padang Sidempuan: Sedang
Bukittinggi	Tinggi untuk ancaman: gempabumi, kebakaran permukiman	Kota Bukittinggi: Sedang
Muara Enim	Tinggi untuk ancaman: banjir, cuaca ekstrim	Muara Enim: Tinggi
Lahat	Tinggi untuk ancaman: Gempabumi, letusan gunung api, banjir dan tanah longsor, cuaca ekstrim	Lahat: Tinggi
Curup - Kab.Rejang Lebong	Tinggi untuk ancaman: letusan gunung api, banjir, kebakaran permukiman	Rejang Lebong: Tinggi
Manna - Kab. Bengkulu Selatan	Tinggi untuk ancaman: banjir, kebakaran permukiman	Bengkulu Selatan: Tinggi
Mukomuko	Tinggi untuk ancaman:	Mukomuko: Tinggi
Sabang	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor,	Kota Sabang: Sedang

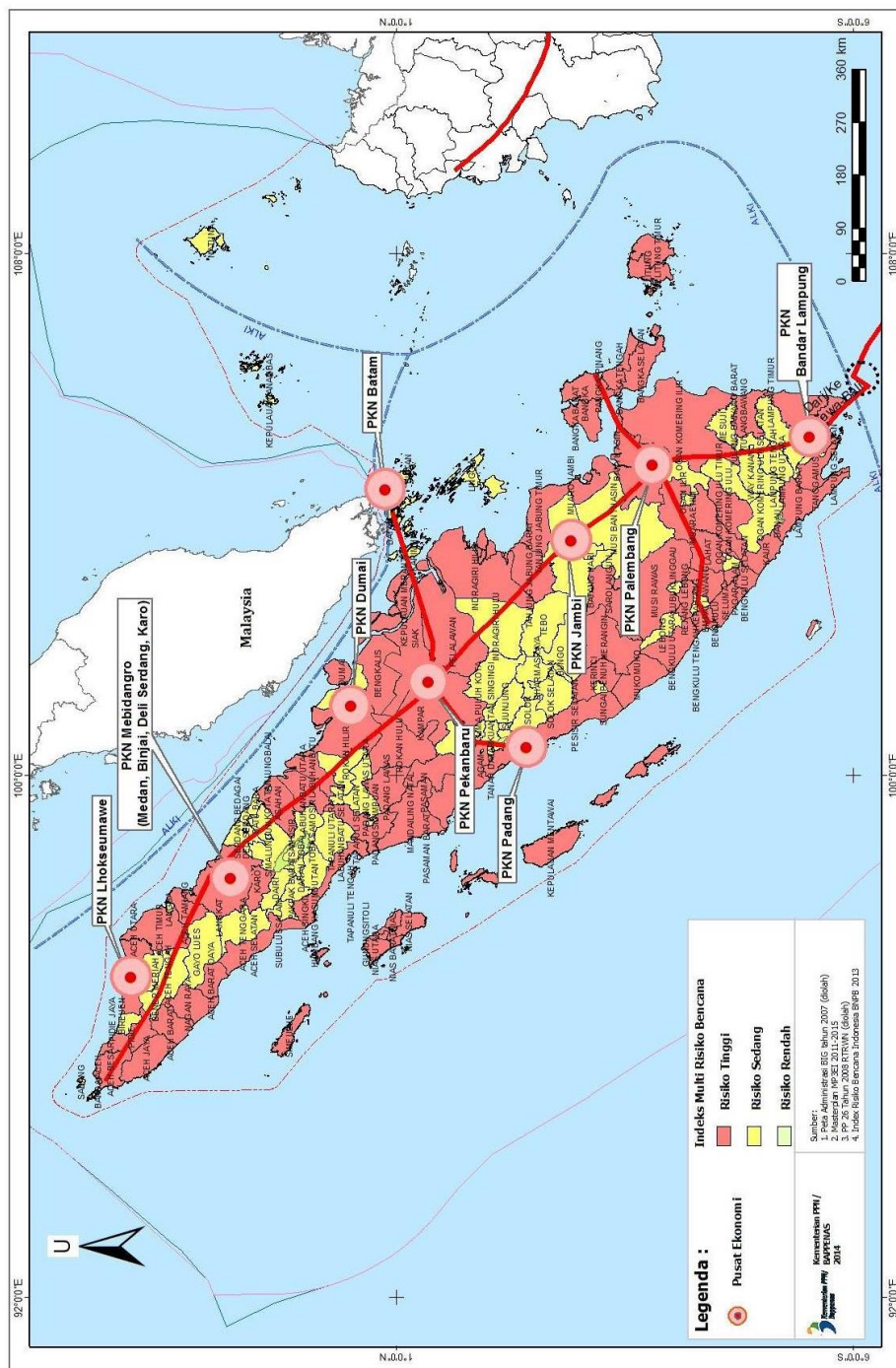


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013)
	cuaca ekstrim	
Meulaboh – Kab. Aceh Barat	Tinggi untuk ancaman: Gempabumi, tsunami, banjir, cuaca ekstrim, abrasi.	Aceh Barat: Tinggi
Gunung Sitoli	Tinggi untuk ancaman: gempabumi	Kota Gunung Sitoli: Tinggi
Sibolga	Tinggi untuk ancaman: Gempabumi, banjir dan tanah longsor, kebakaran permukiman	Kota Sibolga: Tinggi
Pariaman	Tinggi untuk ancaman: Gempabumi	Kota Pariaman: Tinggi
Muara Siberut – Kab. Kepulauan Mentawai	Tinggi untuk ancaman: Gempabumi, tsunami, tanah longsor, abrasi	Kepulauan Mentawai: Tinggi
Kalianda – Kab.Lampung Selatan	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, cuaca ekstrim, abrasi kekeringan	Lampung Selatan: Tinggi
Kota Agung – Kab. Tanggamus	Tinggi untuk ancaman: banjir, cuaca ekstrim, abrasi, kekeringan	Tanggamus: Tinggi
Liwa – Kab. Lampung Barat	Tinggi untuk ancaman: banjir dan tanah longsor, gempabumi, cuaca ekstrim	Lampung Barat: Tinggi
Sarolangun	Tinggi untuk bencana banjir	Sarolangun: tinggi
Kabupaten Kerinci	Tinggi untuk bencana banjir, gempa bumi	Kabupaten Kerinci: tinggi
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sumatera		
Sabang	Tinggi untuk ancaman: kebakaran permukiman, cuaca ekstrim, banjir dan tanah longsor	Kota Sabang: Sedang
Dumai	Tinggi untuk ancaman: data tidak tersedia.	Kota Dumai: Sedang
Batam	Tinggi untuk ancaman: Banjir dan tanah longsor, kebakaran permukiman, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan kecelakaan transportasi	Kota Batam: Sedang
Ranai – Kab. Natuna	Tinggi untuk ancaman: data tidak tersedia	Natuna: Sedang

Sumber : Diolah, Bappenas 2014

GAMBAR 8.5.
PETA INDEKS RISIKO BENCANA WILAYAH PULAU SUMATERA 2015-2019



8.5.5 Penataan Ruang Wilayah Sumatera

A. Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Sumatera

1. Kebijakan mewujudkan pusat pertumbuhan baru di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dilakukan dengan pengembangan kawasan perkotaan nasional berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
2. Kebijakan mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah; dan
 - b. Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
3. Kebijakan mewujudkan kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40 persen (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya meliputi:
 - a. Pemertahanan luasan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan
 - b. Pengembangan pengelolaan potensi kehutanan dengan prinsip berkelanjutan.
 - c. Implementasi pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas;
 - d. Perlindungan mata air di Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas;
 - e. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS;
 - f. Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan DAS dengan mempertimbangkan morfologi tanah, curah hujan, kondisi geologi, dan jenis tanamannya.
4. Kebijakan mewujudkan kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah melalui pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi.
5. Kebijakan mewujudkan pusat industri yang berdaya saing melalui pengembangan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat industri.
6. Kebijakan mewujudkan KSN Perbatasan Negara dan KSN sudut kepentingan ekonomi melalui pengembangan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, Kawasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Kawasan Perkotaan Medan–Binjai–Deli Serdang–Karo (Mebidangro), Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), dan KPBPB Sabang.

B. Strategi Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sumatera

I. Struktur Ruang Pulau Sumatera

1. Strategi pengembangan pusat kegiatan, dilakukan dengan:
 - a. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pertumbuhan perkebunan, agropolitan, pariwisata, minapolitan, dan pertambangan untuk pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
 - b. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional.

Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 8.11.

TABEL 8.11
PRIORITAS LOKASI PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN
PERIODE 2015-2019

Provinsi	Pusat Kegiatan dalam RTRWN		
	PKN	PKW	PKSN
Aceh		Lhokseumawe	Lhokseumawe
		Sabang (I/C/1)	
		Langsa (II/C/3)	
		Takengon (II/C/1)	
		Meulaboh (I/D/1), (II/C/3) Tuapejat	
			Sabang (I/A/ 2)
Sumatera Utara	Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli-Serdang-Karo (Mebidangro) (I/C/3)		
		Tebing Tinggi (II/C/1)	Medan
		Sidikalang (II/B)	
		Pematang Siantar (I/C/1)	
		Balige (II/C/1)	
		Rantau Prapat (I/C/1)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Provinsi	Pusat Kegiatan dalam RTRWN		
	PKN	PKW	PKSN
		Kisaran (II/C/1)	
		Gunung Sitoli (I/D/1), (II/C/1)	
		Padang Sidempuan (II/C/1)	
		Sibolga (I /C/1)	
Sumatera Barat	Padang (I/C/1)		
		Pariaman (II/C/1)	
		Sawahlunto (II/C/1)	
		Muarasiberut (II/C/2)	
		Bukittinggi (I/C/1)	
		Solok (II/C/2) Payakumbuh	
Riau	Pekanbaru (I/C/1)		
	Dumai (I/C/1)		
		Bangkinang (II/B)	Bengkalis
		Taluk Kuantan (II/C/1)	
		Bengkalis (II/B)	
		Bagan Siapi-api (II/B)	
		Tembilahan (I/C/1)	
		Rengat (II/C/1)	
		Pangkalan Kerinci (II/C/1)	
		Pasir Pangarayan (I/C/1)	
		Siak Sri Indrapura (II/C/1)	
		Dumai (I/A/1) Tarempa	
Kepulauan Riau	Batam (I/C/3)		
		Tanjung Pinang	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Provinsi	Pusat Kegiatan dalam RTRWN		
	PKN	PKW	PKSN
		(I/C/1)	
		Terempa (II/B)	
		Daik Lingga (II/B)	
		Dabo - Pulau Singkep (II/B)	
		Tanjung Balai Karimun (I/C/1)	
			Batam (I/A/1)
			Ranai (I/A/2)
Jambi	Jambi (I/C/1)		
		Kuala Tungkal (II/B)	
		Sarolangun (II/B)	
		Muarabungo (I/C/1)	
		Muara Bulian (II/C/1)	
		Muara Sabak	
Sumatera Selatan	Palembang (I/C/1)		
		Muara Enim (I/C/1)	
		Kayuagung (II/B)	
		Baturaja (II/B)	
		Prabumulih (II/C/1)	
		Lubuk Linggau (I/C/1)	
		Sekayu (II/B)	
		Lahat (II/B)	
Bengkulu	Bengkulu	Manna (I/C/1)	
		Muko-Muko (II/C/2)	
		Curup (II/C/2)	
Bangka Belitung		Pangkal Pinang (I/C/1)	
		Muntok (II/B)	
		Tanjungpandan (I/B)	
		Manggar (II/B)	
Lampung	Bandar Lampung (I/C/1)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Provinsi	Pusat Kegiatan dalam RTRWN		
	PKN	PKW	PKSN
		Metro (II/C/1)	
		Kalianda (II/B)	
		Liwa (II/C/2)	
		Menggala (II/B)	
		Kotabumi (I/C/1)	
		Kota Agung (II/B)	

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014

2. Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi, dan daya saing ekonomi wilayah dilakukan dengan:
 - a. Mengembangkan dan memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan/atau udara yang menghubungkan antarkawasan perkotaan, dan memantapkan koridor ekonomi Pulau Sumatera;
 - b. Meningkatkan fungsi dan/atau mengembangkan jaringan transportasi dengan memperhatikan kawasan berfungsi lindung; dan
 - c. Mengembangkan dan memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat yang meliputi jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi sungai, danau, dan lintas penyeberangan yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan sentra produksi, bandar udara, dan pelabuhan.
3. Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil dilakukan dengan:
 - a. Mengembangkan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
 - b. Mengembangkan sistem transportasi antarmoda menuju kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.



II. Pengembangan Kawasan Lindung

1. Strategi untuk pemertahanan luasan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. menetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
 - c. memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau;
 - d. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS;
 - e. Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan DAS dengan mempertimbangkan morfologi tanah, curah hujan, kondisi geologi, dan jenis tanamannya.
2. Strategi untuk pengembangan pengelolaan potensi kehutanan dengan prinsip berkelanjutan, dilakukan dengan:
 - a. merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi;
 - b. mengembangkan sentra kehutanan (*forest based cluster industry*) pada kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Strategi perwujudan kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah, dilakukan dengan:
 - a. Menetapkan koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam; dan
 - b. Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budi daya pada koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi.

III. Pengembangan Kawasan Budidaya

Strategi perwujudan pusat industri yang berdaya saing melalui pengembangan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat industri dilakukan dengan mengembangkan keterkaitan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.

IV. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional

Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dikembangkan 5 (lima) KSN yang mendukung pengembangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

wilayah di Pulau Sumatera. Strategi pengembangan kawasan strategis nasional di Pulau Sumatera dapat dilihat pada Tabel 8.11.

TABEL 8.12
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
DI PULAU SUMATERA

No	KSN	Tipe	Strategi	K/L
1	KPBPB Sabang	Kepentingan Ekonomi	Mengembangkan Kawasan Sabang sebagai pusat perdagangan dan jasa kepelabuhan serta pariwisata internasional	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Agraria dan Tata Ruang- Kementerian Koordinator Perekonomian- Kementerian Pariwisata
2	Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,	Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	Menetapkan batas laut sebagai kawasan yang memiliki fungsi pertahanan dan keamanan dengan Negara India, Thailand dan Malaysia	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Agraria dan Tata Ruang- BNPP- Kementerian Pertahanan- Kementerian Kelautan dan Perikanan
3	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau		Merehabilitasi dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung dalam rangka mempertahankan pulau-pulau kecil terluar dan pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara di Perbatasan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan di Perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Perhubungan- Kementerian PU dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	KSN	Tipe	Strategi	K/L
4	Kawasan Perkotaan Mebidangro	Kepentingan Ekonomi	Mengembangkan dan memantapkan fungsi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional terutama dalam kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Agraria dan Tata Ruang- Bappenas- Kementerian Koordinator Perekonomian
5.	Kawasan Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya-Kayuagung (Patungraya Agung)	Kepentingan Ekonomi	Mengembangkan dan memantapkan fungsi Kawasan Perkotaan Patung Raya Agung sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Agraria dan Tata Ruang- Bappenas- Kementerian Koordinator Perekonomian

Sumber: Data diolah, Bappenas, 2014

8.5.5. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Arah kebijakan pengembangan Wilayah Sumatera yakni peningkatan kapasitas pemerintahan daerah yang mendorong daya saing dan pemerataan pelayanan, dengan strategi:

1. Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan;
2. Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat;
3. Penguatan regulasi sinergi perencanaan dan penganggaran;
4. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada tiap pemerintah daerah yang terintegrasi dengan manajemen kinerja;
5. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
6. Penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah.
7. Peningkatan proporsi belanja modal;
8. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara *on-line*;
9. Penguatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah.

8.6. KAIDAH PELAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA

8.6.1. Prioritas Program Pembangunan

8.6.1.1. Provinsi Aceh

TABEL 8.13.
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI ACEH

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan Jalur KA Banda Aceh-Lhokseumawe
2. Pembangunan jalur KA Banda Lhokseumawe-Langsa-Besitang
3. Pembangunan jalur KA antara Bireun - Lhokseumawe
4. Pembangunan jalur KA antara Sigli - Bireun (tahap 1)
PERHUBUNGAN DARAT
1. Revitalisasi Kawasan Terminal di Banda Aceh (Keudah dan Peunayong)
PERHUBUNGAN UDARA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
1. Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda
2. Pengembangan Bandara Maimun Saleh, Sabang
3. Peningkatan Bandara Lasikin
4. Peningkatan Bandara Gayo Lues
5. Peningkatan Bandara Rambele
6. Peningkatan Bandara Cut Nyak Dhien
7. Peningkatan Bandara T.Cut Ali
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pembangunan dan Perluasan Pelabuhan Krueng Geukuh
2. Pengembangan Pelabuhan Sabang
3. Pembangunan Pelabuhan Malahayati Banda Aceh*
4. Pembangunan Pelabuhan Susuh di Teluk Surin Aceh Barat Daya
5. Pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa
6. Pengembangan Pelabuhan Singkil
JALAN
1. Pembangunan Jalan Kruengraya-Tibang
2. Pembangunan Jalan Gempang - Pameuh
3. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Simelue
4. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Weh (Sabang - Keuneukal)
5. Pembangunan Jalan Takengon-Sp.Peut
ENERGI
1. Revitalisasi kilang LNG Arun 400 mmscf
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Meulaboh*
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sinabang
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P.Banyak
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTGU/MGU Sumbagut-2 Peaker (Arun) 250 MW
2. PLTU Meulaboh #3 200 MW
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Waduk Jambo Aye Kab. Aceh Utara & Timur
2. Pembangunan Waduk Kreuto Aceh Utara
3. Pembangunan Waduk Rukoh & Tiro Pidie
4. Pembangunan Waduk Lawe Mamas I Aceh Tenggara
5. Pembangunan Waduk Lawe Atas Aceh Tenggara
6. Pembangunan Waduk Lawe Mamas II Aceh Tenggara
7. <i>Integrated Participatory Development and Management Lhok Guci Irrigation Aceh Jaya</i>
8. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Kr. Pase Aceh Utara
9. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Kanan Aceh Utara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
10. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Jamuan (extension) Aceh Utara
11. Pembangunan Bendung D.I. Peureulak Aceh Timur
12. Pembebasan Lahan D.I. Peureulak & D.I. Lhok Guci Aceh Timur dan Aceh Jaya
13. Pembangunan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Kr. Singkil Aceh Singkil - Kota Subulussalam
14. Pengendalian Banjir Sungai Lawe Bulan Aceh Singkil
15. Pengamanan Pantai Permukiman Kota Meulaboh Aceh Barat
16. Pengamanan Muara Krueng Peudada Bireun
17. Pembangunan Pengamanan Pantai krueng Raya kec. Masjid Raya Aceh Besar
18. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Aceh Utara Aceh Utara
19. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Aceh Singkil Aceh Singkil
20. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Nagan Raya Nagan Raya
21. RESTORASI SUNGAI Sungai Lawe Alas Dan Lawe Bulan A. Tenggara & Aceh Singkil
22. RESTORASI SUNGAI Sungai Kr. Baro. Kr. Tiro Dan Krueng Aceh Aceh Besar, Pidie Dan Pidie Jaya
PENDIDIKAN
1. Science Park Berbasis Kebencanaan di Kota Banda Aceh
2. Techno Park berbasis komoditas kopi (di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meria) dan kakao (Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya).
3. Techno Park berbasis lobster dan udang di kabupaten Simeulue
4. Penambahan 2 rumah budaya
KESEHATAN
1. Peningkatan kapasitas RS regional (6 RS)
2. Peningkatan fasilitas kesehatan dasar (puskesmas baru, rehabilitasi puskesmas, pusling)
3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan
4. Pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin

8.6.1.2. Provinsi Sumatera Utara

TABEL 8.14.
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan jalur KA ruas Prabumulih-Simpang-Tanjung Api-Api
2. Pembangunan jalur KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung
3. Pembangunan jalur KA dari spoor simpang menuju KEK Sei Mangke
4. Reaktivasi jalur KA antara Binjai - Besitang
5. Pembangunan jalur ganda KA antara Medan - Araskabu (termasuk elevated track dan elektrifikasi)
6. Pembangunan jalur KA menuju Gabion
7. Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat-Gunung Tua-Padang Sidempuan-Sibolga (tahap 1)
8. Pembangunan KA perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo
9. Pembangunan angkutan massal berbasis KA (monorel) dan berbasis BRT di kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo
10. Peningkatan jalur KA reguler menghubungkan Aceh -Sumut-Riau
11. Pembangunan KA dari KEK Seimangkei-Pelabuhan Kuala Tanjung-Pelabuhan Belawan
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Medan
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Kualanamu
2. Pengembangan Bandara Dr.Ferdinand Lumban Tobing (Kab.Tapanuli Tengah)
3. Pengembangan Bandara Binaka (Kota Gunung Sitoli)
4. Pengembangan Bandara Silangit (Kab.Tapanuli Utara)
5. Pengembangan Bandara Sibisa (Kab.Toba Samosir)
6. Pengembangan Bandara Silambo dan Lasondre (Kab.Nias Selatan)
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Terminal Peti Kemas Belawan Paket I dan Paket II (700 m)
2. Pengembangan Pelabuhan Hub International Kuala Tanjung (terminal curah cair, terminal peti kemas)
3. Pengembangan Pelabuhan Pulau Tello
4. Pengembangan Pelabuhan Parlindungan Ketek



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
5. Pengembangan Pelabuhan Sirombu
6. Pembangunan Pelabuhan Penumpang /kargo terminal kargo sibolga
7. Pembangunan/pengembangan pelabuhan penumpang/kargo terminal labuhan angin
8. Pembangunan/Pengembangan pelabuhan penumpang/kargo terminala teluk nibung
9. Pembangunan/Pengembangan pelabuhan penumpang/kargo terminal Bagan Asahan
10. Pembangunan/Pengembangan pelabuhan penumpang/kargo terminal Gunung Sitoli
11. Pembangunan/Pengembangan pelabuhan penumpang/kargo terminal Pulau Batu
JALAN
1. Pembangunan Jalan akses Bandara Kualanamu
2. Pembangunan Jalan KISM - Sp. Mayang - Lima Puluh - Sp. Inalum - Kuala Tanjung
3. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nias
4. Pembangunan Jalan Natal-Bts. Sumbar
5. Pembangunan Jalan Pematang Siantar - Tb.Tinggi
6. Pembangunan Jalan Tanjung Morawa - Saribudolok - Tongging
7. Pembangunan Jalan Simp. Sei Balai - Ujung Kubu
8. Pembangunan Jalan Sp. Mayang-Sei Mangkei-Simpang Pasar Baru - Boluk
9. Pembangunan Jalan Sp. Pal XI - Sp.Kotapinang
10. Pembangunan Jalan Tele - Pangururan
11. Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai
12. Pembangunan Jalan Tol Medan - Kuala Namu - Tebing Tinggi
13. Pembangunan Jalan Ujung Kubu - Kuala Tanjung
14. Pembangunan <i>Flyover</i> Seimangke, Pinang Baris, Katamso dan Gatot Subroto
15. Pembangunan Jalan akses Pelabuhan Kuala Tanjung
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Gn. Sitoli*
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Telo*
3. Pemb. Dermaga Penyeberangan Tanah Masa*
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tanah Bala*
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Pini*
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Karang Baru*
ENERGI
1. Pipa Arun-Belawan 200 km
2. Pipa Dumai-Medan 380 km
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTU Sumut-1 300 MW
2. PLTG/MG Mobile PP Sumut (Belawan) 250 MW



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
3. PLTGU/MGU Sumbagut-1 Peaker 250 MW
4. PLTGU/MGU Sumbagut-3 Peaker 250 MW
5. PLTGU/MGU Sumbagut-4 Peaker 250MW
6. PLTP Sarulla I (FTP2) 220 MW
7. PLTA Asahan III (FTP2) 174 MW
8. PLTP Sarulla I (FTP2) 110 MW
9. PLTG/MG Mobile PP Sumut (Sei Rotan) 100 MW
10. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
11. Pembangunan PLTMH
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Waduk Simanggo III Humbang Hasundutan
2. Pembangunan Waduk Lau Gunung 2 Karo
3. Pembangunan Waduk Lausimeme Kab. Deli Serdang
4. Pembangunan Bendung Sei Padang D.I. Bajayu, D.I. Paya Lombang dan D.I. Langau 7.558 Ha Serdang Bedagai
5. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Bajayu, 4000 Ha Serdang Bedagai
6. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Paya Lombang 1558 Ha Serdang Bedagai
7. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Langau 2000 Ha Serdang Bedagai
8. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Belutu 5.832 Ha Serdang Bedagai
9. Pembangunan Bendung D.I. Sei Wampu 10.000 Ha Langkat
10. Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan D.I. Sei Wampu 5864 Ha Langkat
11. Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri D.I. Sei Wampu 3832 Ha Langkat
12. Pembangunan Bendung Irigasi D.I Sei Batuginggung 3600 Ha Deli Serdang
13. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi DI Silau Asahan
14. Pembangunan DI Batang Angkola Tapanuli Selatan/Madina
15. Pembangunan Bendung Suplesi Sungai Batang Pane D.I Batang Ilung Tapanuli Selatan/Madina
16. Pembangunan Bendung, Jaringan Irigasi dan Drainase D.I Batang Batahan Madina
17. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Paya Sordang 4.350 Ha Kota P.Sidempuan dan Kab. Tap. Selatan
18. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batang Gadis 6,628 Ha Madina
19. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Asahan Asahan & Kota Tanjung Balai
20. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Silau Asahan
21. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Belawan Kab. Deli Serdang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
22. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Belutu
23. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Padang
24. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Babura Medan
25. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Kera Medan
26. Normalisasi Pertemuan Sungai Batang Angkola - Sungai Batang Gadis Kab. Tapsel / Madina
27. Normalisasi Sungai Tanjung Kab. Batubara Batubara
28. Rehabilitasi Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Deli Hilir (lanjutan) Medan
29. Pembangunan Pengamanan Pantai Wisata Danau Toba Kab. Toba Samosir
30. Pembangunan Embung Aek Mandosi Kab. Toba Samosir Kab. Toba Samosir
31. Pembangunan Embung Napa Sibual Buali di Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Selatan
32. Pembangunan Embung Binanga Bolon di Kab. Samosir Kab. Samosir
33. Pembangunan Embung Sinapi di Kab. Samosir Kab. Samosir
34. Pembangunan Embung di Kab. Mandailing Natal Kab. Mandailing Natal
35. Pembangunan Embung di Kab. Padang Lawas Utara Kab. Padang Lawas Utara
36. Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Metro Medan Medan
PENDIDIKAN
1. Peningkatan Pendidikan politeknik, SMK an sederajat, berbasis sumber daya alam lokal (minimal di 33 kab/kota)
2. Peningkatan kesejahteraan guru, beasiswa untuk guru
KESEHATAN
1. Peningkatan RS sebagai RS regional champion
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan

8.6.1.3. Provinsi Sumatera Barat

TABEL 8.15.
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan Jalur KA Padang Panjang - Bukit Tinggi- Payakumbuh
2. Pembangunan Jalur KA <i>Shortcut</i> Padang - Solok
3. Pembangunan jalur KA antara Duku – Bandara Internasional Minangkabau
4. Reaktivasi jalur KA antara Pariaman - Naras
5. Reaktivasi jalur KA antara Muaro Kalaban - Muaro
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Padang*
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Minangkabau
2. Pengembangan Bandara Rokot
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Cerocok Painan
2. Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur, Padang*
3. Pengembangan Pelabuhan Tiram
4. Pengembangan Pelabuhan Pasapat
JALAN
1. Pembangunan Jalan P. Sipora
2. Pembangunan Jalan Sicincin-Lb.Alung
3. Pembangunan Jalan Tapan-Bts Jambi
4. Pembangunan Jalan Tiku-Sasak-Air Bangis-Bts.Prov Sumut
5. Pembangunan Jalan Balinka-Matur-Ngarai Sihanouk (Jembatan & Terowongan)
6. Pembangunan Jalan Sieberut - Muara Sigep
7. Pembangunan Jalan Mara - Sioban - Taopejat
8. Pembangunan Jalan Padang - Mukomuku
9. Pembangunan Jalan Padang Panjang – Solok
10. Pembangunan Jalan Kiliranjao - Teluk Kuantan
11. Pembangunan Jalan Kiliranjao – Bangko
12. Pembangunan Jalan Padang Bypass
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tua Pejat
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sikakap
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Danau Ombilin*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pagai Selatan*
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Padang
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTP Muara Laboh (FTP2) 70 MW
2. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pengendalian Banjir Batang Sianok Kab. Agam
2. Pembangunan DI. Batang Sinamar
3. Pembangunan DI. Sawah Laweh Tarusan (3273 Ha)
4. Pemb. DI Kawasan Batang Bayang
5. Pemb. DI Kawasan Bandar Ubo Solok (3.2000 ha)
6. Pemb.D.I. Kawasan Lubuk Buaya (3362 Ha)
7. Peningkatan DI. Koto Salapan (Areal Air Tambang-Sungai Tunu)
8. Anai <i>River Channel Improvement From River Mouth to Section 50 M Up Stream Bypass Bridge</i> di Kab. Padang Pariaman (0,15 Km)
9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pengendali Banjir Batang Kuranji
10. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tapakis
11. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Lumpo Pesisir Selatan
12. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tandikek
13. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Lurus Kota Padang
14. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Pasaman
15. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Kampar
16. Pembangunan Prasarana Pengendali Sedimen Batang Sanipan
17. Pembangunan Bangunan Terjun dan Perkuatan Tebing Bt. Air Dingin
18. Pembangunan Check Dam dan Perkuatan Tebing Bt. Kuranji-Limau Manis Kota Padang
19. Pembangunan Bangunan Terjun dan Perkuatan Tebing Bt. Timbalun Bungus Kota Padang
20. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Padang Pariaman
21. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Sasak Pasaman Barat
22. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai luhung-bayang-Api-api-Ketaping-Sago Pesisir Selatan
23. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Sumedang Pesisir Selatan
24. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Air Haji Pesisir Selatan
25. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Amping Parak Pesisir Selatan
26. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Bungus Padang
27. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengamanan Pantai Padang di Kota Padang
28. Danau Singkarak Kab. Solok
29. Danau Dibawah Kab. Solok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
30. Pembangunan Bendung DI. Lubuk Malako Kabupaten Solok selatan (MYC) Kab. Solok Selatan
31. Pembangunan Jaringan Tersier DI. Lubuk Malako di Kab. Solok Selatan Kab. Solok Selatan
32. Pembebasan Tanah DI. Lubuk Malako Kabupaten Solok Selatan Kab. Solok Selatan
PENDIDIKAN
1. Pembangunan SMK Kelautan
2. Pembangunan SMA
KESEHATAN
1. Peningkatan kapasitas BP4 menjadi RS rujukan regional khusus untuk paru
PERUMAHAN
1. Proses pembebasan lahan untuk asrama haji embarkasi di Padang Pariaman sudah selesai dilaksanakan
2. Bantuan lanjutan pembangunan Masjid Raya (Islamic Center) Padang

8.6.1.4. Provinsi Kepulauan Riau

TABEL 8.16.
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan Jalur KA Batu Ampar - Bandara Hang Nadim*
2. Pembangunan Jalur KA Tanjung Uncang - Batam Center*
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Batam*
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Dompok
2. Pengembangan Pelabuhan Pulau Laut
3. Pengembangan Pelabuhan Pulau Subi
4. Pengembangan Pelabuhan Letung
5. Pengembangan Pelabuhan Kabil (Tanjung Sauh)*
6. Pengembangan Pelabuhan Malarko
7. Pengembangan Pelabuhan kontainer Batu Ampar Batam
8. Pembangunan Pelabuhan Subang Mas
9. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Moco
10. Pembangunan Pelabuhan Punggur Kabil



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
11. Pembangunan Pelabuhan Belakang Padang
12. Pengembangan Pelabuhan Midai
13. Pengembangan Pelabuhan Pulau Laut
14. Pengembangan Pelabuhan Serasan
15. Pengembangan Pelabuhan Dabo Singkep
16. Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Sekupang
17. Pengembangan dan pembangunan Balai Diklat Perhubungan Di Jalur Trans Bareleng
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pembangunan Bandara Letung Anambas
2. Pembangunan Bandara Tambelan
3. Pemotongan Bukit Bandara Raja Haji Fisabillah
4. Pengembangan bandara Dabo
JALAN
1. Pembangunan Jalan Sei Buluh-Jagoh-Kote-Dabo
2. Pembangunan Jalan Sei Tenan-Sp. Limbung-Tj.Buton
3. Pembangunan Jalan Simpang Jam - Batu Ampar
4. Pembangunan Jalan Tj Uban-Mengkulu Bantan bayu-Sp.Gesek
5. Pembangunan Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Hang Nadim
6. Pembangunan Flyover Sp. Kabil dan Sp. Jam
7. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjung Pinang - Kab. Bintan
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tj. Pinang
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tambelan*
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Selat Lampah
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Lingga
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Matak (Kep. Anambas) Lintas Tanjung Uban - Matak *
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Penarik (P. Lingga) Lintas Dabo - Penarik*
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Penagi (P. Bunguran) Lintas Natuna - Sintete (Kalbar) *
8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sebangka*
9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Letung*
10. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tarempa*
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTG/MG TB. Karimun Peaker 40 MW
2. PLTMG Tanjung Pinang-2 30 MW
3. PLTMG Natuna-2 25 MW
4. PLTMG Bengkalis 18 MW
5. PLTMG Tanjung Batu-1 15 MW
6. PLTMG Dabo Singkep-1 15 MW
7. PLTMG Selat Panjang 15 MW
8. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
9. Penambahan Kapasitas Interkoneksi Batam - Bintan 150 KVA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
10. PLTS Komunal 1 MW
11. PLTU TB. Karimun Peak 20 MW
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Tampung Air Baku DAS Kawal Kab. Bintan
2. Pembangunan Estuari Dam Sei Gong Kota Batam
3. Pembangunan Estuari Dam Rempang Utara Kota Batam
4. Pembangunan Estuari Dam Dompok Kota Tanjungpinang
5. Pembangunan Estuari Dam Busung Kab. Bintan
6. Pembangunan Estuari Dam Teluk Nongsa Kota Batam
7. Pembangunan Estuari Dam Pulau Kepala Jeri Kota Batam
SANITASI
1. Pengelolaan Sampah Kota Batam
PENDIDIKAN
1. Pembangunan Techno Park berbasis industri (Kota Batam)
2. Pembangunan Techno Park berbasis kelautan dan pariwisata (Kab. Lingga)
2. USB SMP di daerah perbatasan (Kab. Lingga)
3. USB SMK di daerah perbatasan (Kab. Lingga)
KESEHATAN
1. Peningkatan fasilitas kesehatan dasar
2. Pengembangan Rumah Sakit Khusus Jiwa di Kota Batam

8.6.1.5. Provinsi Riau

TABEL 8.17.
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI RIAU

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan Jalur KA Duri -Pekanbaru (tahap I)
2. Pembangunan Jalur KA Rantauprapat- Duri - Dumai
3. Pembangunan Jalur KA Pekanbaru-Muara-Lembu-Teluk Kuantan-Muaro
4. Pembangunan Jalur KA Taluk Kuantan - Rengat- Kuala Enok
5. Pembangunan Jalur KA Pekanbaru - Buatan- Tanjung Buton
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Pekanbaru*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II
2. Pengembangan Bandara Japura
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Dumai*
2. Pengembangan Pelabuhan Pekanbaru
3. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Buton
4. Pembangunan Pelabuhan Kuala Enok
5. Pembangunan Pelabuhan Batu Panjang
6. Pembangunan Pelabuhan Meranti
JALAN
1. Pembangunan Jalan Sikijangmati-Prawang-Sp.Bt.Km 11-Siak Sri Indrapura-Mangkapan
2. Pembangunan Jalan Sorek - Sp.Japura - Rengat - Rumbai Jaya - K.Enok
3. Pembangunan Jalan Sp. Batang - Lubuk Gaung
4. Pembangunan Jalan Sp. Kulim - Pelabuhan Dumai
5. Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai
6. Pembangunan Jalan Pekanbaru By-Pass
7. Pembangunan Jalan Kiliranjao - Teluk Kuantan
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ketam Putih Kab. Bengkalis*
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Dangkal Kab. Kep. Meranti
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Meranti Bunting Kab. Kep. Meranti*
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Desa Sepiring Kec. Batang Tuaka
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Desa Pecah Buyung, Kec. Rangsang Barat Pecah Buyung
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Desa Seberang Kec. Keritang
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kuala Enok Kec. Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir *
8. Pembangunan Dermaga di Muko Muko Danau Maninjau Kab. Agam
9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan di Paninggahan Danau Singkarak Kab. Solok
10. Pengembangan Angkutan Penyeberangan Dumai - Tanjung Bruas
11. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Dakal*
12. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pulau Padang*
ENERGI
1. Pipa Duri-Dumai 50 Km
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTU Riau Kemitraan 600 MW
2. PLTU Riau kemitraan (PLN-TNB-PTBA) 600 MW



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
3. PLTGU/MG Riau Peaker 200 MW
4. PLTGU Riau 160 MW
5. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
6. PLT Biomassa (limbah)
7. PLTU Tembilahan 14 MW
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Chek Dam Alur Sungai Silam Dusun Pulau Empat dan Dusun Sungai Lintang Kec. Bangkinang Barat Kab. Kampar
2. Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Desa Tanjung di Kec. Hulu Kuantan, Desa Seberang Pantai di Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi
3. Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Desa Sawah di Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi Kab. Kuantan Singingi
4. Pembangunan Penahan Tebing Kuantan Pasar Usang Baserah di Kec. Kuantan Hilir, Pasar Cerenti Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi Kab. Kuantan Singingi
5. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Pisang Berebus Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
6. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Bandar Alai, dan Di Desa Kepala Pulau Baserah Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
7. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Sikaping Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
8. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Kresek Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
9. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Sawah Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
10. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kampar Kiri Di Pangkalan Indarung Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
11. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Koto Taluk Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
12. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
13. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Tanjung Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
14. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Kuansing Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
15. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Seberang Pantai Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
16. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Pasar Cerenti Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
17. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Pulau Aro Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional	
18.	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Kinali Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
19.	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Pebuan Hulu Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
20.	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Banjar Padang Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
21.	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Di Desa Banjar Guntung Kabupaten Kuansing Kab. Kuantan Singingi
22.	Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor VI Kota Pekanbaru
23.	Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor IV Kota Pekanbaru
24.	Pembangunan Pompa Banjir S. Senapelan II Sektor II Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
25.	Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor III Kota Pekanbaru
26.	Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak di Sektor V Kota Pekanbaru
27.	Pembangunan Pompa Banjir S. Pengambang Sektor V Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
28.	Pembangunan Pompa Banjir Sungai Belanda Sektor IV Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
29.	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Siak di Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
30.	Pembangunan Turap Pengendali Banjir Jl. Yos Sudarso Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
31.	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Sungai Gantung Hilir Kab. Indragiri Hulu
32.	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Kelurahan Kampung Besar Kab. Indragiri Hulu
33.	Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Indragiri di Kota Rengat Kab. Indragiri Hulu
34.	Normalisasi Alur Sungai-sungai di Kabupaten Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hulu
35.	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Enok di Kabupaten Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hilir
36.	Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Indragiri di Teluk Kiambang Kab. Indragiri Hilir
37.	Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Rangsang Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis
38.	Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Kab. Kepulauan Meranti
39.	Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Jemur Kabupaten Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir
40.	Pembangunan Pengaman Pantai di Tanjung Kedabu 7.000 m' Kabupaten Kepulauan Meranti Kab. Kepulauan Meranti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional	
41.	Pembangunan Pengaman Pantai di Sepahat Tengayun 7.000 m' Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis
42.	Pembangunan Pengaman Pantai Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir
43.	Pembangunan Intake, dan Jaringan Pipa Transmisi PAB Pekanbaru Selatan Pekanbaru
44.	Pembangunan Kolam Tandon, intake dan jaringan pipa transmisi di Duri Kec. Duri Bengkalis
45.	Pembangunan Air Baku Dumai Kota Dumai (Sei Hulu Hala) Kota Dumai Kota Dumai
46.	Pembangunan Intake, dan Jaringan Pipa Transmisi di Kerinci Kab. Pelalawan Kab. Pelalawan
47.	Pembangunan Intake dan Jar. Pipa Transmisi Air Baku di Kota Bagan Siapai Api Rokan Hilir
48.	Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (Sungai Kampar) Kota Pekanbaru - Kab. Kampar Pekanbaru-Kampar
49.	Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (Sungai Rokan) Kab. Rokan Hilir Rokan Hilir
50.	Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (Sungai Rokan) IKK Duri Bengkalis
51.	Pembangunan Intake, Pengadaan dan Jaringan Pipa Transmisi dia. 20" (Sungai Rokan) Kota Dumai Dumai
52.	Pembangunan Intake, dan Jaringan Pipa Transmisi PAB Pekanbaru Selatan Pekanbaru-Kampar
AIR MINUM	
1.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru
KESEHATAN	
1.	Peningkatan kompetensi petugas (Dokter, Bidan, Perawat)
2.	Sarana dan prasarana di puskesmas
3.	Pengembangan sikda
4.	Perbaikan dan penambahan sarpras puskesmas di perbatasan.
5.	Bantuan distribusi alokon ke Kab/Kota
6.	Peralatan persalinan di polindes (termasuk KB KIT)
7.	Pembangunan RS rujukan regional
8.	Pemberdayaan ekonomi perempuan di beberapa desa (terdapat 128.000 perempuan sebagai kepala keluarga)

8.6.1.6. Provinsi Sumatera Selatan

TABEL 8.18.
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan jalur ganda KA antara Martapura - Baturaja
2. Pembangunan jalur ganda KA antara Tanjung Enim – Prabumulih
3. Pembangunan jalur ganda KA antara Prabumulih - Simpang
4. Pembangunan jalur ganda KA antara Cempaka - Tulungbuyut - Negeriagung
5. Pembangunan jalur ganda KA antara Muaraenim – Lahat
6. Pembangunan jalur KA antara Simpang-Tanjung Api-Api (swasta)
7. Pembangunan jalur KA antara Tanjung Enim-Kota Padang (Sumsel, Bengkulu) tahap 1 (swasta)
8. Pembangunan jalur kereta api stadion Jakabaring menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II oleh Pemprov Sumsel (pemda)
9. Pembangunan Jalur Kereta Api Tanjung Enim – Tanjung Api-api
10. Pembangunan Jalur Kereta Api Jambi-Kertapati/Palembang
11. Pembangunan Monorel Sumatera Selatan
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Palembang*
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Terminal di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II
2. Pengembangan Bandara Silampari Lubuk Linggau
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan di Palembang (South Sumatra Coal Terminal)
2. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api
3. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat
JALAN
1. Pembangunan Jalan Palembang-Tj Api-Api
2. Pembangunan Jalan Tanjung Enim – Muara Enim
3. Pembangunan Jalan Tol Palembang - Indralaya
4. Pembangunan Jalan Pasanglaya
5. Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung –Palembang-Betung
6. Pembangunan Jembatan Musi III dan Jalan Akses
ASDP
1. Pembangunan Dermaga Kapal Cepat Pel. Tanjung Api Api
2. Pembangunan Dermaga Sungai di Karang Baru Kab. Banyuasin*
3. Pembangunan Dermaga Bus Air 16 Ilir di Kota Palembang
KETENAGALISTRIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
1. PLTU Sumsel-8 2x600 MW
2. PLTU Sumsel - 7 300 MW
3. PLTU Sumsel - 6 300 MW
4. PLTU Sumbagsel-1 150 MW
5. PLTU Sumbagsel-1 150 MW
6. PLTP Rantau Dadap (FTP2) 110 MW
7. PLTU Mulut Tambang -8
8. PLTU Mulut Tambang Sumsel -9 2x600 MW
9. PLTU Mulut Tambang Sumsel -10 1x600 MW
10. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan DI. Merapi (3.000 ha) di Kabupaten Lahat Lahat
2. Pembangunan DI. Selangis/Jemair Kota Pagar Alam Lahat
3. Pembangunan DI. Dangku Kiri/Kanan 10.000 ha Muara Enim
4. Pembangunan DI. Lematang 3.000 ha Kota Pagar Alam Pagar Alam- Sal. induk, sal sek. & Bang. Pelengkap BL. 27 - BL. 32 (1.361 Ha) Musirawas
5. Pembangunan Jaringan Tersier D.I. Air Lakitan (3.592 Ha) pada Sal. Sadap BL.1 - BL. 11 Musirawas
6. Pembangunan Jaringan Tersier dan Cetak Sawah (PLB) D.I. Air Lakitan (3.592 Ha) pada Sal. Sadap BL.0 - BL. 11 dan Sadap BL. 22 - BL.35 Musirawas
7. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Lintang Kiri (3.037 Ha) di Kab. Lahat & Empat Lawang Lahat & Empat Lawang
8. Rehabilitasi Jar. irigasi DI. Kelingi Tugumulyo Musirawas
9. Rehabilitasi Sal. Sek. Macak I OKU Timur
10. Pembangunan DR. Non Pasut Lebak Pauh OKI
11. Rehab. Jar. DR. Pasut Karang Agung Hilir Musi Banyuasin
12. Rehab. Jar. DR. Pasut Karang Agung II/Tengah Muba/Banyuasin
13. Rehab. Jar. DR. Pasut Delta Saleh P. 6, P. 8 & P. 10 (11.808 Ha) Banyuasin
14. Rehab. Jar. DR. Pasut Delta Telang I Banyuasin
15. Rehab. Jar. DR. Pasut Karang Agung Hulu OKI
16. Rehab. Jar. DR. Rawa Pasut Sugihan Kiri P16 - PP17; P18 - P19; P19 - P20; P13; P14 - P15 Banyuasin
17. Rehab. Jar. DR. Rawa Pasut Sugihan Kanan OKI
18. Peningkatan Jar. DR. Rawa Pasut Sungai Lumpur OKI
19. Rehab. Jar. DR. Rawa Pasut Upang Banyuasin
20. LARAP dan Pembebasan Tanah Lahat
21. LARAP dan Pembebasan Tanah Pembangunan DI. Dangku Kiri/Kanan 10.000 ha Muara Enim
22. Pembebasan Tanah Saluran Sekunder Senaro DI, Air Lakitan DI Kab. Musirawas Musirawas
23. Pembangunan Sarana/prasarana pengendali banjir kota pangkalpinang
24. Pembangunan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung di Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
Palembang (lanjutan) Palembang
25. Pengendalian Banjir Sungai Lempuing 100 km (lanjutan) Kayuagung
26. Pembangunan Perkuatan Tebing Seberang Ulu Sepanjang 500 m (Kamp. Kapiten - Jemb. Musi II) OKI
27. Pembangunan Perkuatan Tebing Seberang Ilir Sepanjang 300 m (RM River Side - Jemb. Musi II) OKI
28. Normalisasi Sungai Lempuing 100 km di Kabupaten OKI (lanjutan) Kayuagung
29. Normalisasi Sungai Komering 100 km di Kabupaten OKI (lanjutan) Kayuagung
30. Normalisasi Sungai Banyuasin Boom Berlian (Tahap I) Kabupaten Banyuasin Banyuasin
31. Normalisasi Sungai Banyuasin Boom Berlian (Tahap II) Kabupaten Banyuasin Banyuasin
32. Normalisasi Sungai Banyuasin Boom Berlian (Tahap III) Kabupaten Banyuasin Banyuasin
33. Normalisasi Sungai Banyuasin Boom Berlian (Tahap IV) Kabupaten Banyuasin Banyuasin
34. Normalisasi Sungai Kelekar (50 Km) Kota Prabumulih (Lanjutan) Prabumulih
35. Pembangunan Talud Pengaman Pantai Mudong
36. Pembangunan Talud Pengaman Pantai Penyak
37. Pembebasan Tanah Seluas 7,5 Ha Untuk Perkuatan Tebing S. Musi Kota Palembang OKI
38. Pembangunan Waduk/Dam Air Saka Kab. OKUS OKUS
39. Pembangunan Dam Komering II di Kab. OKU Selatan OKUS
40. LARAP dan Pembebasan Tanah Pemb. Dam Padang Bindu Kab. Muara Enim Muara Enim
41. LARAP dan Pembebasan Tanah Pemb. Dam Tanjung Pura Kab. OKU OKU
42. LARAP dan Pembebasan Tanah Pemb. Dam Buluh Kab. Lahat Lahat
PENDIDIKAN
1. Pembangunan SMK Tambang
2. Pembangunan SMK Lingkungan
KESEHATAN
1. Peralatan sistem informasi kesehatan di Puskesmas
2. Pembangunan rumah sakit rujukan regional
3. Pembangunan RS Pratama
PERUMAHAN
1. IPAL Kawasan di Muara Enim, Pagar Alam, Prabumulih, dan Lubuk Linggau
2. Penanganan kawasan kumuh perkotaan di Palembang dan Pagar Alam

8.6.1.7. Provinsi Jambi

TABEL 8.19.
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI JAMBI

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional	
PERKERETAAPIAN	
1.	Pembangunan Jalur Kereta Api Jambi-Kertapati/Palembang
2.	Pembangunan Jalur KA Pekanbaru-Muara-Lembu-Teluk Kuantan-Muaro
3.	Pembangunan Jalur KA Taluk Kuantan - Rengat- Kuala Enok
PERHUBUNGAN DARAT	
1.	Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Jambi*
PERHUBUNGAN UDARA	
1.	Pengembangan Bandara damn Panjang Runway Depati Parbo Kabupaten Krinci
2.	Pengembangan Bandara Sultan Thaha
3.	Pengembangan Bandara Muaro Bungo
PERHUBUNGAN LAUT	
1.	Pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung
2.	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Tanah Pilih Kota Jambi
3.	Pengembangan Pelabuhan Kuala Tungkal
4.	Pengembangan Pelabuhan Mendahara
JALAN	
1.	Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tungkal
2.	Pembangunan Jalan Bangko-Sp P Bengas-Sungai Penuh
3.	Pembangunan Jalan lingkari Jambi - Talang Duku
4.	Pembangunan Jalan Sp. Niam - Merlung
5.	Pembangunan Jalan Talang Duku - Muara Sabak
ASDP	
1.	Pengembangan Dermaga Penyeberangan Penumpang Tanah Tumbuh
2.	Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kuala Tungkal*
3.	Pemb. Halte Sungai lokasi Kuala Indah
4.	Pemb. Halte Sungai lokasi Teluk Nilau Parit
5.	Pemb. Halte Sungai lokasi Sungai Rambe
6.	Pemb. Dermaga Bus Air lokasi Kota Jambi
7.	Pemb. Halte Sungai lokasi Pasir Panjang
8.	Pemb. Halte Sungai lokasi Tanjung Raden
9.	Pemb. Halte Sungai lokasi Olak Kemang
10.	Pemb. Halte Sungai lokasi Kampung Tengah
11.	Pemb. Halte Sungai lokasi Arab Melayu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
12. Pemb. Halte Sungai lokasi Tatuk Yaman
13. Pemb. Halte Sungai lokasi Tanjung Johor
14. Pemb. Halte Sungai lokasi Candi Ma. Jambi
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTU Jambi 600 MW
2. PLTU Jambi 600 MW
3. PLTG/MG Mobile PP Sumbagteng (Tanjung Jabung Timur) 100 MW
4. PLTGU/MG Jambi Peaker 100 MW
5. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
6. PLTU Tebo 2x200 MW
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kota Jambi (<i>Jambi Flood Control</i>) - (Multi Years Contract/MYC) Kota Jambi
2. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir di Kab. Batanghari Kab. Batanghari
3. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Siulak Deras
4. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Batang Asai
5. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Limun Singkut
6. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Batang Sangkir
7. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Bendung Renah Pemetik
8. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Siulak Deras
9. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Batang Asai
10. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kota Jambi
11. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir di Kab. Batang Hari
12. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Bendung Renah Pemetik
13. Pembangunan PLTA Merangin-5 23,9 MW
PENDIDIKAN
1. Pembangunan baru sekolah menengah kejuruan (SMK, Politeknik) dan penyediaan pengajarnya
2. Pembangunan science park (prov) dan techno park di kab/kota
KESEHATAN
1. Peningkatan Kelas RS Provinsi dari kelas B menjadi kelas A (RS Raden Mataher, RS Hanafi Kab. Bungo sebagai rujukan regional).
2. Peningkatan tenaga penyuluh KB dan kelembagaan untuk KB kembali menjadi kewenangan pusat.

8.6.1.8. Provinsi Bengkulu

TABEL 8.20.
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI BENGKULU

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pengembangan KA Bengkulu-Lubuk Linggau
2. Pembangunan KA Pulau Baai – Muara Enim
PERHUBUNGAN UDARA
3. Pengembangan Bandara Fatmawati Soekarno
4. Pembangunan Bandara Enggano
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu
2. Pengembangan Pelabuhan Linau/Bintuhan
JALAN
1. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bengkulu
2. Pembangunan Jalan Bengkulu-Kepahyang-Curup-Lubuk Linggau
3. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Enggano
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Air Putih
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bado
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kahyapu*
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTU Bengkulu 200 MW
2. PLTP Hululais (FTP2) 55 MW
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Air Cawang Kidau Kaur
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Seluma Kab. Seluma Seluma
3. Perkuatan Tanggul Sungai Air Bengkulu
4. Pembangunan Jetty Air Bengkulu
5. Pembangunan Pengendalian Banjir Air Jenggalu Seluma
6. Pembangunan Pengendali Banjir Mukomuko
7. Pembangunan Check Dam Lahar Gunung Berapi Desa Air Bungai Pasir Lebar Lebong



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
8. Pengawasan Teknis Pembangunan Check Dam Lahar Gunung Berapi Desa Air Bungai Pasir Lebar Lebong
9. Pembangunan Check Dam Air Ketahun Desa Karang Dapo Bengkulu Utara
10. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Maras Seluma
11. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Merpas Bengkulu Utara
12. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Punggur-Air Dikit Mukomuko
13. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Urai-Serangai Bengkulu Utara
14. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Desa Ipuh Mukomuko
15. Pembangunan Sarana Penyediaan Air Baku Regional Kota Karang Tinggi Seluma Kab. Bengkulu Tengah (MYC) Bengkulu Tengah
PENDIDIKAN
1. Pengembangan SMK berbasis potensi daerah
2. Kesiapsiagaan pendidikan dalam kebencanaan
3. Distribusi guru
4. Evaluasi kurikulum
5. Science park
6. Renovasi taman budaya untuk pengembangan sarpras
7. Renovasi museum

8.6.1.9. Provinsi Lampung

TABEL 8.21.
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI LAMPUNG

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan Jalur KA Rejosari - Tarahan
2. Pembangunan/reaktivasi jalur KA menuju Pelabuhan Panjang Lampung
PERHUBUNGAN DARAT
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bandar Lampung*
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Radin Inten II
2. Pengembangan Bandara Pakon Serai
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Panjang*
2. Pembangunan Pelabuhan Sebalang
3. Pembangunan Pelabuhan Pulau Sebesi
4. Pembangunan Pelabuhan Batu Balai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
5. Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Mesuji sebagai pintu masuk kawasan industrial yang terkoneksi tol laut
JALAN
1. Pembangunan Jalan Camp HTI – Sidoarjo
2. Pembangunan Jalan Mesir Ilir - Pakuan Ratu
3. Pembangunan Jalan Mesir ilir - Sri Rejeki
4. Pembangunan Jalan Mesuji - Blambangan Umpu
5. Pembangunan Jalan Sp.Way Tuba - Mesir Ilir
6. Pembangunan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar
7. Pembangunan Jalan Lingkar Bandarjaya
8. Pembangunan Flyover Sp. Pelabuhan Panjang
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kp. Balak
2. DED Pembangunan Dermaga KTM Rawapitu Tulang Bawang
3. Pengadaan Alat Komunikasi
4. Pengadaan Genset 10.000 KVA
5. Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bakauheni 7
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bakauheni 4
ENERGI
1. FSRU Lampung (PGN) 100 mmscd;
2. Pembangunan Jaringan Gas Kota
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTGU/MG Lampung Peaker 200 MW
2. PLTG/MG Mobile PP Sumbagsel (Lampung) 100 MW
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Waduk Segalamider, Lampung Tengah dan Waduk Sukaraja III
2. Persiapan Pembangunan Waduk Way Sekampung, Pringsewu
3. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Way Besai (lanjutan), D.I. Jabung, D.I. Way Bumi Agung, D.I. Way Ngambur, D.I. dan D.I. Kandis
4. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Adi Mulyo dan D.R. Sragi
5. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Way Tatayan dan Way Krep di Lampung Tengah
6. Pembangunan PLTA Semangka (FTP2) 56 MW (2018)
AIR MINUM
1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung
PENDIDIKAN
1. Sosialisasi penerapan Kartu Indonesia Pintar
2. Validasi sasaran penerima program Bantuan Operasional Siswa [BOS].
3. Pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan.
4. Perbaiki kurikulum dan peningkatan sarpras SMK yang responsive



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
terhadap pasar kerja terkait SDM dan pengembangan pariwisata
5. Pembangunan Sekolah Unggulan (Sekolah Keberbakatan Olahraga/SKO dll).
6. Lanjutan pembangunan Institut Teknologi Sumatera yang terintegrasi dengan Techno Park yang fokus pada pengembangan bio fuel
7. Kebudayaan: Kondisi sarpras tama budaya memerlukan perbaikan sarpra sfisik
KESEHATAN
1. Pembangunan RS Regional khusus penanganan narkoba untuk wilayah Sumatera
2. Pengembangan model untuk peningkatan tenaga keperawatan berstandar internasional di 2 institusi pendidikan keperawatan dan 2 SMK jurusan keperawatan
3. Pengembangan RS Komunitas di daerah terpencil/kepulauan/DOB (Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Tulangbawang Barat, dan Mesuji)

8.6.1.10. Provinsi Bangka Belitung

TABEL 8.22.
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah ini diprioritaskan untuk pengembangan wilayah.

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara H.A.S Hananjoeddin
2. Pengembangan Bandara Depati Amir
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Samudera Tj. Berikat - Bangka Tengah
2. Pengembangan Pelabuhan Muntok - Pelabuhan Tj. Berikat (P. Bangka Ruas Tj. Batu - Manggar (P. Belitung)
3. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Pandan* (menjadi entry point masuknya yacht)
4. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu
5. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Gudang
6. Pengembangan Pelabuhan Pangkal Sadai
7. Pengembangan Pelabuhan Balam
8. Pengembangan Pelabuhan Manggar
9. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular
10. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian
JALAN
1. Pembangunan Jalan Tanjung Gudang-Paritiga-Jebus-Ibul



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
2. Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu
3. Pembangunan Jalan Tanjung Kelian - Petaling - Pangkalpinang
4. Pembangunan Jalan Petaling - Namang - Toboali
5. Pembangunan Jalan Koba - Lubuk Besar - Tanjung Berikat
6. Pembangunan Jalan Mendukung KSPN Belitung
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Lepar
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Mendanau
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tjg. Ru
4. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar
5. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Liat
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTG/MG Bangka Peaker 100 MW
2. PLTG/MG Mobile PP Bangka (Air Anyir) 50 MW
3. PLTG/MG Belitung Peaker 30 MW
4. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
5. Pembangunan PLTS di Pulau-Pulau Kecil
6. Pembangunan Instalasi Listrik di Pulau Karantina (P. Naduk- Belitung)
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Bendung Pice Besar D.I. Selingsing di Kab. Belitung Timur Belitung Timur
2. Rehab Jaringan D.I Selingsing PKT I Belitung Timur
PENDIDIKAN
1. Pembentukan Fak. Kedokteran Univ. Bangka Belitung
2. Pembentukan Prodi Ilmu Kelautan Univ. Bangka Belitung
3. Peningkatan status STAIN Abdurrahman Sidiq menjadi IAIN Abdurrahman Sidiq Prov. Kep. Bangka Belitung
4. Pengembangan Institusi Riset yang fokus pada Pengelolaan Logam Tanah Jarang
5. Pengembangan Technopark berbasis Lada di Air Gegas (bangka Selatan)
6. Pengembangan Technopark berbasis Bahan Tambang di Muntok (Bangka Barat)
7. Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata
KESEHATAN
1. Pengembangan RSUP Soekarno
2. Pengadaan sarana prasarana RSUD H. Mursidi Joedono, Pengadaan sarpras RSUD Depati Hamzah

8.6.2. Kerangka Regulasi

Pelaksanaan pembangunan Wilayah Sumatera tidak terlepas dari berbagai kerangka regulasi yang perlu diperhatikan, diantaranya:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1. Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Perpajakan Kepabeanan, dan Cukai di Kawasan Ekonomi Khusus serta aturan turunannya;
2. Penyelesaian Peraturan tentang Ketenagakerjaan di Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Penyelesaian Peraturan tentang Pelimpahan Kewenangan perdagangan, keimigrasian, perindustrian, pertanahan, tenaga kerja dari kementerian/lembaga terkait kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;
4. Penyelesaian status lahan, terutama terkait dengan pemanfaatan lahan yang masih berstatus holding zone di kawasan-kawasan strategis;
5. Menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari hulu-hilir untuk memangkas ongkos produksi hingga 10 persen;
6. Menata ulang kebijakan penetapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DPT);
7. Pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di daerah tertinggal;
8. Tunjangan khusus bagi pegawai pelayanan publik dasar di daerah-daerah terisolir, pedalaman, dan pulau-pulau kecil seperti: bidan, dokter, guru, penyuluh pertanian;
9. Regulasi pengelolaan lintas batas;
10. Regulasi Perdagangan lintas batas Perjanjian kerjasama antara RI-Malaysia, RI-Singapura, maupun RI-Vietnam dalam pengembangan kawasan perbatasan negara;
11. Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan *Dryport*;
12. Regulasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas (asimetrik) kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan sumber daya air, pengelolaan jalan non status, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
13. Penetapan Perpres RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara; dan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)-nya; Perpres RTR KSN Kawasan Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya-Kayuagung (Patungraya Agung) dan penyelesaian Peninjauan Kembali Perpres No. 13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera, Perpres No. 87/2011 tentang RTR KSN

Batam Bintang Karimun, dan Perpres No. 62/2011 tentang RTR KSN Perkotaan Mebidangro.

14. Penyelesaian peninjauan kembali Perpres No. 13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera, Perpres No. 87/2011 tentang RTR KSN Batam Bintang Karimun, dan Perpres No. 62/2011 tentang RTR KSN Perkotaan Mebidangro.
15. Regulasi yang mendukung implementasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan.

8.6.3. Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan pembangunan Wilayah Sumatera tidak terlepas dari berbagai kerangka kelembagaan yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas hubungan industrial antara tenaga kerja, serikat pekerja, dan perusahaan;
2. Penyusunan Strategi Daerah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antar-SKPD dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah;
5. Menyusun rencana induk dan rencana aksi pengembangan ekonomi berbasis pada agroindustri perkebunan, pangan-hortikultura, dan perikanan laut secara terpadu;
6. Kemudahan masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan lindung untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta untuk kemudahan pembangunan infrastruktur yang melalui hutan lindung;
7. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan;
8. Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan;
9. Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara;
10. Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik;

11. Pengembangan koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dan Provinsi di Wilayah Sumatera dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau;
12. Peningkatan koordinasi antara Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi di Wilayah Sumatera dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



Ratih Nurdiati



**Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta10310
Telp: (021)31936207 Fax: (021)3145374
www.bappenas.go.id**